

**EKONOMI KAUM MUDA
DAN KEBIJAKAN
KONTRATERORISME**

EKONOMI KAUM MUDA DAN KEBIJAKAN KONTRATERORISME

Penulis:

Badrus Sholeh, M.A., Ph.D.

Irfan R. Hutagalung, S.H., LL.M.

Dr. Muhammad Guntur Alting, M.Pd., M.Si.

Nostalgawan Wahyudhi, S.IP., M.A.

Saifudin Asrori, M.Si.

Sholehuddin, M.Pd.



PUSTAKA PELAJAR

EKONOMI KAUM MUDA DAN KEBIJAKAN KONTRATERORISME

Penulis

Badrus Sholeh, M.A., Ph.D.
Irfan R. Hutagalung, S.H., LL.M.
Dr. Muhammad Guntur Alting, M.Pd., M.Si.
Nostalgawan Wahyudhi, S.IP., M.A.
Saifudin Asrori, M.Si.
Sholehuddin, M.Pd.

Editor

Badrus Sholeh, M.A., Ph.D., Ingrid Galuh Mustikawati, MHSPS, dan
Ahmad Syaifuddin Zuhri, S.IP., L.M.

Desain Sampul

Wisnu

Pemeriksa Aksara

Ratih Indriani

Penata Aksara

Adnanta Ivan A.

Cetakan I, Februari 2018

Penerbit :

PUSTAKA PELAJAR
Celeban Timur UH III/548 Yogyakarta 55167
Telp. (0274) 381542, Fax (0274) 383083
Email : pustakapelajar@yahoo.com

ISBN : 978-602-229-876-2

Pengantar Editor

Keterlibatan kaum muda dalam ekonomi menjadi krusial bagi Indonesia. Ekonomi bagi mereka tidak hanya memberi kepercayaan diri yang kuat tetapi efektif mencegah mereka dari keterlibatan terorisme dan kekerasan politik. Dalam *the Global Youth Wellbeing Index 2017*, Indonesia masih jauh dibandingkan negara lain dalam memberi kesempatan ekonomi bagi kaum muda. Indonesia menempati ranking tiga paling bawah.

Polling Gallup 2013 atas ekonomi kaum muda di Asia Tenggara, Indonesia diharapkan lebih memberi akses dan mengajak kaum muda dalam kebijakan ekonomi. Engagement ekonomi bagi kaum muda, Indonesia jauh tertinggal dibandingkan Singapore, Malaysia, Thailand dan Filipina.

Lebih dari lima puluh persen penduduk Indonesia berusia di bawah 30 tahun. Karena itu, polling Gallup merekomendasikan kesempatan dan peran lebih kuat bagi kaum muda dalam dunia kerja: *“The concept of engaging younger employees is starkly different from the more traditional focus on retaining employees. Pay and promotion in a hierarchical business structure are unlikely to jump-start the cultural change necessary to nurture the kind of “learning organization” that Gen Y workers will want to embrace.”*¹ Pola hubungan hierarkis dalam budaya Asia Tenggara juga menghambat proses

¹ Vibhas Ratanjee dan Larry Emond, “Why Indonesia must Engage Younger Workers,” 17 Desember 2013. Diakses pada 09/02/2018 dari <http://news.gallup.com/businessjournal/166280/why-indonesia-engage-younger-workers.aspx>.

kepemimpinan kawasan ASEAN yang menjadi tantangan wilayah ini untuk berperan lebih kuat secara internasional.

Kesiapan juga dilakukan bagi generasi Z melalui kreativitas ekonomi dan persaingan regional dan global yang lebih kompleks. Dinamika dan ancaman keamanan serta kebijakan politik yang tidak stabil secara internasional semakin memperkuat harapan kita untuk memberi fondasi dan kesempatan lebih maksimal bagi kaum muda dalam kegiatan kewirausahaan serta program ekonomi lainnya.

Buku ini menyajikan hasil studi lapangan asesmen skill ekonomi kaum muda dan upaya penanggulangan terorisme dan kekerasan politik di lima kota di Indonesia, yaitu Nunukan-Kalimantan Utara, Poso-Sulawesi Tengah, Solo-Jawa Tengah, Lamongan-Jawa Timur, dan Medan-Sumatra Utara. Studi lapangan dilakukan pada 1 Agustus hingga 30 September 2017 melalui wawancara mendalam dan FGD atas lebih dari seratus responden terdiri dari pemerintah daerah, pemerintah pusat, dinas-dinas, polisi, aktivis muda, mahasiswa, siswa, ormas agama, pengusaha, dan stakeholder terkait lainnya. Analisis diperkuat dengan seminar dan workshop hingga akhir Januari 2018. Studi ini dilakukan oleh sepuluh peneliti lapangan dan lima lembaga partner lokal. Ini merupakan salah satu program yang dibiayai oleh CONVEY Indonesia yang dikelola oleh PPIM UIN Jakarta dan UNDP.

Terima kasih kami ucapkan kepada peneliti dan penulis; Irfan R Hutagalung, S.H., LL.M, Dr. Muhammad Guntur Alting, M.Pd., M.Si., Nostalgawan Wahyudhi S.IP.,

M.A., Saifudin Asrori, M.Si., Sholehuddin, M.Pd; para asisten peneliti; Kaula Fahmi, S.S., Achmad Fanani Rosyidi, S.Sos., Kurnia Aswaja, S.Psi, Sarah Hajar Machmudah, S.Sos., Waki Ats Tsaqofi, S.S. Mereka telah melakukan studi lapangan, tinggal di daerah penelitian selama hampir satu bulan penuh.

Terima kasih kami sampaikan kepada lembaga-lembaga partner atas kesediaannya mendampingi kami dalam melakukan studi ini saat di lapangan, antara lain; Aliansi Sumut Bersatu (ASB) Medan, Yayasan Lingkar Perdamaian (YLP) Lamongan, Lembaga Penguatan Masyarakat Sipil (LPMS) Poso, Center for the Study of Islam and Social Transformation (CISform) Yogyakarta dan Pancasila Jiwaku (Panjiku) Nunukan. Pendampingan lembaga partner lokal semakin memudahkan peneliti untuk fokus wawancara mendalam, FGD dan observasi dalam waktu yang terbatas.

Terima kasih banyak atas kepercayaannya kepada kami dalam mengelola program ini disampaikan kepada PMU Convey Indonesia, PPIM UIN Jakarta dan UNDP. Terima kasih banyak kepada Mas Prof. Dr. Jamhari selaku penanggung jawab Convey Indonesia, Mas Ali Munhanif, Ph.D. dan Kang Jajang Jahroni, Ph.D. mewakili PMU menjaga kualitas program ini, Mas Saiful Umam, Ph.D, Direktur Eksekutif PPIM UIN Jakarta, UNDP, Mbak Utami Sandyarani dan Pak Ridwan, PMU Convey Indonesia lainnya Kang Fuad Jabali, Ph.D, Kang Ismatu Ropi, Ph.D, Mbak Hani Samantha, Mas Dani, Mbak Dita Kirana, dan

seluruh tim Convey Indonesia, PPIM UIN Jakarta, dan UNDP.

Kami juga menyampaikan terima kasih tak terhingga kepada Dekan FISIP UIN Jakarta, Prof. Dr. Zulkifli, M.A., Wakil Dekan Bidang Akademik Dr. Dzuriyatun Toyibah, M.Si., Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum dan Keuangan, Dr. Bakir Ihsan, M.Si, dan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Dr. Agus Nugraha, M.A., serta; Dr. Iding Rosyidin, M.Si. (Kaprodi Ilmu Politik) dan Suryani, M.Si. (Sekprodi Ilmu Politik), M. Adian Firnas, S.IP, M.Si, dan Ahmad Alfajri, M.A. (Kaprodi Ilmu Hubungan Internasional) dan Eva Mushoffa, M.HSPS. (Sekprodi Ilmu Hubungan Internasional), Dr. Cucu Nurhayati, M.Si. (Kaprodi Sosiologi) dan Dr. Joharotul Jamilah, M.Si. (Sekprodi Sosiologi). Terima kasih atas bimbingan dan supportnya dalam pelaksanaan program PSTPG FISIP UIN Jakarta.

Terima kasih kami sampaikan kepada pengurus PSTPG FISIP UIN Jakarta yang mendukung program ini hingga akhir, para pembicara dan peserta seminar nasional dan workshop best practise dari Desember 2017 hingga akhir Januari 2018, khususnya Prof. Dr. Irfan Idris, M.A. (Direktur Deradikalisasi BNPT), dan Brigjen Pol. Ir. Hamli, M.E. (Direktur Pencegahan BNPT) yang membantu sejak research design hingga diseminasi dan audiensi dengan BNPT.

Kepada konsultan dan pelaksana program; M. Adian Firnas, S.IP, M.Si., Ahmad Syaifuddin Zuhri, S.IP, LM,

M. Kurnia Majid, S.Sos, dan Gita Syardiana, S.E. kami sampaikan beribu terima kasih atas kerja keras dan dedikasinya.

Last but not least, terima kasih kepada Abah, Ibu, Kakak dan Adik, dan khususnya istriku, Anis Fuadah Z., yang sabar mendampingi dan memberi support material dan moril sehingga program ini berjalan dengan lancar. Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan mereka semua dengan sebaik-baik balasan.

Buku ini menjadi sedikit dari studi atas program ekonomi khususnya bagi kaum muda sebagai bagian dari upaya penanggulangan terorisme dan kekerasan politik di Indonesia. Pusat Studi Timur Tengah dan Perdamaian Global (PSTPG) FISIP UIN Jakarta diharapkan melanjutkan tradisi baik ini untuk melakukan riset dan advokasi lanjutan. Sebagaimana rekomendasi studi ini bahwa pencegahan dan penanggulangan terorisme tidak bisa dilakukan oleh BNPT saja, perlu stakeholder pemerintah pusat dan daerah, ormas dan peran akademik yang lebih aktif. Pendekatan humanistik yang telah dilakukan Indonesia dalam penanggulangan terorisme akan semakin maksimal hasilnya melalui kerja sama komprehensif antar stakeholder.

Jakarta, 11 Februari 2018

Editor dan Direktur PSTPG FISIP UIN Jakarta,

Badrus Sholeh, Ph.D.

Kata Pengantar Convey Indonesia

Salah satu penyebab tertariknya anak muda bergabung dengan kelompok teroris adalah iming-iming pekerjaan dan gaji yang tinggi. Namun sayangnya isu ini tidak pernah diteliti secara lebih serius baik oleh lembaga-lembaga negara yang mengurus kontraerorisme, maupun lembaga penelitian atau LSM yang menekuni bidang ini. Pemuda seringkali digambarkan sebagai kelompok yang tengah mencari-cari identitas, rentan terhadap provokasi dan ideologi yang militan, dan seterusnya. Gambaran tentang pemuda seperti ini sebenarnya tidak terlalu membantu untuk merumuskan sebuah strategi penanggulangan terorisme secara sistematis. Bila saja pemerintah serius memberantas terorisme, maka itu harus dimulai dengan pemberdayaan ekonomi kaum muda. Dan bila pemuda berdaya secara ekonomi, maka salah satu mata rantai penting radikalisme dan terorisme terpotong dengan sendirinya.

Gambaran yang lumrah tentang pemuda di atas dibongkar oleh PSTPG (Pusat Studi Timur Tengah dan Perdamaian Global), sebuah lembaga kampus di UIN Jakarta yang mengkhususkan diri pada kajian kontra-terorisme. Maka buku yang ditulis oleh PSTPG ini mengisi kekosongan di atas. Buku ini memetakan secara cermat permasalahan yang dihadapi pemuda terutama di bidang ekonomi. Buku ini juga memetakan daerah-daerah mana saja yang perlu mendapatkan program pemberdayaan

ekonomi, bagaimana langkah-langkahnya, dan tantangan yang dihadapi.

Salah satu temuan buku ini adalah bila secara ekonomi pemuda mandiri, maka kelompok teroris akan gagal menjual ideologinya terhadap mereka. Paling tidak mereka mengalami kesulitan yang luar biasa untuk mencari pengikut baru. Lebih dari itu, buku ini didasarkan pada sebuah penelitian lapangan yang panjang dan teliti dengan mengambil daerah-daerah yang selama ini menjadi “basis” terorisme yaitu Solo, Lamongan, Poso, dan Medan. Diharapkan buku bisa mengisi kekosongan studi yang selama tidak banyak menarik minat banyak orang. Diharapkan buku ini juga menarik minat penelitian tentang penelitian sosial ekonomi dan hubungannya dengan terorisme dan ekstremisme.

Buku ini ditulis oleh mereka yang secara langsung terlibat di lapangan. Berbicara dan mengamati para pemuda di daerah yang disebutkan di atas. Karena itu, buku ini bicara dengan jujur permasalahan yang dihadapi pemuda. Lewat pendekatan etnografik yang mendalam, buku ini tidak saja menghadirkan informasi penting tentang hubungan pemberdayaan ekonomi pemuda dan terorisme, namun juga mengkritik program deradikalisasi yang selama ini gencar dilakukan pemerintah. Saya menyambut baik gawe PSTPG, yang berada di bawah kepemimpinan Dr. Badrus Sholeh, M.A., dapat berpartisipasi dalam Project Convey PPIM UIN Jakarta Tahun 2017. Buku ini, meski tipis, tidak mengurangi pentingnya dan patut di-

baca baik oleh para pemangku kebijakan, peneliti, maupun masyarakat secara umum.

Jakarta, 28 Desember 2017

Jajang Jahroni, Ph.D.
Convey Project Officer PPIM UIN Jakarta

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	xiii

BAB 1 EKONOMI KAUM MUDA DAN KEBIJAKAN KONTRATERORISME • 1

1. Pendahuluan → 1
2. Ekonomi Kaum Muda dan Terorisme → 3
3. Koordinasi dan Kolaborasi *Stakeholder* → 7
4. Perdebatan Konsep → 10
5. Arah Buku → 12

BAB 2 EKONOMI KAUM MUDA DAN CVE DI MEDAN, SUMATRA UTARA • 14

1. Pendahuluan → 14
2. Medan dan Terorisme → 19
3. Peningkatan, Kegamangan Bersikap, dan Kecenderungan Moderasi terhadap Kekerasan → 24
4. Medan dan Program Kontraradikalisme dan Deradikalisasi → 31
 - 4.1. Kondisi Ekonomi Makro Medan → 33
 - 4.2. Intervensi Ekonomi Bagi Pemuda Penting → 35
 - 4.3. Kondisi Kepemudaan Kota Medan → 37
 - 4.4. Pemerintah Kota/Daerah dan Program Kontraradikalisme dan Deradikalisasi → 42
5. Berbagi Beban → 64
6. Kesimpulan dan Rekomendasi → 69

BAB 3 EKONOMI KAUM MUDA, PEMBANGUNAN PASCAKONFLIK, DAN CVE DI POSO, SULAWESI TENGAH • 73

1. Pendahuluan → 73
2. Kondisi Geografis → 77
3. Kondisi Sosial Ekonomi Poso → 80
4. Peran Pemerintah dalam Pemberdayaan Ekonomi, Khususnya dalam Menangkal Paham Radikal → 87
5. Peran Pemerintah Pusat → 92
6. Peran Pemerintah Daerah → 102
7. Peran Organisasi Keislaman dan Organisasi Kepemudaan → 111

BAB 4 EKONOMI KAUM MUDA DAN CVE DI SOLO, JAWA TENGAH • 118

1. Pendahuluan → 118
2. Solo dalam Bingkai Ekonomi → 120
3. Pesantren → 132
4. Pemberdayaan Ekonomi → 140
5. *Best Practice* → 164

BAB 5 EKONOMI KAUM MUDA DAN CVE DI LAMONGAN, JAWA TIMUR • 173

1. Pendahuluan → 173
2. Gambaran Umum Masyarakat → 183
3. Pemberdayaan Ekonomi Pemuda → 189
4. Pemberdayaan Mantan Napiter oleh Yayasan Lingkar Perdamaian → 215
5. Kesimpulan → 224

BAB 6 EKONOMI KAUM MUDA DAN KEAMANAN PERBATASAN DI NUNUKAN, KALIMANTAN UTARA • 227

1. Pendahuluan → 227
2. Profil Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara → 293
Gambaran Problem Terkini Masyarakat Nunukan → 241
4. Pemberdayaan Ekonomi Pemuda di Nunukan → 253
5. Kebijakan Pemberdayaan Generasi Muda yang Dilakukan Lembaga Pemerintah di Nunukan → 259
6. Upaya Pencegahan Terhadap Radikalisme dan Penanggulangan Terorisme → 266
7. Analisis *Best Practice* → 268

BAB 7 EKONOMI KAUM MUDA DAN STRATEGI PENCEGAHAN TERORISME • 278

1. Peran Pemerintah → 282
2. Penguatan Komunitas → 285
3. Lintas Sektoral → 287
4. Kesimpulan → 290

BAB 8 KESIMPULAN • 292

DAFTAR PUSTAKA	299
TENTANG PENULIS DAN EDITOR	313
INDEKS	319

BAB 1

Prolog Ekonomi Kaum Muda dan Kebijakan Kontraterorisme

1. Pendahuluan

Kebijakan penanggulangan terorisme (*countering terrorism*) mengalami perubahan pasca gagalnya pendekatan keamanan. Upaya dialogis dengan teroris dan mantan teroris menjadi pola lebih efektif tidak hanya dalam penanggulangan tetapi juga pencegahan terorisme.¹ Komunikasi dan dialog ini akan membangun kepercayaan (*trust*) dan hubungan lebih humanis yang tidak hanya membuka informasi untuk kepentingan strategis dan taktis, tetapi juga memberi mereka ruang untuk melakukan refleksi proses perubahan keluar dari lingkaran kekerasan masa lalu. Pendekatan humanistik ini dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam menangani terorisme melalui dialog dan pemberdayaan ekonomi baik oleh Densus 88 pascabom Bali 2002 dilanjutkan oleh BNPT, Kementerian Sosial, dan kementerian lain. Keterbatasan dana dan waktu dalam kegiatan ekonomi membuat kurangnya

¹ Jonathan Powell, *Terrorists At The Table: Why Negotiating Is The Only Way to Peace*, New York: Palgrave Macmillan, 2015.

efektivitas dan lemahnya dampak jangka panjang yang diharapkan terjadi pasca pemberdayaan ekonomi bagi mantan kombatan dan mantan narapidana terorisme (narapidana teroris). Lebih dari tujuh belas tahun Indonesia melakukan upaya penanggulangan terorisme. Masih banyak kaum muda yang tertarik dalam mengikuti gerakan terorisme, termasuk melalui media sosial yang gencar dilakukan oleh ISIS.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan menyatakan bahwa yang disebut Pemuda adalah “Warga Negara Indonesia berusia 16-30 Tahun” (BPS 2015). Jumlah pemuda Indonesia sekitar 65 juta atau sekitar 25% dari total penduduk Indonesia. UN ESCAP menyatakan bahwa pemuda yang berumur 15-24 di Asia Pasifik berjumlah 717 juta atau sekitar 60 persen dari total pemuda dunia. Mereka menentukan masa depan Indonesia dan negara-negara Asia Pasifik. Buku ini merupakan hasil wawancara lebih dari seratus responden, FGD, dan observasi ke Nunukan, Kalimantan Utara, Poso, Sulawesi Tengah, Solo, Jawa Tengah, Lamongan Jawa Timur, dan Medan, Sumatra Utara pada 1 Agustus hingga 30 November 2017. Di antara responden yang diwawancarai adalah siswa, mahasiswa, aktivis organisasi pemuda dan kemahasiswaan, ormas, LSM, pengusaha, dinas-dinas pemerintah daerah, kementerian dan lembaga di pemerintah pusat terkait dengan “Asesmen Program Ekonomi bagi Kaum Muda dan Upaya Penanggulangan Terorisme.”

Studi ini strategis untuk melihat bagaimana program dan kegiatan ekonomi bagi kaum muda, laki-laki dan perempuan, dan dampaknya bagi stabilitas sosial, politik, dan keamanan khususnya pencegahan dan penanggulangan terorisme dan radikalisme. Kegiatan ekonomi memiliki peran strategis dalam proses pemisahan (*disengagement*) para kombatan dan mantan teroris keluar dari lingkaran kelompok dan aksi kekerasan dan teror. Beberapa responden mantan narapidana teroris menyatakan bahwa komunitas dan program ekonomi memberi mereka kekuatan dan ketahanan untuk lebih percaya diri terintegrasi di masyarakat dan terbebas dari ajakan dan rekrutmen yang selalu dilakukan oleh kelompok teroris. Selalu ada upaya dari kelompok teroris untuk mengajak mereka melakukan aksi teror kembali bagi mereka yang keluar dari penjara.

2. Ekonomi Kaum Muda dan Terorisme

Indonesia sebagai negara demokratis terbesar ketiga dan negara muslim terbesar di dunia mendapat tantangan bagaimana negara dan masyarakat mengatasi gerakan radikalisme dan terorisme di Indonesia dan Asia Tenggara. Di antara lebih dari seribu empat ratus narapidana teroris, mayoritas adalah kaum muda yang terlibat dalam beragam aksi teror. Kaum muda semakin mendapat tantangan setelah pola berbeda digunakan ISIS dalam merekrut dan memengaruhi kaum muda untuk

berangkat ke Suriah dan berbaiat kepada Abu Bakar al Baghdadi. ISIS secara masif menggunakan media sosial dan *blog*, dan mendapatkan respons kuat dari jihadis muda. Beberapa pelajar belasan tahun dari Indonesia bergabung dengan ISIS dan berangkat ke Suriah. Ratusan anak muda masih berniat ke Suriah, tetapi terhambat oleh *monitoring* keamanan yang semakin ketat. Pendekatan komprehensif dan lintas pemangku kepentingan (*stakeholder*) terhadap kaum muda dalam pencegahan dan penanggulangan terorisme menjadi kebutuhan penting. Salah satu pendekatan adalah melalui program ekonomi bagi kaum muda. Ekonomi dan radikalisme-terorisme telah menjadi perdebatan para analis dan pengambil kebijakan apakah ekonomi memiliki dampak terhadap gerakan radikalisme dan terorisme.

Kaum muda yang sedang mencari eksistensi diri dan khususnya dalam kondisi ekonomi yang berkekurangan menjadi target kelompok teroris. Bagi mereka yang sebelumnya terlibat dalam aksi kriminal narkoba atau pembunuhan, ketika terpengaruh oleh kelompok teroris, umumnya setelah pertemuan mereka di penjara, menjadi pelaku aksi terorisme yang lebih kuat dan berpengaruh. Aksi kriminal mereka “diputihkan” menjadi aksi “jihad”. Kemiskinan dan tekanan kebutuhan ekonomi potensial bagi pola rekrutmen gerakan terorisme. Thomas Koruth Samuel menyatakan :

“The environment has also played a conclusive role in triggering favourable responses from young people

towards terrorism and extremism. When there are few opportunities to break out of the cycle of poverty, perceived or real injustice and despair, there is a greater tolerance for violence.”²

Program ekonomi yang dilakukan pemerintah mendapatkan respons positif dari kaum muda dan masyarakat. Program umumnya bersifat jangka pendek dan tidak berkelanjutan. Program juga tidak mendapatkan pemantauan dan evaluasi untuk efektivitas dan perbaikan. Arifudin Lako, mantan napiter dari Poso menyatakan:

“Harusnya ada evaluasi, kalo yang sudah berjalan ada beberapa kali turun bantuan tapi lemah di *monitoring*. Harus ada pendamping, paling tidak setelah dapat bantuan kan ada data untuk apa dan untuk siapa. Jadi ada evaluasi dan *monitoring*. Jadi saya waktu itu dapat komputer dan seharusnya dilihat tahun-tahun berikutnya untuk apa.”³

Arifudin memandang BNPT tidak memiliki *platform* yang jelas dalam melakukan bantuan pemberdayaan ekonomi. Arifudin melihat bantuan BNPT sering salah sasaran. Kasus Poso, bantuan diberikan untuk mantan napiter, tetapi banyak orang yang belum pernah dipenjarakan juga mendapatkan bantuan. Arifudin juga menambahkan adanya praktik yang tidak sesuai program dan kegiatan diproyekkan. Ia menyatakan:

² Thomas Koruth Samuel, *Reaching the Youth: Countering the Terrorist Narrative*, Kuala Lumpur: SEARCCT, 2012, hlm. 8.

³ Arifudin Lako, wawancara di Poso, 1 September 2017.

“Apalagi masalah pendataan karena waktu saya di Makassar pernah diundang BNPT karena pendataan yang tidak tepat sasaran, maka terjadi kekacauan siapa yang lebih tepat dalam mendapatkan bantuan.”⁴

Kaum muda memiliki kesempatan dan peran yang setara. Mahfudh, dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Poso, menyatakan bahwa kombatan memiliki kesempatan yang sama dengan yang lain dalam tender PU. Tetapi ada arahan dari bupati dan polres bahwa mantan kombatan mendapat perhatian khusus demi perdamaian dan keamanan. Mahfudh menyatakan:

“Secara umum memang sebagaimana arahan bupati dan Kapolres bahwa mereka harus diperhatikan demi stabilitas keamanan.”⁵

Pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam pemberdayaan ekonomi kaum muda, termasuk dalam konteks pencegahan dan penanggulangan terorisme. Perhatian pemerintah daerah tidak hanya di Poso, tetapi juga di Lamongan.

Program ekonomi bagi kaum muda perlu diarahkan lebih efektif sesuai dengan kebutuhan dan konteks daerah. Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, memiliki tantangan berbeda dengan kabupaten lain. Sebagai daerah perbatasan, Kabupaten Nunukan memiliki tantangan

⁴ Arifudin Lako, wawancara di Lako, 1 September 2017.

⁵ Mahfudh, Dinas Pekerjaan Umum Poso, 28 Agustus 2017.

sebagai daerah lintas batas perdagangan antara Indonesia, Malaysia, dan Filipina. Kaum muda terlibat dalam peredaran barang antarnegara, termasuk godaan untuk terlibat dalam perdagangan barang-barang ilegal, antara lain narkoba dan barang selundupan. Nunukan juga menjadi transit bagi anak muda yang ingin bekerja menjadi TKI dan TKW di luar negeri. Kelompok teroris Jama'ah Islamiyah dan ISIS juga menggunakan daerah ini untuk penyelundupan senjata dari Filipina Selatan ke Indonesia. Anak muda di daerah ini hanya menjadi pendamping dan penunjuk jalan. Tidak adanya operasi aksi terorisme dan rekrutmen anak muda di daerah perbatasan ini membuat masyarakat Nunukan tidak merasa terusik dari peredaran senjata dari luar Indonesia ke Indonesia melalui jalur Mindanao—Nunukan—Parepare (Sulawesi Selatan). Mereka menggunakan perahu tradisional dan kapal Pelni dari Nunukan ke Parepare Sulawesi Selatan.

3. Koordinasi dan Kolaborasi Stakeholder

Pimpinan daerah sangat memengaruhi kebijakan yang komprehensif dan koordinatif dinas-dinas terkait di daerah baik pada level provinsi maupun kabupaten dan kota, termasuk dalam konteks ini dalam program ekonomi dan penanggulangan terorisme. Berbeda dengan Nunukan, Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan memiliki perhatian lebih terhadap program ekonomi bagi kaum muda dan upaya penanggulangan terorisme. Perhatian

pemerintah pusat atas Kabupaten Lamongan sejak terjadi Bom Bali Oktober 2002 yang direncanakan dan dikendalikan dari Solokuro, Lamongan. Ini membuat pemerintah daerah Lamongan terdorong untuk lebih serius mengatasi radikalisme dan terorisme. Dinas pemuda dan olahraga, dinas sosial, dinas tenaga kerja dan transmigrasi, dinas koperasi, serta Kantor Kemenag Lamongan menunjukkan sikap lebih serius atas CVE. Dinas Pemuda dan Olahraga membuat program bela negara kerja sama dengan Yayasan Lingkar Perdamaian (YLP) melalui pelatihan upacara dan baris-berbaris. Dinas Sosial mendapat respons negatif ketika mencoba memberikan bantuan program pemberdayaan, tetapi memaksa diri untuk membuat laporan sebagai bantuan terhadap masyarakat miskin di Desa Tenggulun, Kecamatan Solokuro, Kabupaten Lamongan. Ali Fauzi merespons bahwa:

“Ini akan kontraproduktif terhadap misi dan visi dakwah dan dalam menjaga moral aktivis YLP dalam mendampingi ikhwan, mantan napiter dan mantan teroris.”⁶

Kementerian Sosial telah terlibat dalam banyak kegiatan penanggulangan terorisme. Tidak hanya membantu para mantan napiter dan mantan kombatan, tetapi juga melakukan rehabilitasi bagi deportan Suriah dan mendampingi mereka dalam reintegrasi di masyarakat.

⁶ Ali Fauzi, Pendiri dan Ketua YLP, wawancara di Solokuro, Lamongan, 2 September 2017.

Proses reintegrasi ini yang tidak diiringi dengan keterlibatan *stakeholder* daerah baik dinas-dinas maupun ormas agama. Kurangnya perencanaan dan kebijakan yang komprehensif dan koordinatif antar dinas pemerintah daerah membuat program ekonomi dan program lain yang tidak efektif pengaruhnya secara jangka panjang dan substansial.

Kritik juga dinyatakan oleh Khoirul Ghozali, mantan napiter dan pengasuh Pesantren Al Hidayah Medan, Sumatra Utara. Ghozali menyatakan bahwa pemerintah kota dan pemerintah provinsi sudah beberapa kali berkunjung ke Pesantren Al Hidayah. Tetapi mereka tidak memberi bantuan dana dan perhatian terhadap program Pesantren Al Hidayah. Dalam wawancara terhadap Pemkot Medan bahwa mereka merasa tidak dilibatkan dalam pendampingan dan pemberdayaan terhadap Pesantren Al Hidayah sebagai Lembaga Pendidikan Islam yang mengatasi dan melakukan pencegahan terhadap radikalisme dan terorisme. Sikap apatis pemerintah daerah dan ormas Islam dalam pembinaan mantan teroris dan lembaga Pendidikan dalam pencegahan terorisme membuat Pesantren Al Hidayah mengalami kemerosotan dalam proses belajar-mengajar. Khoirul Ghozali mengungkapkan kekecewaannya:

“Kalau dari segi dana tidak ada dari Pemprov, Pemkab, Pemkot mereka sudah datang ke sini. Jadi bohong kalau mereka tidak tahu kondisi di sini,

kalau mereka bilang tidak tahu mereka menutup diri itu... Mereka hanya menganggap sepele, nanti kalau sudah ada kejadian baru kelimpungan.”⁷

Lemahnya koordinasi dan sikap apatis pemerintah serta ormas pusat dan daerah akan membuat kebijakan program ekonomi tidak memiliki dampak yang berarti bagi mengatasi radikalisme dan terorisme. Makin banyaknya gerakan terorisme membuat tantangan baru bagi negara dan masyarakat bagaimana upaya lebih komprehensif dilakukan dalam jangka panjang dan berkesinambungan.

4. Perdebatan Konsep

Studi terorisme menjadi perhatian lintas keilmuan sejak serangan WTC 11 September 2001 dan Bom Bali Oktober 2002. Kebijakan internasional pada awalnya lebih ke kontraterorisme (*countering terrorism*). Hasilnya tidak maksimal karena hanya reaktif atas kejadian aksi terorisme. Indonesia telah menahan lebih dari 1.400 pelaku terorisme dari 2002 sampai 2017 (*Kompas*, 21 Desember 2017). Padahal ada ribuan lainnya yang melakukan gerakan terorisme baik rekrutmen, pelatihan, dan pembentukan komunitas teroris. Pendekatan keamanan dianggap gagal memahami dan membendung terorisme secara lebih komprehensif. Pada masa Barack Obama kebijakan terorisme lebih menggunakan *soft approach* menekankan

⁷ Khoirul Ghozali, mantan napiter/pengasuh Pesantren Al Hidayah, wawancara di Medan, September 2017.

aspek lebih luas dan diharapkan menjangkau komunitas di luar kelompok inti pelaku aksi terorisme. Kebijakan ini disebut CVE (*Countering Violent Extremism*) mengatasi ekstremisme kekerasan. Kebijakan deradikalisasi menjadi bagian penting dalam mengatasi terorisme dengan melibatkan lebih luas *stakeholder* pemerintah dan masyarakat.

Terorisme tidak hanya persoalan keamanan dan studi strategis tetapi juga terkait dengan masalah ekonomi, psikologi, dan bahkan sains. John Horgan dan Mia Bloom melihat terorisme dari perspektif psikologi. Horgan menyatakan bahwa *disengagement* teroris merupakan salah satu pendekatan pemisahan teroris dan mantan teroris sebagai bagian tahap penting proses transisi keluar dari jerat kelompok kekerasan. Mia Bloom melihat peran perempuan dalam aksi dan korban terorisme.

Studi ekonomi dan terorisme menjadi hal baru dalam kajian terorisme. Ada dua alasan. *Pertama*, gerakan terorisme menggunakan sumber-sumber keuangan lintas negara. Respons banyak negara pada bagaimana mekanisme peredaran keuangan global yang digunakan kelompok teroris. *Kedua*, pencegahan dan penanggulangan terorisme menggunakan pendekatan pemberdayaan ekonomi terhadap masyarakat dan mantan teroris. Alasan kedua ini menjadi legitimasi studi ini bagaimana pemerintah dan masyarakat bekerja sama dalam mengatasi terorisme melalui pemberdayaan ekonomi bagi kaum muda.

5. Arah Buku

Buku ini terbagi menjadi lima bagian sesuai dengan lima wilayah studi. *Pertama*, ekonomi kaum muda dan Countering Violent Extremism (CVE) di Medan, Sumatra Utara. Pada bagian ini akan dicari bagaimana program pemerintah dan masyarakat dalam pemberdayaan ekonomi kaum muda. Sebagai kota metropolitan, Medan menjadi *melting pot* beragam etnis dan sosial agama. *Kedua*, ekonomi kaum muda dan CVE di Poso, Sulawesi Tengah. Sebagai daerah pascakonflik, Poso memiliki program ekonomi bagi kaum muda yang strategis bagi pengembangan perdamaian. Kegiatan ekonomi kaum muda dilihat tidak hanya pada aspek deradikalisasinya, tetapi dampak pada pertemuan berbeda agama dalam melakukan aktivitas ekonomi. *Ketiga*, ekonomi kaum muda dan CVE di Solo, Jawa Tengah. Solo sebagai basis aktivis Islam, pertarungan kelompok Islam dan nasionalis menjadikan gerakan ekonomi kaum muda memiliki kekuatan politik. Ekonomi kaum muda dilakukan secara lebih mandiri tanpa ketergantungan pada pemerintah. Ekonomi kreatif berkembang dengan baik. Pada bagian ini dilihat bagaimana kaum muda mantan napiter juga aktif dalam melakukan inovasi dan kegiatan ekonomi. *Keempat*, ekonomi kaum muda dan CVE di Lamongan, Jawa Timur. Pada bagian ini akan dilihat keterlibatan masyarakat dan pemerintah daerah dalam program ekonomi kaum muda dan bagaimana mereka aktif dalam penguatan komunitas muda untuk

mengatasi dan mencegah terorisme. *Kelima*, ekonomi kaum muda dan keamanan perbatasan di Nunukan, Kalimantan Utara. Berbeda dengan kajian lain, program ekonomi kaum muda di Nunukan terkait erat dengan keamanan perbatasan termasuk penguatan nasionalisme dan gerakan bela negara. Meski wilayah ini menjadi jalur tradisional lintas negara bisnis narkoba dan smuggling senjata dari Filipina Selatan ke Indonesia. Buku diakhiri dengan kesimpulan dan rekomendasi baik bagi kementerian dan lembaga strategis pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dan masyarakat sipil serta ormas agama.

Tabel 1. Konteks Wilayah Studi

DAERAH	KONTEKS
Nunukan, Kalimantan Utara	Memahami daerah perbatasan, potensi ekonomi lintas batas, dan daerah transit kriminal dan terorisme antar negara
Poso, Sulawesi Tengah	Memahami daerah pasca konflik, keterlibatan kaum muda dalam kegiatan ekonomi yang mendukung keberlanjutan perdamaian, termasuk mengatasi potensi radikalisme dan terorisme di wilayah ini melalui program ekonomi.
Solo, Jawa Tengah	Memahami daerah yang menjadi barometer aktivisme nasionalis dan Islam, peran pemerintah dan masyarakat dalam pemberdayaan ekonomi bagi kaum muda
Lamongan, Jawa Timur	Memahami program ekonomi bagi kaum muda dan keterlibatan ormas Islam dan pemerintah daerah dalam program ini. Juga hubungan pemberdayaan ekonomi bagi mantan teroris dan penanggulangan terorisme.

BAB 2

Ekonomi Kaum Muda dan CVE di Medan, Sumatra Utara

1. Pendahuluan

Keanekaragaman suku bangsa, bahasa, budaya, dan agama menjadi sebuah cerminan masyarakat plural atau majemuk. Pengalaman masyarakat Indonesia hidup berdampingan dengan keanekaragaman tersebut mencirikan sikap toleran atas dasar saling menghargai di antara kelompok masyarakat yang beragam. Setidaknya terdapat empat unsur dalam konsep toleransi, yakni mengakui hak orang lain, menghormati dan menghargai keyakinan orang lain, setuju dalam perbedaan dan saling pengertian.⁸ Namun demikian, sikap toleransi tidak berlaku pada perbuatan yang bertentangan dengan hukum negara, agama, dan norma sosial yang berlaku dalam masyarakat. Aksi terorisme dan penyebaran paham radikalisme menjadi sebagian contoh yang jelas terhadap pelanggaran hukum negara dan agama serta menimbul-

⁸ The Habibie Center, *Cerdas Bermedia untuk Toleransi: Modul dan Laporan Kegiatan The Habibie Center 2010*, hlm. 158-159.

kan keresahan dalam masyarakat sehingga perlu ditangani secara menyeluruh.

Terorisme merupakan fenomena modern yang sejak peristiwa 9/11 menunjukkan bentuk gerakan baru dan lebih membahayakan jika dibandingkan dengan aksi-aksi terorisme di tahun-tahun sebelumnya.⁹ Kemunculan terorisme modern ini disebabkan oleh beberapa alasan, salah satunya karena adanya peningkatan arus lintas batas atas manusia, barang, uang, teknologi, dan gagasan yang pada umumnya menguntungkan aktor non-negara dengan mengorbankan negara. Kelompok teroris telah terbukti sangat mahir mengeksploitasi mobilitas ini. Paham radikalisme dengan mudahnya dapat disebar dan diakses oleh semua orang melalui media sosial tanda ada filter substansi yang signifikan. Aksi-aksi terorisme yang terjadi di sebuah negara, misalnya, dapat menginspirasi seseorang untuk melakukan hal yang sama di negara lainnya, tidak terkecuali sebagaimana beberapa aksi terorisme yang terjadi di Indonesia beberapa tahun terakhir. Dengan demikian, terlepas dari isu terorisme yang menjadi alat baru negara-negara adidaya untuk menekan negara lain, serangkaian aksi terorisme di Indonesia jelas memberikan dampak yang besar bagi faktor keamanan dan masa depan negara.

Serangkaian serangan teroris cukup intens terjadi di beberapa wilayah di Indonesia. Bentuk serangan

⁹ Andrew Heywood, *Global Politics*, New York: Palgrave Macmillan, 2011, hlm. 282-289.

teroris tersebut di antaranya mulai dari bom bunuh diri, serangan senjata tajam, sampai serangan bom dan senjata api dan gabungan dari beberapa bentuk. Sasarannya adalah penduduk sipil, aparat kepolisian, sampai aparat pemerintah, atau gabungan ketiganya. Untuk lokasi penyerangan pun bervariasi, mulai dari bar turis, hotel, pos dan markas kepolisian daerah, bank, tempat ibadah, kedutaan, sampai terminal bus. Adapun wilayah serangan tersebar mulai ujung Indonesia bagian barat yakni Kota Banda Aceh, Medan, Jakarta, Bandung, Samarinda, pusat keramaian turis di Kuta, Bali, Poso, Makassar, sampai ke Ambon. Kota tempat sasaran serangan tidak selalu di kota besar provinsi, kota kecil juga seperti Tuban, Banyumas, Solo. Jika tempat dan lokasi penangkapan dimasukkan ke dalam daftar tempat atau kota lokasi terjadinya serangan teroris, daftarnya akan semakin panjang.

Pelaku teroris berjenis kelamin laki-laki juga perempuan—walau sejauh ini masih satu orang yang sampai dituntut di pengadilan dan dihukum—mulai dari remaja pria belasan tahun sampai pria usia manula.¹⁰ Pelaku beragam latar belakang profesinya: ada guru, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan wiraswasta. Demikian juga dengan label etnis yang beragam. Sejak 9 September 2001, Indonesia telah mengalami serangan teroris berkali-kali. Walau tentu tidak diharapkan, serangan teroris diyakini masih akan terus berlanjut dan besar kemungkinan

¹⁰ Salah satu terpidana usia manula adalah Abu Bakar Baasyir.

akan mengakibatkan timbulnya korban jiwa pula. Hal ini disebabkan karena Indonesia belum mempunyai skema besar yang jelas dan sistematis untuk penanganan terorisme.¹¹

Pemerintah dan masyarakat—dalam beberapa situasi dan peristiwa—telah berupaya memberantas eksistensi kelompok teroris. Upaya tersebut dapat diklasifikasi ke dalam tiga kategori umum dan longgar yakni: sebelum serangan teroris terjadi, pada saat kejadian, dan pascakejadian. Kategori ini perlu dilihat dalam bentuk siklus yang tidak terputus dan dapat juga terjadi simultan. Untuk yang pertama, dapat disebut sebagai kontraradikalisme yakni upaya yang dilakukan—terutama oleh aparat sipil pemerintah—untuk melawan paham radikal di masyarakat agar masyarakat terhindar dari paham dimaksud dan pada akhirnya akan menjauhi atau bahkan menentang tindakan kekerasan yang berangkat dari paham radikal itu. Sasarannya dengan demikian adalah khalayak luas dan mediana beragam sejauh yang dapat dijangkau masyarakat. Upaya kedua tentu adalah tindakan represif, yakni melumpuhkan pelaku teroris saat hendak melakukan perbuatannya atau sedang melakukan, dan mengejanya untuk diproses hukum. Tindakan ini tentu hanya dilakukan oleh aparat kepolisian dan secara khusus dari Detasemen Khusus 88 (Densus 88).

¹¹ <https://www.antaraneews.com/berita/663604/indonesia-dinilai-belum-punya-skema-tangani-terorisme>

Upaya ketiga deradikalisasi yakni menghilangkan pandangan atau keyakinan radikalisme dari mereka yang telah terpengaruh paham tersebut, yang telah melakukan, atau terlibat dalam tindakan kekerasan yang didorong oleh paham radikal. Target program, dengan demikian, adalah para mantan pelaku dan orang-orang di sekitarnya baik keluarga dekat atau yang terkait langsung dengan para pelaku atau mantan pelaku yang memiliki pandangan yang sama dengan pelaku teroris. Mediana bisa sangat spesifik dan metodenya bisa juga sangat personal. Walaupun demikian, secara umum, program deradikalisasi bisa diarahkan kepada siapa saja yang telah terpengaruh oleh paham radikal. Tindakan aparat kepolisian dalam memberantas terorisme dalam bentuk tindakan represif sudah dikenal luas. Namun, usaha lain yang bersifat non-represif, seperti upaya pencegahan, dirasa sangat jarang dilakukan.

Perang terhadap radikalisme dan terorisme pada hakikatnya tidak semata menjadi tanggung jawab pemerintah, khususnya Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Upaya pencegahan dan penanganan aksi-aksi terorisme memerlukan keterlibatan semua elemen dalam masyarakat termasuk generasi muda. Sebagai aset bangsa, masa depan sebuah negara akan sangat bergantung pada kualitas kaum mudanya. Dengan karakter umum bahwa kaum muda cenderung masih belum stabil, selalu ingin tahu, dan mudah terpengaruh menjadi sebuah tantangan tersendiri bagi *stakeholder* ter-

kait dalam membentengi kaum muda dari pengaruh paham radikalisme, kontraterorisme, *countering violence extremism* (CVE), dan kekerasan politik lainnya.

Untuk itu, pada bagian ini, penulis akan memberikan pemaparan secara komprehensif mengenai keterkaitan antara program pemberdayaan ekonomi bagi kaum muda dalam upaya pencegahan penyebaran paham-paham dan aksi-aksi berasas radikalisme, kontraterorisme, CVE, dan kekerasan politik di Kota Medan, Sumatra Utara. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada argumentasi bahwa beberapa kelompok teroris menggunakan Medan sebagai kota transit dan kota pengembangan aksi terorisme. Seperti halnya bagian-bagian tulisan lain dalam buku ini, pada bagian pertama akan melihat bagaimana kaum muda di Kota Medan menyikapi paham radikalisme dan aksi terorisme yang sedang berkembang. Penjelasan ini yang kemudian akan memaparkan aspek pemberdayaan ekonomi bagi kaum pemuda sebagai salah satu bentuk pencegahan paham radikalisme dan terorisme.

2. Medan dan Terorisme

Kota Medan telah beberapa kali mendapat serangan teroris. Sampai bagian tulisan ini dibuat, aksi terakhir terorisme di kota ini adalah penyerangan terhadap Markas Kepolisian Daerah Sumatra Utara yang menewaskan satu orang anggota polisi.¹² Di kota ini beberapa pelaku

¹² Penyerangan ini dilakukan oleh dua pelaku dengan senjata tajam pada 25 Juni 2017. Kedua pelaku berhasil dilumpuhkan pihak

teroris telah pula ditangkap, diadili, dan dihukum. Di kota atau di pinggir kota ini juga berdiam dan bermukim mantan pelaku teroris yang tengah berupaya untuk mengisi hidupnya dengan memutus mata rantai radikalisme di kalangan keluarga mantan napi teroris (napiter). Kota dengan jumlah penduduk 2.210.624 jiwa¹³, sekitar 1.207.541¹⁴ (54,6%) beragama Islam, bermukim tidak hanya kelompok muslim cinta damai dan moderat, tetapi juga kelompok-kelompok garis keras walau sangat minoritas seperti Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) dan Jama'ah Ansharut Daulah (JAD).¹⁵ Dari segi komposisi penduduk, Medan adalah kota yang sangat pluralis dibandingkan dengan kota besar lain di Indonesia. Dengan demikian, Medan tidak dengan sendirinya mampu menjamin

kepolisian, satu orang di antaranya meninggal di tempat kejadian dan satu orang lagi kritis. <https://news.detik.com/berita/d-3541617/teror-di-polda-sumut-diduga-terkait-penangkapan-3-teroris-di-medan> dan <http://nasional.kompas.com/read/2017/06/25/10592361/dua.terduga.teroris.masuk.ke.markas.polda.sumut.dengan.lompat.pagar>

¹³ Badan Pusat Statistik Kota Medan, "Kota Medan Dalam Angka 2016," hlm. 57. Namun menurut informasi dari sumber yang lain, jumlah penduduk Medan berdasarkan Sensus tahun 2010, berjumlah 2.103.783 dan proyeksi penduduk tahun 2016 sebesar 2.229.408; BPS, "Statistik Kesejahteraan Rakyat Kota Medan 2016" hlm. 19.

¹⁴ Badan Pusat Statistik Kota Medan, hlm. 179.

¹⁵ Menurut Polisi terduga teroris yang tinggal dan ditangkap di Medan adalah anggota Jamaah Ansharut Daulah. Salah seorang di antaranya adalah Jhon Hen yang pernah menjadi pengurus Majelis Mujahidin Indonesia, Medan. <http://regional.kompas.com/read/2017/06/08/17005691/istri.3.terduga.teroris.di.medan.pertanyakan.keberadaan.suaminya>; <http://medan.tribunnews.com/2017/06/07/ketua-majelis-mujahidin-akui-ada-mantan-pengurus-diamankan-densus-88>

penduduknya tidak ada yang berpikir dan bertindak ekstremis. Suatu sikap tindak yang dipicu oleh pandangan agama yang bersifat fundamentalis.

Dengan luas kota kurang lebih 265,1 km persegi¹⁶ dan jumlah penduduk yang besar, warga kota cenderung mengenal penduduknya satu sama lain terutama didasarkan karena kesamaan pekerjaan, profesi, dan status sosial. Masyarakat yang seperti ini biasanya kurang begitu peduli dengan keberadaan orang asing di lingkungannya. Medan dengan demikian adalah tempat yang tepat untuk bersembunyi bagi pelaku kejahatan termasuk teroris.

Jika disepakati Darul Islam (DI) adalah salah satu akar terorisme di Indonesia, Medan tidak asing dengannya. Walau tidak seperti Aceh, Ibu kota Provinsi Sumatra Utara yang dulu wilayah provinsinya termasuk Aceh ini adalah juga tempat bermukim para anggota DI. Ayah Ustad Khairul Ghazali adalah anggota DI yang tinggal di sekitar kota ini. Dari segi letak geografis, Medan berada dekat dengan perbatasan laut Selat Malaka yang menghubungkannya dengan Malaysia, negara tetangga tempat pelarian dan bermukim tokoh atau pengikut DI dan aktivis-aktivis Islam lain yang menolak asas tunggal Pancasila pada masa Presiden Soeharto. Di antara mereka adalah Ustadz Abu Bakar Ba'asyir dan Ustadz Abdullah Sungkar yang kemudian menjadi tokoh penting Jama'ah Islamiyah (JI) yang diduga terlibat banyak aksi teror di

¹⁶ Badan Pusat Statistik, Tabel Statistik, <https://sumut.bps.go.id/frontend/linkTabelStatistik/view/id/362>

tanah air.¹⁷ Dari Malaysia-lah Abdullah Sungkar mengatur rekrutmen anggota DI dan kemudian JI untuk dikirim belajar perang ke Afghanistan.¹⁸ Berbatasan dengan laut membuat Medan dan Sumatra Utara pada umumnya menjadi wilayah yang mudah bagi lalu lintas orang dan barang secara ilegal termasuk senjata api.¹⁹

Disamping itu, kedekatan wilayah dengan Aceh merupakan suatu bentuk 'keuntungan' lain bagi Medan. Walau bukan daerah konflik, hawa konflik Aceh bagi sebagian orang sangat terasa di Medan. Semangat perlawanan orang Aceh terhadap pemerintah pusat memberi pengaruh bagi semangat yang sama untuk mereka yang menolak sistem dan model pemerintahan yang berlaku saat ini. Mereka melawan sistem tersebut dan hendak menggantinya dengan sistem lain yang paling benar menurut keyakinan mereka. Untuk ini, Aceh menyumbang inspirasi.

Tentang dimensi perlawanan terhadap pemerintah pusat, Medan atau Sumatra Utara punya sejarahnya sendiri. Selain perlawanan oleh DI kepada Jakarta, Medan atau Sumatra Utara pada masa setelah kemerdekaan adalah salah satu tempat berlangsungnya konflik bersenjata antara pemerintah pusat dan daerah. Pemerintahan

¹⁷ Solahudin, *NII sampai JI*, hlm. 197,199; Adi Renaldi https://www.vice.com/en_id/article/nz8beg/meet-the-former-mujahideen-behind-indonesias-fight-against-terrorism,

¹⁸ Solahudin, *NII sampai JI*, hlm. 203.

¹⁹ <http://www.viva.co.id/berita/nasional/278628-senjata-di-aceh-selundupan-dari-selat-malaka>

Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) adalah contohnya. Dewan Gajah, suatu dewan daerah yang menentang pemerintah pusat di Jakarta di bawah pimpinan Kolonel Maludin Simbolon dibentuk di wilayah ini. Ini adalah bagian dari serangkaian perlawanan bersenjata daerah yang tergabung ke dalam PRRI. Singkatnya, Medan atau Sumatra Utara pada umumnya ditinjau dari berbagai aspek bukanlah tempat yang asing bagi pergolakan sosial dan politik yang sebagian diantaranya menimbulkan perlawanan fisik bersenjata dan konflik serius, baik yang didasari oleh kepentingan kekuasaan material maupun ideologis. Walau memang tidak 'sehebat' Jawa Barat yang terkenal sebagai pionir dalam gerakan perlawanan terutama yang bersumber dari radikalisme Islam, tempat lahirnya Darul Islam.

Walaupun fakta-fakta di atas tidak harus dipahami memiliki korelasi langsung secara mutlak dengan serangkaian tindakan terorisme di Medan dan bermukimnya pelaku atau simpatisannya di kota ini, namun fakta-fakta itu tidak dapat dikesampingkan sebagai faktor yang berkontribusi keadaan. Dengan demikian, seharusnya bukan suatu kejutan jika Medan yang secara umum adalah kota pluralis dan toleran adalah juga tempat bagi bermukimnya kelompok radikal, tempat teroris melancarkan serangan, lari, bersembunyi, dan ditangkap di sini. Hal ini juga tidak harus berarti bahwa faktor-faktor di atas menjadikan Medan sebagai alasan utama bagi bermukimnya para simpatisan atau pelaku teroris.

3. Pengingkaran, Kegamangan Bersikap, dan Kecenderungan Moderasi terhadap Kekerasan

Setelah melihat bagaimana kota Medan secara historis dan geografis bersinggungan dengan gerakan radikal dan terorisme, penting juga untuk melihat bagaimana pandangan pemerintah dan organisasi non-pemerintah, termasuk unsur organisasi agama, di kota ini secara sekilas memandang terorisme. Secara umum, semua responden tanpa sedikit pun keraguan menolak terorisme apa pun bentuknya. Bahwa tindakan tersebut dinilai keji dan bertentangan dengan ajaran Islam. Mereka mengutuk serangan yang menelan banyak korban masyarakat sipil. Tetapi, sikap penolakan terhadap bentuk-bentuk kekerasan yang dimotivasi oleh keyakinan agama ini tidak akan seragam jika dihubungkan dengan berbagai hal terkait: siapa pelaku, alasan/motivasi, *magnitude* ancaman, pencegahan, dan penindakan terhadapnya. Pertama, tidak semua responden sepakat bahwa tindakan pencegahan yang dilakukan aparat terhadap terduga pelaku terorisme atau yang diduga terlibat perbuatan terorisme sebagai suatu aksi yang nyata melawan terorisme. Masih ada yang meyakini bahwa pemberantasan terorisme itu rekaan aparat belaka. Penangkapan, pelumpuhan, atau penuntutan, dan penghukuman terhadap pelaku teroris tidak sepenuhnya meyakinkan sebagian responden bahwa hal itu nyata adanya.

Masih ada keyakinan bahwa terorisme adalah isu yang dibesar-besarkan oleh terutama aparat kepolisian

atau pemerintah. Ancamannya tidak sebesar yang dipublikasikan dan pelakunya masih diragukan apakah mereka dari kelompok Islam. Argumentasi yang disampaikan menyebutkan bahwa aparat memiliki beberapa kepentingan untuk memelihara isu terorisme ini. Penolakan dengan alasan ini bukan hal unik yang hanya ada di Medan, tetapi juga jamak ditemukan dalam masyarakat di Indonesia sebagaimana dapat terpantau di media sosial atau di situs-situs tertentu.²⁰ Ada kepercayaan, terorisme itu sandiwara aparat atau diciptakan oleh aparat untuk kepentingan politik tertentu dan guna keuntungan material. Sebagian di antaranya berpendapat: "Tidak ada teroris maka tidak ada program (pemberantasan) dan tidak ada BNPT."²¹ Ada juga keyakinan bahwa pelaku atau kelompok teroris itu bukan dari kelompok Islam. Alasannya sederhana, bahwa pelaku atau kelompok dimaksud tidak dikenal oleh kelompok-kelompok atau organisasi keagamaan di kota Medan seperti Nahdatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Alwashilyah, dan lain-lain atau kelompok mahasiswa atau kepemudaan agama seperti Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), dan lain-lain. Ada yang mencoba membuktikan bahwa terorisme itu ciptaan aparat belaka. Itu dilakukan

²⁰ <http://www.voaislam.com/read/politik-indonesia/2016/01/22/41830/pengamat-tindakan-teror-di-jakarta-merupakan-sandiwara-ciptaan-polisi/#sthash.6cZDguxa.dpbs>

²¹ Narasumber dari Badko HMI pada acara FGD di Medan.

dengan menghubungkan keyakinan tadi dengan fakta adanya beberapa terduga teroris dilumpuhkan dengan ditembak mati sehingga yang bersangkutan tidak dapat didengar keterangannya di pengadilan. Keterangan yang menurut pandangan ini akan merugikan aparat. Secara retorik Masri Sitanggang, tokoh yang menjadi pengurus MUI kota Medan, dalam *blog*-nya bertanya:

“Saya khawatir, kalau-kalau mental penjajah sedang merasuki banyak anak bangsa ini sehingga pikirannya bisa ketakutan dengan jihad dan menganggapnya sebagai teror. Saya khawatir, negeri ini baru merdeka secara fisik saja! Sebab, adalah pertanyaan besar mengapa di negeri berpenduduk muslim terbesar di dunia ini ada “teroris”: siapa meneror siapa?”²²

Penggunaan istilah terorisme dipandang tidak netral dan bias kepentingan penguasa. Sejalan dengan keyakinan bahwa terorisme itu tidak nyata, rekaan, atau setidaknya dibesar-besarkan, penggunaan istilah terorisme juga mengandung nuansa kepentingan. Pemilihan istilah itu seperti hendak mengaburkan makna dan alasan mengapa tindakan yang disebut teror itu terjadi. Menurut pandangan ini—seperti misalnya yang disampaikan oleh Masri Sitanggang—pelaku teroris harus disalahkan hanya dengan melihat tindakan itu semata (*an sich*) tanpa

²² Masri Sitanggang, “Ada Apa dengan Jihad?!” <https://sisipandangmasrisitanggang.wordpress.com/2016/07/29/ada-apa-dengan-jihad/>

berupaya mencari tahu mengapa tindakan itu terjadi.²³ Dengan menggunakan istilah terorisme, kita terpaksa menyalahkan orang itu atas tindakan terornya dan berhenti mencari tahu mengapa tindakan itu terjadi. Hal ini karena jika setelah kejadian kemudian diteruskan dengan pertanyaan mengapa kejahatan itu dilakukan, maka apologi atau moderasi terhadap kejahatan dimaksud akan muncul dan penguasa tidak akan menghendaknya. Sebab ada keyakinan bahwa terorisme lahir dari kebijakan dan praktik ketidakadilan yang diyakini terus berlangsung.

Penguasa memilih istilah itu dalam rangka menghindari sikap apologi ini yang akan bisa membawa tiga konsekuensi yang tidak diinginkan. *Pertama*, kejahatan terorisme seolah akan mendapat justifikasi atau setidaknya dimoderasi. *Kedua*, justifikasi kejahatan akan melemahkan upaya pemberantasannya. *Ketiga*, apologi atau apalagi justifikasi terhadap tindakan terorisme—yang pada umumnya dapat dikatakan sebagai aksi perlawanan terhadap otoritas pemerintah dan aparat—akan dapat membawa justifikasi perlawanan dan delegitimasi terhadap pemerintah itu sendiri. Tentu, pemerintah di mana pun—baik yang demokratis apa lagi yang bukan demokratis—tidak akan membiarkan dirinya di dejustifikasi atau didelegitimasi oleh siapa pun, apalagi oleh teroris atau kelompok yang mendukungnya.

Di samping untuk menghindari munculnya sikap moderasi apalagi apologi terhadap kejahatan ini,

²³ Wawancara dengan DR. Ir. Masri Sitanggang.

pemerintah sekaligus ingin juga menggalang dukungan pemberantasan terhadap mereka. Namun, di sisi lain penggunaan terminologi ini bagi kalangan tertentu adalah manifestasi kepentingan penguasa. Kepentingan agar masyarakat tidak mempertanyakan mengapa terorisme lahir. Hal ini karena bagi sebagian, munculnya terorisme diyakini sebagai akibat dari kebijakan dan praktik ketidakadilan yang dijalankan pemerintah, langsung atau tidak dan disadari atau tidak.

Perbedaan ketiga dalam memandang terorisme ini menyangkut motivasi. Terhadap fakta bahwa terorisme itu nyata, perbedaan pandangan dapat muncul dari motivasi yang melahirkan perbuatan itu. Seperti yang telah disebutkan, bagi sebagian kalangan, munculnya terorisme karena persepsi kebijakan dan praktik penguasa yang tidak adil. Dimensinya luas mulai dari ekonomi, politik, dan sosial. Bagi kalangan ini, terorisme adalah reaksi atas ketidakadilan itu. Andaikan ini adalah jawaban, maka jawaban ini tentu bukanlah jawaban tunggal. Ada alasan lain yang mungkin paling tepat yang secara langsung mendorong terjadinya tindakan kekerasan itu yakni motivasi yang didasarkan pada pemahaman atas ajaran agama.

Bagi kalangan ini sulit menerima bahwa perbuatan terorisme sebagaimana publik telah saksikan adalah juga dipicu atau didorong oleh keyakinan agama ini. Setidaknya ada dua penjelasan terhadap penolakan ini, dua penjelasan yang saling terkait: ketidaktahuan

(*ignorance*) dan pengingkaran (*denial*). Ketidaktahuan berhubungan dengan keyakinan bahwa terorisme hanyalah rekaan atau lahir dari kreasi penguasa. Teroris—dengan demikian—tidak pernah ada sehingga tidak relevan membicarakan motivasi yang bersifat keagamaan yang mendasari perbuatan itu. Kalaupun ada, alasan yang relevan untuk dibincangkan adalah motivasi dari penguasa yang mengkreasi mereka.

Aspek berikutnya adalah pengingkaran bahwa pemahaman ajaran dapat membuat orang berbuat keji. Kerelaan menerima fakta bahwa ajaran agama di tangan pihak tertentu bisa berwujud tindakan yang mengerikan memang tidak akan mudah diterima. Ini menyangkut gugatan terhadap keyakinan bahwa agama adalah jalan damai dan ketenangan. Tidak mungkin agama atau pemahaman agama akan melahirkan pembunuhan tanpa pandang bulu. Suatu bentuk perbuatan yang nyata-nyata bertentangan atau bertolak belakang dengan ajaran yang paling fundamental dari agama, yakni ajaran cinta kasih dan pengayoman. Penolakan demikian bisa terjadi karena mencampurkan antara ajaran agama dan pemahaman subjek terhadap ajaran. Dengan demikian, muncul anggapan bahwa orang beragama pasti baik karena agama itu adalah kebaikan. Jika ada orang yang berbuat kejahatan karena didasari agama atau ajaran agama pasti itu bohong atau rekayasa. Padahal, agama dan pemahaman terhadapnya adalah dua hal yang berbeda sebagaimana

perbedaan antara *the text and the reader*.²⁴ Teks bisa selalu benar atau setidaknya netral, tetapi yang keliru itu adalah yang memahaminya.

Sikap penolakan bisa muncul dilatarbelakangi pandangan 'kami' yang berhimpun ke dalam suatu identitas agama dan 'mereka' yang berbeda agama atau berbeda pandangan agama di mana 'kami' memosisikan diri sedang dimusuhi oleh 'mereka'. Dengan demikian, setiap peristiwa buruk yang terjadi dan dilakukan oleh kelompok atau individu yang diasosiasikan dengan 'kami' tetapi tidak dikenal oleh 'kami', pasti adalah pekerjaan 'mereka' untuk memojokkan 'kami' atau setidaknya mencari keuntungan dari peristiwa ini.

Jika begini kondisinya apa yang harus dilakukan? Apakah institusi, program, strategi, dan pendekatan yang selama ini telah dijalankan telah meng-*address* permasalahan ini? Adakah hasil yang dapat diverifikasi? Respons singkat terhadap pertanyaan tersebut di atas adalah pemerintah sebagai pengambil kebijakan dan pihak-pihak yang peduli terhadap persoalan ini harus mampu mengubah pandangan bahwa teroris tidak hanya berbahaya dan patut dilumpuhkan, tetapi juga harus menerima bahwa agama dapat sebagai dasar tindakan terorisme dan bertindak meng-*address* persoalan ini dari sisi agama. Tindakan keras kepada teroris dari kelompok agama harus dilepaskan dari perang terhadap kelompok

²⁴ Walaupun harus diakui juga ada pandangan yang beranggapan mustahil memisahkan antara ajaran dan pemahaman terhadapnya.

agama tertentu sembari mengupayakan dukungan secara sungguh-sungguh dari kelompok agama ini. Setelah persepsi tersebut berubah, implementasi program kontra-radikalisme dan deradikalisasi diyakini akan lebih berhasil jika dilakukan tepat sasaran dan dengan manajemen yang baik.

4. Medan dan Program Kontraradikalisme dan Deradikalisasi

Jika menggunakan pendekatan pemecahan masalah (*problem solving*) dalam melihat lahirnya program seperti program kontraradikalisme dan deradikalisasi, kedua program yang saling terkait ini dibentuk untuk memecahkan masalah yang lahir dari pemahaman terhadap akar penyebab munculnya masalah. Dengan cukup melihat penggunaan istilah yang dipakai, dapatlah diduga akar masalah terorisme menurut alur berpikir itu adalah keyakinan bersifat radikal yang membawa subjek melakukan tindakan radikal dengan kekerasan. Jika alur logika ini benar, penting juga untuk mengajukan sebuah pertanyaan: Mengapa orang yang berpikir radikal tidak selalu melakukan perbuatan radikal apalagi dengan kekerasan? Bahkan dapat diyakini mereka yang berpikir radikal hanya sebagian kecil yang bergabung dengan kelompok teroris dan melakukan tindakan terorisme. Apa faktor lain yang akhirnya mendorong orang yang memiliki pandangan atau ideologi radikal bersumber dari

keyakinan agama melakukan atau terlibat dalam tindakan kekerasan seperti terorisme? Jika ini berhasil diidentifikasi apakah program kontraradikalisme dan deradikalisasi telah meng-*address* aspek ini? Kontraradikalisme dan deradikalisasi untuk mencegah terorisme berangkat dari pemahaman dasar bahwa terorisme disebabkan oleh faktor penting pemahaman keagamaan tertentu. Suatu model pemahaman keagamaan yang eksklusif yang lahir dari pemahaman terhadap teks kitab suci dan pemahaman sejarah perjalanan dakwah nabi.²⁵

Untuk mengeksekusi pekerjaan besar penanggulangan terorisme ini tidak cukup dilakukan oleh institusi yang sudah ada seperti kepolisian dan badan intelijen. Karena itu, dibentuklah suatu institusi baru yang diberi tugas khusus menangani penanggulangan teroris. Badan itu adalah Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Tugas BNPT adalah merumuskan kebijakan yang kemudian diturunkan dalam bentuk program dan strategi untuk menjalankan dan mencapai tujuan kebijakan. Ketika institusi yang telah ada sebelumnya juga bertanggung jawab melakukan pemberantasan terorisme, badan yang baru bertugas untuk mengoordinasikan upaya itu agar tidak saling tumpang tindih dan terjadi benturan kepentingan antarlembaga.²⁶ BNPT juga memiliki kepanjangan tangan di daerah. Namun, tugas dan fungsinya tidak men-

²⁵ Pembahasan latar belakang sejarah radikalisme Islam dapat membaca Solahudin *NII sampai JL*.

²⁶ Penjelasan singkat tentang tugas BNPT dapat dilihat di <https://www.bnpt.go.id/tentang-bnpt>

duplikasi tugas dan fungsi BNPT sepenuhnya, melainkan hanya sebagai forum koordinasi. Forum itu disebut Forum Koordinasi Penanggulangan Terorisme (FKPT). Untuk provinsi Sumatra Utara, FKPT berada di kota Medan. Namun, seperti FKPT lainnya, mandat FKPT Sumatra Utara yang wilayahnya mencakup Medan tidak sampai menyiapkan dan mengeksekusi program pemberdayaan ekonomi sebagai bagian dari pelaksanaan program kontraradikalisme dan deradikalisasi bagi pemuda di kota ini. Walaupun demikian, penting untuk terlebih dahulu melihat bagaimana kondisi ekonomi makro kota Medan termasuk kondisi kelompok pemudanya secara sekilas.

4.1. Kondisi Ekonomi Makro Medan

Program pemberdayaan ekonomi melalui penyiapan keahlian atau dukungan berusaha adalah salah satu upaya untuk pencegahan radikalisme dengan kekerasan seperti terorisme. Pemberdayaan ekonomi menjadi sangat relevan jika dilakukan pada tempat dan orang yang memang sangat membutuhkan. Di Medan, angka pengangguran tahun 2015 meningkat jika dibandingkan tahun sebelumnya. Menurut survei tahun 2015, BPS Medan mencatat jumlah pengangguran sebesar 108.243 orang dari jumlah angkatan kerja 984.037 orang. Secara umum, tingkat pengangguran sebesar 11%.²⁷ Sementara pada

²⁷ Badan Pusat Statistik Medan, "Kota Medan Dalam Angka 2016", hlm. 71.

tahun sebelumnya, jumlah pengangguran sebesar 92.437. Padahal, jumlah pertumbuhan rata-rata jumlah penduduk antara tahun 2000-2010 hanya 0,97%.²⁸ Jika diasumsikan ada pertumbuhan penduduk sebesar 1% saja, kenaikan pengangguran itu tinggi. Walaupun demikian, tingkat laju pertumbuhan ekonomi kota ini tahun 2016 sebesar 6,26% meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 5,74%.²⁹ Jika melihat angka pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2015 dan 2016 yang masing masing sebesar 4,88% dan 5,02%,³⁰ pertumbuhan ekonomi kota Medan masih di atas angka pertumbuhan nasional.

Sementara itu, tingkat pengangguran terbuka Provinsi Sumatra Utara pada Februari 2015 sebesar 6,39% dan Agustus 2015 6,71%. Secara nasional, pada Februari 2015 angka pengangguran sebesar 5,81% dan 6,18% di bulan Agustus.³¹ Jika dibandingkan angka pengangguran kota Medan ini dengan angka pengangguran Sumatra Utara dan angka pengangguran nasional, jelas terlihat angka orang tidak bekerja di Medan jauh lebih besar. Sementara itu, secara nasional, tingkat inflasi tahun 2015, 2016, 2017 sampai Oktober secara berurutan adalah 3,35%, 3,02%, dan

²⁸ Badan Pusat Statistik Medan, "Kota Medan Dalam Angka 2016", hlm. 498.

²⁹ Badan Pusat Statistik Medan, "Kota Medan Dalam Angka 2017", hlm. 457.

³⁰ Badan Pusat Statistik Berita Resmi Statistik No. 16/02/Th. XX, 06 Februari 2017 https://www.bps.go.id/website/brs_ind/brsInd-20170208123344.pdf

³¹ Badan Pusat Statistik RI <https://www.bps.go.id/linkTabelStatistik/view/id/981>

2,67%.³² Sementara tingkat inflasi Medan pada September 2017 sebesar 1,08%.³³ Dari sini terlihat bahwa angka inflasi kota Medan masih jauh di bawah nasional. Walaupun demikian secara umum, kondisi makro ekonomi Medan tidaklah cemerlang jika dibandingkan dengan angka rata-rata nasional.

4.2. Intervensi Ekonomi Bagi Pemuda Penting

Dari data di atas dapat dilihat bahwa walau angka pertumbuhan ekonomi kota ini relatif lebih tinggi dari angka pertumbuhan nasional, tetapi angka tersebut belum-lah cukup untuk menurunkan tingkat pengangguran di kota Medan. Jika kelompok pemuda adalah kelompok yang membentuk seperempat dari jumlah penduduk dan membentuk sekitar setengah jumlah angka penduduk usia produktif, angka-angka ini tentu juga sangat me-mengaruhi kelompok penduduk yang berusia antara 16-30 tahun. Dengan demikian, jika ada program pemberdayaan ekonomi kepada kelompok ini secara masif dan berkelanjutan maka dapat dipastikan akan mengubah angka-angka statistik tersebut di atas secara signifikan.

Dari aspek pemberantasan terorisme, besarnya jumlah pemuda dan tingginya angka pengangguran bukanlah angka yang menggembirakan. Jika dipercaya bahwa

³² Badan Pusat Statistik RI <https://www.bps.go.id/linkTabelStatistik/view/id/907>

³³ Badan Pusat Statistik Sumatra Utara Perkembangan Indeks Harga Konsumen/Inflasi No. 55/10/12/Th. XX, 02 Oktober 2017 hlm. 2.

salah satu sebab munculnya terorisme dan berulangnya tindakan tersebut disebabkan oleh persoalan ekonomi, maka angka-angka yang tidak sehat ini harus dibenahi. Hal ini dikarenakan memang upaya pembangunan ekonomi di kota Medan dan juga di tempat-tempat lain, dilakukan dan menjadi tanggung jawab SKPD tertentu. SKPD di bidang ekonomi dan yang bertanggung jawab di bidang tersebut tidak mengeksekusi program pembangunannya hanya dalam kerangka pemberantasan terorisme, tetapi tentu dalam rangka pembangunan ekonomi secara luas.

BNPT dan FKPT harus melihat kondisi makro ekonomi kota Medan sebagai dasar untuk bertindak dan bekerja sama dengan pemerintah daerah kota. Dari data itu terlihat jelas ada lahan intervensi yang harus segera digarap oleh institusi tingkat pusat dan daerah sesuai dengan tugasnya masing-masing. Mengingat besarnya jumlah kelompok pemuda di kota ini, kedua belah pihak perlu menyusun skala prioritas. Patut diyakini bahwa BNPT, FKPT, atau kelompok intelijen telah memiliki peta situasi kelompok pemuda yang rentan terhadap gagasan radikalisme dengan kekerasan berikut kondisi sosial ekonominya dan kebutuhan intervensi seperti apa yang mereka butuhkan. Dari data tersebut, pemerintah daerah kota melalui SKPD terkait dapat terjun melakukan intervensi pemberdayaan ekonomi kepada kelompok-kelompok pemuda yang paling rentan sebagai prioritas utama.

Jika mereka tidak memiliki data ini, prioritas pertama yang harus dilakukan adalah membuat pemetaan

kelompok pemuda rentan terhadap paparan radikalisme dan mengidentifikasi kondisi perekonomiannya. FKPT dapat bekerja sama dengan BPS Sumatra Utara atau kota Medan untuk menyusun pemetaan ini. Lalu, dengan berpedoman pada pemetaan ini, intervensi ekonomi kepada kelompok pemuda yang membutuhkan dapat dilakukan.

4.3. Kondisi Kepemudaan Kota Medan

Sebagaimana layaknya kota-kota lain di Indonesia, Medan juga memiliki banyak organisasi kepemudaan seperti organisasi kemahasiswaan dan Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP). Walaupun demikian, banyak anggota dari organisasi pemuda ini terutama OKP yang tidak dapat dikategorikan sebagai kelompok usia pemuda menurut Undang-Undang No. 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan. Menurut Pasal 1.1 UU ini, yang dimaksud sebagai pemuda adalah mereka yang berusia 16 sampai 30 tahun. Dari pengertian pemuda ini jelas bahwa mereka termasuk dalam usia produktif karena menurut statistik, kelompok usia produktif atau kelompok usia angkatan kerja adalah mereka yang berumur 15 sampai 64 tahun. Secara nasional, menurut survei ekonomi nasional (Susenas) tahun 2016, kelompok pemuda ini membentuk sekitar seperempat dari seluruh jumlah penduduk Indonesia yang berjumlah 62,06 juta dari 257,9 juta penduduk Indonesia.³⁴

³⁴ Badan Pusat Statistik, "Statistik Pemuda Indonesia 2016", hlm. v.

Di Sumatra Utara sendiri—masih dari data yang sama—jumlah pemuda sekitar 26,11%. Turun dari tahun sebelumnya, tahun 2015, yang jumlahnya, 26,33%. Jika menggunakan data ini sebagai perbandingan, dapatlah juga ditarik kesimpulan bahwa jumlah pemuda kota Medan kurang lebih sama dengan jumlah pemuda secara nasional, yakni sekitar seperempat dari total jumlah penduduk Medan. Kelompok seperempat dari total penduduk Medan dimaksud dapat dikategorikan ke dalam dua bagian, yakni kelompok pemuda yang masih belajar (kelompok pelajar dan mahasiswa) dan kelompok pemuda tidak lagi sekolah. Kelompok terakhir ini dapat pula dibagi menjadi tiga golongan, yaitu kelompok pemuda pengangguran, kelompok pemuda bekerja, dan kelompok pemuda mengurus rumah tangga.

Kelompok pemuda yang masih sekolah di Provinsi Sumatra Utara, untuk wilayah perkotaan terdapat 28,44%, yang tidak lagi bersekolah terdapat 71,23%, dan sisanya tidak pernah sekolah sejumlah 0,32%.³⁵ Karena Medan adalah perkotaan, maka angka ini bisa dijadikan dasar. Dengan demikian, sekitar angka itu pulalah jumlah angka persentase pemuda kota Medan dari segi tingkat partisipasi sekolah pada 2016. Dari sisi kegiatan dalam seminggu, pada 2016, di perkotaan Sumatra Utara ada sekitar 9,93% pemuda pengangguran, yang bersekolah sejumlah 18,84%, mengurus rumah tangga sejumlah 17,12%. Lalu, ada sekitar 42,80% pemuda di

³⁵ Badan Pusat Statistik, "Statistik Pemuda Indonesia 2016", hlm. 182.

perkotaan Sumatra Utara bekerja dan ada sekitar 4,96% jumlah pemuda di perkotaan Sumatra Utara yang tidak masuk di dalam empat kategori itu. Karena itu, dapatlah dikatakan bahwa sekitar angka itu pulalah persentase pemuda menurut kegiatan dalam seminggu di kota Medan. Dibandingkan dengan angka nasional, secara umum, angka ini lebih jelek. Angka persentase nasional pemuda bekerja sebesar 51,86% dan angka persentase nasional pemuda pengangguran sebesar 8,85%.³⁶ Berdasarkan angka-angka ini kondisi pemuda kota Medan tidak menggembirakan jika dibandingkan dengan angka rata-rata nasional.

Sementara itu, dari segi organisasi pemuda, menurut Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga Medan, di kota ini terdapat sekitar 60 organisasi kemasyarakatan pemuda. Dari jumlah tersebut, yang aktif ada sekitar 40 saja. Mereka terdiri dari organisasi kepemudaan berbasis atau berafiliasi kepada agama seperti: Gerakan Pemuda Anshor, Pemuda Muhammadiyah, Pemuda Katolik, dan lain-lain. Organisasi kepemudaan lainnya berbasis nasionalis seperti Banteng Muda Indonesia. Organisasi kepemudaan berbasis kepartaian seperti Barisan Muda PAN, Gema Keadilan, dan lain-lain. Untuk organisasi kepemudaan berbasis profesi orangtua seperti Generasi Muda Forum Komunikasi Putra-Putri Purnawirawan dan Putra-Putri TNI-Polri. Sebagian besar organisasi ini

³⁶ Badan Pusat Statistik, "Statistik Pemuda Indonesia 2016", hlm.182.

merupakan organisasi cabang/wilayah yang berpusat di Jakarta atau di tempat lain. Di Medan, menurut pemantauan penulis, organisasi kepemudaan yang paling terkenal adalah Pemuda Pancasila (PP) dan Ikatan Pemuda Karya (IPK). Baliho, spanduk, pos, kendaraan berlabel atau bercat, dan baju seragam dua organisasi ini paling sering terlihat di kota Medan. Dan seperti yang disinggung di atas, anggota dan pengurus organisasi ini banyak yang tidak lagi dapat dikategorikan sebagai pemuda. Semua organisasi kemasyarakatan pemuda di kota Medan ini secara hukum bernaung di bawah Komite Nasional Pemuda Indonesia Medan.

Terkait dengan program pemberdayaan ekonomi pemuda dalam rangka mencegah terorisme, sepanjang informasi yang penulis peroleh dalam diskusi kelompok terbatas yang juga dihadiri oleh unsur KNPI Medan, tidak terungkap adanya program ini yang dilakukan oleh OKP di Medan.

Dalam wawancara dengan Ketua Badko HMI Sumatra Utara, Septian Fujiansyah Chaniago, mengatakan bahwa memang terorisme bertentangan dengan Islam. Tetapi, Badko HMI sendiri belum pernah punya program yang dibuat khusus untuk penanggulangan terorisme ini. Respons organisasi ini baru sebatas membuat diskusi dan seminar yang membahas tentang terorisme.³⁷ Dalam acara diskusi kelompok terfokus yang dihadiri oleh

³⁷ Wawancara dengan Ketua Badan Koordinasi Wilayah Sumatra Utara HMI, Septian Fujiansyah Chaniago.

organisasi Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Medan, Pemuda Muhammadiyah, Pemuda Anshor, dan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) juga tidak terungkap adanya program yang dibuat oleh organisasi-organisasi pemuda ini untuk memberikan pemberdayaan kepada kelompok masyarakat pemuda sesuai organisasinya masing-masing dalam rangka menutup salah satu celah terjadinya terorisme. Walau semua menyadari terorisme itu berbahaya, bertentangan dengan Islam, dan salah satu faktor kemunculannya karena sebab ekonomi.

Dari sisi pemerintah, pemerintah punya perhatian sendiri dengan pemuda. Hal ini antara lain dilakukan dengan membentuk kementerian yang mengurus pemuda yakni Kementerian Pemuda dan Olahraga. Kementerian ini mempunyai suatu kedeputian yakni Deputi Pemberdayaan Pemuda yang bertanggungjawab untuk antara lain meningkatkan kapasitas dan kompetensi pemuda untuk membentuk pemuda mandiri.³⁸ Cakupan kerja pemberdayaan pemuda ini bersifat nasional tidak terkecuali kota Medan. Sementara itu, walau tidak langsung terkait—namun berhubungan dengan pemberdayaan ekonomi pemuda—Kementerian Pemuda dan Olahraga telah pula memberikan beasiswa S-2 kepada pemuda yang aktif di bidang kepemudaan. Pemuda di Sumatra Utara termasuk Medan juga mendapatkan kesempatan beasiswa tersebut. Universitas Sumatra Utara (USU) di Medan untuk tahun 2017 mendapat kuota se-

³⁸ <http://deputi1.kemencpora.go.id/statik/tupoksi>

banyak 30 orang untuk menerima mahasiswa dengan menggunakan skema beasiswa ini.³⁹ Sementara di daerah baik di wilayah provinsi atau kabupaten/kota dibentuk SKPD yang bertanggung jawab untuk mengurus pemuda yakni Dinas Pemuda dan Olahraga. Namun, pemerintah kota Medan sendiri tidak memiliki program beasiswa khusus kepada kelompok pemuda apalagi yang diberikan dalam rangka sebagai bagian dari pemberdayaan kepada kelompok ini untuk terhindar dari bahaya terorisme. Singkatnya jumlah pemuda yang mendapatkan beasiswa karena kepemudaannya dari pemerintah masih sangat sedikit. Walaupun demikian, jumlah pemuda yang mendapat pendanaan untuk belajar dari program pemerintah yang lain juga tersedia seperti program beasiswa dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).

4.4 Pemerintah Kota/Daerah dan Program Kontraradikalisme dan Deradikalisasi

Dengan adanya persepsi terhadap terorisme dan kondisi ekonomi kota Medan sebagaimana disebutkan di atas, pertanyaan pokok yang kemudian muncul adalah: Bagaimana kota Medan merespons bahaya radikalisme dalam bentuk kekerasan atau terorisme ini? Sebelum membahas lebih jauh bagaimana Pemerintah Kota Medan sebagai bagian dari sistem pemerintahan di Indonesia merespons hal itu, perlu diingat bahwa negara Indonesia berdasarkan hukumnya telah membagi urusan

³⁹ <http://www.beasiswapascasarjana.com/2017/04/pendaftaran-beasiswa-s2-kemenpora.html>

pemerintahan sedemikian rupa yakni antara urusan pemerintahan pusat dan urusan pemerintahan daerah/kota. Pemerintahan daerah tidak punya urusannya sendiri, urusan pemerintahan daerah adalah urusan yang diurus bersama-sama antara keduanya. Dengan demikian, dalam memahami apa yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh kota Medan harus dilihat dari kerangka berpikir pembagian urusan pemerintahan ini sebagaimana diatur di dalam UUD 1945 dan UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagai penjabaran ketentuan pokok di dalam UUD.

Dari segi tugas pemerintahan, secara normatif fungsi pemerintah daerah atau kota adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat dalam lingkup wilayah daerah atau kotanya sebagaimana diatur di dalam UU Pemerintahan Daerah dimaksud. Dalam bahasa UU Pemerintahan Daerah ini, urusan pemerintahan daerah/kota hanyalah urusan pemerintahan yang bersifat konkuren yakni urusan yang dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah/kota. Urusan ini terbagi pula ke dalam dua bagian yakni urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan wajib terbagi lagi ke dalam urusan pelayanan dasar dan bukan urusan pelayanan dasar. Singkatnya, urusan pemerintahan daerah/kota yang bersifat wajib berupa pelayanan dasar adalah:

- a. pendidikan;
- b. kesehatan;
- c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat ; dan
- f. sosial.

Sementara urusan pemerintahan daerah/kota yang bersifat wajib tetapi bukan dalam bentuk pelayanan dasar adalah:

- a. tenaga kerja;
- b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. pangan;
- d. pertanahan;
- e. lingkungan hidup;
- f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- g. pemberdayaan masyarakat dan desa;
- h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- i. perhubungan;
- j. komunikasi dan informatika;
- k. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
- l. penanaman modal;
- m. kepemudaan dan olahraga;
- n. statistik;
- o. persandian;
- p. kebudayaan;
- q. perpustakaan; dan
- r. kearsipan.

Ada pula urusan pemerintahan pilihan yakni urusan yang wajib diurus oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah, yakni:

- a. kelautan dan perikanan;
- b. pariwisata;
- c. pertanian;
- d. kehutanan;
- e. energi dan sumber daya mineral;
- f. perdagangan;
- g. perindustrian; dan
- h. transmigrasi.

Sementara itu, urusan pemerintah pusat yang tidak dibagi ke daerah dalam hubungannya dengan otonomi daerah adalah:

- a. politik luar negeri;
- b. pertahanan;
- c. keamanan;
- d. yustisi;
- e. moneter dan fiskal nasional; dan
- f. agama.

Menimbang *magnitude*, skala ancaman, kekuatan, dan kemampuan, sifat gerakan, serta keluasan jaringan dan pelaku, terorisme adalah ancaman keamanan negara, berbeda dengan bentuk gangguan ketertiban seperti kriminalitas dan isu perlindungan masyarakat. Dengan melihat jenis-jenis pembagian urusan antara pemerintah pusat dengan pemerintahan daerah/kota, dapat diketahui

bahwa urusan pemberantasan dan penanggulangan terorisme adalah urusan keamanan negara yakni urusan yang diurus oleh pemerintah pusat yang bersifat absolut yang tidak dibagi dengan pemerintahan daerah atau kota. Dengan demikian, bukanlah tanggung jawab pemerintah daerah kota Medan secara langsung untuk mencegah serangkaian ledakan bom dan serangan yang dilakukan oleh teroris di kota ini. Hal tersebut merupakan tanggung jawab pemerintah pusat yang dilakukan melalui institusi yang cakupan yurisdiksinya bersifat nasional seperti Kepolisian, Badan Intelijen Negara, dan BNPT baik yang memiliki institusi di daerah maupun yang tidak, serta sistem peradilan pidana.

Berdasarkan prinsip pengalokasian anggaran dan belanja daerah yang didasarkan pada beban urusan yang menjadi tanggung jawab masing-masing daerah/kota dan pemerintah pusat, maka dengan jelas dapat pula diketahui tidak ada alokasi anggaran yang akan dibuat oleh pemerintah daerah/kota untuk penanggulangan teroris, baik itu yang bersumber dari dana pendapatan transfer (dana yang diberikan oleh pemerintah pusat ke daerah) apalagi dari dana pendapatan asli daerah. Pendanaan untuk penanggulangan terorisme adalah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Jika pemberantasan teroris dapat dikelompokkan ke dalam beberapa bagian seperti yang telah diintrodusir di bagian awal: sebelum, pada saat, dan setelah kejadian, dapatkah pemerintah daerah ikut berperan? Seperti yang

diketahui, program pemberdayaan ekonomi masuk ke dalam bagian cakupan program kontraradikalisme dan deradikalisasi, apakah urusan pemberdayaan ekonomi terhadap kelompok muda dan keluarga atau mantan napi teroris (napiter) juga terkait dengan urusan keamanan sehingga pemerintah daerah/kota tidak perlu ikut mengurusnya? Tidakkah dalam program itu terkandung atau setidaknya beririsan dengan urusan pelayanan dasar seperti pendidikan dan sosial, juga urusan yang non-pelayanan dasar seperti tenaga kerja, koperasi/usaha kecil dan menengah.

Pengamatan langsung di lapangan menunjukkan bahwa urusan terorisme dengan segala hal yang terkait seperti tindakan preventif dalam bentuk deradikalisasi dan kontraradikalisme yang antara lain dapat berupa upaya pemberdayaan pemuda keluarga atau mantan napi teroris tidaklah masuk ke dalam urusan pemerintah daerah/kota, dalam hal ini pemerintah kota Medan. Hal itu dapat diketahui dari wawancara yang dilakukan dengan semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang terkait dengan urusan dimaksud. Dari hasil wawancara itu ditemukan tidak satu pun SKPD memiliki program khusus terkait terorisme seperti deradikalisasi dan kontraterorisme. Apalagi dilakukan dalam bentuk pemberdayaan ekonomi bagi kaum muda dan keluarga dari mantan napi teroris atau mantan napi teroris itu sendiri.

Walaupun demikian, ini tidak berarti bahwa semua SKPD sama sekali tidak bersinggungan dengan dimensi pencegahan teroris ini. Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) kota Medan misalnya, adalah SKPD yang portofolio—atau biasa dikenal dengan sebutan tugas dan fungsi—adalah mengupayakan peningkatan bidang ideologi, wawasan kebangsaan, kewaspadaan, politik dalam negeri, ketahanan seni, budaya, agama, dan ekonomi dalam masyarakat. Dengan demikian, badan ini bertanggung jawab dalam ikut merumuskan kebijakan dan pelaksana teknis di daerah dalam bidang kewaspadaan nasional dan penanggulangan konflik yang berlatar belakang ideologi termasuk ekonomi. Hal ini seperti yang lazim disepakati dalam studi tentang akar masalah munculnya terorisme antara lain disebabkan pertentangan dan upaya pemaksaan ideologi dan kesenjangan ekonomi. Badan Kesbangpol Medan memiliki satu bagian dalam struktur organisasinya yang bernomenklatur penanganan konflik dan kewaspadaan. Bagian ini bertanggung jawab dalam isu penanganan konflik sosial, termasuk terorisme. Diakui juga bahwa kemunculan terorisme bisa dipicu dari faktor ekonomi. Namun, Kesbangpol belum secara khusus merumuskan kebijakan dan melakukan langkah-langkah teknis dan menggunakan sumber dayanya untuk diarahkan dalam menanggulangi kejahatan terorisme, walau tentu Kesbangpol tidak akan terlibat langsung dalam merumuskan program pemberdayaan ekonomi. Namun, diakui oleh instansi ini, terorisme dapat menimbulkan

konflik sosial dan kemunculannya perlu diwaspadai sehingga perlu diantisipasi secara dini dan tuntas.

Dengan demikian, SKPD ini sedikit banyak akan bersentuhan dengan upaya yang sejalan dengan pemberantasan terorisme seperti deradikalisasi dan kontra-terorisme karena sosialisasi dan pengimplementasian wawasan kebangsaan bertujuan untuk memantapkan pemahaman masyarakat akan cinta tanah air dan menjalankan kehidupan bernegara dan bermasyarakat berdasarkan falsafah dan fondasi bangsa Indonesia yakni Pancasila dan UUD. Sementara kewaspadaan nasional bertujuan untuk memberikan penyadaran kepada masyarakat tentang anasir-anasir yang dapat mengancam keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jika hal ini berhasil dilaksanakan, langsung maupun tidak langsung persis sejalan dengan tujuan deradikalisasi dan kontraterorisme karena radikalisme dan terorisme bertentangan dengan falsafah bangsa dan UUD 1945, yang dapat mengancam keberlangsungan dan eksistensi negara ini.

Demikian juga halnya dengan Dinas Koperasi dan UKM dan Dinas Tenaga Kerja. Dinas Koperasi dan UKM dibentuk untuk membina serta mengembangkan koperasi dan usaha kecil dan menengah termasuk membantu dan mendampingi mereka mendapatkan fasilitas pembiayaan atau permodalan bagi usaha bisnis koperasi dan usaha kecil dan menengah. Sementara itu, Dinas Tenaga Kerja kota Medan ini dibentuk untuk, antara lain, menjalankan

fungsi merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis pada bidang ketenagakerjaan seperti penanggulangan masalah pengangguran, ketenagakerjaan, hubungan industrial, pengawasan perlindungan kerja, tenaga kerja asing, pelatihan kerja, dan jaminan sosial ketenagakerjaan.

Menghilangkan pengangguran dan meningkatkan kualitas sumber daya para angkatan kerja serta membantu permodalan dan pendampingan usaha kecil adalah sejalan dengan program pemberdayaan ekonomi bagi kaum muda dan mantan napi teroris atau keluarganya. Ketiganya memiliki tujuan yang sama yakni agar mereka memiliki kegiatan dan pekerjaan sehingga dapat mandiri secara ekonomi. Ini tentu akan membantu mencegah kalangan ini ikut terlibat dalam gerakan atau kelompok fundamentalis yang mengimplementasikan kepercayaannya dengan kekerasan bersenjata.

Tetapi, kedua dinas ini tidak memiliki program khusus kepada kelompok pemuda apalagi kepada keluarga mantan napi atau mantan napi teroris untuk tujuan tertentu seperti deradikalisasi. Program, pelayanan, fasilitasi, dan bantuan yang diberikan oleh dinas ini bersifat terbuka bagi semua kalangan penduduk kota Medan tidak ada segmentasi khusus atau perlakuan istimewa kepada kelompok tertentu. Keluarga mantan napi teroris atau napi teroris sendiri dapat mengakses program, asistensi, pelayanan, atau fasilitas kedua dinas tadi tanpa perbedaan. Tidak ada praktik diskriminasi bagi keluarga atau mantan narapidana teroris untuk mendapatkan kesempatan kerja

dan berusaha. Juga kesempatan untuk mendapatkan pelatihan kerja sebelum dan sesudah bekerja. Syarat-syarat untuk mendapatkan status pencari kerja tidak menghambat keluarga teroris atau mantan napiter.

Untuk mendapatkan status pencari kerja ini, pemohon cukup memenuhi persyaratan seperti menyerahkan fotokopi KTP Medan dan ijazah. Pelamar bahkan tidak perlu menyertakan dalam permohonannya surat keterangan catatan kepolisian (SKCK). Jika pemohon tidak memiliki KTP Medan, pemohon cukup membawa surat domisili menetap di Medan yang dikeluarkan kelurahan di mana pemohon berdomisili. Hal yang sama juga berlaku bagi pemohon pelatihan kerja. Namun, keterangan ini perlu diberi catatan karena Disnaker belum pernah mendapat permohonan pencari kerja dari keluarga atau mantan napiter. Dengan demikian, perlakuan yang sama bagi setiap orang dalam mencari kerja dan mendapatkan kesempatan yang sama untuk mendapat manfaat dari pelatihan kerja belum terbukti kecuali secara normatif.

Tidak berbeda dengan SKPD yang telah disebut di atas, Dinas Sosial Kota Medan yang bertugas menjalankan program pemerintah baik pusat dan pemerintah daerah kota Medan seperti pelaksanaan jaminan dan perlindungan sosial, rehabilitasi sosial, dan juga pemberdayaan sosial belum membuat program yang khusus ditujukan bagi keluarga atau mantan teroris. Namun, seperti halnya dengan Dinas Koperasi, UKM dan Dinas Tenaga Kerja, Dinas Sosial membuka pelayanan bagi siapa saja

warga kota Medan tidak terkecuali mantan atau keluarga napi teroris. Walaupun demikian, sejauh ini, Dinas Sosial belum pernah mendapat laporan atau mencatat bahwa keluarga atau mantan napi teroris pernah mengajukan permintaan pelayanan terkait dengan tugas dan fungsi SKPD ini. Pertanyaannya adalah apakah memang para mantan atau keluarga mantan napi teroris belum pernah mengajukan permohonan atau pihak Dinas Sosial yang tidak menyadari bahwa mereka pernah memberikan pelayanan kepada kelompok ini.

Jika memang keluarga mantan napi teroris pernah mengajukan permohonan pelayanan dalam lingkup tugas Dinas Sosial dan mereka tidak mengetahuinya, ini adalah suatu indikasi positif bahwa keluarga mantan napi teroris tidak teridentifikasi keberadaannya, setidaknya oleh Dinas ini. Oleh sebab itu, mereka merasa privasi mereka terlindungi dan sekaligus membenarkan klaim dari SKPD ini bahwa pelayanan yang diberikan tidak membedakan. Tetapi, bisa jadi ini juga menunjukkan ada kelemahan dalam aspek identifikasi terhadap mereka yang berpotensi telah terpapar gerakan radikal. Namun, di sisi lain, jika memang mereka tidak datang memohon pelayanan padahal secara umum dapat diasumsikan mereka membutuhkan maka pertanyaannya adalah mengapa mereka enggan melakukannya? Ada asumsi bahwa mereka tidak akan mau datang meminta pelayanan demikian karena sifat tertutupan dan kepercayaan untuk tidak mudah meminta-minta kepada siapa pun,

apalagi kepada pemerintah yang eksistensinya mereka tolak atau setidaknya bukan 'teman' mereka. Jika memang kondisi yang terakhir ini benar adanya maka ada tantangan baru untuk mengintegrasikan mereka ke dalam masyarakat dan menjadikan pemerintahan kota adalah juga pemerintahan mereka.

Jika SKPD tidak terlibat langsung dengan urusan terorisme karena memang SKPD dimaksud memang dibentuk untuk menjalankan urusan konkuren yang menjadi urusan wajib pemerintahan daerah atau kota, bagaimana dengan Kantor Kementerian Agama (KKA) Kota Medan yang merupakan instansi vertikal pemerintah pusat? Dari studi lapangan diketahui bahwa KKA juga tidak terlibat langsung pada upaya pemberdayaan ekonomi kaum muda apalagi ikut menjalankan program yang berorientasi pada peningkatan keahlian agar kelompok muda ini dapat mandiri secara ekonomi dan akhirnya semakin terhindar dari radikalisme dan tindakan terorisme.

Walaupun demikian, KKA terlibat dalam ruang lingkup tugas dan wewenangnya sebagai perpanjangan tangan Kementerian Agama di daerah kota Medan. Dalam hubungan ini, KKA melakukan penyuluhan-penyuluhan keagamaan melalui penyuluh yang mereka rekrut secara khusus baik yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau non-PNS. KKA mampu menjangkau masyarakat untuk menyampaikan dakwah dan pesan keagamaan melalui penyuluh-penyuluhnya. Tujuannya antara lain

adalah memberikan pandangan keagamaan yang dapat bersifat kontranarasi terhadap radikalisme. Di samping itu, bersama-sama dengan SKPD di Kota Medan, KKA juga merupakan bagian dari upaya pencegahan dini tindakan kekerasan yang dipicu motif keagamaan. Menurut wawancara dengan pelaksana tugas, KKA biasa melakukan pertemuan koordinasi dengan aparat keamanan dan SKPD seperti Kesbangpol dan Kepolisian Resor Kota Medan. Dengan demikian, walau tidak secara khusus dan walau bukan merupakan bagian dari unsur pelaksana program deradikalisasi dan kontraradikalisme, KKA dapat juga berkontribusi dalam mewujudkan tujuan program deradikalisasi dan kontraradikalisme itu walau bukan lewat pemberdayaan ekonomi.

Pembahasan bagaimana kota Medan merespons radikalisme yang dilakukan dengan kekerasan tidak mungkin tidak harus melibatkan upaya Ustadz Khairul Ghazali pemilik dan pengelola Pesantren Al Hidayah, suatu pesantren yang didedikasikan khusus untuk anak-anak mantan napi teroris. Walau secara administratif pesantren ini terletak di luar kota Medan, tidak berarti ustadz Ghazali dan pesantrennya diabaikan dari pembahasan ini.

Salah satu problem utama pencegahan terorisme adalah bagaimana memutus mata rantai jaringan terorisme yang pada awalnya bermula dari keluarga. Dia mencontohkan beberapa pelaku terorisme memiliki anak yang juga teroris. Pesantren yang didirikannya tiada lain

bertujuan untuk memutus mata rantai itu. Soal memutus mata rantai agar keberlangsungan gerakan ini berhenti adalah soal yang sangat krusial. Di pesantrennya, Khairul Ghazali mendidik anak-anak mantan napi teroris untuk tidak mengikuti jejak ayahnya. Telah cukup banyak bukti yang menunjukkan bahwa sikap dan pandangan radikal ditularkan oleh orang dekat seperti orangtua kepada anaknya, guru kepada muridnya. Seharusnya, upaya yang dilakukan oleh Khairul Ghazali dikembangkan dan dilakukan di tempat-tempat lain yang memerlukan. Sejauh ini, menurut beliau baru, ada dua pesantren sejenis. Usaha membantu penyediaan tanah dan lokasi serta infrastruktur dilakukan oleh BNPT dan pemerintah pusat melalui instansinya di daerah.

Sesuai dengan apa yang telah disampaikan sebelumnya bahwa urusan terorisme adalah urusan pemerintah pusat maka tidak aneh bantuan terbesar yang didapatkan oleh pesantren ini berasal dari badan pemerintah pusat atau instansi pemerintah pusat di daerah seperti kepolisian dan TNI. Keterlibatan Pemerintah Daerah Deli Serdang atau kota Medan dalam membantu pesantren ini tampaknya minim. Bahkan, beberapa pejabat penting di SKPD di Kota Medan tidak mengenal dan mengetahui keberadaan pesantren ini walau liputan atau pemberitaan terhadap sekolah ini bukan sekali dua kali.

Pesantren yang mengasuh sekitar belasan anak laki-laki mantan napi teroris ini tidak terlalu berbeda dengan pesantren pada umumnya. Ada pendidikan umum dan

ada pendidikan agama. Dengan kata lain tidak ada kurikulum khusus yang dipakai. Namun, dalam materi pendidikan agama Islam, materi yang disampaikan adalah materi Islam yang damai. Ini ditunjukkan melalui penyampaian sejarah Islam dan norma Islam dalam al-Qur'an dan Hadis terkait ajaran kedamaian itu. Radikalisme yang melahirkan terorisme menurutnya berasal dari pemahaman agama yang keliru sehingga diperlukan kontranarasi bagi anak-anak mantan napi teroris yang sangat mungkin telah terpapar paham radikalisme dari ayah atau ibunya.

Tidak dapat dipungkiri juga bahwa anak-anak mantan teroris ini adalah korban walau tidak langsung. Dengan demikian, pesantren ini juga dibangun dalam rangka memberikan perlindungan bagi korban teroris ini. Dendam yang timbul akibat ayahnya ditembak atau ditindak oleh Detasemen Khusus 88 harus dipadamkan. Demikian juga perasaan traumatik atau tertekan karena ayahnya teroris harus dihilangkan. Walaupun demikian, jumlah siswa yang berhasil ditampung masih belasan orang dan semuanya adalah anak-laki-laki. Jumlah ini masih sangat sedikit jika dibandingkan dengan jumlah anak-anak mantan napi teroris. Juga, sejauh ini pesantren belum menerima santri dari anak-anak non mantan napi teroris. Hal ini dikarenakan pesantren yang melabel dirinya sebagai pesantren hafidz dan *life skill* masih disokong oleh dana pribadi pe ngelola. Dengan demikian, kemampuan finansial sekolah Islam ini masih sangat terbatas dalam mengembangkan

pendidikan dan menyediakan sarana belajar-mengajar bagi para murid dan gurunya. Di samping dengan bekal pendidikan agama dan modal tanah yang luas, pesantren ini diharapkan mampu memberikan pemberdayaan ekonomi bagi santrinya agar kelak semakin jauh terhindar dari paham radikalisme yang melahirkan terorisme. Walaupun demikian, pesantren ini hanya mendidik anak-anak yang belum dapat dikategorikan sebagai pemuda menurut UU Kepemudaan yang berlaku dan pemberdayaan ekonomi masih belum tergarap secara serius karena keterbatasan terutama sumber daya.

Penting sekali untuk mengetahui respons SKPD yang bertanggung jawab dalam bidang pendidikan di Sumatra Utara perihal bahaya terorisme ini. Dinas Pendidikan Sumatra Utara⁴⁰ juga tidak punya program khusus penanggulangan terorisme di kalangan pelajar setingkat sekolah menengah dalam lingkup yurisdiksinya. Walaupun demikian, Dinas Pendidikan menyampaikan pesan akan pentingnya menjaga negara kesatuan RI dan perdamaian dalam pertemuan-pertemuan koordinasi dengan para kepala sekolah menengah yang dilakukan setidaknya dua kali setahun. Juga, pesan disampaikan kepada guru-guru dalam pelaksanaan Kurikulum Tahun 2013. Kepada pelajar, pesan pentingnya NKRI dan sikap toleransi disampaikan melalui program ekstrakurikuler

⁴⁰ UU No.23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menentukan urusan pendidikan menengah adalah urusan pemerintahan daerah provinsi bukan pemerintahan kota atau kabupaten.

seperti pramuka. Program Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang banyak memberikan bekal akan keterampilan untuk hidup mandiri secara ekonomi diharapkan mampu mencegah mereka jatuh ke tangan radikalisme-terorisme. Terkait informasi bahwa acara pesantren kilat dapat menjadi sarana penyebaran radikalisme, pihak dinas beranggapan itu mungkin saja terjadi. Terhadap apakah pernah mendengar atau mengetahui anak-anak mantan napi teroris yang dirundung di sekolah atau tidak diterima bersekolah karena menjadi anak napi teroris atau mantan napi teroris, responden tidak pernah mendengar atau mengetahui hal demikian pernah terjadi.

Dinas yang paling bertanggung jawab dalam urusan pembinaan pemuda yakni Dinas Pemuda dan Olahraga juga tidak punya program khusus kepada kaum muda, keluarga, atau mantan napi teroris terkait upaya penanggulangan teroris atau upaya pencegahan berulangnya kasus teroris yang dilakukan oleh pelaku lama atau keluarganya. Mungkin karena Dinas Pemuda dan Olahraga dalam hal ini sekretaris dinas beranggapan bahwa pelaku teroris yang selama ini pernah melakukan aksinya di Medan bukanlah warga Medan melainkan pendatang atau pelaku yang berasal dari luar kota Medan. Padahal, menurut apa yang diketahui dan ditegaskan kembali oleh pihak Polrestabes Medan, pelaku teroris juga berasal dari kota ini. Pelaku serangan ke Mapolda Sumatra Utara yang dilakukan oleh Syawaludin Pakpahan misalnya

adalah warga kota Medan dengan etnis yang berasal dari provinsi Sumatra Utara.⁴¹

Walaupun Dinas tidak punya program khusus terkait penanggulangan terorisme, Dinas cukup punya akses kepada kaum muda terutama lewat organisasi kepemudaan. Dinas dapat menyampaikan pesan-pesan perdamaian kepada mereka. Persoalannya adalah apakah mereka juga dapat menjangkau kelompok-kelompok yang telah terpengaruh oleh paham radikal? Dengan karakter kelompok ini yang cenderung tertutup dan sebagian bahkan *underground*, usaha pendekatan kepada mereka bukanlah pekerjaan mudah. Apalagi, jika Dinas hanya melakukan pendekatan kepada kelompok atau organisasi-organisasi pemuda dan mahasiswa yang formal dan bersifat seremonial.

Sementara dari Pemerintah Kota Medan sendiri lewat Sekretaris Daerah (Sekda) memang menyadari bahwa masalah kesenjangan ekonomi dapat mendorong orang pergi ke jalan radikalisme dengan kekerasan. Namun, seperti yang tecermin dari wawancara dengan dinas-dinas yang berada di lingkungan Pemerintah Kota Medan, Pemerintahan ini tidak membuat program pemberdayaan ekonomi khusus bagi kalangan muda dan mantan napi teroris atau keluarganya. Tetapi, Pemerintah Kota beranggapan bahwa dengan otonomi daerah dan potensi ekonomi kota Medan yang besar

⁴¹ <http://www.tribunnews.com/nasional/2017/06/26/inilah-wajah-2-pelaku-penyerangan-polda-sumut>

akan mampu menyejahterakan masyarakat kota ini dan pada gilirannya akan ikut menghambat terjadinya radikalisme kekerasan seperti terorisme. Oleh karena itu, membuka dan membuat investor nyaman di kota Medan menjadi sangat penting. Koordinasi dengan lembaga-lembaga terkait seperti BNPT/FKPT dilakukan. Termasuk misalnya ikut membantu terbitnya buku yang narasinya anti radikalisme. Komunikasi dengan lembaga-lembaga keagamaan dipelihara tidak terkecuali dengan otoritas yang bertanggung jawab di bidang keamanan.

Lalu, bagaimana aparat kepolisian kota Medan berkontribusi terhadap penanggulangan terorisme ini selain dalam bentuk tugas tradisionalnya? Ketika aparat kepolisian melakukan upaya penanggulangan terorisme baik melalui tindakan preventif atau bukan, ini adalah bentuk implementasi tugas yang berkenaan dengan urusan keamanan dan penegakan hukum, yang merupakan bagian dari urusan absolut pemerintah pusat. Kepolisian di daerah adalah perpanjangan tangan instansi vertikal pemerintah pusat di daerah atau kota. Namun, selain mengeksekusi urusan absolut pemerintah pusat ini, dalam wawancara dengan polisi yang bertugas pada unit intelijen Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Medan, diketahui bahwa mereka menjalin hubungan yang baik dan menjembatani kepentingan mantan napi teroris atau keluarganya dengan pihak-pihak lain. Termasuk misalnya mendapatkan surat-surat identitas kendaraan, urusan dengan badan pertanahan, kesempatan berusaha, dan

lain-lain. Di samping itu juga, pihak Polrestabes menjaga komunikasi dengan mantan napi teroris sebagai bagian dari upaya merebut hati mereka sekaligus 'memantau' keberadaan mereka. Ini diharapkan dapat menghindarkan kelompok ini kembali ke jalan radikalisme yang diwujudkan dalam bentuk kekerasan.

Penting juga untuk mengetahui bagaimana lembaga pemasyarakatan (Lapas) berkontribusi. Medan memiliki Lapas Kelas 1 dan pernah membina warga binaan (narapidana) yang telah terbukti melakukan kejahatan terorisme. Menurut Kepala Pembinaan Lapas ini, secara umum, napi teroris di LP dibina oleh BNPT. Pihak dari BNPT biasanya mengunjungi Lapas untuk menemui mereka. Tujuannya agar setelah mereka selesai menjalani pemidanaan atau pembinaan dan kembali ke masyarakat, tidak jatuh ke tangan radikalisme dengan kekerasan.

Ketika dikunjungi, saat itu, Lapas Tanjung Gusta tidak sedang membina napi teroris. Di Lapas ini para warga binaan termasuk napi teroris ketika itu mendapatkan kesempatan untuk mengikuti pembekalan keterampilan seperti perbengkelan, peternakan, dan keterampilan membuat perabot dan anyaman. Namun, tidak mudah untuk membuat napi teroris untuk ikut program pembekalan ini. Bahkan, sebagian dari mereka menutup diri dan menolak ikut terlibat. Sikap tidak kooperatif terhadap pembinaan masih muncul karena pandangan dan keyakinan mereka bahwa bekerja sama dengan petugas atau dengan pemerintah adalah terlarang.

Mereka menganggap pemerintah atau petugas adalah *thogut*. Dari sini dapat juga diketahui bahwa tidak semua napi teroris yang usai pembinaan telah berhasil dideradikalisasi.

Setelah para napi teroris bebas, pihak Lapas, menurut pengakuan responden, menyimpan data mereka. Namun, komunikasi dengan mereka tidak dipelihara. Dengan demikian, keberadaan mereka setelah keluar dari Lapas tidak terpantau. Memang, setelah keluar dari Lapas ada unit lain yang memiliki tugas melanjutkan pembinaan mantan warga binaan. Unit ini bernama Balai Pe-masyarakatan (Bapas). Namun, Bapas hanya akan dapat berperan dalam meneruskan pembinaan kepada mantan narapidana teroris jika yang bersangkutan secara sukarela mau untuk dibina di sini. Bapas sebagaimana Lapas tidak boleh memaksa mantan warga binaan untuk terlibat dalam program pembinaan di Bapas. Memang, sesungguhnya tidak perlu ada pemaksaan. Jika warga binaan tidak mau terlibat dengan program pembinaan di dalam atau di luar Lapas dengan alasan bahwa bekerja sama dengan pemerintah atau petugas diyakini sebagai tindakan terlarang, maka upaya deradikalisasi terhadap mereka ketika di Lapas tidak berhasil. Kemungkinan mereka menjadi residivis kembali terbuka.

Ketika institusi pemerintah kota tidak memiliki program khusus penanggulangan terorisme, bagaimana dengan institusi keagamaan seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Medan? Majelis Ulama Indonesia

(MUI) memiliki struktur hierarki mulai dari MUI Pusat, MUI Provinsi, MUI Kabupaten/Kota sampai tingkat Kecamatan. MUI adalah wadah para ulama dalam menyebarkan Islam, membimbing umat, penegak *amar makruf* dan *nahi mungkar* yang dilakukan antara lain dengan penerbitan fatwa baik diminta atau tidak tentang berbagai aspek kehidupan umat sekaligus juga penyalur aspirasi umat Islam.

Dalam struktur MUI Kota Medan ada beberapa komisi, salah satunya adalah Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat. Dengan peran dan adanya organ di MUI yang bertanggung jawab mengurus pemberdayaan ekonomi umat, mendapatkan informasi tentang penanggulangan terorisme dari dimensi ekonomi sangat relevan. Namun, MUI Medan tidak memiliki program khusus pemberdayaan bagi kalangan muda apalagi yang berorientasi pada penciptaan keahlian agar kelompok muda dapat mandiri secara ekonomi dan sulit untuk digoda untuk terlibat dalam tindakan yang kekerasan yang bermotif keagamaan seperti terorisme.

Walaupun demikian, seperti responden yang lain, secara umum, MUI juga melihat munculnya terorisme dapat berawal dari masalah ekonomi terutama masalah keadilan ekonomi. MUI melihat ketimpangan ekonomi termasuk penguasaan sumber-sumber ekonomi di tangan kelompok kecil masyarakat yang beretnis minoritas adalah salah satu bentuk ketidakadilan ekonomi. Ini bisa menimbulkan bibit-bibit konflik. MUI juga pernah terlibat

dalam forum-forum yang membicarakan stabilitas kota Medan yang terkait dengan potensi konflik yang bernuansa keagamaan dengan pihak kepolisian. Namun, menurut Masri Sitanggang, forum seperti itu lebih menempatkan pihak seperti MUI sebagai instrumen pemadam kebakaran, tidak sebagai mitra dalam upaya-upaya penyelesaian penanganan konflik.

5. Berbagi Beban

Seperti yang diuraikan pada Bagian 4 di atas, urusan terorisme ditangani oleh pemerintah pusat karena terorisme adalah urusan keamanan dan masuk dalam kategori urusan absolut pemerintah pusat. Studi lapangan di kota Medan juga menunjukkan bahwa ketiadaan program penanganan teroris dari sisi pemberdayaan ekonomi terutama, dapat diartikan sebagai suatu kepatutan hukum karena mengikuti undang-undang yang berlaku. Dengan kata lain, secara kewenangan menurut UU Pemerintahan Daerah memang begitulah seharusnya. Tetapi, apakah memang UU Pemerintahan Daerah ini menutup peluang bagi pemerintah pusat dan daerah/kota berbagi beban bersama-sama mengurus terorisme? Jika tidak, apakah memang diperlukan?

Undang-Undang Pemerintahan Daerah tidak menutup kemungkinan bahwa pemerintahan kota seperti Medan untuk ikut juga berperan dalam penanggulangan terorisme dari sisi pencegahan melalui deradikalisasi atau

secara khusus lewat pemberdayaan ekonomi kelompok pemuda. Hal ini dapat dilakukan tanpa menyimpang dari undang-undang tersebut. Secara umum, seperti yang telah disebutkan Kementerian Pemuda dan Olahraga memiliki tanggung jawab untuk ikut meningkatkan kemampuan, kompetensi, dan daya saing pemuda. Tanggung jawab ini dapat dilakukan langsung oleh Kementerian dan dapat juga dilakukan oleh pemerintahan daerah melalui SKPD yang relevan dalam hal ini dinas pemuda dan olahraga. Keduanya juga dapat bekerja sama sesuai dengan ruang lingkup dan tugas masing-masing. SKPD tidak perlu memandang tanggung jawab ini sebagai bentuk upaya penanggulangan teroris secara khusus tetapi cukuplah menyebutnya sebagai upaya pemberdayaan pemuda yang dapat dimaksudkan sebagai upaya untuk ikut menanggulangi terorisme secara umum.

Dalam pola yang sama hal ini juga dapat dilakukan oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dan Kementerian lain yang relevan dengan tugas peningkatan kesejahteraan ekonomi. SKPD di daerah dalam hal ini SKPD Kota Medan baik melalui skema pendanaan dari pusat atau melalui alokasi anggaran daerah sendiri sesuai dengan kemampuan juga dapat melakukan hal yang sama. Singkatnya, daerah juga dapat ikut menanggulangi masalah terorisme ini walau itu bukanlah urusan pemerintahan daerah atau pemerintah kota Medan. Namun, karena penanggulangan terorisme ini bisa dilakukan dari berbagai dimensi, maka urusan

penanggulangan ini juga dapat dilakukan dari dimensi kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Setidaknya pada sisi penanggulangan yang bersifat umum dengan memberikan pemberdayaan pada pemuda melalui program-program pembangunan manusia di daerah. Persoalannya kemudian apakah daerah telah melihat urgensi persoalan pembangunan manusia pada aspek pembangunan ekonomi dari kalangan pemuda ini sebagai suatu kebutuhan mendesak sebagai bagian dari upaya penanggulangan terorisme secara umum atau tidak?

Dari pemantauan lapangan di kota Medan dapatlah disimpulkan bahwa pembangunan manusia termasuk dari sisi ekonomi telah, sedang, dan bahkan akan terus dilakukan termasuk juga pembangunan pemuda. Namun, dari pemantauan itu juga dapat disimpulkan pembangunan dimaksud tidak dilihat dalam perspektif pencegahan terorisme melalui pemberdayaan ekonomi, tetapi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat termasuk pemuda secara umum.

Dari hasil pemantauan juga dapat dijelaskan mengapa hal ini terjadi. Dari sisi Dinas Pemuda dan Olahraga misalnya, dinas ini lebih banyak perhatiannya kepada kelompok pemuda yang terpapar narkoba dibandingkan dengan terorisme. Hal ini terjadi karena di kota Medan seperti halnya kota-kota lain, ancaman narkoba sangat nyata dan terasa betul keberadaannya di depan mata. Warga kota Medan yang terkait dengan narkoba seperti bandar, pengedar, pengguna, dan korban jumlahnya

sangat besar. Dari perkiraan Badan Narkotika Nasional (BNN), pada 2017 ada sekitar 350 ribu pengguna narkoba di Sumatra Utara.⁴² Dengan mengacu pada angka penduduk Medan adalah sekitar 15% dari penduduk Sumatra Utara maka ada sekitar 52.500 pengguna narkoba di Medan. Angka ini tentu sangat besar dibandingkan dengan jumlah pihak yang terlibat atau menjadi korban terorisme. Dengan demikian, patut dimengerti jika perhatian Pemerintah Kota Medan terhadap bahaya narkoba jauh lebih besar jika dibandingkan dengan bahaya terorisme. Terlebih lagi urusan penanggulangan bahaya narkoba tidak masuk sebagai urusan absolut pemerintah pusat, sebagaimana halnya urusan penanggulangan terorisme, melainkan juga urusan pemerintahan daerah. Lebih lanjut, dapatlah juga dijelaskan mengapa di beberapa kota termasuk kota Medan tumbuh pusat-pusat rehabilitasi pengguna narkoba tetapi tidak ada pusat rehabilitasi terorisme.

Demikian juga halnya dengan dinas atau LKPD lain. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah patut merasa tidak perlu segera memikirkan dan membuat program koperasi atau usaha kecil dan menengah yang diperuntukkan bagi kalangan pemuda khusus menangkal terorisme. Hal ini dikarenakan jumlah pemuda yang terlibat dalam tindakan ini tidak signifikan. Dengan demikian,

⁴² <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/daerah/17/08/27/ovc1pk384-bnn-sebut-ada-350-ribu-pengguna-narkoba-di-sumut>.
Lihat juga <https://sumut.antaranews.com/berita/165956/foto>

membuat program pemberdayaan yang bertujuan umum dinilai lebih masuk akal. Juga, karena program yang bersifat terbuka tanpa pembatasan ini juga tidak mengecualikan pemuda. Sehingga, secara umum manfaatnya juga tidak tertutup bagi kalangan ini.

Hal yang sama juga berlaku bagi Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Pendidikan, atau dinas lain yang terkait. Jumlah kelompok pemuda yang terlibat terorisme tidak cukup menarik perhatian mereka untuk membuat program yang didedikasikan untuk kelompok usia ini sebagai bagian dari upaya mencegah terorisme. Hal ini karena masih banyak kelompok masyarakat lain atau kelompok rumah tangga lain yang lebih urgensi untuk diperhatikan. Walaupun demikian, tidak signifikannya jumlah pemuda yang terlibat terorisme jangan sampai menutup mata potensi bahaya terorisme ini di kalangan kelompok usia produktif ini. Mengingat potensi bahaya terorisme akibat ketidakberdayaan ekonomi sebagaimana ditunjukkan lewat data statistik kota Medan tersebut di atas sementara di sisi lain, penanggulangan terorisme ini tidak boleh hanya menjadi perhatian pemerintah pusat saja, maka kolaborasi pemerintah pusat dan pemerintah kota harus terjadi dalam bentuk nyata. Keduanya harus berbagi beban penanggulangan terorisme menurut hakikat dan fungsi lembaga masing-masing sesuai dengan hukum pembagian kewenangan mengurus urusan yang berlaku. Lebih jauh lagi, masyarakat baik secara individu atau lewat organisasi kemasyarakatan juga perlu ikut terlibat.

Pemerintah perlu menciptakan iklim yang kondusif dan mengundang keterlibatan mereka. Berkaca pada keterlibatan masyarakat dalam penanggulangan narkoba di Medan seperti mendirikan pusat-pusat rehabilitasi pengguna narkoba dapatlah diyakini hal yang sama dapat juga dibuat masyarakat terhadap pelaku atau mereka yang terpapar radikalisme sebagaimana yang telah dicontohkan oleh ustadz Khairul Ghazali dengan pesantrennya.

6. Kesimpulan dan Rekomendasi

Program penanggulangan terorisme lewat pemberdayaan ekonomi sebagai bagian dari upaya besar kontraradikalisme dan deradikalisasi bagi kalangan pemuda belum dijalankan di kota Medan. Pemerintah kota atau pihak terkait di kota Medan belum membuat program pemberdayaan pemuda ini karena setidaknya disebabkan dua alasan. *Pertama*, sistem pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat dan pemerintah kota termasuk pemerintah kota Medan memang mengatur pembagian sedemikian rupa, sehingga urusan terorisme adalah urusan pemerintah pusat bukan pemerintah daerah atau kota. Alasan *kedua*, urgensi pembuatan dan pelaksanaan program ini belum mendesak. Hal ini karena mengingat jumlah mantan napi teroris atau keluarga mantan pelaku tidaklah sebanyak dibandingkan misalnya dengan jumlah pelaku atau

korban penyalahgunaan narkoba. Juga, jika dibandingkan dengan jumlah pengangguran kota Medan yang harus ditanggulangi oleh Dinas Tenaga Kerja. Termasuk juga jika dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin dan mereka yang perlu mendapat pelayanan dari Dinas Sosial atau dari Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

Walaupun demikian, di sisi lain tidak menutup kemungkinan baik secara teknis atau secara hukum kolaborasi antara instansi pemerintah pusat dan pemerintah kota dalam menyediakan usaha pemberdayaan kaum muda di Medan. Ini bisa dilakukan dengan tetap berpedoman pada tugas dan fungsi masing-masing instansi. Ini mungkin terjadi karena urusan-urusan pemerintah pusat dan daerah itu secara cakupan bersifat beririsan satu sama lain. Sehingga, penyusunan dan implementasinya dan aspek-aspek teknis lain bisa dikoordinasikan antarinstansi pemerintah pusat dan kota.

Pemberdayaan pemuda di kota Medan penting untuk dilakukan karena secara makro ekonomi karena angka persentase tingkat kesejahteraan penduduk kota ini secara umum lebih rendah dari rata-rata angka persentase nasional. Indikator-indikator penting ekonomi seperti tingkat pengangguran pemuda, jumlah pemuda yang tidak lagi bersekolah, pertumbuhan ekonomi kota, menunjukkan tanda tidak terlalu menggembarakan. Sehingga, pembangunan atau intervensi ekonomi penting dilakukan di kota ini walau tidak harus dalam rangka penanggulang-

an radikalisme dengan kekerasan. Jika ini dilakukan, secara tidak langsung juga akan berimbas bagi upaya penanggulangan terorisme dimaksud.

Selain itu, sikap sebagian masyarakatnya terhadap tindakan terorisme masih perlu diubah. Pandangan yang dapat mengarah kepada apologi atau setidaknya moderasi terhadap kemunculan terorisme masih terasa. Bahwa pemahaman agama adalah salah satu penyebab lahirnya terorisme masih belum sepenuhnya diterima oleh sebagian dari mereka yang diwawancarai. Sementara itu, sejarah kota ini juga tidak dapat dilepaskan dari gerakan perlawanan kelompok Islam. Dengan demikian, ada faktor lain yang membuat Medan menjadi penting untuk diperhatikan dalam upaya penanggulangan terorisme ini.

Berdasarkan temuan-temuan itu, beberapa rekomendasi dapat diajukan. *Pertama*, pihak instansi pemerintah pusat bekerja sama dengan pemerintah kota perlu membuat pemetaan kondisi kepemudaan secara sosial seperti latar belakang keluarga, tingkat pendidikan, dan tentu ekonomi seperti tingkat kesejahteraan sekaligus memetakan pandangan mereka terhadap radikalisme agama. Terkait dimensi ekonomi, instansi pemerintah pusat atau pemerintah kota harus punya data kelompok pemuda yang perlu mendapat intervensi secara ekonomi dan bentuk-bentuk intervensi yang perlu dilakukan sampai pada level kelurahan atau level wilayah administrasi yang lebih rendah. *Kedua*, instansi pemerintah pusat dan pemerintah kota perlu bekerja sama menyusun pola,

kerangka waktu, dan bentuk atau model intervensi yang dilakukan dan diperlukan lengkap dengan *monitoring* dan evaluasinya. Termasuk di dalam hal ini metode pendampingan ketika melakukan intervensi. Dalam menyusun intervensi dimaksud, pemerintah harus pula menentukan skala prioritas mengingat jumlah pemuda yang masuk target intervensi pasti tidak sedikit. Terakhir, *ketiga*, dalam menyusun tindakan intervensi itu, partisipasi masyarakat harus dibuka, tidak sekadar partisipasi semu tetapi substansial sehingga mereka merasa bahwa program ini adalah milik dan untuk kepentingan mereka juga.

BAB 3

Ekonomi Kaum Muda, Pembangunan Pascakonflik, dan CVE di Poso, Sulawesi Tengah

1. Pendahuluan

Persoalan pemberdayaan pemuda, khususnya dalam bidang ekonomi akan terus menjadi diskursus yang tiada henti. Karena memang pemuda merupakan aset berharga dari bangsa ini. Kita sering mendengar beberapa istilah di bawah ini, di antaranya yaitu: Pemuda adalah tulang punggung bangsa, Pemuda adalah masa depan bangsa, Pemuda adalah generasi penerus bangsa, Pemuda adalah calon pemimpin masa depan, Pemuda adalah tumpuan dan harapan bangsa, Pemuda adalah generasi emas bangsa, dan sebagainya.

Dari beberapa istilah tentang kepemudaan di atas, sangat jelas dan tidak dapat diragukan lagi bahwa pemuda adalah aset terbesar bahkan aset yang paling berharga yang dimiliki bangsa ini. Sejarah juga telah membuktikan bagaimana kiprah pemuda terhadap kemajuan bangsa, bahkan sejak dahulu, sebelum kemerdekaan. Misalnya pada 1928, pemuda dari berbagai penjuru tanah air ber-

kumpul untuk mendeklarasikan “Sumpah Pemuda” hingga pada 1998, pemuda juga menjadi motor penggerak era reformasi. Pemuda telah berhasil menumbangkan rezim Orde Baru, sehingga kita saat ini berada pada era reformasi. Hal ini pun tidak lepas dari partisipasi aktif pemuda untuk menyumbangkan karya-karya terbaiknya bangsa dan negara Indonesia.

Ilustrasi di atas semakin membuktikan bahwa pemuda adalah harapan terbaik bangsa. Dengan demikian, investasi yang paling strategis dan paling menguntungkan di masa mendatang adalah melatih, mengembangkan, dan memberdayakan potensi-potensi yang dimiliki para pemuda di seluruh Nusantara. Bagi pemerintah, tidak ada kata “rugi” dalam membelanjakan uang negara untuk memberdayakan para pemuda.

Pada sektor ekonomi, pada satu sisi para pemuda pun mulai menunjukkan kapasitas dirinya yang mampu menciptakan dan mengelola kelompok usaha, bahkan berbasis massa yang cukup besar. Akan tetapi, pada sisi yang lain, banyak di kalangan pemuda pun yang tampak kesulitan mengembangkan potensi dirinya, bahkan kalah bersaing dengan kelompok-kelompok lainnya. Hal ini terjadi bukan hanya di kota-kota besar semata, melainkan juga terjadi di daerah-daerah, tidak terkecuali di Poso, sebuah kabupaten yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah.

Pasca konflik horizontal, Poso terus bergeliat mengejar ketertinggalan dari daerah lainnya. Akan tetapi, harus diakui bahwa akibat dari konflik tersebut telah menyisakan

'PR' yang cukup besar bagi pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Poso dengan segala kekurangan dan kelebihanannya membutuhkan perhatian lebih dari pemerintah.

Kalangan pemuda, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari generasi masa depan Poso masih membutuhkan perhatian serius. Mereka tidak bisa dibiarkan begitu saja, mereka menjadi bagian dari korban konflik yang terjadi beberapa tahun silam, efek dari konflik tersebut masih dirasakan oleh mereka. Ini merupakan beban tersendiri yang harus dipikul oleh mereka, yang tentunya berbeda dari beban para pemuda dari daerah lainnya.

Di samping persoalan tersebut, Poso juga disorot karena persoalan radikalisme dan terorismenya. Bahkan Poso diharapkan menjadi daerah untuk meneruskan cita-cita mendirikan Negara Islam Indonesia.⁴³ Pada dasarnya persoalan radikalisme dan terorisme ini tidak hanya di Poso, daerah-daerah lainnya pun tidak luput dari perkembangan dan pengaruh paham ini. Dalam konteks ini, para pemuda di Poso dituntut untuk mampu menghadapinya. Untuk itu, banyak hal yang dapat dilakukan oleh pemerintah, salah satunya dengan cara melakukan pemberdayaan bidang ekonomi kepada para pemuda.

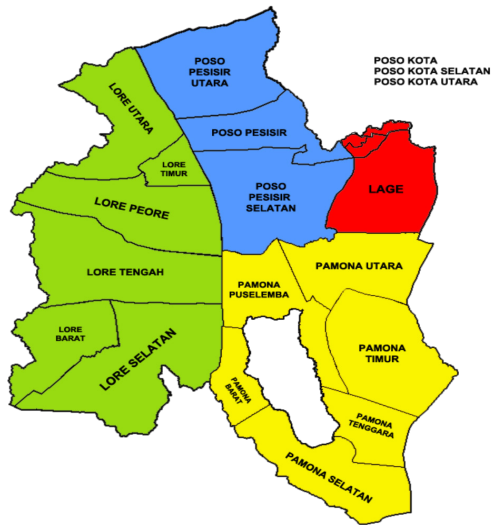
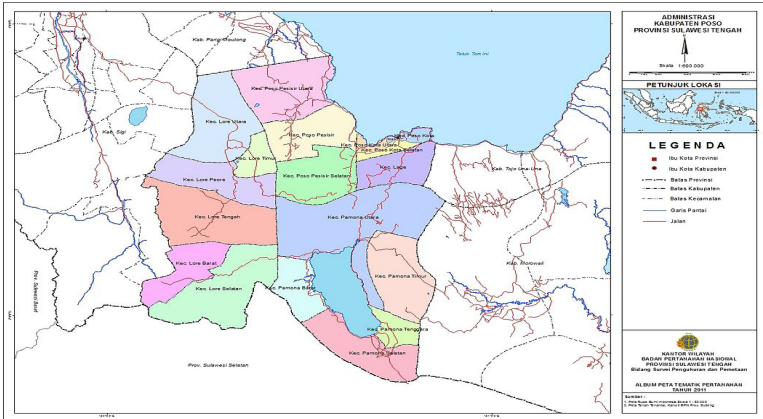
⁴³ Gagasan ini pernah dibicarakan antara Abu Thalut dengan Santoso dan Ustadz Yasin pada 2009, sebelum proyek dimulai. Baca Ansyaaad Mbai, *Dinamika Baru Jejaring Teror di Indonesia dan Keterkaitannya dengan Gerakan Radikalisme Transnasional*, Jakarta: AS Production Indonesia, 2014. hlm. 31.

Pemberdayaan ekonomi kepada para pemuda ini tidak hanya dilakukan kepada orang yang terlibat dalam konflik dan yang melakukan tindak pidana terorisme saja (baik masih menjalani proses hukum maupun yang telah kembali ke masyarakat), melainkan kepada para keluarga, jaringan, dan para pemuda secara umum. Karena mereka juga terkena dampak dari kondisi Poso ini, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Dalam beberapa hal, Pemerintah Pusat telah melakukan upaya-upaya untuk mengembalikan situasi Poso seperti sediakala, sebagai daerah yang aman dan damai. Pemerintah, di antaranya melalui Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)⁴⁴ bersinergi dengan pemerintah daerah dan aparat keamanan telah banyak melakukan pembinaan baik keagamaan, wawasan kebangsaan, maupun kemandirian yang berupa pemberdayaan ekonomi.

⁴⁴ BNPT dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2012.

2. Kondisi Geografis



Sumber: <https://g035.wordpress.com/2012/01/13/kabupaten-poso/peta-kab-poso>

Sumber: https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_kecamatan_dan_kelurahan_di_Kabupaten_Poso

Kabupaten Poso adalah salah satu kabupaten tertua di Provinsi Sulawesi Tengah yang beribukota di Kota Poso. Saat ini Kabupaten Poso dipimpin oleh Bupati Drs. Piet Ingkriwang, MM., Ketua DPRD Kabupaten Drs. S. Pelima, serta Sekretaris Daerah Kabupaten Drs. Amjad Lawasa, MM.

Luas wilayah daerah ini adalah 24.197 km, secara administratif daerah ini terbagi menjadi 19 kecamatan. Daerah ini mempunyai potensi yang besar untuk dikembangkan, antara lain di sektor perkebunan dengan komoditi utama yang dihasilkan berupa kakao, kelapa dalam, kopi arabika, kopi robusta, cengkih, lada, dan jambu mete. Untuk kegiatan pertanian di daerah ini tanaman pangan masih menjadi andalan yang utama berupa padi, tanaman hortikultura, dan palawija. Untuk sektor pariwisata, Pulau Togeana yang semakin ramai dikunjungi wisatawan mancanegara menjadi modal utama pengembangan wisata bahari, di samping itu terdapat festival Danau Poso yang pernah menjadi barometer perkembangan pariwisata. Dari hasil pertanian ini berdampak besar juga terhadap perdagangan. Perdagangan menjadi tumpuan mata pencaharian penduduk setelah pertanian. Keberadaan infrastruktur berupa jalan darat yang memadai akan lebih memudahkan para pedagang untuk berinteraksi sehingga memperlancar baik arus barang maupun jasa, daerah ini juga telah terdapat Bandara Kasiguncu dan Pelabuhan utama yaitu Pelabuhan Poso, serta terdapat berbagai sarana dan pra-sarana pen-

dukung di antaranya sarana pembangkit tenaga listrik, air bersih, gas, dan jaringan telekomunikasi.

Berdasarkan garis lintang dan garis bujur wilayah Kabupaten Poso terletak pada koordinat $1^{\circ}06' 44,892'' - 2^{\circ} 12' 53,172''$ LS dan $120^{\circ}05' 96'' - 120^{\circ} 52' 4,8''$ BT. Berdasarkan letak astronominya, panjang wilayah Kabupaten Poso dari ujung barat sampai ujung timur diperkirakan jaraknya kurang lebih 86,2 km. Lebarnya dari utara ke selatan dengan jarak kurang lebih 130 km.

Dilihat dari posisi di permukaan bumi, letak wilayah Kabupaten Poso secara umum terletak di kawasan hutan dan lembah pegunungan. Kawasan lainnya terletak pada pesisir pantai yang sebagian terletak di perairan Teluk Tomini dan Teluk Tolo.

Secara geologis wilayah Kabupaten Poso terletak pada deretan pegunungan lipatan, yakni Pegunungan Fennema dan Tineba di bagian barat, Pegunungan Takolekaju di bagian barat daya, Pegunungan Verbeek di bagian tenggara, Pegunungan Pompangeo dan Pegunungan Lumut di bagian timur laut.

Luas daratan Kabupaten Poso setelah terpisah dengan Kabupaten Tojo Una-una diperkirakan sekitar 8.712,25 km² atau 12,81% dari luas daratan Provinsi Sulawesi Tengah. Bila dibandingkan dengan luas daratan kabupaten yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Poso menempati urutan keempat.

Pada 2010 Kabupaten Poso mengalami pemekaran kecamatan, yaitu Kecamatan Pamona Puselemba.

Kecamatan ini merupakan pemekaran dari Kecamatan Pamona Utara dengan luas wilayah kira-kira 560,05 km². Terdiri dari 10 wilayah pedesaan, dengan ibukota kecamatan yaitu Desa Sangele. Jika dilihat berdasarkan luas kecamatan, Kecamatan Lore Tengah memiliki luas terbesar yaitu kira-kira 976,37 km² atau 11,21% dari luas Kabupaten Poso. Wilayah Kabupaten Poso dibatasi oleh batas alam yakni kawasan pantai dan pegunungan/perbukitan dengan batas administratif sebagai berikut:

1. Sebelah Utara: berbatasan dengan Teluk Tomini dan Provinsi Sulawesi Utara.
2. Sebelah Selatan: berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Selatan.
3. Sebelah Timur: berbatasan dengan wilayah Kabupaten Tojo Una-una dan Kabupaten Morowali.
4. Sebelah Barat: berbatasan dengan wilayah Kabupaten Donggala dan Kabupaten Parigi Moutong.

3. Kondisi Sosial Ekonomi Poso

Dilihat dari sisi kependudukan, penduduk asli daerah Poso saat ini sudah bercampur dengan para perantau yang telah berada di daerah ini sejak puluhan bahkan ratusan tahun yang lalu. Selain suku asli, daerah Poso dan sekitarnya didiami oleh pendatang dari daerah luar, karena dahulu daerah ini juga menjadi daerah tujuan transmigrasi.

Seiring dengan perkembangan dan kemajuan zaman, sejak era Orde Baru, Kabupaten Poso telah didiami oleh banyak etnis dengan berbagai agama yang ada di sana. Penduduk muslim banyak berasal dari Jawa, Bugis, Makassar, Mandar, Buton, Kaili, Tojo, Togean, bahkan dari Arab. Sedangkan kelompok Protestan selain Pamona juga termasuk dari Minahasa, Tionghoa, Mori, Napu, Besoa, dan Bada dari pedalaman kabupaten. Kelompok Katolik banyak berasal dari Minahasa, Tionghoa, dan Flores. Di Poso juga terdapat masyarakat pemeluk agama Hindu, mereka dari Bali.

Jumlah penduduk yang terdiri dari berbagai suku, etnis, dan agama tersebut tersebar di 19 kecamatan di seluruh Kabupaten Poso, yaitu:

NO.	NAMA KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK	KETERANGAN
1	Pamona Selatan	20.697	
2	Pamona Barat	10.514	
3	Pamona Tenggara	7.293	
4	Pamona Utara	13.755	
5	Pamona Pusalemba	20.249	
6	Pamona Timur	10.727	
7	Lore Setalan	6.332	
8	Lore Barat	3.164	
9	Lore Utara	13.403	
10	Lore Tengah	4.532	
11	Lore Timur	5.481	
12	Lore Peore	3.305	
13	Poso Pesisir	22.644	
14	Poso Pesisir Selatan	9.953	
15	Poso Pesisir Utara	17.659	
16	Poso Kota	22.815	

17	Poso Kota Selatan	10.123	
18	Poso Kota Utara	12.451	
19	Lage	20.470	

Sumber: BPS Kabupaten Poso, 2015.

Jumlah tersebut terbagi dalam beberapa kelompok umur, yaitu :

No	Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Jumlah	Keterangan
		Laki-laki	Perempuan		
1	0-4	11.790	11.310	23.100	
2	5-9	10.653	9.761	20.414	
3	10-14	10.526	10.005	20.531	
4	15-19	10.208	9.414	19.622	
5	20-24	9.946	8.517	18.463	
6	25-29	10.557	9.525	20.082	
7	30-34	10.406	9.908	20.314	
8	35-39	10.108	9.159	19.267	
9	40-44	9.095	8.203	17.298	
10	45-49	7.524	6.969	14.493	
11	50-54	6.193	5.833	12.026	
12	55-59	4.956	4.768	9.724	
13	60-64	3.572	3.371	6.943	
14	65+	6.440	6.850	13.290	
	JUMLAH	121.974	113.593	235.567	

Sumber: BPS Kabupaten Poso, 2015.

Dari data di atas, tampak bahwa jumlah kelompok usia muda cukup banyak. Sebagaimana diketahui bahwa menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan, pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun. Dengan jumlah yang begitu banyak, hal ini bisa menjadi potensi pertumbuhan

dan perkembangan ekonomi Kabupaten Poso. Usia muda adalah usia produktif, jadi tinggal kemampuan pemerintah melakukan pemberdayaan potensi mereka.

Angka Harapan Hidup, Angka Melek Huruf, Rata-rata Lama Sekolah dan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Poso 2010-2016							
Indikator	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)
Angka Harapan Hidup (tahun)/ <i>Life Expectancy Rate (year)</i>	70,13	70,09	69,99	69,98	69,96	69,95	69,92
Harapan Lama Sekolah (tahun) <i>Expected Years of Schooling (year)</i>	13,16	13,15	12,87	12,39	12,21	12,07	11,92
Rata-Rata Lama Sekolah (tahun)/ <i>Mean Years of Schooling (year)</i>	8,67	8,52	8,49	8,42	8,37	8,32	8
Indeks Pembangunan Manusia/ <i>Human Development Index</i>	68,83	68,13	67,65	66,94	66,2	65,59	64,81

Sumber: BPS Kabupaten Poso, 2015.

Dari data tersebut, angka Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Poso masih ada pada angka 68,83. Ini memang masih tergolong rendah, bahkan masih lebih rendah dari angka rata-rata nasional, yaitu 70,18 pada

2016. Bahkan, rata-rata tingkat pendidikannya pun ada pada angka 8,67 tahun. Ini berarti secara umum belum lulus SMP. Dengan data ini juga, menunjukkan bahwa masyarakat Poso masih membutuhkan perhatian yang cukup besar dari pemerintah. Secara lebih jelas, berikut ini Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) serta gambaran garis kemiskinan di Kabupaten Poso.

Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Poso, 2014 - 2015				
Jenjang Pendidikan	APM		APK	
	Net Enrollment Rate		Gross Enrollment Rate	
	2014	2015	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<i>SD/MI/Elementary School</i>	93,53	95,38	105,89	108,74
<i>SMP/MTs/Junior High School</i>	81,75	80,48	91,76	95,84
<i>SMA/SMK/MA/Senior High School</i>	72,99	61,71	87,16	86,32

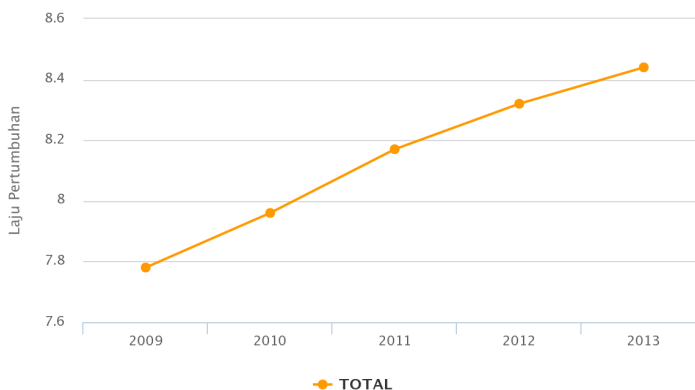
Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional, Maret 2014–2015.

Garis Kemiskinan dan Penduduk Miskin di Kabupaten Poso, 2011–2015			
<i>Poverty Line and Number of Poor People in Poso Regency, 2011–2015</i>			
Tahun	Garis Kemiskinan	Penduduk Miskin / Number of Poor People	
<i>Year</i>	<i>Poverty Line (rupiah)</i>	<i>Jumlah/Total</i>	<i>Persentase/Percentage</i>
(1)	(2)	(3)	(4)
2011	286 000	43,0	20,10
2012	312 764	40,8	18,46
2013	343 358	41,3	18,22
2014	368 562	39,65	17,09
2015	378 190	42,64	18,16

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional

Dengan keadaan IPM, APM, APK dan garis kemiskinan, ternyata laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Poso terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Berikut gambaran laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Poso, yaitu:

Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten 2009 – 2013

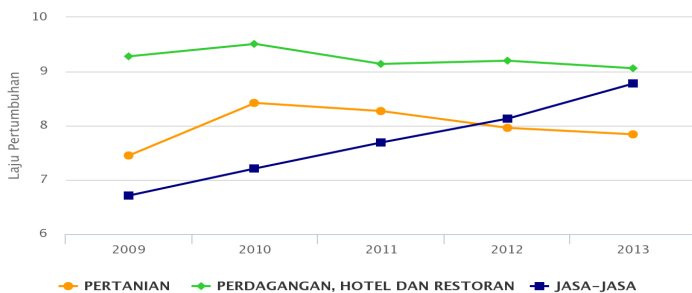


Sumber: BPS Kabupaten Poso, 2015.

Dari gambar tabel di atas tampak jelas bahwa setiap tahun perekonomian Kabupaten Poso terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Laju pertumbuhan ekonomi yang terus mengalami kemajuan ini dapat menjadi modal bagi Kabupaten Poso untuk terus berkembang, bersaing dengan daerah lainnya.

Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Poso Berdasarkan Sektor Dominan

Sektor Dominan yaitu memiliki kontribusi terbesar dalam PDRB



Sumber: BPS Kabupaten Poso, 2015.

Seiring dengan terus meningkatnya pertumbuhan ekonomi Kabupaten Poso, tabel di atas menunjukkan bahwa sektor jasa merupakan sektor dominan yang terus meningkat, berbeda halnya dengan sektor pertanian dan perdagangan, hotel, serta restoran.

4. Peran Pemerintah dalam Pemberdayaan Ekonomi, Khususnya dalam Menangkal Paham Radikal

Poso merupakan suatu kabupaten yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah yang senantiasa disorot oleh berbagai media, bahkan media internasional pun tidak luput menyorotinya. Akan tetapi sorotan itu hanya terletak pada aspek gerakan ekstremisme yang ada di Kabupaten Poso. Sedangkan pada aspek lainnya justru tidak menjadi perhatian, padahal kekayaan alam dan potensi wisata pantai serta alam sebenarnya tidak kalah eksotis dari daerah lain.

Tidak jarang orang mengenal Poso dengan ‘embel-embel’ kata teroris. Karena memang di Poso hingga saat ini masih terjadi kontak senjata antara kelompok ekstremis yang oleh negara disebut kelompok teroris dengan aparat keamanan (TNI-Polri). Jika kita runtut ke belakang, kasus ini memang tidak lahir dengan sendirinya, melainkan bermula dari berbagai konflik yang terjadi di Poso dan diiringi oleh penyebaran paham-paham radikal yang di sana oleh beberapa kelompok masyarakat, yang justru dari luar Poso. Gelombang penyebaran ini memang terus

mengalir baik secara langsung maupun melalui media sosial, bahkan beberapa orang yang terlibat kontak senjata pun bukan orang Poso, melainkan datang dari daerah lain untuk bergabung dengan kelompok tersebut. Tewasnya Santoso bukan berarti upaya penanaman kebencian dan penyebaran permusuhan atas nama agama telah berakhir, karenanya upaya kontranarasi, kontrapropaganda, kontra-ideologi, dan kontraradikalisasi harus terus ditingkatkan dengan memperkuat regulasi dengan menetapkan rencana perubahan RUU Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Terorisme menjadi undang-undang yang dapat menjadi rujukan bagi aparat penegak hukum.⁴⁵

Dalam situasi tersebut, pemerintah juga selain melakukan pembinaan kepada masyarakat, juga melakukan upaya penegakan hukum. Hingga saat ini banyak pelaku tindak pidana terorisme yang berhasil diamankan, menjalani proses hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dilakukan pembinaan baik ketika mereka di dalam maupun setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan tersebut. Saat ini, beberapa mantan pelaku tindak pidana terorisme tersebut telah kembali ke Poso dan bergabung lagi dengan masyarakat.

Poso mempunyai kasus berbeda dengan beberapa daerah lain, karena memiliki akar budaya dan konflik yang berbeda. Kasus tindak pidana terorisme yang ada di

⁴⁵ Irfan Idris, *Membumikan Deradikalisasi: Soft Approach Model Pembinaan Terorisme dari Hulu ke Hilir Secara Berkesinambungan*, Jakarta: Daulat Press, 2016. hlm. 300-301.

Poso dengan di daerah lain tidak bisa disamakan, karena akar masalahnya pun berbeda. Kasus-kasus tindak pidana terorisme yang ada di Poso banyak bermula dari konflik komunal yang pernah terjadi di Poso, yang oleh beberapa kalangan belum mampu diselesaikan secara komprehensif. Selanjutnya kasus yang belum tuntas terselesaikan ini menjadi pemicu beberapa orang dan kelompok orang untuk melakukan aksi-aksi kekerasan yang tidak jarang mengatasnamakan agama.

Konflik komunal tersebut telah meninggalkan bekas yang hingga saat ini masih dirasakan oleh sebagian masyarakat di sana, ada yang trauma, dendam, dan sebagainya. Begitupun bagi para pemuda di sana, sedikit banyaknya memiliki pengaruh baik langsung maupun tidak langsung. Akan tetapi seiring perkembangan waktu, kondisi Poso, terus membaik atas perhatian penuh dari pemerintah.

Seiring dengan situasi keamanan yang semakin baik, kehidupan ekonomi masyarakat pun terus bergerak maju. Ekonomi masyarakat secara perlahan namun pasti terus mengalami kemajuan. Begitu juga dengan aktivitas ekonomi di kalangan pemudanya, walaupun belum pulih seperti sediakala, akan tetapi setidaknya sudah mengalami perkembangan yang lebih baik dibandingkan sebelumnya.

Program-program pemberdayaan ekonomi yang dilakukan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sedikit banyak mampu menyentuh

lapisan kelompok pemuda ini, walaupun belum mampu dilakukan secara sinergis dan berkelanjutan, baik karena kurang sinkronnya data yang dimiliki oleh para pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang justru dijadikan pijakan kebijakan program, ketersediaan anggaran, maupun sebab-sebab lainnya.⁴⁶

Memang, diakui bahwa penanggulangan terorisme secara terpadu tidak hanya berhenti ketika para warga binaan pemasyarakatan kasus tindak pidana terorisme tersebut keluar dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), melainkan justru saat mantan waraga binaan pemasyarakatan tersebut sudah keluar dari Lapas. Pembinaan dan pemberdayaan harus secara terus-menerus dilakukan melalui sinergi dengan berbagai komponen pemerintah dan masyarakat.

Pemerintah, baik pusat maupun daerah perlu melakukan aksi nyata untuk secara bersama-sama dengan masyarakat melakukan pembinaan 'pendampingan' dengan cara pemberdayaan atas minat, bakat, dan potensi. Salah satu pemberdayaan yang diperlukan adalah dalam bidang ekonomi. Pemberdayaan pada bidang ekonomi ini diarahkan pada pelatihan untuk menjadi pribadi dan keluarga yang mandiri secara ekonomi.

Program pemberdayaan ini dapat menjadi upaya pemerintah untuk membekali mereka dengan keterampilan-keterampilan praktis berwirausaha yang

⁴⁶ Hasil wawancara dengan Budiman Maliki, Direktur LPMS Poso, 25 Agustus 2017.

langsung dapat diaplikasikan dan dikembangkan menjadi kegiatan wirausaha yang bernilai ekonomis.

Dengan demikian, program pemberdayaan ini diharapkan dapat mengatasi masalah ekonomi keluarga mereka dengan menawarkan alternatif pekerjaan ataupun melatih keterampilan mereka sesuai dengan minat, bakat, potensi dan kebutuhan pasar yang ada di sekitar lingkungan mereka. Tentunya program ini, perlu dilakukan oleh berbagai unsur pemerintahan baik pemerintah pusat maupun daerah dengan melibatkan secara aktif komponen-komponen masyarakat yang ada, sehingga program ini dapat menyatu dengan aktivitas masyarakat.

Lebih lanjut, pendekatan pemberdayaan ekonomi ini diharapkan dapat membantu meredam gejolak dan pikiran radikal bagi seseorang/kelompok khususnya di kalangan para pemuda karena mereka merasa negara ikut membantu menanggulangi kesulitan ekonominya. Dalam konteks ini, negara juga membuktikan kehadiran dan keberpihakannya kepada mereka.

Dengan pemberdayaan ekonomi ini diharapkan mampu menyentuh akar masalah dari muncul dan berkembangnya aksi-aksi kekerasan itu sendiri, khususnya karena memiliki keterbelakangan dari sisi ekonomi. Untuk itu, kegiatan pemberdayaan ekonomi ini dituntut untuk mampu mengatasi atau menjawab dari akar masalah tersebut. Pemberdayaan ekonomi ini dilakukan dengan kegiatan-kegiatan pembimbingan baik dalam konteks kesiapan mental maupun *hard skill* kewirausahaan. Selain

itu diperlukan arahan untuk menumbuhkan motivasi kewirausahaan. Dengan demikian, pemberdayaan ekonomi tersebut diharapkan dapat mengangkat dan memperbaiki kondisi ekonomi mereka, sehingga mampu mengangkat kesejahteraan hidup mereka di tengah masyarakat. Oleh karena itu, kegiatan ini sangat penting dan mendesak untuk dilakukan melalui tahapan-tahapan yang jelas dan berkesinambungan.

Sebagai gambaran, peran pemerintah tersebut bisa dipetakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Walaupun dalam pelaksanaan program-program pemberdayaan tersebut, keduanya juga bersinergi, artinya jalannya program pemerintah pusat juga tidak lepas dari dukungan pemerintah daerah.

5. Peran Pemerintah Pusat

Dari hasil wawancara dengan para responden, beberapa instansi pemerintah telah banyak berbuat untuk pembinaan masyarakat Poso, termasuk di dalamnya pemberdayaan ekonomi, walaupun nama programnya tidak secara jelas sebagai program pemberdayaan ekonomi kepada para pemuda, misalnya oleh Kepolisian dan TNI. Kedua instansi ini memang banyak terlibat, bukan hanya dari aspek penjagaan keamanan agar menjadi kondusif, melainkan banyak memberdayakan masyarakat melalui kegiatan-kegiatan sosial, seperti pembangunan dan rehab fasilitas lembaga pendidikan, keagamaan, dan fasilitas

umum lainnya. Begitu juga dengan kegiatan-kegiatan kemasyarakatan lainnya, seperti kegiatan olahraga.

Di samping kedua instansi tersebut, di tahun 2016, Kementerian Sosial bersama Komnas HAM juga melakukan pemberdayaan ekonomi kepada para mantan pelaku tindak pidana terorisme dan keluarganya. Pemberdayaan ekonomi ini dilakukan dengan memberikan bantuan mesin jahit.

Adanya bantuan mesin jahit ini diharapkan mampu menjadi alat untuk berwirausaha sehingga mereka mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Akan tetapi, dalam beberapa kasus, ternyata pemberian mesin jahit tidak diberikan kepada orang yang tepat, misalnya kualifikasi penerima yang dianggap kurang jelas dan beberapa penerima itu sendiri tidak memiliki *skill* menjahit. Sehingga tampak kurang dari sisi kemanfaatannya.

Persoalan kualifikasi penerima ini banyak dipertanyakan oleh para responden yang kami temui, karena di lapangan ada beberapa mantan pelaku tindak pidana terorisme dan keluarga warga binaan pemasyarakatan yang tidak menerima bantuan tersebut, padahal mereka juga membutuhkannya.

Adanya pemberian mesin jahit ini tentu akan sangat bermanfaat jika dilakukan pemetaan terlebih dahulu berdasarkan kualifikasi penerima, potensi pasar, minat, dan bakat masing-masing calon penerima bantuan. Setelah itu dilakukan pelatihan dan pendampingan baik produksi maupun pemasaran hasil produksi. Dengan demikian,

program pemberdayaan ekonomi ini akan terus bergulir dan berkesinambungan, bahkan dari sisi pemantauannya pun akan lebih mudah.

Selain Kementerian Sosial, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) sebagai lembaga pemerintah setingkat kementerian yang bertugas mengoordinasikan lembaga-lembaga dalam hal penanggulangan terorisme juga melakukan pemberdayaan ekonomi di Poso.

Secara umum kegiatan BNPT di Poso, bukan hanya pada program deradikalisasi atau pembinaan kepada orang-orang atau kelompok yang sudah terpapar paham radikal, melainkan juga banyak program pencegahan yang berbasis kepada masyarakat, dari semua lapisan.

Program pencegahan terorisme yang dilakukan oleh BNPT termasuk melalui FKPT⁴⁷ ini menyentuh berbagai kalangan yang ada di Poso, baik dari kalangan pemuda, pelajar, tokoh agama, adat, hingga tokoh-tokoh masyarakat. Kegiatan-kegiatan ini biasanya berupa sosialisasi bahaya paham radikal dan penyebarannya, dialog antartokoh dan penguatan wawasan kebangsaan. Adapun program pemberdayaan ekonomi yang secara khusus kepada para pemuda tentang CVE, FKPT Sulawesi Tengah tidak memiliki program seperti itu. Program FKPT lebih banyak bergerak pada bidang pencegahan. Program-

⁴⁷ FKPT dibentuk berdasarkan pada Peraturan Kepala BNPT Nomor: PER- 02/K.BNPT/1/2012 tentang Pembentukan Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme di Daerah.

program pencegahan ini baik dilakukan oleh BNPT sendiri, Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Provinsi Sulawesi Tengah, maupun oleh BNPT bersinergi dengan kelompok masyarakat yang ada di Poso.⁴⁸

Sedangkan program deradikalisasi secara umum sudah dijalankan oleh berbagai instansi pemerintah dan masyarakat sesuai dengan peran dan kapasitasnya. Instansi pemerintah yang melakukan program deradikalisasi seharusnya tidak hanya terbatas kepada BNPT dan kepolisian semata, akan tetapi semua kementerian dan lembaga negara seharusnya terlibat sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Meskipun demikian, program deradikalisasi yang berjalan selama ini belum didesain secara integratif, komprehensif, dan sistemik sehingga program ini masih sulit diukur keberhasilannya. Dalam banyak hal, program ini masih menghadapi banyak kekurangan dan kelemahan.

Secara konseptual, deradikalisasi merupakan semua upaya untuk mentransformasi dari keyakinan atau ideologi radikal menjadi tidak radikal dengan pendekatan multi dan interdisipliner (agama, sosial, budaya, dan selainnya) bagi orang yang terpengaruh oleh keyakinan radikal. Atas dasar itu, deradikalisasi lebih pada upaya melakukan perubahan kognitif atau memoderasi pemikiran atau keyakinan seseorang. Dengan demikian, deradikalisasi memiliki program jangka panjang. Ia bekerja di tingkat

⁴⁸ Wawancara dengan Bapak Muhtadin, Pengurus FKPT Sulawesi Tengah, 5 September 2017 di Palu.

ideologi dengan tujuan mengubah doktrin dan interpretasi pemahaman keagamaan teroris. Dari konteks pemahaman di atas, deradikalisasi dapat dimaknai sebagai semua upaya untuk mentransformasi dari keyakinan atau ideologi radikal menjadi tidak radikal dengan berbagai pendekatan multi dan interdisipliner. Sebagai program kegiatan, implementasi deradikalisasi dapat berbentuk upaya identifikasi, rehabilitasi, reedukasi, dan resosialisasi bagi individu atau kelompok masyarakat yang terpengaruh oleh keyakinan radikal dengan mengedepankan prinsip pemberdayaan, hak asasi manusia, supremasi hukum dan kesetaraan.⁴⁹

Secara umum, program deradikalisasi/pembinaan yang sudah dilakukan di Poso, yaitu:

1. Pembinaan pemahaman keagamaan
Pembinaan keagamaan merupakan rangkaian bimbingan keagamaan kepada mereka agar memiliki pemahaman keagamaan yang inklusif, damai, dan toleran. Pembinaan ini mengacu pada moderasi ideologi yaitu dengan melakukan perubahan orientasi ideologi radikal dan kekerasan kepada orientasi ideologi yang inklusif, damai, dan toleran.⁵⁰ Pembinaan ini diarahkan pada pelurusan pemahaman terhadap

⁴⁹ BNPT, *Blueprint Deradikalisasi*, 2013.

⁵⁰ Agus SB, *Deradikalisasi Nusantara: Perang Semesta Berbasis Kearifan Lokal Melawan Radikalisme dan Terorisme*, (Jakarta: Daulat Press. 2016). hlm. 158.

suatu ajaran yang dikontekstualisasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

2. Pembinaan wawasan kebangsaan
Pembinaan ini diarahkan pada pemahaman dan semangat kebangsaan warga negara terhadap negaranya. Pembinaan ini untuk memoderasi paham kekerasan dengan memberikan pemahaman nasionalisme kenegaraan dan kebangsaan Indonesia.
3. Pembinaan psikologis
Pembinaan ini diarahkan pada penguatan mental untuk meninggalkan paham radikal dan kembali ber-baur di masyarakat sebagai warga negara yang baik.
4. Pembinaan kemandirian/pemberdayaan ekonomi
Pembinaan ini diarahkan pada pembinaan keterampilan praktis yang dapat dimiliki oleh seseorang atau kelompok agar tetap *survive* menjalani hidup di masyarakat. Pembinaan ini juga menjadi bukti perhatian dari negara terhadap warganya yang telah melakukan kejahatan *extraordinary crime*.

Untuk kegiatan pembinaan/deradikalisasi, secara khusus BNPT mengarahkan kegiatannya kepada mantan warga binaan pasyarakatan kasus tindak pidana terorisme, keluarga, jaringan, orang/kelompok yang berpotensi melakukan aksi/tindakan radikal terorisme. Kegiatan pembinaan tersebut berupa pembinaan pemahaman keagamaan, psikologi, wawasan kebangsaan, dan kemandirian/kewirausahaan.

Sebagai gambaran tentang program BNPT, pada 2011, Direktorat Deradikalisasi BNPT pernah melakukan pelatihan kewirausahaan pembuatan kue kepada para keluarga warga binaan pemasyarakatan kasus tindak pidana terorisme di Kota Palu, dengan peserta dari Poso. Pelatihan kewirausahaan ini pada dasarnya sebagai bagian dari program deradikalisasi.

Pada program pelatihan pembuatan kue tersebut, para keluarga warga binaan pemasyarakatan kasus tindak pidana terorisme diberikan pelatihan praktis pembuatan kue, seperti nastar, bolu, hingga kue ulang tahun. Pada saat itu, peserta dibagi menjadi beberapa kelompok dan masing-masing kelompok diberikan satu set perlengkapan pembuatan kue.

Apa yang dilakukan oleh BNPT pada saat itu, telah memberikan keterampilan praktis kepada para peserta sekaligus memberikan alat yang dapat digunakan oleh mereka untuk membuat dan mengembangkan wirausaha pembuatan kue di Poso. Hal ini merupakan stimulus bagi mereka untuk terus mengembangkan wirausahanya di Poso, sehingga dapat membantu untuk pemenuhan kebutuhan mereka sehari-hari.

Berikut beberapa catatan tentang program pemberdayaan ekonomi yang sudah dilaksanakan oleh BNPT, yaitu:⁵¹

⁵¹ Disarikan dari berbagai sumber dalam pelaksanaan program deradikalisasi.

- a. Pemberdayaan ekonomi sebagai bagian dari program deradikalisasi dilakukan sebagai upaya untuk pembinaan kemandirian kepada 4 (empat) kelompok yaitu para mantan pelaku tindak pidana terorisme, keluarga, jaringan dan orang/kelompok yang terindikasi/berpotensi memiliki paham radikal terorisme. Jadi kualifikasi sasaran program ini adalah bukan dititikberatkan pada pemuda, melainkan siapa saja yang termasuk dalam kategori 4 kelompok tersebut.
- b. Pemberdayaan ekonomi didahului dengan melakukan identifikasi, baik identifikasi data penerima maupun kegiatan ekonomi yang dibutuhkan. Hal ini dilakukan untuk memastikan kepada orang yang tepat sebagai penerima dan memberikan perlengkapan wirausaha sesuai dengan kebutuhan peserta.
- c. Pemberdayaan ekonomi diberikan dalam bentuk pelatihan wirausaha secara singkat, termasuk perhitungan pembiayaan dan pemberian alat/barang/perlengkapan yang dapat dijadikan wirausaha. Jadi, pemberdayaan ekonominya dengan tidak memberikan dalam bentuk modal /uang.
- d. Pemberdayaan ekonomi diberikan sesuai dengan potensi, minat, bakat, dan kecenderungan pasar yang ada di Poso. Misalnya, ternak kambing, sapi, jual beli sembako, motor sebagai sarana untuk ngojek, dan sebagainya.

- e. Pemberdayaan ekonomi dilakukan dengan berkoordinasi dengan dinas terkait di daerah.

Dalam pelaksanaannya terdapat beberapa catatan pada pelaksanaan program-program pemberdayaan ekonomi yang langsung diberikan kepada para mantan narapidana terorisme, keluarga, jaringan, dan orang/kelompok yang potensi melakukan aksi terorisme, yaitu:⁵²

- a. Pemilihan peserta kegiatan atau penerima manfaat kegiatan pemberdayaan ekonomi. Menurut mereka, pemilihan peserta ini terkadang tidak jelas kualifikasinya, sehingga banyak silang perdebatan di kalangan mereka tentang nama-nama peserta tersebut. Menurut mereka, semestinya perlu dilakukan standardisasi yang jelas dan dilakukan secara tegas.
- b. Di antara para peserta yang diikutkan program, terdapat beberapa yang tidak serius bahkan terkesan hanya untuk mendapatkan barang semata, setelah itu mereka jual lagi. Hal ini tentunya sudah tidak sesuai dengan tujuan utama pemberdayaan ekonomi kepada mereka.
- c. Program pemberdayaan ekonomi dilakukan dengan cara memberikan bantuan barang atau alat wirausaha, tidak berbentuk modal usaha. Program seperti ini lebih tepat dibandingkan dengan pemberian modal usaha.

⁵² Disarikan dari hasil wawancara dengan beberapa mantan narapidana terorisme dan FGD, 26-27 Agustus 2017 di Poso.

- d. Program pemberdayaan ekonomi dilakukan secara individual yaitu dengan cara memberikan satu jenis barang atau alat/perlengkapan yang dapat digunakan untuk berwirausaha.
- e. Ada peserta yang secara terpaksa menuliskan perlengkapan atau alat wirausaha yang akan dibantu, karena yang dia inginkan tidak bisa terpenuhi. Peserta seperti ini biasanya setelah menerima barang wirausaha tersebut, akan langsung dijual. Sedangkan uang hasil penjualan tersebut ada yang digunakan untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari dan ada juga yang digunakan untuk membeli barang/ alat/ sarana wirausaha yang lain.
- f. Peserta yang diberikan bantuan barang atau alat/ perlengkapan berwirausaha tidak mau menjadi satu kelompok, mereka lebih senang diberikan secara individual. Mereka beralasan, jika dilakukan secara berkelompok maka akan lebih mudah untuk bubar, 'pecah kongsi'.
- g. Banyak di antara peserta yang sering berubah-ubah dalam mengajukan permohonan alat wirausaha. Tampak mereka masih belum memahami potensi, minat, bakat, dan segmen pasar dari wirausaha yang akan dijalaninya, mereka juga dengan mudah dipengaruhi oleh kawan-kawannya.

- h. Pelaksanaan pelatihan yang sangat singkat, bahkan tidak menyentuh secara langsung alat/barang jenis usaha yang dibagikan. Pelatihan ini lebih kepada persoalan manajerial dan keuangan tidak secara praktis wirausaha. Ke depan, ini perlu menjadi pertimbangan sebelum dilakukan kegiatan pemberdayaan ekonomi.

6. Peran Pemerintah Daerah

Di samping pemerintah pusat, program pemberdayaan ekonomi juga tidak bisa dilepaskan dari peran strategi pemerintah daerah. Bahkan program-program pemberdayaan ekonomi yang dilakukan oleh instansi pemerintah pusat pun tetap berkoordinasi dengan pemerintah daerah yang bersangkutan, termasuk dengan aparat keamanan daerah setempat.

Mayoritas instansi pemerintah daerah tidak memiliki program pemberdayaan ekonomi kepada para pemuda, apalagi terkait CVE. Mereka lebih banyak melakukan program-program rutin pembinaan kepada masyarakat, khususnya pembinaan kerukunan dan keagamaan, seperti oleh Kemenag, FKUB, Kesbangpol, dan lain lain.

Terdapat instansi yang sebenarnya tidak memiliki program pemberdayaan ekonomi pemuda, apalagi terkait CVE. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya, kegiatan instansi tersebut banyak melibatkan mantan kombatan yang ada di Poso. Sehingga para mantan kombatan tersebut merasa sangat terbantu, khususnya dalam pekerjaan untuk

mendapatkan penghidupan. Instansi tersebut adalah Dinas Pekerjaan Umum. Bahkan, menurut pengakuan mantan warga binaan pemasyarakatan kasus tindak pidana terorisme, bahwa apa yang dilakukan oleh Dinas PU tersebut sangat mengena. Untuk mendapatkan pekerjaan itu sendiri, syaratnya juga sama dengan warga masyarakat lainnya. Jadi dalam hal ini bukan terlebih dahulu diatur atau dimenangkan untuk kelompok tertentu. Di kalangan warga binaan pemasyarakatan kasus tindak pidana terorisme banyak yang sudah memiliki usaha dagang atau bisnis berbentuk CV, sehingga mereka bisa ikut lelang pekerjaan.⁵³

Dinas Sosial tidak memiliki anggaran/dana yang secara khusus diperuntukkan untuk pemberdayaan ekonomi pemuda dalam rangka menangkal paham radikal. Anggaran yang ada diperuntukkan bagi masyarakat secara umum, tidak spesifik untuk menangkal paham radikal.

Dinsos sedang merancang program yang bisa membuat kegiatan yang bisa mengena pada kelompok tersebut. Sehingga mereka bisa berkegiatan sosial dan bisa mendapatkan bantuan sosial.

Perencanaan selanjutnya, Dinsos berencana akan menganggarkan agar para mantan warga binaan pemasyarakatan kasus tindak pidana terorisme bisa dilibatkan dalam program Usaha Ekonomi Mandiri

⁵³ Hasil wawancara dengan Upik dan Irwanto Irano, 26 Agustus 2017 di Poso.

(UEM). Ini termasuk program unggulan di Dinas Sosial. Rencananya para mantan Warga binaan pemasyarakatan kasus tindak pidana terorisme akan dimasukkan dalam program ini. Sedangkan yang sudah berjalan program ini bisa diberikan kepada penyandang disabilitas dengan cara mengirim mereka untuk ikut pelatihan di Makassar dan setelah mereka mampu untuk terjun di masyarakat. Maka mereka akan didampingi dan diberikan bimbingan. Perencanaan ke depannya program ini akan diberikan juga kepada mantan warga binaan pemasyarakatan kasus tindak pidana terorisme.⁵⁴

Dinas Kesra Kabupaten Poso, banyak menyampaikan pesan perdamaian dalam sektor agama. Dalam hal ini yang terlibat semua golongan baik anak-anak, pemuda, maupun orangtua, jadi tidak secara khusus diperuntukkan kepada para pemuda. Terkait pemberdayaan ekonomi Kesra Kabupaten Poso belum menjalankan program di bidang itu. Secara teknis program pemberdayaan usaha ekonomi produktif belum banyak dilakukan. Lebih banyak kepada bidang keagamaan.⁵⁵ Oleh sebab itu, perlu adanya evaluasi agar bisa mengetahui ke mana arah program tersebut. Kemudian perlu juga ada target untuk pelaksanaan program tersebut agar yang mendapatkan programnya hanya orang itu saja dan tidak bisa diberikan kepada yang

⁵⁴ Disarikan dari hasil wawancara dengan Bapak Fuad dan diskusi dalam FGD tentang Pemberdayaan Ekonomi terkait CVE, di Poso.

⁵⁵ Disarikan dari hasil wawancara dan diskusi dalam FGD tentang Pemberdayaan Ekonomi terkait CVE, 11 September 2017 di Poso.

lain. Dengan kata lain, kualifikasi penerima program harus jelas.

Menurutnya, secara garis besar dinas-dinas dan komunitas yang ada belum ada yang melaksanakan program pemberdayaan ekonomi bagi pemuda dan mantan warga binaan pemasyarakatan kasus tindak pidana terorisme. Untuk itu, para pemangku kepentingan (*stakeholder*) di sana penting untuk berkolaborasi dan menyampaikan kepada pemerintah daerah, agar pemberdayaan ekonomi bagi pemuda dan mantan warga binaan pemasyarakatan kasus tindak pidana terorisme bisa dimasukkan dalam program pemerintah untuk mencegah paham radikal yang berkembang di Kabupaten Poso.

Ada pandangan dari beberapa orang bahwa pendekatan hari ini adalah pendekatan proyek, karena pelaksanaannya tidak ditopang oleh data yang akurat dan dimiliki secara sama oleh instansi-instansi yang berwenang dan yang akan melakukan program. Misalnya, banyak bantuan yang tidak sesuai dengan lingkungan dan kebiasaannya. Oleh sebab itu, pentingnya identifikasi agar tidak salah sasaran dan bantuan yang diberikan menjadi lebih bermanfaat. Banyak bantuan yang hanya diberikan kepada orang yang itu-itu saja. Untuk itu, pentingnya dilakukan pendataan ulang yang lebih komprehensif.

Dalam kasus tertentu, bantuan personal membuat mereka manja dan tidak berkembang. Oleh sebab itu, penting untuk membentuk/ mengembangkan kelompok

yang sudah berjalan agar lebih besar. Banyak program yang terkesan dipaksakan, hanya memanfaatkan momentum untuk mendapatkan program. Mendukung kelompok yang sudah jalan lebih penting daripada membentuk kelompok baru yang tidak jalan nantinya.

Masalah yang ditemui di lapangan banyak jenis usaha yang berubah-ubah dari penerima manfaat atau mantan warga binaan pemasyarakatan kasus tindak pidana terorisme karena kecenderungan yang berubah-ubah. Sebab banyak juga orang yang hanya punya jiwa pekerja tetapi tidak punya jiwa wirausaha. Maka perlu ada program magang bagi mereka, agar nantinya mereka bisa mengembangkan kemampuan mereka sendiri.

Menurut Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Poso, program pemberdayaan ekonomi yang diselenggarakan oleh pusat tidak banyak sampai informasinya di daerah. Bahkan, mereka banyak yang harus 'menjemput bola' dan menanyakan ke pusat. Oleh sebab itu, banyak program dari Kemenpora seperti Wirausaha Pemula yang dikhususkan bagi pemuda di Kabupaten Poso, tidak ada pemuda yang mengikuti program tersebut. Pemberdayaan ekonomi bagi pemuda, apalagi terkait dengan pencegahan paham radikal belum banyak dilakukan oleh Dispora. Akan tetapi, semangat pemuda yang dilakukan oleh Dispora lebih banyak pengembangan bakat olahraga untuk menangkal pemuda dari bahaya narkoba dan memperkuat semangat nasionalisme. Mereka

yang disibukkan dengan kegiatan olahraga akan terhindar dari hal-hal negatif.⁵⁶

Belum ada program yang didampingi oleh Dispora dalam wilayah pemberdayaan ekonomi pemuda. Belum pernah ada program pemberdayaan ekonomi bagi pemuda yang terkait pencegahan CVE. Pernah ada kelompok pemuda yang mengajukan proposal kewirausahaan akan tetapi tidak bisa ditindaklanjuti karena minimnya dana dari pemerintah kabupaten. Terkait pemberdayaan ekonomi, sebenarnya di Kabupaten Poso banyak pemuda yang punya usaha mandiri, tetapi mereka bergerak sendiri, dan bukan atas pendampingan dari Dispora.

Kementerian agama, secara spesifik juga tidak memiliki program pemberdayaan ekonomi kepada para pemuda, melalui para penyuluh yang sudah tersebar di berbagai daerah di Kabupaten Poso⁵⁷ serta Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Poso.⁵⁸ Sesuai dengan Permendagri 14/2016 tidak ada bantuan untuk UMKM di tahun 2016, kecuali mereka mengakses secara *online* ke Dirjen UMKM di Jakarta, akan tetapi harus berkelompok, sudah berjalan, serta memiliki akta notaris. Dalam hal ini, bagi yang sudah mempunyai izin usaha bisa mengajukan program ke Dirjen UMKM Kementerian Koperasi dan UKM tanpa melalui dinas di Kabupaten Poso. Alasannya,

⁵⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Mursid, 28 Agustus 2017 di Poso.

⁵⁷ Hasil pertemuan di Poso, yang difasilitasi oleh LPMS, 26 Agustus 2017 di Poso.

⁵⁸ Hasil wawancara dengan Julen di Dinas UMKM, 28 Agustus 2017 di Poso.

karena sudah dibantu beberapa tahun sebelumnya maka tinggal pengembangan saja.

Di samping itu, ada juga program dana hibah, akan tetapi tidak banyak dana yang keluar sedangkan proposal yang masuk tidak berimbang. Program yang berjalan sejauh ini adalah memantau program kewirausahaan yang sudah berjalan. Adapun program yang berjalan biasanya dari provinsi, bukan di kabupaten. Mulai dari 2016 tugas UMKM kabupaten hanya memantau dan mengarahkan.

TNI di wilayah Kabupaten Poso lebih banyak membantu ketika diminta oleh pihak-pihak terkait. Sebab tugas dan wewenangnya berbeda dengan dinas-dinas yang ada di bawah naungan pemerintah daerah. Selama ini yang dilakukan oleh TNI melalui Kodim adalah membantu masyarakat memperbaiki rumah yang tidak layak huni, membantu petani untuk menanam, membuat pupuk fermentasi, dan lain-lain, jadi tidak secara spesifik melakukan program pemberdayaan ekonomi di kalangan pemuda dalam rangka menangkal CVE.⁵⁹

Di kalangan pemuda itu sendiri, Kodim sering hadir untuk memberikan pemahaman tentang nasionalisme untuk meningkatkan kesadaran dan semangat kebangsaan. Sehingga kecintaan para pemuda terhadap NKRI di Kabupaten Poso semakin tinggi dan tidak ada hal yang mengancam keamanan di wilayah Poso. Dalam hal ini, berkomunikasi serta berinteraksi dengan masyarakat menjadi

⁵⁹ Hasil wawancara dengan anggota Kodim Poso, 28 Agustus 2017 di Poso.

salah satu cara TNI untuk dekat dengan masyarakat dan menciptakan keamanan di lingkungan sekitar.⁶⁰

Di pihak kepolisian, melalui Polres Kabupaten Poso sudah banyak melakukan pendekatan dengan masyarakat. Kedekatan antara polisi dengan masyarakat ini perlu terus ditingkatkan karena dapat bersinergi dalam menciptakan suasana keamanan yang kondusif. Polisi, melalui Babinkamtibmas, terus menyatu dengan masyarakat di mana pun mereka bertugas.

Terkait pemberdayaan ekonomi di kalangan pemuda, memang jika dilihat dari Tupoksinya itu tidak sesuai dengan kepolisian. Akan tetapi pihak kepolisian juga pernah memberikan bantuan berupa ternak sapi dan peralatan wirausaha lainnya khususnya kepada para mantan warga binaan pemasyarakatan kasus tindak pidana terorisme dan keluarganya.

Disamping itu, Polres Kabupaten Poso telah banyak melakukan kegiatan di kalangan para pemuda, yaitu pemberian materi kepada pelajar dengan bekerja sama dengan dinas terkait. Agar para pelajar tidak dekat dengan paham radikal, dengan cara melakukan ceramah-ceramah di sekolah, kampus, dan berbagai kelompok masyarakat. Babinkamtibmas banyak berperan aktif dalam menangkal paham tersebut, di Tamanjeka, misalnya, Babinkamtibmas di sana melakukan kegiatan dengan membentuk tim sepak bola di beberapa wilayah. Misalnya di wilayah pesisir

⁶⁰ Hasil wawancara dengan anggota Kodim Poso, 28 Agustus 2017 di Poso.

dengan merekrut pemain sepak bola. Sedangkan pihak polres menyiapkan bola, kostum, dan lain-lain, untuk persiapan perlombaan. Kegiatan ini dimaksudkan agar pemuda tidak ikut-ikutan dengan paham radikal, bersatu dengan sportif, serta berperan aktif dalam olahraga. Polres Poso punya program yang diberi nama *Polisi Madagoraya* artinya polisi yang baik hati.⁶¹

Dalam perjalanannya, program ini berjalan lancar dan sesuai dengan harapan. Bagi kalangan masyarakat pengajian, khususnya ibu-ibu, kamtibmas turun untuk menyampaikan ceramah untuk perdamaian dan anti radikalisme. Selain itu, Polres banyak membantu dan menangani mantan warga binaan pemasyarakatan kasus tindak pidana terorisme, keluarga, dan korban, bantuan tersebut baik berupa bingkisan sembako maupun dalam pembuatan SIM. Dalam hal ini, pihak kepolisian juga banyak melakukan aksi simpatik kepada masyarakat. Ke depannya, program pemberdayaan ekonomi kepada para pemuda khususnya dalam rangka CVE, perlu diperkuat bahkan dianggarkan secara khusus oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Poso. Dalam diskusi yang berkembang, pada *focus group discussion* yang dihadiri oleh beberapa perwakilan dari instansi pemerintah daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Poso, dan beberapa ormas yang ada di Poso, muncul harapan DPRD dapat

⁶¹ Hasil wawancara dengan anggota Polres Poso, 28 Agustus 2017 di Poso.

menggulirkan program-program pemberdayaan ekonomi kepada para pemuda ini.⁶²

7. Peran Organisasi Keislaman dan Organisasi Kepemudaan

Di kalangan organisasi Keislaman dan organisasi kepemudaan juga tidak memiliki program yang secara spesifik pemberdayaan ekonomi di kalangan para pemuda dalam rangka menangkal paham radikal. Organisasi Keislaman banyak melakukan dakwah untuk menyerukan kedamaian, sikap saling menghormati perbedaan, ke-taatan dalam beribadah, dan sebagainya. Akan tetapi di kalangan organisasi tersebut, ada juga yang melakukan pendampingan terhadap istri dan atau keluarga warga binaan pemasyarakatan kasus tindak pidana terorisme. Antara lain Aisiyah (Muhammadiyah) yang banyak memberikan pendampingan terhadap istri dari mantan warga binaan pemasyarakatan kasus tindak pidana terorisme baik yang masih di LAPAS maupun yang sudah meninggal.

Mereka ini perlu didukung dalam satu kegiatan agar bisa berperan aktif dan juga tidak bergantung dengan pendampingan tersebut. Oleh sebab itu perlu diarahkan kepada ekonomi kreatif dan mandiri. Agar para mantan warga binaan pemasyarakatan kasus tindak pidana terorisme dan keluarganya bisa bergabung dengan masyarakat

⁶² Hasil FGD tentang Pemberdayaan Ekonomi bagi Pemuda terkait CVE, 11 September 2017 di Poso.

dan kepercayaan dari masyarakat. Diharapkan mereka bisa terus berkembang baik dalam segi ekonomi dan lain-lain dan tidak ada pikiran untuk bertindak anarkis lagi.

Sedangkan bagi Komda Al-khairaat Poso, terkait kasus-kasus terorisme, mereka mengutuk keras akan tindakan radikalisme. Mereka punya program untuk pemuda juga di bawah naungan Himpunan Pemuda Al-khairaat (HPA) yang akan melakukan pengaderan dan pembinaan kepada pemuda al-Khairaat agar tidak terjerat dalam lingkaran paham tersebut.⁶³

Pemuda Al-Khairaat selalu memberikan arahan kepada pemuda tentang paham nasionalisme, kebhinekaan, dan lain-lain. Oleh sebab itu, sebenarnya HPA punya program pemberdayaan ekonomi bagi pemuda, terlebih banyak sekali tanah wakaf yang diberikan kepada PB Al-Khairaat yang sebenarnya bisa dikelola dengan baik. Namun, lagi-lagi terbentur anggaran yang menghalangi terlaksananya program tersebut. HPA sedang berusaha untuk terhubung dengan beberapa dinas terkait agar pemberdayaan ekonomi bagi pemuda dapat segera direalisasikan. Ekonomi mandiri menjadi salah satu cita-cita HPA dan banyak pemuda yang bisa mandiri dalam ekonomi. Sedangkan program yang selama ini dilakukan masih banyak bersifat seminar sehingga belum banyak menyentuh kepada penerapan ekonomi mandiri. Begitu juga dengan PB Al-Khairaat, yang juga tidak memiliki program pemberdayaan ekonomi secara khusus kepada

⁶³ Hasil wawancara dengan Fadly, 4 September 2017 di Palu.

para pemuda tentang CVE. Program-program PB Al-Khairaat, lebih banyak pada bidang pendidikan dan dakwah.⁶⁴

Begitupun dengan pengurus Muhammadiyah Kabupaten Poso, bahwa orang yang melakukan aksi radikal terorisme berarti pemahaman agamanya belum komprehensif. Sedangkan terkait program pemberdayaan ekonomi bagi pemuda, beliau mengatakan Muhammadiyah sebenarnya sedang *concern* dengan program ekonomi mandiri. Namun, untuk pelaksanaannya masih mengalami hambatan, baik dari faktor dana maupun yang lain-lain. Meskipun demikian, organisasi ini akan terus mengupayakan program tersebut, terutama pemberdayaan ekonomi, sehingga para pemuda Muhammadiyah tidak banyak yang bergabung dalam lingkaran paham-paham radikal.⁶⁵

Kepengurusan GP Ansor Kabupaten Poso baru kembali dibentuk setelah lama tidak aktif. Akan tetapi, dia mengatakan sesuai dengan arahan pusat terkait upaya menangkal paham radikal, mereka siap hadir untuk menangkal paham tersebut. Sejauh ini program terkait pemberdayaan ekonomi bagi para muda belum berjalan, sehingga perlu ditindaklanjuti,⁶⁶ mengingat usia muda rentan paham-paham radikal. Berdasar data yang beredar,

⁶⁴ Wawancara dengan Ridwan, 5 September 2017 di Palu.

⁶⁵ Hasil FGD tentang Pemberdayaan Ekonomi bagi Pemuda terkait CVE, 11 September 2017 di Poso.

⁶⁶ Hasil FGD tentang Pemberdayaan Ekonomi bagi Pemuda terkait CVE, 11 September 2017 di Poso.

usia pemuda yang bergabung dengan ISIS sekitar 20-40 tahun.

Tidak jauh berbeda dengan GP Ansor, KNPI Kabupaten Poso mengatakan bahwa OKP yang ada di Kabupaten Poso kurang lebih 60 OKP. Akan tetapi KNPI hadir hanya sebagai rumah bersama OKP yang ada saja. Tidak banyak bisa memberikan pengawasan kepada masing-masing OKP sehingga tidak banyak mengetahui program pemberdayaan ekonomi. Akan tetapi KNPI terus berkoordinasi dengan OKP agar bekerja bersama untuk menangkal paham radikal, sehingga tercipta keamanan, kedamaian, dan ketenangan di Kabupaten Poso.

Di kalangan FKUB,⁶⁷ deradikalisasi masih sebatas kegiatan non fisik. Baik di Kemenag sekalipun, menangkal paham radikal masuk dalam program kerukunan umat beragama yang tidak memiliki anggaran banyak. Kita harus mengolaborasikan bersama untuk meminta pemerintah untuk turun andil dan bisa digunakan untuk pemberdayaan ekonomi. Apabila masyarakat sudah punya pemahaman untuk peduli dengan mantan warga binaan pasyarakatan kasus tindak pidana terorisme, maka akan ada semangat bersama untuk membangun ekonomi bagi para mantan warga binaan pasyarakatan kasus tindak pidana terorisme dan keluarganya. Dari FKUB belum ada kegiatan pemberdayaan ekonomi untuk kegiatan ekonomi. Pernah mendapat dana hibah 30 juta

⁶⁷ Hasil FGD tentang Pemberdayaan Ekonomi bagi Pemuda terkait CVE, 11 September 2017 di Poso.

hanya untuk kegiatan non fisik atau untuk pembinaan saja. Tidak bisa menyentuh kepada kegiatan pemberdayaan ekonomi.

- **Saran/Rekomendasi**

1. Bagi Pemerintah Pusat, program pemberdayaan ekonomi perlu dilakukan secara terukur, terprogram, dan berkesinambungan. Program ini harus diawali dengan pendataan yang akurat, berdasarkan dari berbagai sumber. Misalnya, kualifikasi/kategori penerima, unit-unit usaha yang sudah berjalan, kemampuan wirausaha calon penerima, dan sebagainya.
2. Sebelum dilakukan pemberdayaan ekonomi, perlu dipetakan terlebih dahulu tentang siapa-siapa yang memiliki kemampuan berwirausaha dan siapa-siapa yang hanya memiliki kemampuan untuk bekerja semata. Dari pemetaan ini, bagi yang memiliki kemampuan wirausaha maka akan dikembangkan, sedangkan yang hanya memiliki kemampuan bekerja, maka akan disalurkan ke industri atau instansi yang membutuhkan tenaga kerja.
3. Pemberdayaan ekonomi diawali dari pelatihan yang dilakukan secara matang, tidak hanya sekadarnya. Karena dari pelatihan itulah sebagai bekal para peserta baik untuk memulai maupun mengembangkan wirausahanya.

4. Pemberdayaan ekonomi dilakukan dengan metode pendampingan.
5. Perlu dilakukan *monitoring* untuk memastikan kelanjutan wirausaha yang telah dirintisnya.
6. Perlu ada struktur penanggung jawab dari kalangan mantan warga binaan pemasyarakatan kasus tindak pidana terorisme atas program-program yang diberikan. Konteks Poso ini berbeda dengan daerah lain. Poso merupakan kabupaten yang sudah majemuk, banyak orang dari luar daerah Poso datang dan mengembangkan usaha di sana. Untuk mengembangkan semangat para mantan warga binaan pemasyarakatan kasus tindak pidana terorisme, pengusaha perlu memberikan motivasi kepada mereka bahwa perjuangan membangun usahanya dari nol. Dengan demikian, para peserta dapat termotivasi dan jiwa untuk usahanya tumbuh.
7. Pemberdayaan ekonomi perlu dilakukan dengan sistem pemagangan. Bagi peserta yang akan menerima bantuan, mereka perlu magang di tempat wirausaha yang akan mereka geluti. Hal ini diharapkan sebelum terjun, mereka sudah punya kemampuan dan mengerti apa yang harus mereka lakukan. Sehingga tidak ada lagi setelah menerima bantuan pemberdayaan ekonomi tidak ada hasilnya bahkan hilang begitu saja.
8. Bagi Pemerintah Kabupaten Poso, perlu dilakukan perencanaan yang matang, yang melibatkan ber-

bagai dinas terkait sehingga masing-masing dinas mendukung dan menguatkan program pemberdayaan ekonomi ini.

9. Dinas-dinas terkait perlu digerakkan kembali untuk melibatkan secara aktif para pemuda dalam kegiatan-kegiatan mereka.

BAB 4

Ekonomi Kaum Muda dan CVE di Solo, Jawa Tengah Tengah

1. Pendahuluan

Relasi efektivitas pemberdayaan ekonomi untuk menurunkan potensi tindakan radikalisme dan terorisme (*extra-ordinary crime*/tindakan kriminal luar biasa) perlu diuji lebih jauh. Studi ini sebenarnya sangat beririsan dengan studi sosial tentang pemberdayaan ekonomi dan kriminalitas. Pemberdayaan ekonomi sering dianggap efektif untuk menurunkan tingkat kriminalitas (melawan hukum). Dua hal tersebut memiliki relasi yang sangat erat di mana kriminalitas merupakan jalan pintas bagi kelompok yang dihadapkan oleh frustrasi ekonomi akibat tekanan kebutuhan hidup seperti pengangguran. Frustrasi ekonomi tersebut menjadi motivasi bagi seseorang untuk melakukan tindakan yang berlawanan dengan hukum. Suatu daerah yang memiliki tingkat pengangguran yang tinggi akan berkorelasi dengan tingginya angka kriminalitas. Pemberdayaan ekonomi dianggap perlu dan

efektif untuk menurunkan tindakan kriminal melawan hukum di masyarakat.⁶⁸

Sebenarnya beberapa studi terkini tentang pemberdayaan ekonomi dan tindakan melawan hukum itu mulai dibantah satu persatu. Kriminalitas tidak selalu dikaitkan dengan satu faktor terutama pengangguran (motif ekonomi),⁶⁹ karena tindakan kriminal itu memiliki varian faktor seperti psikologis, sosial, medis, agama, dan yang lain-lain.⁷⁰ Dalam penelitian lain, faktor ekonomi (yaitu pengangguran) dan kriminalitas dalam periodisasi yang panjang ternyata tidak memiliki korelasi yang positif.⁷¹ Karena itu pemberdayaan ekonomi secara riil tidak berdampak langsung pada penurunan angka tindakan kriminal.

Studi di atas tentu memunculkan pertanyaan kritis, lalu bagaimana dengan efektivitas upaya pemberdayaan ekonomi untuk menanggulangi/menurunkan potensi tindakan kriminal luar biasa seperti radikalisme dan terorisme dalam rangka *counter violence extremism* (CVE) di Indonesia? Di satu sisi, radikalisme dan terorisme seperti yang dilakukan oleh kelompok Jama'ah Islamiyah

⁶⁸ Jeffrey Leigh Sedgwick, "Deterring Criminals: Policy Making and the American Political Tradition," The American Enterprise Institute for Public Policy Research (Washington, DC: AEI, 1980).

⁶⁹ Matthew D. Melick, "The Relationship between Crime and Unemployment," *The Park Place Economist*, Volume 11, Issue 1, 2003.

⁷⁰ K. Lee, "Unemployment and crime," Econometric Society Austral Asian Meeting, Canberra, 2009.

⁷¹ Zuzana Janko dan Gurleen Popli, "Examining the link between crime and unemployment: a time-series analysis for Canada," *Applied Economics*, Volume 47, Issue 37, 2015.

dan ISIS 'bersaing' merebut pengaruh di kalangan kaum muda di Indonesia. Di sisi lain, naasnya program-program demikian justru sudah dilakukan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) baik secara langsung maupun melalui program kemitraan seperti Yayasan Prasasti Perdamaian (YPP) di Solo dan Yayasan Lingkar Perdamaian (YLP) yang baru saja didirikan di Lamongan.

Dalam studi ini, kami ingin melakukan penilaian (*assessment*) terhadap efektivitas pemberdayaan ekonomi terhadap kaum muda dalam rangka CVE dengan memilih kota Solo sebagai studi kasus. Bagaimana pemberdayaan ekonomi kaum muda selama ini telah dilakukan baik oleh pemerintah dan non pemerintah di sekolah, perguruan tinggi dan pusat pelatihan kewirausahaan lainnya, khususnya pada kelompok yang rentan kena dampak perkembangan radikalisme dan terorisme di Solo? Sejauh mana efektivitas lembaga lokal dalam melakukan pemberdayaan ekonomi kaum muda?

2. Solo dalam Bingkai Ekonomi

Dalam data BPS kota Solo, jumlah penduduk Solo mencapai 514.171 jiwa. Kecamatan yang memiliki penduduk terbanyak ada di daerah Banjarsari, namun kepadatan tertinggi ada di pusat ekonomi yang berada di daerah Pasar Kliwon dan Serengan. Populasi terbanyak ada pada rentang usia sekolah 15-24 tahun yang mencapai 100.8 jiwa. Sedangkan usia pemuda dari rentang 15-45 tahun cukup tinggi mencapai 252.893 jiwa atau 49,2%

dari total penduduk. Jumlah penduduk usia muda di kota membuat kota ini cukup dinamis baik dalam roda perekonomian maupun gerakan sosial.⁷²

Pertanian bukan sektor ekonomi yang utama di Solo. Karena lingkungan geografis Solo yang merupakan lingkungan perkotaan, keterbatasan lahan merupakan penyebab utama rendahnya sektor pertanian. Lahan sawah di Solo menurun dari 99,46 ha di tahun 2012 menjadi 95,39 ha di tahun 2016, faktor utama yang menyebabkan penurunan ini adalah alih fungsi lahan untuk pemukiman. Sektor pertanian menjadi tidak prospektif bagi ekonomi masyarakat, terlebih beberapa kecamatan seperti Serengan dan Pasar Kliwon tidak memiliki lahan sawah maupun lahan kosong. Sedangkan di Kecamatan Laweyan dan Jebres kondisi tanah persawahan juga sangat minim masing-masing di bawah angka 20 ha, hanya di Kecamatan Banjarsari saja yang masih terdapat tanah sawah yang luas.⁷³

Tingkat pendidikan usia 15 tahun ke atas yang hanya lulus Sekolah Dasar mencapai 16,6%, SMP 17,1%, SMA/K 41,3%, dan yang mengenyam pendidikan tinggi D-3/Sarjana mencapai 18,3%. Seperti halnya di daerah lain, sekolah kejuruan lebih diminati dibanding SMA (60% lebih). Namun demikian pengangguran lebih banyak berada pada lulusan SMA/K yang mencapai 6.116 jiwa.⁷⁴

⁷² BPS Kota Surakarta, *Kota Surakarta dalam Angka* (Solo: BPS Solo, 2017).

⁷³ *Ibid.*

⁷⁴ *Ibid.*

UMK/R kota Solo pada 2016 mencapai Rp 1.534.985. Jumlah ini masih di bawah kota-kota lain. Dalam skala provinsi, sebagai kota sentra produsen batik, UMR kota Solo cenderung masih rendah jika dibandingkan kota Kendal yang tidak menjadi sentra prioritas baik di bidang ekonomi maupun pariwisata di Jawa Tengah.

Pertumbuhan ekonomi kota Solo cukup bagus mencapai 5,32%, namun kota ini masih menyisakan pekerjaan domestik yaitu angka pengangguran pada usia kerja yang mencapai 4,53%. Hal ini diperparah dengan kemiskinan di kota Solo yang mencapai angka yang cukup tinggi 10,95%. Sebenarnya angka ini menurun dibandingkan tahun 2010 yang mencapai 13,9% dan sembilan tahun yang lalu yang mencapai 16,13%.⁷⁵ Namun demikian, persentase ini masih tinggi jika dibandingkan pusat kota lain di Jawa Tengah seperti kota Magelang, Pekalongan, Salatiga, dan Semarang. Yang perlu dicatat dari angka pengangguran ini adalah, pengangguran di kalangan laki-laki mencapai hampir 75% dibandingkan perempuan. Penelitian lebih lanjut perlu dilakukan untuk mengkaji tingginya pengangguran di antara kaum laki-laki terhadap masifnya keterlibatan mereka dalam laskar-laskar di kota Solo.

Kota Solo sebenarnya direncanakan menjadi pusat sentra industri ekonomi kreatif di mana beberapa produk kerajinan yang potensial seperti mebel ukir, rotan, ukir kaca, kulit, dan keris bisa dikembangkan di daerah ini. Dari sektor fesyen, selain Pekalongan, Solo merupakan sentra

⁷⁵ Data BPS Jawa Tengah 2017.

batik yang besar. Batik tulis Solo diekspor ke mancanegara dan menjadi lambang khas Indonesia. Bahkan, di Kota Solo kini sentra industri batik dengan berbagai skala terus bertumbuh seperti Kampung Batik Laweyan, Kauman, Tegalsari, Tegalayu, Tegalrejo, Sondakan, Batikan, dan Jongke. Beberapa merek terkenal seperti Danar Hadi, Batik Keris, dan Batik Semar merupakan ikon batik Solo yang mendunia. Data Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Solo menyebutkan, pada Oktober 2010, nilai ekspor mebel dari Solo mencapai 528.115 dolar Amerika Serikat (AS), sedangkan batik mencapai 911.991 dolar AS.⁷⁶

Beberapa sektor budaya yang dijadikan ikon pariwisata seperti wayang, gamelan, dan sendratari Solo merupakan sektor potensial di tengah sektor pariwisata yang meningkat di kota Solo. Hal ini diperkuat dengan adanya even-even kultural seperti Kirab Pusaka 1 Suro, Sekaten, Grebeg Sudiro, Grebeg Maulud, Grebeg Poso, Syawalan, dan Grebeg Besar merupakan aset kultural yang sangat penting bagi daya tarik pariwisata. Seiring dengan pertumbuhan pariwisata, sektor jasa seperti travel dan perhotelan tumbuh sedemikian pesat.

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata kota Solo mencatat bahwa jumlah kunjungan wisatawan berdasarkan obyek wisata dan tingkat inap hotel cukup tinggi. Pada data tahun 2010, sebanyak 718.521 wisatawan domestik dan 22.583 wisatawan asing berkunjung ke Solo. Tingkat inap

⁷⁶ "Industri Kreatif, Masa Depan Kota Solo," Kompas, 10 Desember 2010. <http://ekonomi.kompas.com/read/2010/12/10/05144252/Industri.Kreatif.Masa.Depan.Kota.Solo>.

hotel hingga Juni 2010 mencapai 528.937 orang. Tahun 2009, tercatat 1.054.283 wisatawan domestik dan 26.047 wisatawan asing berkunjung ke Solo.⁷⁷

Selain even kultural, pariwisata, dan sentra industri kreatif, kota Solo memiliki potensi wisata kuliner yang kaya. Namun sektor ini belum tergarap secara maksimal sehingga masih tertinggal dari kota lain, seperti Yogyakarta dan Bandung. Potensi lain yang cukup unik dari kota Solo yang belum dikembangkan dengan baik adalah Solo merupakan satu di antara tiga dari pusat produksi *shuttlecock* bulu tangkis yang besar di Indonesia, tepatnya kampung sentra industri *shuttlecock* bulu tangkis di Kecamatan Serengan. Namun demikian, menurut observasi kami di lapangan, produksi *shuttlecock* bulu tangkis ini masih berbasis industri rumah tangga yang sederhana yang secara teknologi masih tertinggal dari Tegal dan Malang. Jika dicermati lebih lanjut, industri kecil pembuatan *shuttlecock* bulu tangkis ini minimal akan memberdayakan 15 orang masyarakat di sekitarnya. Hal ini sangat berpotensi positif bagi pengembangan pemberdayaan ekonomi berbasis komunal di kota Solo.⁷⁸

Di antara potensi-potensi ekonomi yang dimiliki kota Solo, sektor pekerjaan yang paling diminati adalah di sektor wirausaha yang mencapai 39,9% (karena Solo sebagai sentra batik), namun sebagian besar mereka menjadi buruh dan karyawan di dalam sektor ini. Jumlah mereka

⁷⁷ *Ibid.*

⁷⁸ Observasi lapangan peneliti di sentra produksi rumah tangga *shuttlecock* di Kecamatan Serengan.

mencapai 169.558 jiwa di mana 102.110 di antaranya bekerja pada sektor kerja kasar. Di satu sisi keberadaan mereka sangat penting bagi penopang sirkulasi perekonomian kota Solo dari beberapa aktivitas pasar besar yang menyuplai produk-produk terutama batik ke seluruh Indonesia seperti pasar besar Klewer, kampung batik Laweyan, kampung batik Kauman, dan Pusat Grosir Solo (PGS).

Di sisi lain, SDM kota Solo tidak sesiap kota lain seperti Yogyakarta dan Bandung di sektor pariwisata, jasa dan pengembangan ekonomi kreatif terutama di kalangan muda. Masih terbatasnya pembinaan dan pemberdayaan untuk meningkatkan kemampuan SDM kaum muda pada sektor-sektor tersebut membuat banyak potensi daerah yang tidak dimanfaatkan secara maksimal. Sehingga peran serta kaum muda untuk masuk pada sektor ini ke depan masih sangat potensial karena pariwisata, jasa dan pengembangan ekonomi kreatif akan tumbuh secara dinamis di kota Solo.

- **Solo dalam Kacamata Sosial, Budaya, dan Politik**

Secara kultural, Solo merupakan jantung dari budaya Jawa. Di mana di kota ini pernah berdiri kerajaan Mataram yang merupakan pusat dari kekuasaan yang penting di Jawa. Karena berada pada lingkungan kerajaan, tidak mengherankan jika Solo secara kultural terkenal sebagai daerah yang masyarakatnya terbiasa menggunakan bahasa Jawa tertinggi dan halus (*krama inggil*), adat, sopan santun,

tata krama, serta perilaku (*unggah-ungguh*) lemah lembut sehingga sangat sulit dijumpai padanannya di daerah lain.

Solo merupakan potret sebuah keunikan. Kota ini merupakan pusat pergerakan sosial yang dinamis di daerah Jawa Tengah, dan juga merupakan titik pertemuan spektrum ideologi dari ekstrem kanan hingga kiri. Dengan hanya seluas 44 kilometer persegi, mampu menjadi barometer gerakan Islam di Indonesia. Namun demikian di kota ini kita tidak bisa menafikan komposisi masyarakat abangan yang masih mayoritas. Di daerah ini tumbuh berbagai even kontestasi gerakan yang terpelihara sejak sebelum kemerdekaan. Secara keagamaan, Islam merupakan agama mayoritas yang dianut oleh mayoritas masyarakat Solo. Angka persentasenya cukup tinggi yaitu 88,6%. Namun, entitas keislaman mereka tidaklah tunggal, di daerah ini banyak bertumbuhan organisasi-organisasi gerakan Islam dan non Islam baik dari yang moderat maupun keras.

Pengaruh Islam di Solo tidak lepas pengaruh kerajaan Mataram Islam yang merupakan pusat kekuasaan dan penyebaran Islam. Relasi antara kebudayaan Jawa dengan Islam sudah terbentuk sejak masa Susuhunan Pakubuwono II (1726-1749). Mataram memiliki relasi yang kuat dengan Pesantren Gebangtinatar milik Kyai Kasan Basari di Tegalsari, Ponorogo, Jawa Timur. Karena itu banyak anggota keluarga kerajaan yang dikirim untuk menimba ilmu agama di pesantren tersebut. Gerakan Islamisasi ini diteruskan oleh Susuhunan Pakubuwono IV (1788-1820)

dengan mengundang para kyai untuk mendirikan pondok pesantren di Solo.⁷⁹

Pada generasi awal, kerajaan Mataram memanggil Kyai dari Banyumas, Kyai Jamsari yang kemudian mendirikan pondok pesantren pertama di Daerah Jamsaren. Pesantren ini dihancurkan oleh Belanda pada Perang Diponegoro. Lalu Kyai Muhammad Idris dari Klaten membangun kembali pesantren ini hingga mencapai puncaknya pada tahun 1905 dengan mendirikan sekolah Islam modern pertama kali di Solo, Madrasah Manba'ul 'Ulum, atas inisiatif R. Adipati Sosrodiningrat dan Penghulu Tafsir Anom. Sekolah ini memadukan kurikulum agama dan kurikulum pendidikan sekuler. Sekolah ini termasuk sekolah modernis pertama bersamaan dengan sekolah modernis yang diinisiasi oleh organisasi Hadrami, Jama'at Khair. Namun berbeda dengan yang diupayakan oleh Jama'at Khair, sekolah Minba'ul 'Ulum didirikan dengan tujuan eksklusif untuk memproduksi lebih banyak ulama untuk dijadikan penghulu. Selain itu, madrasah ini hanya untuk kalangan anggota keluarga kerajaan dan priyayi, dan dibuka untuk rakyat umum ketika Kasunanan Solo mengalami kemunduran.⁸⁰

Karena berada di tengah pusat kekuasaan, Solo juga berkembang sebagai pusat ekonomi, terutama sebagai sentra produksi batik. Gerakan Islam yang fenomenal

⁷⁹ Muhammad Wildan, "The Nature of Islamic Radical in Solo," *Journal of Indonesian Islam*, vol. 07/01 (2013).

⁸⁰ *Ibid.*

pernah tumbuh di daerah ini seperti Sarekat Dagang Islam (SDI) atau selanjutnya dikenal dengan Sarekat Islam (SI) yang didirikan oleh H. Samanhudi di tahun 1905.⁸¹ SDI merupakan bentuk penyempurnaan organisasi sebelumnya yang bernama Rekso Rumekso (saling menjaga/tolong-menolong) yang tidak menonjolkan identitas Islam. Memasukkan label Islam pada organisasi itu dianggap efektif secara emosional untuk memperkuat identitas dan rasa saling terikat. Pendirian organisasi ini merupakan bentuk kontestasi para pedagang pribumi Islam yang ingin menyingkirkan hegemoni para Saudagar Cina di bidang industri batik. Para Saudagar Cina saat itu memiliki organisasi dagang yang kuat bernama Kong Sing, di mana H. Samanhudi merasa pernah dilecehkan ketika ikut bergabung dalam organisasi tersebut.⁸² Hal ini menggambarkan bahwa sejak awal abad ke-20, gerakan Islam memang tumbuh dan berkontestasi secara dinamis di Solo.

Adanya liberalisasi ekonomi yang dilakukan oleh Belanda sejak akhir abad ke-19, membuat pemilik modal

⁸¹ Ahmad Timur Jaelani, *The Sarekat Islam Movement: Its Contribution to Indonesian Nationalism*, Montreal: Tesis Ph.D. di McGill University, 1958. Tentang tahun pendirian ini dibenarkan oleh Tamar Djaja yang mewawancarai H. Samanhudi, Asmodimedjo, Kertoturano, Sumowerdoyo, Hj. Abduljadjak, Harsono Cokroaminoto, Abdul Moeis, Sjech Awad Sjahbal (teman akrab H. Samanhudi di Djamiat Khair dan Al-Irsyad), Ki Ahmad Bemawi, Raden Gunawan dan Hj. Abdulhalim. Baca M. Natsir, *Percakapan Antar Generasi: Pesanan Perjuangan Seorang Bapak*, diedit oleh A.W. Pratiknya dan N. Murbakusuma (Petaling Jaya: Dewan Pustaka Islam, 1991), 37-38.

⁸² A.P.E. Korver, *Sarekat Islam: Gerakan ratu Adil?* (Jakarta: Grafiti Pers, 1985) hlm. 13.

kapital sangat diuntungkan dengan melakukan penetrasi terhadap pasar,⁸³ sehingga mayoritas masyarakat Jawa saat ini berada pada level ekonomi yang paling bawah. Para Saudagar Cina menempati posisi prestisius dalam strata ekonomi. Mereka memonopoli perdagangan bahan-bahan dasar yang digunakan pribumi untuk membuat batik yang diimpor dari Cina daratan, seperti kain katun dan tinta.⁸⁴ Selain itu, para pedagang Cina juga menguasai rantai bisnis baik di tengah perkotaan hingga area pinggiran kota.⁸⁵ Hal ini membuat pebisnis pribumi di kota Solo yang menopangkan hidupnya dari industri pembuatan batik merasa sangat terkekang.⁸⁶ Sehingga gerakan boikot terhadap bisnis Cina pernah terjadi di kota Solo.⁸⁷

Meskipun gerakan Islam tumbuh subur di kota Solo, sejatinya masyarakat abangan (dalam terminologi Clifford Geertz)⁸⁸ masih menjadi mayoritas. Jika dirunut secara historis, hal ini terjadi karena upaya pembentukan kantong-kantong (*enclave*) komunitas demi kepentingan penjajah-

⁸³ Robert van Niel, *The Emergence of Modern Indonesian Elite*, The Hague dan Bandung: W. van Hoeve Ltd, 1960, 31-100.

⁸⁴ Korver, *Sarekat Islam: Gerakan Ratu Adil?*, 14-21.

⁸⁵ De Kat Angelino offered in *batikrapport* hlm. 321, that in Surakarta, 1930, Batik production populated by 236 East Indies native (Javanese), 86 Arab people, 60 Chinese, and 3 Europeans. The Chinese dominations were not only over batik but also cigarette and textile manufacturing, see Jean Gelman Taylor, *Indonesia: Peoples and Histories* (New Haven and London: Yale University Press, 2003), 295.

⁸⁶ van Niel, *The Emergence of Modern Indonesian*, 88-89.

⁸⁷ Taylor, *Indonesia: Peoples and Histories*, 295.

⁸⁸ Clifford Geertz, *Religion of Java* (Chicago: University of Chicago Press, 1976).

an. Belanda dan Kasunanan mengelompokkan wilayah berdasarkan afiliasi sosial, ekonomi dan budaya untuk memudahkan pengendalian sosial. Daerah yang memiliki lingkungan keislaman yang kuat akan mengelompok di daerah Kauman (kalangan priyayi), Pasar Kliwon (kalangan keturunan Arab), dan Laweyan (pengusaha Islam/santri).⁸⁹

Pengelompokan ini berdampak pada terbatasnya perluasan Islamisasi pada masyarakat Solo. Islamisasi terlihat menonjol karena berada di pusat kota, di sekeliling kekuasaan Kasunanan Surakarta dan sentra perdagangan, tetapi secara fisik tidak menyebar ke seluruh wilayah Solo. Karena sebaran Islamisasi hanya terkantong pada daerah tertentu saja. Dalam kasus Manba'ul 'Ulum, misalnya, yang dimonopoli hanya untuk kalangan keluarga kerajaan saja, proses Islamisasi tidak banyak melibatkan peran masyarakat.

Hal lain yang perlu dicermati adalah proses Islamisasi yang terjadi di Solo dilakukan secara politis-struktural. Diinisiasi secara *top down* oleh kekuasaan Kasunanan Surakarta. Gerakan Islamisasi bukan muncul karena inisiatif dari akar rumput seperti halnya Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Sehingga proses Islamisasi berlangsung secara kaku dan eksklusif, tidak secara bebas

⁸⁹ Muhammad Wildan, "Memetakan Islam Radikal: Studi atas Suburnya Gerakan Islam Radikal di Solo," dalam Martin van Bruinessen (ed.), *Islam Indonesia dalam Ancaman Fundamentalisme* (Bandung: Mizan, 2014).

dan dinamis di tengah masyarakat. Hal ini yang menjadi alasan logis, meskipun geliat gerakan Islam terkesan dinamis dan menonjol di kota Solo tetapi hal tersebut bersifat elitis dan didominasi oleh kalangan terpelajar, sehingga wajar jika masyarakat abangan tetap menjadi mayoritas di kota tersebut.

Dengan komposisi abangan yang banyak, masyarakat Solo secara sosiologis dan kultural menjadi lebih terbuka dengan ideologi-ideologi lain. Maka dari itu tidak mengherankan jika Solo juga menjadi basis PKI di masa lalu. Bahkan DN Aidit yang menjadi buronan paska gerakan 30 September 1965 melarikan diri ke daerah ini.⁹⁰ Jika ditarik garis ke belakang, hal itu bukanlah hal yang baru. Kyai Misbach yang merupakan tokoh gerakan sosialisme Islam juga berasal dari daerah Kauman. Bahkan ketika terjadi perpecahan organisasi Sarekat Islam, SI merah (Marxist) yang tumbuh di Semarang menjadikan Solo menjadi basis gerakan.⁹¹ Spektrum gerakan sosial baik yang paling kanan hingga yang paling kiri berkembang secara dinamis di kota ini

Setelah rezim Orde Baru, kota Solo dikuasai oleh Partai Golkar. kini pasca reformasi, PDI-P menjadi partai dominan yang menguasai suara mayoritas. Bahkan Solo dikenal sebagai lumbung pendukung partai tersebut.

⁹⁰ "Eksklusif G30S 1965: Pengakuan Penyergap Ketua CC PKI Aidit," Tempo, 17 Januari 2018. <https://bisnis.tempo.co/read/1051324/surakarta-ultah-solo-great-sale-tawarkan-diskon-hingga-80-persen>

⁹¹ Takashi Shiraishi, Zaman Bergerak: Radikalisme Rakyat di Jawa 1912-1926 (Jakarta: Pustaka Grafiti 1997)

Dalam pilkada 2015, di tengah kota yang hingar-bingar menjadi pusat gerakan Islam, PDIP justru mengusung kandidat walikota yang beragama Kristen untuk melawan gabungan koalisi partai-partai Islam dan partai lainnya. Kemenangan FX Rudiantmo-Ahmad Purnomo dalam pilkada tersebut mencapai raihan suara yang meyakinkan, 60,39%. Perolehan ini sebenarnya tidak mengherankan, mengingat pada pilkada tahun 2010 PDIP memperoleh suara yang sangat gemilang hingga 90,09%.⁹² Apakah gerakan Islam benar-benar sedemikian lemah di kota Solo?

3. Pesantren

Jika dilihat dari reproduksi keilmuannya, ada dua pondok pesantren yang terkenal di Solo, Al-Mukmin di Ngruki, As-Salam dan Al-Muayyad. Dua pondok pesantren terakhir menerapkan peraturan pesantren secara lentur. Ponpes As-Salam merupakan tipikal ponpes modern Gontor yang saat ini menyasar kalangan menengah ke atas. Sedangkan Al-Muayyad merupakan ponpes salaf yang tidak berbeda dengan ponpes NU lainnya. Yang menarik dibahas di sini adalah ponpes Al-Mukmin Ngruki. Naiknya pamor pondok pesantren al-Mukmin Ngruki tidak lain karena pondok itu dilekatkan dengan sosok ustadz Abu Bakar Baasyir, Abdullah Sungkar dan be-

⁹²“Kemenangan Fenomenal Jokowi-Rudy,” Kompas, 21 Mei 2010; “Pasangan Rudy-Purnomo Ditetapkan sebagai Pemenang Pilkada Solo,” Sindo, 17 Desember 2015.

berapa aksi terorisme yang dilakukan oleh lulusannya. Meskipun demikian sebenarnya entitas pondok pesantren Ngruki tidaklah tunggal. Meskipun kiprah ustad Abu Bakar Baasyir dan Abdullah Sungkar dominan (kini dilanjutkan oleh Abdurrohim Basyir yang memiliki pandangan berbeda dengan ayahnya tentang ISIS), namun para pengajar di ponpes tersebut berasal dari berbagai latar belakang. Karena itu tidak semua alumni dari ponpes Ngruki memiliki pemikiran yang seirama dengan Abu Bakar Baasyir. Jika dilihat dari kurikulum, pengajaran, dan aktivitas internal di dalam pondok pesantren, tidak terlihat perbedaannya dengan pesantren lainnya.⁹³

Al-Mukmin Ngruki merupakan ponpes induk yang menginspirasi berdirinya beberapa ponpes baru yang sealiran dengan generasi awal yang dibentuk oleh Abu Bakar Baasyir. Ponpes-ponpes tersebut tidak terpusat di kota Solo, namun menyebar di berbagai daerah di sekitar-nya seperti Darus Syahadah, Ma'had Aly An-Nur, Al-Kahfi, Ulil Albab, dan Isy Karimah yang berada di Sukoharjo, Boyolali, dan sekitarnya. Ada beberapa ponpes yang ber-afiliasi dengan pelaku terorisme yang patut untuk dicari informasi seperti Ponpes Salafi Darus Syahadah (SMP) di Boyolali (ponpes jaringan JI) yang salah satu santrinya pernah melakukan pelatihan di Pakistan dan

⁹³ Berdasarkan interview dengan Fajar Shodiq alumni dan staf pengajar IAIN Surakarta, Irsyad Fikri Ketua Sekolah Tinggi Isam al-Mukmin, Muchson Humas Ponpes al-Mukmin, dan observasi peneliti di lingkungan pondok pesantren al-Mukmin, Ngruki.

pengeboman di Kedubes Australia Jakarta, Ma'had Ali An Nur di Baki Sukoharjo, Ma'had Isy Karimah Sukoharjo.⁹⁴

Ketiga Ponpes tersebut merupakan pecahan dari Ponpes Al-Mukmin Ngruki Solo. Perpecahan tersebut terjadi ketika sekitar 500 santri dan 70 ustadz yang umumnya dari Jawa Barat keluar dari JI yang memiliki afiliasi dengan pecahan NII jaringan Ajengan Masduki. Berdirinya ponpes Darus Syahadah sangat terkait dengan 500 santri yang *drop out* dari Al-Mukmin Ngruki. Untuk menampung santri-santri tersebut, Darus Syahadah memulai programnya dari SMP. Hal serupa juga terjadi pada ponpes Isy Karimah yang pada awalnya membuka program setingkat SMA yang kini mulai membuka SMP. Sedangkan Ma'had Aly An-Nur merupakan pendidikan tinggi berbasis ponpes yang memfokuskan program studinya pada ilmu-ilmu agama.⁹⁵

- **Laskar-Laskar**

Organisasi di Solo terkenal dengan laskar-laskar yang menegakkan *amar ma'ruf* dengan cara memberikan himbauan, *sweeping*, dan aksi dalam skala besar. Beberapa di antaranya *Laskar Jundullah, Laskah Hisbullah Sunan Bonang, Hawariyyun, Brigade Hizbullah, Barisan Bismillah, Al-Islah, Gerakan Pemuda Ka'bah (GPK), dan Front Pembela Islam (FPI)*. Di antara organisasi yang menonjol perannya dalam mewadahi laskar-laskar dan organisasi-

⁹⁴ Diskusi dengan Dr. Muhammad Wildan dan tim CisForm di UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 25 Agustus 2017.

⁹⁵ *Ibid.*

organisasi Islam di Solo adalah Front Pemuda Islam Surakarta (FPIS) dan Dewan Syariah Kota Surakarta (DSKS). Banyak pihak menyamakan FPIF yang berada di Solo dengan Front Pembela Islam (FPI). Kedua organisasi ini berbeda namun memiliki model gerakan sosial yang sama. FPIS berdiri sebagai respons sosial atas konflik Ambon yang dianggap sebagai konflik agama, namun organisasi tersebut tidak terlibat dalam konflik tersebut. Pada perkembangannya FPIS sangat responsif terhadap isu-isu dalam skala lokal dan nasional seperti narkoba, alkohol, seks bebas, dan perjudian. Keberadaannya sangat disegani sebagai payung gerakan-gerakan Islam di Solo. Di sisi lain, FPI tidak sepakat dengan aksi terorisme seperti bom Bali, kelompok tersebut lebih tertarik dengan isu-isu moralitas namun tidak mengadvokasi penerapan syariah Islam secara *top down*.

DSKS merupakan organisasi yang berdiri atas respon terhadap suksesi pemerintahan daerah kota Solo dari Jokowi ke FX. Rudianto. DSKS juga sangat aktif dalam aksi-aksi massal mengkritisi kebijakan pemerintah yang dianggap tidak adil terhadap umat Islam. Pada perkembangannya DSKS bergerak dalam berbagai aksi massal seperti parade Tauhid Solo Raya yang diselenggarakan pada Mei 2015. Gerakan ini merupakan respon terhadap Kirab Salib yang dilakukan oleh umat Kristiani pada April 2015. Terlebih daerah tersebut kini dipimpin oleh walikota yang beragama Kristen. Meskipun daerah kota Solo (tidak termasuk Solo Baru) masih didominasi oleh

pemeluk Islam, sikap curiga dengan isu kristenisasi juga terbilang tinggi.

Akar dari spirit anti kristenisasi di kota Solo berawal sejak kegiatan misionari yang dilakukan van Andel di Solo melalui pendidikan dan pelayanan kesehatan. Sejak 1913 melalui program yang dilakukan oleh van Andel, pengikut Kristiani meningkat hampir tiga kali lipat. Bahkan di Solo melalui organisasinya van Andel mampu mendirikan 83 sekolah kristiani yang menampung sekitar 12.000 siswanya dari kalangan pribumi. Yang juga penting adalah pendirian sekolah perempuan Home Economics School dan Queen Emma School yang menysasar keluarga priyayi dan ningrat. Ide melakukan kegiatan kristenisasi melalui bidang pendidikan dan kesehatan sebenarnya bukan murni dari pemikiran van Andel tetapi merupakan pemikiran bersama para pengurus gereja tentang pendidikan bagi orang Timur.⁹⁶ Program Kristenisasi yang dilakukan van Andel sangat berhasil terutama di daerah Manahan, Timuran, Danukusuman, dan Banjarsari.⁹⁷

⁹⁶ Th Sumartana, *Mission at the Crossroads: Indigenous Churches, European Missionaries, Islamic Association and Socio-religious Change in Java 1812-1936* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1994) hal. 103-106. Dalam data yang disodorkan oleh Sumartana, peningkatan jumlah pengikut Kristiani di tahun 1913 hanya 74 orang meningkat hingga 945 di tahun 1925. Jumlah ini kembali meningkat dalam hanya 5 tahun menjadi 2.208 orang dan menjadi 5.115 orang di tahun 1943. Perkembangan Kristenisasi di kota Solo merupakan proyek yang paling berhasil dibandingkan kota-kota lain seperti Yogyakarta, Magelang, Purworejo, Kebumen, Banyumas, dan Wonosobo.

⁹⁷ "Historisitas Kristenisasi dan Komunisme di Kota Solo," Panjimas, 1 Desember 2015, <http://www.panjimas.com/nahi-munkar/2015/12/01/historisitas-kristenisasi-dan-komunisme-di-kota-solo/>

- **Majelis Tafsir Al-Qur'an (MTA)**

Dalam pengajian rutin skala besar, Solo memiliki keunikan seperti yang dilakukan oleh Majelis Tafsir Al-Qur'an (MTA). Dalam pengajian rutinnnya, banyak di antara pengikutnya yang datang dari luar kota Solo dalam rombongan. Sebenarnya MTA bukan organisasi tunggal yang melakukan gerakan secara sentral. Organisasi ini memiliki perwakilan dan cabang di berbagai daerah di seluruh Indonesia seperti organisasi Islam pada umumnya. Namun, pengajian terpusatnya merupakan bagian daya tarik tersendiri bagi MTA yang berbeda dengan organisasi Islam lainnya. Setidaknya ada beberapa faktor yang dianggap mendukung tradisi tersebut, *pertama*, sentralitas kepemimpinan Ustadz Ahmad Sukino sebagai ikon diseminasi ajaran MTA. *Kedua*, berbeda dengan Muhammadiyah dan NU yang garis *fikrah, manhaj*, dan tipe gerakannya yang sudah menyebar dan mengakar di kalangan pengikutnya melalui sekolah-sekolah dan pesantren-pesantren, penyebaran pengaruh MTA justru didominasi melalui media teknologi seperti radio dan televisi. Pengajian terpusatnya di Solo merupakan satu-satunya kontak langsung antara pemimpin MTA dengan pengikutnya.

Ajaran MTA sebenarnya lebih dekat dengan Muhammadiyah pada periode awal yang juga berseteru dengan NU, namun organisasi ini lebih tegas dibanding Muhammadiyah dalam menegakkan prinsip akidah. Sikap oposisinya terhadap praktik keagamaan yang

dilakukan oleh kaum Nahdliyin seperti do'a qunut, yasinan, tradisi selamatan orang meninggal 7 hari dan 40 hari, dan berbagai pendekatan fikih tanpa mazhab membuat friksi organisasi ini dengan NU cukup tajam. Terlebih pengikut MTA secara umum rata-rata datang dari kalangan abangan yang mayoritas sebelumnya merupakan pengikut NU. Berbeda dengan organisasi lainnya, MTA tidak menampakkan ketertarikan pada aktivitas politik meskipun tetap memiliki relasi yang cukup dengan berbagai pejabat negara.

- **Organisasi Pelajar dan Mahasiswa**

Gerakan mahasiswa di Solo sama seperti organisasi mahasiswa di daerah lain. Beberapa elemen mahasiswa seperti HMI, KAMMI, PMII, IMM, dan berbagai organisasi Lembaga Dakwah Kampus (LDK) yang berbasis di kampus-kampus. Peran yang cukup menonjol sebenarnya Forum Silaturahmi Lembaga Dakwah Kampus (FSLDK) cabang Solo yang merupakan organisasi induk dari berbagai organisasi LDK di wilayah tersebut. Peran mereka sebenarnya tidak fokus gerakan sosial kemasyarakatan seperti yang dilakukan laskar-laskar, namun lebih terfokus pada gerakan kampus. Namun, organisasi ini cukup aktif dalam merespons isu-isu keislaman baik dalam konteks lokal di Solo, nasional, dan internasional.

Di kalangan pelajar SMP dan SMA yang terlibat dalam gerakan kerohanian Islam, mereka membentuk wadah Forum Aktivitas Kerohanian Islam SMP-SMA se-

Surakarta (FAROIS). Organisasi ini sangat aktif dalam menyelenggarakan berbagai even kegiatan termasuk pelatihan keterampilan dan kepedulian masyarakat. Namun, pada kenyataannya FAROIS juga aktif merespons isu-isu terkini, termasuk kebijakan pemerintah yang dianggap menyudutkan. Dalam mengaplikasikan programnya, FAROIS juga menjalin kerja sama pembinaan pelajar dengan LPR Kriya Mandiri (Komunitas Remaja Ilmiah Kreatif Beriman dan Mandiri). Pelatihan-pelatihan dampingan yang dilakukan masih seputar kepemimpinan, keorganisasian, *mentoring*, dan kajian keislaman. Sangat disayangkan forum ini tidak memperluas sayap terhadap pembinaan dan pemberdayaan minat dan potensi wira-usaha di kalangan pelajar.

Organisasi Islam besar seperti NU dan Muhammadiyah di Solo perannya tidak semenonjol dan seaktif laskar-laskar lokal. NU dan Muhammadiyah sering mengikuti ritme aksi-aksi bersama yang dilakukan gabungan organisasi Islam se-Solo Raya. Namun kedua organisasi ini memiliki *standing position* tersendiri terhadap berbagai isu tentang radikalisme dan terorisme. Meskipun tidak tampak dominan, peran sosial-keagamaan dari kedua organisasi ini tetap kuat melalui jaringan pendidikan dan pesantren.

Yang unik dari organisasi-organisasi Islam ini adalah meskipun mereka sering melakukan aksi di kota Solo, aksi mereka sering mengatasnamakan Solo Raya karena anggota mereka banyak juga yang berasal dari luar kota

Solo, misalnya Sukoharjo, sehingga tampak sedemikian besar.

4. Pemberdayaan Ekonomi

Meskipun banyak eks narapidana terorisme (napiter) dan pelaku terorisme yang terlibat di Jama'ah Islamiyah (JI) dan ISIS berasal dari kota Solo, namun dalam penelitian kami di lapangan, uniknya tidak ada program atau perhatian khusus dari pemerintah terkait dengan pemberdayaan ekonomi. Dalam komunikasi kami dengan beberapa pejabat pemerintah mereka beranggapan bahwa dalam kasus terorisme, baik masalah pencegahan dan penanggulangan itu merupakan wewenang pemerintah pusat melalui BNPT atau Densus 88. Fungsi pemerintah daerah dalam hal ini dinas-dinas terkait hanya melakukan fungsi suportif.

Dalam menganalisis pemberdayaan ekonomi ini perlu dipisahkan antara pemberdayaan terhadap mantan napiter dan pemuda secara umum. Kedua segmentasi memiliki pendekatan yang berbeda. Yang *pertama*, pendekatan terhadap pemuda secara umum tidak difokuskan pada upaya deradikalisasi, tetapi lebih pada upaya pencegahan pemberdayaan ekonomi secara umum untuk membuka lapangan kerja. Banyaknya pelaku terorisme di kalangan pemuda yang menjadi keprihatinan bersama, diharapkan pemberdayaan ini mengarahkan pemuda kepada kegiatan-kegiatan positif. Diharapkan dengan menurunnya pe-

ngangguran dan angka kemiskinan di kalangan pemuda (usia produktif), maka mereka tidak mudah terjebak pada aktivitas terorisme.

Sedangkan yang *kedua*, pendekatan yang lebih spesifik terhadap mantan napiter. Kerentanan mantan napiter untuk terjebak atau kembali lagi dalam kelompoknya sangat tinggi. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya aksi terorisme yang justru dilakukan oleh mantan napiter. Setelah keluar dari penjara, mantan napiter dihadapkan adanya keterpaksaan dan himpitan hidup (permasalahan ekonomi) untuk menafkahi keluarganya. Pengangguran merupakan pemicu utama gagalnya proses deradikalisasi bagi mantan napiter. Di sisi lain, menurut In'am, insentif ekonomi berupa jaminan ekonomi atas keluarga juga disediakan oleh jaringan teroris, hal ini yang juga menjadi penarik bagi mantan napiter kembali lagi ke jaringan mereka. Sistem fa'i dari perampokan-perampokan bank yang nominalnya mencapai sekian miliar itu merupakan bentuk pemenuhan suplai dana internal kelompok teroris.⁹⁸

- **Pemberdayaan Ekonomi bagi Mantan Napiter**

BNPT sering mengadakan acara-acara keliling seluruh Indonesia dengan berbagai tema, misalnya untuk pemahaman kebangsaan dan cinta NKRI, pemahaman yang moderat di bidang agama, serta program-program pemberdayaan ekonomi di berbagai tempat seperti hotel

⁹⁸ Wawancara dengan In'am, pengusaha Kopi Gandroeng, 25 Agustus 2017.

yang akhirnya ada dana untuk modal usaha. Pelatihan pemberdayaan ekonomi yang diselenggarakan BNPT merupakan bagian dari upaya pemberdayaan dan pemberian motivasi kepada mereka dalam berbagai bidang sesuai dengan permintaan dan peminatan mereka. Pelatihan ini diselenggarakan di tempat yang representatif di Medan, Palembang, dan Lampung. Dalam penyelenggaraan program ini biasanya BNPT mengundang kementerian UMKM, Bapas, Kemensos, dan Kementan sebagai narasumber.

Pemerintah, dalam hal ini BNPT, memberikan opsi-opsi pelatihan terhadap napiter sesuai minat, kemampuan, dan latar belakang mereka. Kerena itu, tema pelatihannya pun bervariasi berdasarkan permintaan dan usulan dari mantan napiter. In'am mencontohkan, sesuai bidang kuliner yang digelutinya, ia memberikan motivasi berdasar pengalamannya jatuh bangun di bidang bisnis ketika pelatihan di Palembang. Salah satu dari alumni pelatihan dan pemberdayaan yang menurutnya berhasil adalah Yusuf, mantan napiter yang berdomisili di Semarang. Yusuf berkecimpung di beberapa bidang bisnis seperti rental mobil, bistik ayam, dan kini ingin merambah ke bisnis ternak burung.⁹⁹

Menurut In'am, program BNPT belakangan ini sangat bagus, tidak seperti sebelumnya yang jarang memberikan pelatihan-pelatihan dan pemantauan kepada mantan

⁹⁹ *Ibid.*; wawancara dengan Yusuf, mantan napiter yang berdomisili di Semarang, 3 September 2017.

napiter. Sebenarnya para mantan napiter ini sifatnya agak pemalas, karena mereka terbiasa menerima bantuan dan dukungan dana dari jaringannya, sehingga mereka kurang kreatif. Mereka memiliki kecerdasan ideologis, tetapi tidak memiliki kecerdasan sosial untuk hidup bermasyarakat. Para mantan napiter perlu dimotivasi oleh para praktisi bisnis bukan sekadar teoretisasi sehingga bisa langsung mereka praktikkan.¹⁰⁰

Kebanyakan program-program BNPT bersifat sporadis dan insidental, tidak terprogram dengan baik. Bahkan, ada yang menganggap sebagai tidak lebih dari program penghabisan anggaran atau kepanikan karena tidak ada program yang jelas. Dalam kasus Lapas Pasir Putih misalnya ketika kelompok dan Abu Bakar Baasyir melakukan bai'at deklarasi daulah (ISIS), BNPT karena kalut sering kali memberikan dukungan kepada para napiter dalam batas yang tidak masuk akal, seperti pemberian *treadmill* (*fitness centre*) di lingkungan lapas seperti permintaan mereka.¹⁰¹

BNPT kurang memaksimalkan potensi-potensi yang dimiliki lembaga pemerintah, misalnya Bapas. Setelah keluar dari penjara, para napiter biasanya berhubungan langsung dengan Bapas untuk mendapatkan pendampingan dan bimbingan agar mereka bisa kembali secara baik dalam masyarakat. Bapas berkewajiban untuk melakukan

¹⁰⁰Wawancara dengan In'am, 25 Agustus 2017.

¹⁰¹Wawancara dengan Eko Prasetyo, pegiat LSM Sarekat Movement Indonesia, 27 Agustus 2017.

prakondisi dengan pejabat terkait dan masyarakat sekitar agar mereka bisa diterima kembali di masyarakat. Bapas mengakui bahwa komunikasi dengan mantan napiter terkadang mengalami kendala, meskipun mereka memiliki kewajiban wajib lapor. Itu pun bagi mereka yang mau mengajukan pembebasan bersyarat (PB). Bagi mantan napiter yang bebas murni, Bapas tidak memiliki hak untuk mengendalikan mereka.

Dalam pertemuan kami dengan Bapas, setidaknya ada beberapa kendala. *Pertama*, Bapas terkendala dengan masalah biaya. Bapas tidak memiliki slot anggaran untuk pemberdayaan ekonomi. Tupoksi yang dilakukan Bapas terhadap napiter sifatnya berupa pendampingan untuk mencegah agar mereka tidak melakukan terorisme lagi dan kooperatif dengan pemerintah. Hal serupa juga dijumpai Bapas ketika mereka mengajukan kerja sama dengan lembaga lain misalnya Dinas Sosial. Hampir semua lembaga menyatakan memang tidak memiliki alokasi anggaran khusus bagi pemberdayaan ekonomi bagi napiter sedangkan permasalahan sosial ekonomi masyarakat secara luas juga belum sepenuhnya tercakup oleh anggaran yang ada.

Secara umum, di kalangan pemerintah daerah, permasalahan yang terkait dengan terorisme ini dianggap permasalahan pemerintah pusat, baik dari segi anggaran dan program melalui kewenangan penuh BNPT. Semua anggaran yang berkaitan dengan penanggulangan terorisme terpusat pada BNPT. Hal ini berdampak pada

pola pikir kelembagaan yang menganggap permasalahan penanggulangan terorisme bukan merupakan tugas pokok mereka.

Kedua, koordinasi antarlembaga masih sangat rendah, sehingga diperlukan komitmen dan perhatian yang khusus terkait dengan permasalahan napiter di Solo. Jika mereka ditiptikan di Badan Latihan Kerja Indonesia (BLKI) di bawah Dinas Tenaga Kerja misalnya, masih juga ada kekhawatiran-kekhawatiran tertentu dari pihak terkait ketika berhubungan dengan napiter. Bapas memang membutuhkan komunikasi dan pemahaman antara dinas-dinas terkait tentang pentingnya masalah ini. Bapas secara resmi memang belum pernah melakukan kerja sama dengan dinas-dinas yang memungkinkan diajak kerja sama dalam bidang pembinaan ekonomi.¹⁰²

Menurut Eko Prasetyo, dalam pengalamannya melakukan pendampingan napiter di Nusakambangan, dia melihat adanya ketidaksinambungan antara pendampingan yang sudah dilakukan di lapas dan sesudah mereka keluar dari lapas. Bahkan sering kali program pembinaan tersebut berhenti dan tidak ada kesinambungan sama sekali. Proses transisi kembali ke masyarakat tidaklah mudah bagi napiter. Dalam kasus Kamarudin, petugas Lapas berinisiatif sendiri dengan biaya sendiri melakukan pendampingan diantarkan ke lingkungannya yang baru untuk diserahkan dan disambut kedatangannya

¹⁰²Wawancara dengan Agus Rahmanto (Kepala Bapas), Siswanto (staf), dan Mulyono (staf), 4 September 2017.

ramai-ramai oleh kepala desa, ketua RT dan RW, Korem, Kodim, Polres, dan Polsek sehingga keberadaannya diperhatikan dan diterima.

Namun, hal ini membutuhkan upaya koordinasi antar lembaga baik dan ini sangat jarang sekali terjadi. Sering kali proses kembali ke masyarakat melalui aparat desa buyar gara-gara kepolisian melalui Polsek tiba-tiba masuk dalam program tersebut. Karena bagi para mantan napiter mereka masih trauma dan sangat anti dengan pihak kepolisian, terutama Densus 88 dan BNPT. Dalam berbagai kasus, pihak aparat tampak sekali tidak melakukan koordinasi. Misalnya, ketika terjadi aksi terorisme baru, Polsek, Korem, secara sendiri-sendiri tanpa koordinasi mendatangi dan memantau mantan napiter untuk membuat laporan ke atasan. Pihak aparat seolah melakukan *business as usual* tanpa mempertimbangkan dampak ketertekanan dan perasaan intimidatif yang dialami mantan napiter yang membuat mereka semakin tidak terbuka dengan pemerintah. Hal ini penting untuk dicermati agar para mantan napiter tidak terekrut ke kelompoknya lagi. Memori trauma tersebut sekiranya perlu diredam sementara untuk membangun *trust* dan memperlancar proses pendampingan.¹⁰³

Kesinambungan dan koordinasi yang terprogram merupakan kelemahan utama dari pemerintah. Program yang berkesinambungan dari masa tahanan di lapas hingga masa pemandirian ketika keluar hidup di

¹⁰³Wawancara dengan Eko Prasetyo, 27 Agustus 2017.

tengah masyarakat harus dilakukan. Pemerintah bisa memaksimalkan fungsi Bapas untuk pembinaan dan *monitoring*. Waktu yang paling efektif bagi pemerintah untuk melakukan pendampingan dan pembinaan adalah ketika relasi formal antara negara dan napiter itu masih terbentuk yaitu ketika mereka masih di lapas dan masa pembebasan bersyarat (PB). Karena pada masa itu, keterkaitan dan ketergantungan napiter terhadap pemerintah masih sangat tinggi, sehingga komunikasi intens sangat mungkin dilakukan. Pola seperti itu pernah diaplikasikan ke kasus Abu Tholut, ia diberi masukan, diceramahi, dan dinasihati secara kontinu oleh petugas Bapas.¹⁰⁴

Relasi antara Bapas dengan mantan napiter tidak menjamin tercegahnya mereka kembali dalam jaringan terorisme. Pada titik tertentu, ekonomi bukan masalah utama, tetapi pemicu saja. Dalam kasus Bahrnun Naim, dia merupakan sosok yang sangat rajin melakukan wajib lapor ketika masa pembebasan bersyarat ke Bapas. Ketika dia mengajukan upaya memulai bisnis mukena juga dibantu oleh BNPT, tetapi tetap tidak bisa mencegahnya pergi ke Suriah untuk bergabung ke ISIS.

Ada beberapa hal yang patut dicermati. Program pemberdayaan narapidana yang diinisiasi oleh Eko Prasetyo dan Prof. Sarlito Wirawan (UI) berawal dari LP Semarang pernah mengalami kegagalan. Pemberdayaan tersebut dilakukan dalam bentuk *short course* pelatihan memasak

¹⁰⁴ *Ibid.*

dan pembuatan kaligrafi. Bahkan peralatan *training* juga disediakan secara pribadi oleh Pak Sarlito seperti peralatan memasak dan mesin pembuat kaligrafi yang cukup mahal. Ketiadaan pelatihan yang berkesinambungan dan minimnya perhatian pihak lapas untuk melanjutkan program tersebut menjadi permasalahan tersendiri. Di sisi lain, Eko juga pernah bekerja sama dengan Kedutaan Australia untuk memberikan pelatihan yang disesuaikan dengan minat dan bakat para napiter. Saat itu permintaan napiter adalah pelatihan tata cara pembuatan dan pengobatan tradisional yang namanya *thibun nabawi*. Meskipun telah disesuaikan dengan permintaan dan minat mereka, setelah sesi pelatihan hal itu menghilang begitu saja.

Menurut Eko, ada tarik ulur pengaruh ketika napiter berada dalam lapas. Selain dari BNPT ataupun LSM pegiat deradikalisasi, kunjungan intens dari keluarga, anggota jaringan dan kelompok mereka ke Lapas juga sangat berpengaruh. Hal ini juga memengaruhi keberhasilan berbagai pelatihan yang diberikan kepada mereka. Terlebih sekarang program lapas tidak mempertimbangkan aspek pemberdayaan dan pelatihan ini, tahanan napiter didistribusikan ke lapas-lapas kecil yang tidak memiliki pengalaman dan keahlian khusus untuk menangani tahanan narapidana terorisme. Sehingga tingkat keberhasilan pelatihan dan koordinasi program yang berkesinambungan akan lebih sulit lagi dilakukan.¹⁰⁵

¹⁰⁵ *Ibid.*

Selain menggandeng instansi pemerintah dalam program insidentalnya BNPT sebenarnya sudah menggandeng beberapa LSM pegiat antiterorisme seperti Yayasan Prasasti Perdamaian (YPP) pimpinan Noor Huda Ismail dan Yayasan Lingkar Perdamaian (YLP) yang dipimpin Ali Fauzi. Di Solo YPP sebenarnya pernah melakukan pembinaan secara riil untuk menampung mantan napiter dengan melibatkan mereka dalam bisnis Dapur Bistik. Bisnis ini berawal di Semarang pada 2009 akhir, lalu dirasa perlu untuk membuka cabang di Solo akhirnya pada 2012 dibuka. Awal semangat pendirian Dapur Bistik adalah pemberdayaan mantan napi. Mendahulukan aspek sosial dibandingkan bisnis dengan menggaet 5 orang mantan napiter di Semarang dan 1 orang napiter di Solo.

Pada awal pendiriannya bisnis ini berhasil mendirikan tiga *outlet* di Semarang. Prinsip yang dikedepankan adalah agar para napiter bisa berkomunikasi dan bersosialisasi dengan orang awam baik dalam kerja tim ataupun dengan pelanggan dari masyarakat luas. Bisnis sosial ini bukan tanpa risiko, dan akhirnya hanya bisa berjalan hingga tahun 2014. Dengan *cash flow* keuangan yang tidak sehat akhirnya memutuskan untuk menutup beberapa cabang bisnis, terutama yang berada di Semarang. Hanya Dapur Bistik Solo yang masih berjalan hingga sekarang, namun mantan napiter yang dulu ikut bekerja di sini mundur satu per satu.

Menurut analisis Toyib, kegagalan mundurnya para mantan napiter dari bisnis Dapur Bistik karena mereka awalnya mantan prajurit perang, tidak pernah terkekang harus berdiam diri di suatu tempat dan dibatasi oleh waktu kerja. Model pekerjaan yang lepas (*mobile*), seperti rental mobil dirasa lebih tepat. Analisis lain, menurut Toyib, bisa juga mereka sebenarnya tidak memiliki *passion* di bidang kuliner ataupun merasa tidak nyaman karena bisnis ini dianggap bagian dari program BNPT.

Tidak sampai di situ saja, YPP juga pernah usahakan membuka bisnis roti (*bakery*) yang saat itu menjamur. Bahan baku dan perlengkapannya memang mahal. YPP sengaja mengambil segmentasi kelas menengah, agar kualitas dan rasa roti bisa bersaing di tengah kompetisi usaha roti di Solo. Akhirnya, YPP membuka peluang kepada semua pihak yang ingin berinvestasi untuk memperkuat modal sehingga bisa berkompetisi. Meskipun ada beberapa orang yang ikut berinvestasi, bisnis ini tidak berjalan karena kompetisi bisnisnya tidak tercapai.¹⁰⁶

Program lain yang pernah dikerjasamakan oleh YPP adalah bisnis rental mobil yang digerakkan oleh Yusuf (eks napiter Semarang). Sebenarnya Yusuf juga pihak yang dipercaya memegang cabang Dapur Bistik di Semarang yang berakhir gagal. Menurut keterangan Yusuf pada awalnya ia berbisnis rental dengan mengoperasikan tiga unit mobil. Pada awalnya perjalanan bisnis rental ini

¹⁰⁶ Wawancara dengan Toyib, pengelola Dapur Bistik, 30 Agustus 2017.

berjalan mulus. Ia memanfaatkan jaringan rekan-rekan mantan napiter dan keluarganya untuk mengoperasikan rental mobilnya. Namun, dengan berbagai kendala yang dialaminya, dia terpaksa menjual 2 unit lainnya hingga tersisa satu unit saja yang masih beroperasi.¹⁰⁷

Menurut Faisal, kelemahan inisiasi bisnis yang dilakukan oleh YPP adalah terlalu memaksakan dan mempersempit peluang bisnis bagi mantan napiter. Padahal minat mereka sangat variatif. Seharusnya semua itu berawal dari minat dan bakat mereka masing-masing. Pemilihan peminatan ini juga tidak mudah. Dalam sesi kelas wirausaha yang dilakukan oleh Faisal yang rata-rata sekitar 40 peserta, peminatan ini merupakan hal yang paling sulit karena berkaitan dengan kurikulum pelatihan. Faisal pernah mendatangkan koki yang ahli memasak kambing dan masakan Arab, karena peserta senang dengan model wirausaha yang berbau masakan Arab meski sejatinya mereka tidak suka. Namun pelatihan ini belum membuahkan hasil, karena pilihan mereka hanyalah peminatan sesaat.¹⁰⁸

Kegagalan itu memberikan inspirasi bagi Faisal untuk menggali minat dan bakat mantan napiter dengan cara yang lebih natural. Faisal mendatangi satu per satu peserta pelatihannya dengan melihat lingkungan tempat tinggalnya, kebiasaannya, lalu dimintai pendapatnya. Jenis

¹⁰⁷ *Ibid.*; wawancara dengan Yusuf, mantan napiter, 3 September 2017

¹⁰⁸ Wawancara dengan Faisal, Penggiat LSM, 30 Agustus 2017.

dan variasi usaha disesuaikan dengan kondisi lingkungan, ketersediaan lahan, dan kemampuan SDM. Faisal menamai metode pendampingannya sebagai operasi senyap. Melalui cara ini ia merasa inisiatifnya lebih berjalan baik dan riil. Sedangkan bantuan yang diberikan bukan dalam bentuk uang melainkan barang keperluan usaha.¹⁰⁹

Menurut In'am, Yayasan Lingkar Perdamaian (YLP) yang dipimpin Ali Fauzi ke depannya lebih bisa menarik banyak keterlibatan mantan napiter. Noor Huda (YPP) bukanlah pelaku tindak terorisme, sehingga secara psikologis mantan napiter lebih memiliki kedekatan emosional dan kenyamanan di YLP, seperti *back to home*. Program-program yang dilakukan YLP lebih riil dan mengena. In'am menggambarkan bagaimana pendekatan Ali Fauzi terhadap napiter dilakukan sejak mereka masih dalam tahanan, misalnya kompetisi sepak bola bersama. Hal yang menggembirakan lagi, In'am mengungkapkan, bahwa mantan napiter tersebut sudah bersedia melakukan upacara bendera, menghargai eksistensi bangsa ini.

Mantan napiter di YLP lamongan ada yang kembali menjadi ustadz, mendirikan biro umroh, beternak (seperti Ali Fauzi yang beternak perkutut), dan juga termasuk kafe Gandroeng ini yang merupakan salah satu proyek percontohan di dalam program pemberdayaan YLP. Tugas dari Kopi Gandroeng adalah mendukung pemberdayaan ekonomi yang diinisiasi YLP dengan memberikan motivasi, pelatihan, dan pendampingan. Menurut In'am,

¹⁰⁹ *Ibid.*

ada beberapa faktor yang membuat narapidana kembali ke jalan radikal, namun faktor yang paling dominan adalah ekonomi. Menurutnya ketika narapidana kembali ke masyarakat, selain mendapatkan tekanan sosial, mereka juga mendapatkan tekanan ekonomi. Kondisi keterdesakan ini membuat mereka mudah terseret kembali ke jalan radikal.¹¹⁰

Sebenarnya YLP baru terbentuk, jadi program-program YLP belum tampak hasil yang nyata. YLP merupakan mitra langsung dalam program pemberdayaan dan deradikalisasi yang dimiliki BNPT. Fungsi YLP sebenarnya sebagai wadah para napiter eks Jama'ah Islamiyah (JI) yang dipimpin Ali Fauzi. Dalam berbagai acara yang diselenggarakan BNPT, Ali Fauzi menjadi ikon dalam isu deradikalisasi tersebut. Permasalahan paling mendasar dari napiter ini adalah mereka perlu dirangkul, didorong, dan diakui. In'am dalam berbagai pelatihan BNPT yang dipandunya selalu meninggalkan nomor HP agar para napiter mudah menghubungi, dan di sisi lain memudahkan In'am untuk melakukan fungsi kontrol dan pendampingan sejauh mana kemajuan para napiter setelah pelatihan tersebut. Ini hal yang kecil, tetapi mampu memancing mereka secara proaktif untuk belajar wira-usaha.

Selain mengurus napiter YLP juga memberdayakan keluarga dari napiter yang sudah meninggal atau masuk penjara. Biasanya para istri/janda dan anak-anak akan

¹¹⁰ Wawancara dengan In'am, 27 Agustus 2017.

pindah ke daerah sekitar Lamongan. YLP membantu keluarga napiter dalam bentuk misalnya menyekolahkan mereka, sedangkan yang lulus pondok atau SMA akan diarahkan sesuai minat mereka atau dikuliahkan. Program-program YLP mendapat dukungan yang sangat kuat dari BNPT. Contohnya pendirian masjid yang megah dalam 3 bulan selesai di Tenggulun, Lamongan, di sekitar pesantren yang didirikan oleh Ali Fauzi merupakan bentuk dukungan intensif BNPT.

Dalam observasi kami ke Klaten, dalam perjalanan menuju rumah keluarga Siyono, kami bertemu dengan Tomo, kakak almarhum Siyono. Kami ingin menggali potensi pemberdayaan ekonomi bagi ibu rumah tangga. Menurut Tomo, pemberdayaan ekonomi yang paling tepat bagi kalangan ibu rumah tangga adalah usaha yang tidak memakan banyak aktivitas di luar rumah dan bisa dikerjakan di dalam. Seperti menjahit, berdagang pakaian, tumbuhan, atau membuat kerajinan alas kaki. Hal ini mempertimbangkan kesibukan ibu rumah tangga yang juga harus mengurus anak-anak mereka agar tidak terlantar karena pekerjaan.

Hal serupa diungkapkan oleh Joko, mantan napiter yang menekuni usaha yang memulai berjualan, soto dan mie ayam. Ia menceritakan bahwa selama ia dipenjara, istri Joko menekuni usaha menjahit pakaian gamis baik untuk perempuan dan laki-laki. Dia tidak hanya menerima jasa menjahit, tetapi dia menjual pakaian hasil produksinya sendiri. Sedangkan jika ada pelatihan pemberdayaan

ekonomi, Joko mengapresiasi itu dengan baik, namun ia meminta pemerintah mempertimbangkan beberapa hal. *Pertama*, sebaiknya pelatihan pemberdayaan ekonomi tidak dilakukan oleh BNPT. Selain karena bukan keahliannya, para mantan napiter masih banyak bersikap anti terhadap BNPT dan Densus 88. Joko menyarankan sebaiknya pelatihan tersebut langsung di bawah program dinas-dinas terkait, seperti Dinas Perdagangan, Dinas UKM, dan Dinas Sosial. Kelebihan pendekatan ini adalah selain menciptakan suasana lebih netral dan setara, para mantan napiter bisa langsung bersosialisasi dengan peserta lain dari masyarakat umum.

Kedua, sebaiknya BNPT melakukan evaluasi terhadap program pemberdayaan ekonomi yang selama ini bersifat insidental, tidak berkesinambungan, dan tidak direncanakan secara matang. Joko mengungkapkan bagaimana ketika ia bersama rekannya di akhir acara pelatihan kewirausahaan di hotel mewah dalam waktu singkat harus memutuskan jenis usaha yang akan mereka lakukan. Tentu saja hal ini membuat ia bingung dan terkejut, sehingga bantuan fasilitas usaha tersebut tidak berjalan baik. Mobil bak terbuka sumbangan BNPT untuk usaha patungan bersama dua rekan lainnya lebih banyak menganggur saat ini.

Ketiga, pelatihan yang diselenggarakan BNPT di hotel tidak dapat menyentuh segmentasi kalangan ibu rumah tangga mantan teroris yang sudah kehilangan suaminya. Joko mengusulkan pemerintah untuk melakukan pelatihan

sistem jemput bola mendatangi rumah peserta latihan. Pelatihan ini bisa berbentuk pelatihan kelompok usaha, sehingga peserta latihan bisa berkumpul secara bergantian di rumah peserta seperti halnya sistem arisan, bukan di hotel. Hal ini membuat kalangan ibu-ibu rumah tangga merasa nyaman.¹¹¹

- **Pemberdayaan Ekonomi bagi Pemuda**

Semakin mudanya usia pelaku tindak kekerasan dan terorisme membuat perhatian terhadap perilaku usia muda tidak bisa diabaikan. Dalam penelitian ini kami berusaha mengunjungi dinas-dinas di kota Solo untuk mengeksplorasi program-program pemberdayaan ekonomi khusus bagi pemuda yang telah dilakukan dan sedang diprogramkan.

Meskipun sedikit terlambat, segmentasi ekonomi kreatif yang digawangi oleh kaum muda terus meningkat. Tidak seperti era dahulu, hampir semua usia muda terfokus untuk menjadi pegawai atau karyawan, pemuda masa kini memiliki mental yang lebih berani untuk terjun di dunia usaha. Usaha-usaha seperti kedai kopi dan distro yang sudah terlebih dahulu menjamur di Yogyakarta dan Bandung kini sudah mulai merambah kota Solo. Pelaku usaha di segmen ini mayoritas dikuasai oleh pemuda yang mengambil segmentasi pasar kalangan pemuda juga. Jika distro pakaian mungkin bisa menyasar hingga usia yang lebih muda misalnya sebagian anak SD, SMP, dan

¹¹¹ Wawancara dengan Joko, mantan napiter, 5 September 2017.

SMU. Jika usaha kedai kopi akan lebih menarik jika berada di lingkungan perkotaan terlebih di sekitar universitas karena segmentasi pasarnya kebanyakan dari kalangan mahasiswa.¹¹²

Program yang dimiliki Dinas Perdagangan saat ini masih berkonsentrasi pada segmentasi pasar umum, tidak memiliki program khusus bagi pemuda. Pemerintah belum bisa memberikan porsi khusus misalnya memberikan slot lahan tempat usaha yang dimiliki oleh Dinas Perdagangan bagi pemuda ataupun mantan napiter kecuali ada kebijakan khusus dari instansi yang lebih tinggi misalnya walikota/bupati dan gubernur.¹¹³ Karena itu diperlukan upaya yang lebih serius dari kepala daerah untuk melihat segmen ini, terlebih kota Solo karena potensi reproduksi radikalisme di daerah ini cukup tinggi.

Di sisi lain, pemberian slot tempat berniaga tidak secara langsung bisa menyelesaikan masalah. Dikhawatirkan lahan tersebut menjadi tidak produktif dan menganggur jika kalangan pemuda ataupun mantan napiter tidak memiliki keterampilan berwirausaha. Jika mereka tidak memiliki mental yang berani untuk berbisnis atau sering bangkrut karena tidak mampu mengelola bisnis maka lahan tersebut menjadi sia-sia. Lahan tersebut tidak mendukung bagi peningkatan perputaran ekonomi di kota Solo. Karena itu, perlu ditingkatkan kerja

¹¹²Wawancara dengan Suprpto, Sekretaris Dinas Perdagangan Surakarta, 31 Agustus 2017.

¹¹³Wawancara dengan Suprpto, 4 September 2017.

sama dengan instansi lain seperti Dinas UMKM dan Dinas Tenaga Kerja agar mereka dibekali keterampilan mengelola usaha.

Pemberdayaan terhadap pemuda tidak bisa dipukul secara rata. Kebutuhan, kemampuan, dan tingkat pendidikan masing-masing pemuda berbeda-beda. Menjadi pebisnis ataupun diberi pelatihan tentang wirausaha bukan satu-satunya solusi. Beberapa kasus pernah terjadi dalam hal perebutan lahan parkir antara preman dengan laskar (sebutan sayap pemuda gerakan Islam) adalah contoh pemberdayaan ekonomi dengan memberikan lapangan pekerjaan dari lahan parkir. Dinas perdagangan pernah turun tangan untuk mengatasi ini dengan membagi area parkir yang diperebutkan, preman di siang hari, sedangkan laskar di malam hari.¹¹⁴

Dinas UMKM pernah berkomunikasi dengan Kalapas terkait adanya pemberdayaan keterampilan kerajinan tangan yang diproduksi oleh tahanan di dalam lapas. Namun, mereka memiliki kesulitan dalam hal pemasaran produk mereka, terlebih dunia bisnis *online* belum sesemarak sekarang. Hal ini tidak menutup kemungkinan Dinas UMKM membantu kelompok lain misalnya kelompok pemuda. Pembinaan yang bisa dilakukan oleh Dinas UMKM adalah mengembangkan minat mereka untuk memproduksi kerajinan kreatif, misalnya menghasilkan produk kreatif dari hasil limbah sesuai dengan

¹¹⁴Wawancara dengan Subagiyo, Kepala Dinas Perdagangan Surakarta, 4 September 2017.

bakat dan minat mereka. Dinas UMKM bisa menyediakan narasumber profesional untuk membuat berbagai produk kreatif tersebut dan membantu menyalurkan para pengusaha kecil untuk mendapatkan kredit mikro.¹¹⁵

Untuk pelatihan terhadap narapidana diperlukan program dan MoU antar instansi yang lebih jelas. Karena di bawah kementerian yang berbeda, inisiatif program termasuk pendanaan seharusnya disiapkan melalui Kemenkumham agar narapidana tidak dilepas begitu saja tanpa ada keahlian dan keterampilan. Sedangkan Dinas UMKM memiliki anggaran terbatas yang tidak bisa digunakan untuk membiayai kegiatan di bawah kementerian lain, sehingga Dinas UMKM hanya dalam posisi mendukung. Namun, kerja sama ini tetap bisa dilaksanakan sesuai dengan kemampuan dan sumber daya yang dimiliki oleh Dinas UMKM. Terlebih lagi menurut UU No. 23/2014 pelatihan parsial itu tidak diperbolehkan, apa lagi memberikan bantuan alat seperti dulu misalnya pelatihan menjahit sekalian diberi bantuan mesin jahit.¹¹⁶

Kerja sama Dinas UMKM sebenarnya banyak melakukan kerja sama dengan banyak komunitas lain seperti penyandang HIV AIDS, penyandang TBC, dan disabilitas karena mereka perlu dibantu untuk mendapatkan akses ke pasar. Sebenarnya kuncinya ada di anggaran, karena semuanya bisa diberdayakan. Mereka

¹¹⁵Wawancara dengan Nurhayati, Kepala Dinas UMKM Surakarta, 7 September 2017.

¹¹⁶*Ibid.*

akan dikelompokkan dan diberi slot anggaran karena tidak bisa mencampurkan, misalnya mungkin orang AIDS dicampurkan dengan masyarakat awam dalam pelatihan untuk menghindari kejadian yang tidak diperlukan.¹¹⁷

Untuk mengakses dana sebenarnya bisa dicarikan dari celah-celah anggaran. Menurut UU No. 23/2014, Dinas Perindustrian sebenarnya bisa mengalokasikan anggaran untuk membeli alat ataupun pelatihan pembangunan usaha, tetapi sifatnya harus kelompok yang sudah berbadan hukum misalnya mendirikan koperasi terlebih dulu. Jika ingin memanfaatkan dana CSR, maka harus dilakukan melalui satu pintu yaitu Walikota Solo. Dana CSR tidak bisa diakses melalui jalur perorangan, tetap harus melalui kelompok yang berbadan hukum. Program CSR terkini yang digalakkan walikota adalah kebijakan infrastruktur membangun RTH. Sebenarnya jika mantan napiter memiliki keterampilan di bidang infrastruktur bisa ikut dalam proyek pembangunan RTH tersebut.

Di Dinas UMKM, terdapat sistem pendampingan dan konsultasi yang sudah memiliki mekanisme sendiri. Di Kementerian Koperasi ada Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) yang memiliki 5 pokok pendampingan ada dari sisi kualitas produk dan kemampuan SDM, dari sisi pasar ke mana saja terakses, dari sisi kelembagaannya apakah sudah tergabung dalam kelompok tertentu atau masih masuk anggota koperasi, dari sisi pembiayaannya, dan dari sisi produksinya apakah bermasalah atau tidak.

¹¹⁷ *Ibid.*

Setelah dalam pendampingan itu pasarnya bagus, produknya bagus, produksi berjalan, mereka butuh modal bisa kita bantu melalui sistem kelompok (koperasi). Untuk masalah produksi, dinas UMKM memiliki program pendampingan membuat produk, mengemas produk, izin produk, dan pasar potensial yang tepat hingga sampai hasil produk sudah layak pasar.¹¹⁸

Perbedaan PLUT milik Dinas Koperasi dengan program Badan Latihan Kerja (BLK) milik Dinas Tenaga Kerja terletak pada skema pelatihan dan pendampingan yang berbeda. Jika dalam BLK, pelatihan keterampilan bisa memakan waktu hingga 2-3 bulan di mana mereka langsung melakukan *on the job training*, pelatihan dengan langsung ditempatkan di tempat kerja. Peserta yang mengikuti program BLK ini boleh memilih program pelatihan yang disukai sesuai dengan peminatan. Dalam skema pelatihan PLUT Dinas Koperasi, pelatihan yang dilakukan hanya kurang lebih satu minggu, namun akan memaksimalkan proses pendampingan hingga selama 3 tahun. Kedua bentuk pemberdayaan ini sebenarnya sangat membantu pelatihan pemberdayaan ekonomi dan keterampilan bagi pemuda ataupun mantan napiter.

Dalam memudahkan peserta bimbingan, Dinas UMKM tidak segan-segan untuk membantu mendampingi mengawal alur formulir untuk memastikan agar peserta dampingan mendapatkan skema pembiayaan

¹¹⁸ *Ibid.*

bagi menjalankan bisnis. Dinas UMKM biasanya akan menggandeng rekanan dari dunia perbankan dengan memberikan masukan pembiayaan (kekurangan modal) yang tepat karena Dinas memiliki informasi sosialisasi permodalan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan tawaran menarik dan potensial, terutama dari Bank Solo.

Dari program PLUT yang dicanangkan Dinas UMKM, untuk wilayah Solo sekitar 20% peserta dampingan yang sudah berhasil. Program ini akan terus digenjut oleh dinas UMKM agar peserta dampingan potensial terus meningkat. Dalam 3 tahun ke depan, Dinas UMKM kota Solo menargetkan 1.000 UKM naik kelas (wawancara dengan Nurhayati 7 September 2017). Program-program ini sebenarnya potensial jika dikerjasamakan dengan BNPT. Selain itu, pemuda dan mantan napiter akan terdampingi secara maksimal. Model pelatihan ini tidak sporadis, sangat berbeda dengan seminar kewirausahaan BNPT yang juga nyaris tanpa pendampingan dan penilaian.

Dinas UMKM sayangnya tidak memiliki program motivasi dan pelatihan kewirausahaan untuk kalangan siswa usia sekolah dan mahasiswa. Selain sangat berpotensi untuk menanamkan bibit kewirausahaan, program seperti ini sebenarnya juga dapat menyalurkan kegiatan positif bagi pemuda agar tidak terjebak pada aktivitas menyimpang seperti radikalisme dan terorisme. Dalam konfirmasi kami, Dinas UMKM menyatakan sebenarnya program kewirausahaan sudah secara mandiri diterapkan

di kampus-kampus melalui Unit Kegiatan Mahasiswa di bidang Koperasi seperti LPM UNS atau koperasi siswa di sekolah-sekolah.

Di luar program yang diadakan di Dinas UMKM, program pemberdayaan ekonomi yang dilakukan oleh Majelis Ekonomi Muhammadiyah patut dicontoh. Majelis Ekonomi melakukan program pengajian bisnis bagi kader muda Muhammadiyah dengan tema-tema bisnis yang kini sedang menarik. Konsep dari pengajian bisnis ini adalah memperluas wawasan dan memberi motivasi bagi kadernya. Sedangkan untuk pelatihan bisnis yang intensif, Majelis Ekonomi akan mendirikan sekolah bisnis dengan kurikulum yang lebih mapan dan terukur.

Yang menarik dari program Majelis Ekonomi adalah di tengah geliat bisnis *online* saat ini, mereka bekerja sama dengan Bukalapak.com. Prinsip dari kerja sama ini adalah rekanan pemberdayaan ekonomi. Tim dari Bukalapak.com akan melakukan pelatihan dan pembinaan terhadap peserta dari Majelis Ekonomi dengan mengikutsertakan mereka menjadi rekanan riil di perusahaan Bukalapak.com. Ada kerja sama yang saling menguntungkan, Bukalapak.com diuntungkan dengan rekanan dari Majelis Ekonomi, sedangkan Muhammadiyah terbantu dengan kadernya yang terberdayakan dalam bisnis *online*. Dalam waktu berkala, Bukalapak.com memberikan laporan kepada Majelis Ekonomi capaian penjualan dari peserta-peserta yang ikut pelatihan tersebut. Sehingga tingkat ke-

berhasilan dari relasi dengan perusahaan *online* seperti Bukalapak.com sangat terukur.¹¹⁹

5. Best Practice

Dalam skema yang diajukan oleh Bapas, inisiatif BNPT untuk bekerja sama dengan 17 lembaga patut diapresiasi. Diharapkan sinergi tersebut bisa secara perlahan mengurai permasalahan terorisme dan radikalisme di Indonesia. Setelah mantan napiter bebas bersyarat dari lapas, Bapas bisa berperan sebagai hubungan yang menyinergikan dinas-dinas terkait seperti Dinas Sosial, Dinas UMKM, Dinas Perdagangan, Dinas Perindustrian, dan Dinas Tenaga Kerja untuk melanjutkan program pemberdayaan ekonomi yang telah dimulai sejak dari lapas. Bapas menekankan pentingnya sistem “bapak asuh” untuk memperluas jaringan kerja sama baik dalam produksi maupun penjualan produk.¹²⁰

Senada dengan yang diungkapkan oleh Bapas, Ketua PCNU, Hilmi Ahmad Sakdilah, mengatakan banyak aspek yang bisa dikembangkan dari pemberdayaan ekonomi bagi mantan napiter. Dia mengungkapkan setidaknya ada dua pintu bagi BNPT untuk menginisiasi pemberdayaan ekonomi terhadap mantan napiter: melalui LSM dan pemerintah kota. Jika melalui LSM, sinergi pemberdayaan

¹¹⁹Wawancara dengan Tri, ketua Majelis Ekonomi PDM Surakarta, 11 September 2017.

¹²⁰Wawancara dengan Agus Rahmanto (Kepala Bapas), Siswanto (staf), dan Mulyono (staf), 4 September 2017.

ekonomi BNPT dimasukkan dalam program-program kerja LSM untuk memberikan pendampingan dan keterampilan langsung. Kelebihan dari LSM adalah mereka lebih fleksibel untuk melakukan inovasi program demi tercapainya pemandirian ekonomi mantan napiter. Dalam hal ini, pemberdayaan ekonomi bagi kalangan istri mantan napiter bisa dilakukan dengan sistem jemput bola atau kelompok usaha.

Jika melalui pintu Pemerintah Kota Solo, pemberdayaan ekonomi dilakukan dengan menyinergikan program dan peran dari dinas terkait. Pemerintah Kota hendaknya memberikan perhatian dan prioritas bagi mantan napiter untuk mendapatkan pelatihan pemberdayaan ekonomi di bawah dinas terkait. Kelebihan dari pintu ini, mantan napiter akan mendapatkan kemudahan akses formal berupa pelatihan, perizinan usaha, slot tempat usaha, dan bantuan akses terhadap pasar untuk penjualan hasil produksi.

Untuk implementasi kemandirian ekonomi, Hilmi mengatakan, keberadaan “bapak asuh” sangatlah penting. *Pertama*, bapak asuh akan memberikan ketahanan usaha yang lebih di mana mantan napiter terlindungi dari kematian usaha dari dini. *Kedua*, bapak asuh akan memberikan pembelajaran langsung tentang celah produksi, kemasan, dan pembukaan pasar bagi produk yang dihasilkan oleh mantan napiter. Untuk kasus Solo yang merupakan sentra industri batik, perusahaan terkenal seperti Batik Keris dan Danar Hadi sebagai contoh sangat

potensial untuk dijadikan bapak asuh. Pemberian bantuan alat implementasi usaha bagi mantan napiter bisa diberikan berdasarkan kebutuhan dan hasil koordinasi dengan bapak asuh.

Hilmi juga menekankan pentingnya dana CSR dari berbagai BUMN potensial yang beroperasi di Solo seperti Bank Mandiri, BRI, BNI, Bank Solo, dan yang lain. Karena harus melalui satu pintu, hendaknya walikota memfasilitasi penggalan dan penyaluran dana CSR bagi kebutuhan deradikalisasi dan pemberdayaan ekonomi bagi kalangan mantan napiter. Dana CSR ini bisa juga digunakan dalam program renovasi rumah bagi mantan napiter yang mayoritas dari kalangan menengah ke bawah. Bukan tidak mungkin dana ini dikoordinasikan untuk kebutuhan yang lebih luas renovasi rumah rakyat miskin ataupun program RTH yang sedang digalakkan oleh pemerintah kota.¹²¹

Berkaca dari masukan di atas, pemberdayaan ekonomi yang dilakukan terhadap pemuda dan mantan napiter sebaiknya tidak menonjolkan peran BNPT, Densus 88 dan Kepolisian. Trauma psikologis mereka terhadap BNPT dan Densus 88 membuat mereka enggan untuk berperan serta mengikuti pelatihan yang ada. Menurut Joko, mantan napiter yang kini membuka usaha soto dan mie ayam, pemberdayaan yang dilakukan di bawah program-program dinas terkait lebih membuat mereka merasa

¹²¹ Wawancara dengan Hilmi Ahmad Sakdilah, Ketua PCNU Surakarta, 5 September 2017.

tidak terintimidasi. Hanya saja, BNPT perlu bekerja sama dengan Disnaker dan Dinas UMKM agar mantan napiter mendapatkan kuota latihan dan prioritas.¹²²

Hal serupa juga dikatakan oleh Yusuf, sebenarnya relasi kerja sama yang berlebihan antara BNPT dengan LSM seperti YLP dan YPP dalam membina mantan napiter secara tidak langsung membentuk semacam hierarki yang membuat mereka tidak independen. Pelibatan dinas-dinas dalam pemberdayaan ekonomi mantan napiter akan menciptakan, *pertama*, suasana yang lebih netral dan tidak intimidatif. *Kedua*, kehadiran negara lebih terasa dalam wajah yang lain (non BNPT dan Densus 88). *Ketiga*, terciptanya relasi yang lebih setara dan independen. *Keempat*, tidak bersifat eksklusif. Mendorong napiter untuk bekerja sama dan berbaur dengan anggota masyarakat lainnya.¹²³

BNPT perlu mempertimbangkan konsep pelatihan yang tidak insidental dan formal seperti seminar ekonomi yang dilakukan di hotel-hotel. Tetapi mempertimbangkan konsep pemberdayaan yang berkesinambungan. Seperti masukan dari Eko Prasetyo efektivitas pemberdayaan ekonomi yang dilakukan BNPT lebih maksimal ketika ketika para napiter masih berada di dalam lapas dan masa pembebasan bersyarat.¹²⁴ Dari masukan Nurhayati, BNPT perlu didorong untuk memaksimalkan peran

¹²² Wawancara dengan Joko, mantan napiter, 5 September 2017.

¹²³ Wawancara dengan Yusuf, mantan napiter, 3 September 2017.

¹²⁴ Wawancara dengan Eko Prasetyo, 27 Agustus 2017.

instansi-instansi pemerintah terutama membuat MoU dengan Kemenkumham dan Kementerian UMKM agar Dinas UMKM agar bisa melakukan pembinaan ekonomi sejak napiter berada dalam lapas.¹²⁵ MoU ini hendaknya dilanjutkan hingga masa pembebasan bersyarat (PB) sehingga Bapas memiliki peran untuk mengawasi, mendorong, dan memastikan mantan napiter mendapatkan kuota dan diwajibkan mengikuti pelatihan baik di BLK milik Disnaker ataupun PLUT milik Dinas UMKM.

Bagi kalangan pelajar dan mahasiswa, program pemberdayaan ekonomi ini mendapatkan respon yang kurang. Program ini dirasa tidak mewakili kebutuhan dan lingkungan mereka saat ini yang memang fokus di dunia pendidikan. Hanya sebagian kecil diantara mereka yang cukup apresiatif dengan tawaran program pemberdayaan ekonomi ini, terutama pelajar dan mahasiswa memang ikut dalam UKM koperasi. Mereka lebih tertarik dengan program-program yang dimodifikasi dengan kebutuhan mereka yang masih berkecimpung di dunia pendidikan seperti beasiswa, pertukaran pelajar/mahasiswa, program dukungan kreatifitas pelajar/mahasiswa seperti pentas seni, klub hobi, seminar dan pelatihan, lomba esai dan lain-lain. Mereka juga tertarik dengan program kerjasama dukungan dan pemberdayaan melalui organisasi intra di sekolah/kampus dan unit-unit kegiatan pelajar dan mahasiswa.¹²⁶

¹²⁵ Wawancara dengan Nurhayati, 7 September 2017.

¹²⁶FGD dengan pelajar-pelajar, rohis, takmir masjid, perwakilan lembaga mahasiswa di Solo, Aula Sekolah Tinggi Islam Al-Mukmin (STIM), 6 september 2017.

Diagram 1. Skema Pemberdayaan Ekonomi Pemuda dan Napiter

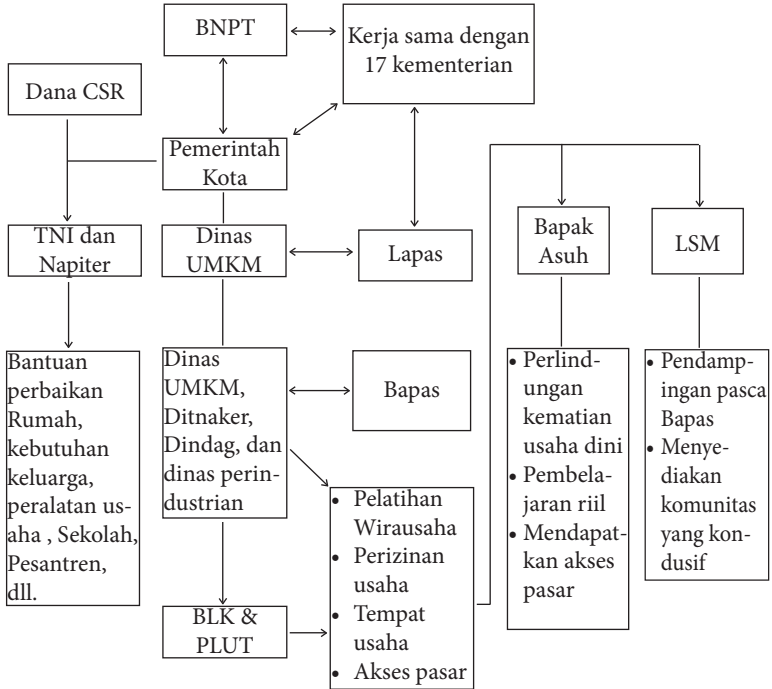
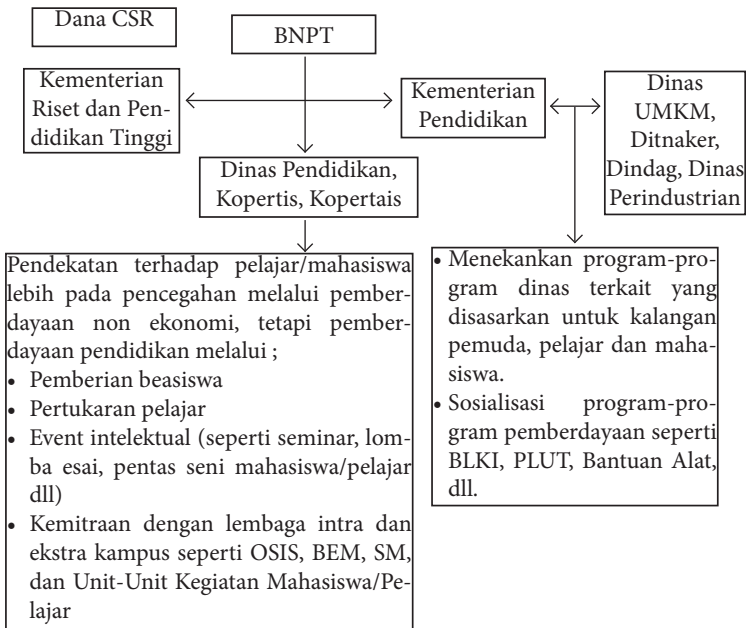


Diagram 2. Skema Pemberdayaan Ekonomi Pelajar dan Mahasiswa



BNPT melanjutkan kerja sama yang sudah terjalin dengan LSM yang peduli dengan pemberdayaan mantan napiter seperti YPP dan YLP sebagai wadah yang secara sosial bisa menampung mantan napiter. *Pertama*, untuk menyingkirkan perasaan terasing dan terbuang yang dialami mantan napiter ketika mereka kembali ke masyarakat. Keberadaan YPP dan YLP sangat penting untuk menciptakan lingkungan dan komunitas yang kondusif bagi keberadaan mantan napiter agar mereka tidak terjebak kembali dalam jaringan radikalisme dan terorisme. *Kedua*, keberadaan LSM juga berperan sebagai

fasilitator antara mantan napiter dengan BNPT di mana program-program deradikalisasi tetap bisa dikerjasamakan dengan LSM-LSM tersebut. Selain itu LSM berperan untuk mengembangkan pemberdayaan yang lebih lanjut seperti pembentukan koperasi dan program-program riil seperti bantuan alat kewirausahaan yang sudah diinisiasi sejak mereka mengikuti pelatihan pemberdayaan di BLK dan PLUT.

- **Kesimpulan**

Pemberdayaan ekonomi bagi pemuda dan mantan napiter secara khusus tidak terdapat di Solo. Padahal Solo merupakan kota yang memiliki gerakan Islam dinamis, yang menjadi barometer gerakan Islam di Indonesia. Banyak pelaku terorisme di Indonesia merupakan lulusan atau berafiliasi dengan pesantren yang berada di Solo. Perhatian tentang permasalahan ini hendaknya menjadi prioritas ke depannya.

Dalam observasi yang kami lakukan selama di lapangan, kami menemukan sebenarnya potensi pemberdayaan ekonomi itu bisa diwujudkan seperti yang telah kami bahas pada Diagram 1. Skema ini mempertimbangkan masukan dari mantan napiter yang sangat traumatik dengan BNPT sebagai corong deradikalisasi di Indonesia. Namun demikian, pemaksimalan fungsi dan sinergi antar Dinas UMKM, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Perdagangan, Lapas dan Babas bisa menjadi alternatif yang sekiranya bisa diterima oleh semua pihak.

Pemberdayaan ekonomi ini hendaknya dilakukan secara berkesinambungan sejak napiter masih berada di dalam penjara. *Pertama*, peran sentral dari koordinasi Lapas dan Bapas sangat penting untuk memastikan program yang telah dikerjasamakan dengan Dinas UMKM bisa berjalan maksimal. *Kedua*, peran Bapas sebagai penyambung estafet pemberdayaan ekonomi sangat penting untuk melakukan komunikasi dengan Dinas UMKM, Dinas Tenaga Kerja, dan Dinas Perdagangan. Peran Bapas yang masih sentral dalam proses pembebasan bersyarat, memungkinkan secara komunikatif mewajibkan napiter untuk mengambil dan ikut serta dalam program BLK atau PLUT yang sudah disediakan. *Ketiga*, peran LSM sebagai penyedia lingkungan dan komunitas yang kondusif sebagai benteng untuk mencegah mantan napiter tersangkut kembali dalam jaringan terorisme.

Peran proaktif dari Walikota sebagai pihak yang paling berwenang di Solo sangat menentukan bagi terlaksananya skema ini. Efektivitas kerja birokrasi dan satuan-satuan dinas akan sangat bergantung dari sejauh mana walikota memprioritaskan permasalahan ini sebagai sesuatu yang urgen dan harus diatasi.

BAB 5

Ekonomi Kaum Muda dan CVE di Lamongan, Jawa Timur

1. Pendahuluan

Secara umum, pemberdayaan ekonomi pemuda merupakan upaya peningkatan potensi pemuda dalam proses sosial, ekonomi, dan politik demi terciptanya kemandirian pemuda dalam segala bidang. Popularitas pemberdayaan mengalami peningkatan ketika sebagian dari mereka terlibat dalam aksi radikalisme sosial dan politik seperti kejahatan, penyalahgunaan narkoba, kekerasan dan terorisme. Sehingga ada kecenderungan menyamakan gagasan pemberdayaan pemuda dengan pemberdayaan masyarakat. Program penanggulangan kemiskinan, misalnya, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), Program Jaminan Sosial, Program Indonesia Pintar, Program Gerakan Membangun Ekonomi Rakyat Lamongan Berbasis Pedesaan (Gemerlap) dalam kerangka kebijakannya selalu memasukkan unsur pemuda di dalamnya. Sayangnya, beberapa kajian menunjukkan bahwa partisipasi dan keterlibatan pemuda yang sejatinya

bertujuan untuk memberikan peluang lebih besar kepada pemuda guna memperkuat jati diri dan potensinya sering kali hanya bersifat artifisial.¹²⁷ Implementasi program pemberdayaan masyarakat sering kali didominasi oleh elite, dan tokoh masyarakat yang umumnya berstatus dewasa dan berusia tua.

Usia menjadi batasan penting dalam menentukan kategori status sosial. Sebagaimana status anak memiliki “status sponsor” mengingat ketergantungannya pada pemberian orangtua atau masyarakat, sedangkan orang dewasa memiliki “status primer”, yang didasarkan pada kemampuan dan usahanya sendiri untuk mandiri. Pemuda dianggap memiliki status “*interim*” sebagai konsekuensi dari posisinya yang sebagian diberikan orangtua, dan sebagian yang lain diperoleh melalui usaha sendiri yang kemudian memberikan sebetuk prestise tersendiri padanya.¹²⁸ Undang-Undang No. 7 tahun 2009 tentang Kepemudaan, menetapkan batasan usia pemuda mencakup mereka yang berusia 16-30 tahun. Berdasarkan batasan usia tersebut. Data Susenas tahun 2016, dari sekitar 257,9 juta penduduk Indonesia, sekitar 62,06 juta jiwa (24,06 persen).

¹²⁷Nugroho, B. A., & Astuti, P. (2015). Partisipasi Pemuda dalam Menyukseskan Program PNPM Mandiri Perdesaan di Desa Buluroto Kabupaten Blora. *Journal of Politic and Government Studies*, 4(2), 206-220.

¹²⁸Monks, F.J., Knoers, A.M.P., & Haditono, S.R. (2002). *Psikologi Perkembangan: Pengantar dalam Berbagai Bagiannya*, Terjemahan Sri Rahayu Haditomo, Yogyakarta: UGM. 217

Selain batasan usia, karakteristik lainnya dari kaum muda digambarkan berdasarkan peran sosial dan politik. Pemuda digambarkan sebagai pembawa perubahan, menempati posisi strategis sebagai mediator dalam reproduksi dan transformasi sosial. Namun di sisi lain, pemuda juga seringkali dipersalahkan sebagai perusak norma dan tatanan sosial, keterlibatan dalam berbagai pemasalahan sosial dan politik dalam bentuk penyalahgunaan narkoba, aksi kekerasan, dan terorisme. Sebagai agen perubahan, sejarah mencatat kiprah penting yang dimainkan kaum muda dalam gerakan perjuangan nasional, hingga merebut kemerdekaan, dan tumbangya Orde Baru yang memunculkan era reformasi dan demokratisasi di Indonesia. Pemuda digambarkan dalam paradoks “*as both heroes and villains.*”¹²⁹

Gambaran tersebut menempatkan pemuda dalam kondisi ambigu yaitu mempunyai “lebih dari satu interpretasi atau penjelasan, makna ganda, atau beberapa kemungkinan makna.”¹³⁰ Ambiguitas dicirikan dengan kenyataan menampilkan dirinya sebagai serangkaian perubahan yang saling berinteraksi dengan efek yang sering kali tidak dapat diprediksi. Keadaan seperti itu memupuk suatu keadaan ambivalensi, “koeksistensi satu orang dari emosi atau sikap yang kontradiktif

¹²⁹Jones, G. (2009). *Youth*. Cambridge: Polity. *Key Concepts for Understanding Curriculum*, 4.

¹³⁰*Oxford Advanced Learner's Dictionary* (Vol. 1428). Oxford: Oxford University Press.

(seperti cinta dan kebencian) terhadap seseorang atau benda.”¹³¹ Perkembangan globalisasi yang ditandai dengan intensifikasi ilmu pengetahuan dan teknologi juga berdampak pada peran sosial dan politik pemuda. Penggunaan media sosial seperti facebook, twitter, dan instagram di kalangan muda terbukti mampu menjadi pemantik perubahan sosial dan politik di berbagai belahan dunia.¹³²

Penyebaran informasi baik fakta maupun *hoax* dengan mudah dapat ditemukan di media sosial menambah ambiguitas gambaran pemuda. Tingkat penetrasi internet pemuda di Indonesia tertinggi ada pada kelompok umur 16-18 tahun, yaitu sebesar 62,32 persen, disusul kelompok umur 19-24 tahun sebesar 56,88 persen, dan kelompok umur 25-30 tahun sebesar 41,00 persen. Sebagian besar pemuda mengakses internet dengan tujuan sosial media (88,35 persen) dan mendapatkan informasi/berita (75,02 persen).¹³³ Ambiguitas dicirikan oleh kenyataan menampilkan dirinya sebagai serangkaian perubahan yang saling berinteraksi dengan efek yang sering kali tidak dapat diprediksi, menyebabkan seseorang memilih di antara berbagai penyebab dan penjelasan yang saling bertentangan. Kondisi seperti ini meningkatkan suatu keadaan ambivalensi, yaitu suatu kondisi “koeksistensi

¹³¹ *Oxford Advanced Learner's Dictionary* (Vol. 1428). Oxford: Oxford University Press.

¹³² Mahdi, W. F., & Al-Hattami, A. A. (2016). Youth & Revolution. Dalam *Education and the Arab Spring* (hlm. 83-94). Sense Publishers.

¹³³ Badan Pusat Statistik, (2006). *Statistik Pemuda Indonesia 2006*.

satu orang dari emosi atau sikap yang kontradiktif (seperti cinta dan kebencian) terhadap seseorang atau benda.”¹³⁴ Beragam julukan untuk generasi ini seperti “ Gen Y dan Gen Z”,¹³⁵ “generasi Facebook” atau “generasi internet”, atau istilah populer “generasi zaman now”, dan lain sebagainya.

Riset PPIM UIN Jakarta, misalnya, menunjukkan bahwa kaum muda menjadi ‘ruang terbuka’ bagi infiltrasi berbagai ideologi dan paham keagamaan dan berkembangnya paham intoleransi terhadap minoritas di sekolah dan universitas.¹³⁶ Termasuk di dalamnya kampanye menghujat dan negara dan penegakan syari’at Islam. Secara umum, peningkatan pemahaman keagamaan yang radikal bagi generasi muda disebabkan oleh terbukanya peluang terjadinya hubungan dengan kelompok radikal, beserta sumber-sumber wacananya, serta terbukanya akses informasi baik pada tingkat lokal maupun global mengenai beragam isu dan ketimpangan dialami oleh masyarakat muslim.¹³⁷ Mudah-mudahan infiltrasi terhadap pemuda di kalangan masyarakat muslim, paling tidak disebabkan oleh tiga hal. *Pertama*, media massa telah meningkatkan kesadaran masyarakat akan

¹³⁴*Oxford Advanced Learner’s Dictionary* (Vol. 1428). Oxford: Oxford University Press.

¹³⁵Gen Y adalah Kelompok anak muda yang juga disebut generasi milenium adalah mereka yang berusia belasan tahun hingga awal tiga puluhan (lahir awal 1980 hingga awal 2000) sedangkan Gen Z atau anak-anak dan remaja dengan rentang usia 10-19 tahun.

¹³⁶<https://tirto.id/survei-uin-jakarta-intoleransi-tumbuh-di-banyak-sekolah-dan-kampus-czQL>

¹³⁷Vertigans, S. (2008). *Militant Islam: A Sociology Of Characteristics, Causes And Consequences*. Routledge, hlm. 82-83.

ketidaksetaraan sosial, ekonomi, dan politik dan ketidakadilan yang terjadi di banyak masyarakat Muslim dan korupsi serta kesalahan manajemen yang mengacaukan pemerintahan dan institusi negara. *Kedua*, kekuatan agama Islam sebagai benteng, dibandingkan dengan beberapa tradisi keagamaan lainnya, hingga proses diferensiasi dan privatisasi yang menyertai sekularisasi. *Ketiga*, para pengkhotbah dan pemimpin Islam telah berkompetisi secara efektif dengan para pemimpin Islam arus utama untuk mendapatkan sumber daya dan rasa hormat. Mereka melakukannya dengan menunjukkan integritas, efisiensi, dalam pelayanan kepada orang-orang yang tertindas dan membutuhkan, dan dedikasi militan terhadap tujuan mereka.¹³⁸

Terjadinya perubahan sosial dan ekonomi membutuhkan penyesuaian dari kaum muda serta kemampuan dan kesiapan individu dalam proses penyesuaian tersebut.¹³⁹ Pemberdayaan ekonomi pemuda menjadi salah satu upaya bagi proses mengurangi bahkan melawan keterlibatan pemuda dalam gerakan-gerakan ekstremisme. Meski, tidak ada kaitan langsung antara kemiskinan, pengangguran dan kecenderungan munculnya perilaku terorisme di kalangan pemuda. Namun, jenjang usia muda yang merupakan fase pencarian jati diri, yang ditandai

¹³⁸ Appleby, S. R. (1999). *The Ambivalence Of The Sacred: Religion, Violence And Reconciliation*. Rowman & Littlefield Publishers.

¹³⁹ Blossfeld, H. P., Klijzing, E., Mills, M., & Kurz, K. (ed.). (2006). *Globalization, Uncertainty And Youth In Society: The Losers In A Globalizing World*. Routledge.

rasa penasaran serta hasrat tinggi mencoba berbagai pengalaman religiusitas, menjadi ruang mudah bagi masuknya berbagai paham keagamaan, tidak terkecuali yang beraliran ekstrem. Undang-Undang Kepemudaan Pasal 24 menjelaskan bahwa, “pemberdayaan pemuda dilaksanakan secara sistematis, dan berkelanjutan untuk meningkatkan potensi dan kualitas jasmani, mental spiritual, pengetahuan, serta keterampilan diri dan organisasi menuju kemandirian pemuda.”

Pemberdayaan atau *empowerment* berasal dari kata “daya” yang berarti kemampuan melakukan sesuatu atau kemampuan bertindak, sedangkan pemberdayaan berarti proses, cara, perbuatan memberdayakan. Menurut Oxford English Dictionary, kata *empower* mengandung dua pengertian, yaitu: (1) *to give power* atau *authority* to atau memberi kekuasaan, mengalihkan kekuatan atau mendelegasikan otoritas ke pihak lain; (2) *to give ability to* atau *enable* atau usaha untuk memberi kemampuan atau keperdayaan.¹⁴⁰ Secara teoretikal, adalah upaya untuk membangun daya masyarakat dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkannya. Memberdayakan masyarakat berarti upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat dalam kondisi yang kurang mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan

¹⁴⁰*Oxford Advanced Learner's Dictionary* (Vol. 1428). Oxford: Oxford University Press.

kata lain memberdayakan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat.

Kondisi keberdayaan masyarakat diartikan sebagai kemampuan individu yang bersenyawa dengan masyarakat dalam membangun keberdayaan masyarakat yang bersangkutan. World Bank mengartikan pemberdayaan sebagai upaya untuk memberikan kesempatan dan kemampuan kepada kelompok masyarakat (miskin) untuk mampu dan berani bersuara (*voice*) atau menyuarakan pendapat, ide, atau gagasan-gagasannya, kemampuan, dan keberanian untuk memilih (*choice*) sesuatu (konsep, metode, produk, tindakan, dan lain-lain) yang terbaik bagi pribadi, keluarga, dan masyarakat.¹⁴¹

J. Rappaport mendefinisikan pemberdayaan sebagai ragam pendekatan atau aplikasi konstruktif yang bersifat multilevel, sebagai hasil dari interaksi individual, sosial, dan kolektif. Mengacu pada ragam indikator, yaitu: individual, keluarga, organisasi dan komunitas yang mendapatkan akses sekaligus kontrol dalam konteks sosial, ekonomi, dan politik yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan sosial dan hidup.¹⁴² Rappaport menjabarkan fungsi pemberdayaan yakni program pemberdayaan individual yang berfokus untuk me-

¹⁴¹Wouters, J., Ninio, A., & Doherty, T. (ed.). (2015). *The World Bank Legal Review Volume 6 Improving Delivery in Development: The Role of Voice, Social Contract, and Accountability*. World Bank Publications.

¹⁴²Rappaport, J. (1987). Terms of empowerment/exemplars of prevention: Toward a theory for community psychology. *American journal of community psychology*, 15(2), 121-148.

ngubah dalam level individu, khususnya dalam hal pemberdayaan psikologi dalam pembangunan kapasitas pribadi, mengintegrasikan persepsi-persepsi kontrol dan kendalanya, pendekatan yang proaktif dalam kehidupan, dan pemahaman yang kritis dalam lingkungan sosial dan politik. Sedangkan yang kedua, pemberdayaan dalam level kolektif yang di dalamnya keluarga, organisasi, dan komunitas di mana melibatkan proses dan sistem yang dapat meningkatkan keahlian atau kemampuan anggota-anggotanya, memfasilitasi mereka dalam upaya-upaya perubahan, meningkatkan kesejahteraan kolektif mereka, dan memperkuat jaringan intra serta ekstraorganisasi untuk meningkatkan kualitas dan integrasi kolektif tersebut. Dalam konteks inilah pemberdayaan pemuda mempunyai relevansinya.

Pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah penguatan pemilikan faktor-faktor produksi, penguatan distribusi dan pemasaran, penguatan masyarakat untuk mendapatkan gaji/upah yang memadai, dan penguatan masyarakat untuk memperoleh informasi, pengetahuan, dan keterampilan, yang dilakukan secara multiaspek, baik dari aspek masyarakat sendiri, maupun aspek kebijakannya. Dari jumlah tersebut, sekitar 13,44 persen termasuk dalam kategori pengangguran terbuka. Angka pengangguran terbuka tersebut mengalami penurunan bila dibandingkan dengan tahun 2015 yaitu sekitar 15,38 persen. Angka tersebut menunjukkan bahwa dari setiap 100 angkatan kerja pemuda, terdapat 15 hingga 16 pemuda

yang tidak bekerja dan sedang mempersiapkan usaha atau mencari pekerjaan.¹⁴³

Kabupaten Lamongan dikenal media nasional maupun internasional atas keterlibatan beberapa pemuda berasal dari daerah tersebut dalam rangkaian aksi Bom Bali I (2002) dan Bom Bali II (2005). Aksi Bom Bali sendiri merupakan perluasan dari konflik komunal-agama yang terjadi di Ambon dan Poso. Nama Lamongan muncul kembali pada April 2015 dalam proses dideportasi 10 orang keluarga Pacitan setelah gagal bergabung dengan kelompok ISIS di Suriah.¹⁴⁴ Peristiwa terbaru adalah penangkapan Pimpinan JAD (*Jama'ah Ansharut Daulah*) juga di Lamongan.¹⁴⁵ Hal ini menjadi tanda bahwa jaringan Lamongan telah menjadi bagian jaringan terorisme internasional. Kabupaten Lamongan seakan menjadi lahan yang subur bagi berkembangnya ideologi radikal dan *jihadis* di Indonesia.

Kabupaten Lamongan juga dikenal sebagai pedagang pecel lele dan soto ayam di pinggir jalan hampir di seluruh kabupaten besar di Indonesia. Warung-warung tenda dengan mudah ditemukan di pinggir-pinggir jalan dari Jakarta, Surabaya, Kabupaten Lamongan, Ternate,

¹⁴³Badan Pusat Statistik. 2015; 2016, *Statistik Pemuda Indonesia, Hasil Survey Sosial Ekonomi Nasional*, hlm. vii.

¹⁴⁴IPAC, Indonesia's Lamongan Network: How East Java, Poso And Syria Are Linked. 15 April 2015. Report No. 18

¹⁴⁵<http://news.liputan6.com/read/2913537/peran-zainal-pemimpin-jaringan-teroris-jad-dibekuk-di-lamongan>.<http://news.liputan6.com/read/2914821/polisi-aksi-teror-di-tuban-terkait-teroris-lamongan>

sampai Papua. Serbuan pemuda-pemuda Lamongan untuk berdagang merupakan salah satu pilihan di tengah himpitan ekonomi atau menjadi pengangguran. Tingginya angka pengangguran bisa jadi menjadi salah satu penyebab peningkatan radikalisme yang melibatkan pemuda.¹⁴⁶ Untuk itu, upaya pemberdayaan ekonomi pemuda diharapkan mampu membendung infiltrasi ideologi radikal bagi kalangan muda di Lamongan.

Laporan penelitian ini berupaya menggambarkan upaya pemberdayaan ekonomi pemuda di Kabupaten Lamongan. Upaya pemberdayaan dianalisis berdasarkan program pemberdayaan yang dilakukan pemerintah pusat dan daerah, organisasi sosial-masyarakat, organisasi politik, lembaga pendidikan, serta organisasi kepemudaan sendiri.

2. Gambaran Umum Masyarakat

Kabupaten Lamongan merupakan salah satu kawasan pantai utara (pantura) Provinsi Jawa Timur dengan panjang garis pantai 47 km. Letak wilayah Kabupaten Lamongan berbatasan dengan Kabupaten Jombang dan Mojokerto di sebelah selatan; Kabupaten Bojonegoro dan Tuban di sebelah barat; dengan Kabupaten Gresik sebelah timur. Luas wilayah Kabupaten Lamongan kurang lebih

¹⁴⁶ Hasan, Noorhaidi. 2010 "The Drama of Jihad: The Emergence of Salafi Youth in Indonesia" dalam *Being Young and Muslim: New Cultural Politics in the Global South and North*. Oxford: Oxford University Press. hal. 49-62

1.812,80 kilometer persegi terbagi menjadi tiga karakteristik yaitu; *Pertama*, daerah pantai dan berpegunungan, daerah ini berbatasan dengan garis pantai utara dan sungai Bengawan Solo, wilayah ini berada di bagian utara dan merupakan wilayah industri, pariwisata, perdagangan, tempat pelelangan ikan, dermaga, dan pertanian. *Kedua*, daerah Bonorowo, daerah ini merupakan dataran rendah yang sering terjadi genangan terdapat di wilayah tengah dan utara. Wilayah ini merupakan kawasan pertanian, perdagangan, dan perkantoran. *Ketiga*, daerah dataran tinggi dan berpegunungan, wilayah ini merupakan kawasan pertanian, perkebunan, perdagangan, dan industri.

Secara administratif, Kabupaten Lamongan terbagi menjadi 27 kecamatan, 262 desa, dan 12 kelurahan. Pusat pemerintahan Kabupaten Lamongan terletak 50 km sebelah barat Kabupaten Surabaya, ibukota Kabupaten Provinsi Jawa Timur.¹⁴⁷ Jumlah penduduk Kabupaten Lamongan adalah 1.188.193 jiwa pada 2016, dengan perbedaan berdasarkan jenis kelamin adalah 576.812 laki-laki dan 610.983 perempuan. Mengalami kenaikan sedikit bila dibanding dengan tahun 2015, yaitu sebanyak 1.187.795 jiwa.¹⁴⁸ Sedangkan komposisi penduduk berdasarkan usia adalah sebagai berikut: berusia muda (0-14 tahun) sebesar 18,50 persen, usia produktif (15-64 tahun) sebesar 77,05

¹⁴⁷Badan Pusat Statistik Lamongan (2016), *Kabupaten Lamongan dalam Angka*, hlm. 1-3.

¹⁴⁸Badan Pusat Statistik Jawa Timur (2016), *Provinsi Jawa Timur dalam Angka*, hlm. 42.

persen, dan usia tua (> 65 tahun) sebesar 4,45 persen. Dari jumlah tersebut, penduduk berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun berjumlah 313.850 jiwa, terdiri dari laki-laki 161.860 jiwa dan perempuan 151.990 jiwa.¹⁴⁹

Dalam aspek pendidikan, data BPS Lamongan menunjukkan tingkat Angka Partisipasi Kasar (APK) penduduk di Kabupaten Lamongan, yaitu: penduduk belum sekolah berjumlah 386.196 jiwa, SD/MI berjumlah 429.169 jiwa, SMP 247.878 jiwa, SMA 223.669 jiwa, Diploma 8.922 jiwa, S-1 berjumlah 43.714 jiwa, S-2 berjumlah 2.697 jiwa, dan S-3 berjumlah 28 jiwa.¹⁵⁰ Sedangkan, Angka Partisipasi Murni (APM) penduduk Kabupaten Lamongan adalah sebagai berikut: persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang tidak/belum pernah sekolah sebesar 14,94 persen, tidak/belum tamat SD dari 18,06 persen, tamat SD dari 25,79 persen, tamat SLTP sebanyak 21,63 persen, tamat SLTA sebesar 17,25 persen, tamat perguruan tinggi sebesar 2,89 persen pada 2006. Berdasarkan data tersebut, rata-rata pendidikan tertinggi yang ditamatkan penduduk di Kabupaten Lamongan adalah setingkat sekolah dasar atau pendidikan 6 tahun.¹⁵¹

Dalam aspek keagamaan, masyarakat Lamongan, sebagaimana masyarakat Jawa Timur lainnya, mayoritas memeluk agama Islam. Berdasarkan data BPS tahun 2015,

¹⁴⁹ Badan Pusat Statistik Lamongan (2016), *Kabupaten Lamongan dalam Angka*, hlm. 94.

¹⁵⁰ Badan Pusat Statistik Lamongan (2016), *Kabupaten Lamongan dalam Angka*, hlm. 136-137.

¹⁵¹ Badan Pusat Statistik Lamongan (2016), *Kabupaten Lamongan dalam Angka*, hlm. 184.

komposisi pemeluk agama: Islam berjumlah 1.338.441 orang, Protestan 2.896 orang, Katolik 551 orang, Hindu 269 orang, dan Buddha sebanyak 86 orang, Khonghucu berjumlah 6 orang, serta aliran kepercayaan 17 orang.¹⁵² Meski Islam menjadi agama mayoritas penduduk, namun perbedaan afiliasi organisasi keagamaan, khususnya Nahdhatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah jelas terlihat dalam dinamika hubungan sosial di wilayah Lamongan. Kedua organisasi keagamaan saling berlomba dengan identitas keorganisasian. Di beberapa desa dan kecamatan, masjid dan gedung NU dan Muhammadiyah saling berhadapan, tidak jarang pula terjadi konflik horizontal berdasarkan perbedaan afiliasi organisasi keagamaan. Organisasi sosial keagamaan seperti LDII, FPI, PERSIS, Al-Irsyad, HTI, Hidayatullah, MTA, dan al-Wasiliyah juga mempunyai pengikut, namun populasinya jauh lebih sedikit dibandingkan NU dan Muhammadiyah. Selain itu, potret perbedaan juga tecermin dalam pilihan pendidikan antara pendidikan umum (SD dan SMP) dan pendidikan Agama (MI dan MTS atau Pesantren). Data BPS tahun 2016, total populasi penduduk usia pendidikan dasar (Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama) adalah sebanyak 192.568 orang. Bagi masyarakat yang mendiami wilayah utara dan tengah, mayoritas penduduk memilih memasukkan anaknya ke pendidikan agama (pesantren atau madrasah ibtida'iyah atau tsanawiyah) daripada

¹⁵²Badan Pusat Statistik Lamongan (2016), *Kabupaten Lamongan dalam Angka*, hlm. 283.

menyekolahkan anak-anak mereka ke lembaga pendidikan umum. Sedangkan untuk wilayah bagian selatan, mayoritas menyekolahkan di sekolah umum.

Aspek lain dari penduduk Kabupaten Lamongan adalah kondisi kemiskinan, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Lamongan tahun 2014 sebesar 178.470 penduduk, jumlah ini mengalami penurunan sebesar 7,65 persen dibanding tahun 2013 yang sebesar 186.120 penduduk. Sementara itu, garis kemiskinan Kabupaten Lamongan tahun 2014 mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp 289.403/kapita/bulan. Data BPS Kabupaten Lamongan tahun 2013 menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin terbanyak berada di Kecamatan Babat sebesar 2.168 jiwa dan yang paling sedikit berada di Kecamatan Sarirejo sebesar 218 jiwa.¹⁵³

- **Pertumbuhan Ekonomi Wilayah**

Perekonomian Kabupaten Lamongan tumbuh 5,90 persen berdasarkan perhitungan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan pada 2016. Sektor pertanian, terutama pertanian tanaman pangan dan hortikultura merupakan subsektor yang berpengaruh cukup besar terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Lamongan. Penyumbang terbesar kedua terhadap perekonomian di Lamongan adalah sektor perdagangan, hotel, dan restoran. Besarnya kontribusi

¹⁵³ Badan Pusat Statistik Lamongan (2016), *Kabupaten Lamongan dalam Angka*, hal. 307.

sektor ini antara lain ditunjang oleh subsektor swasta yaitu hiburan dan rekreasi. Selanjutnya sektor industri pengolahan merupakan penyumbang terbesar keempat. Sumbangan terbesar sektor ini adalah industri makanan, minuman dan tembakau. Untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lamongan dari tahun 2011 sampai 2016, sebagai tabel berikut:

**Tabel Pertumbuhan Ekonomi
Kabupaten Lamongan Periode 2011-2016 (%)**

Tahun	Pertumbuhan Ekonomi
2011	7,02%
2012	7,12%
2013	6,65%
2014	6,02%
2015	5,77%
2016	5,90%

Dari data di atas terlihat bahwa pertumbuhan ekonomi mengalami pelambatan, dari 7,02% pada 2011 menjadi 5,90% pada 2016. Salah satu penyebab turunnya pertumbuhan ekonomi adalah menurunnya sumbangan dari sektor pertanian, penurunan kontribusi pertumbuhan sektor pertanian dari tahun 2011 hingga 2016 disebabkan oleh menurunnya volume produksi, iklim yang tidak menentu, berakibat pada penurunan luas panen.¹⁵⁴

¹⁵⁴ Wawancara dengan kapala bidang ketahanan pangan.

3. Pemberdayaan Ekonomi Pemuda

- **Peran Pemerintah Pusat dan Daerah**

Sebagaimana diungkapkan sebelumnya, program pemberdayaan ekonomi pemuda menjadi bagian dari program pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat, terutama program penanggulangan kemiskinan. Program PNPM Mandiri, misalnya, adalah program nasional dalam penanggulangan kemiskinan. Program ini pertama kali diluncurkan pada 2007. Program PNPM Mandiri dirancang dengan konsep bahwa pemberdayaan masyarakat memerlukan keterlibatan yang besar dari perangkat pemerintah daerah serta berbagai pihak untuk memberikan kesempatan dan menjamin keberhasilan yang dicapai.¹⁵⁵

Secara garis besar program ini dapat diklasifikasikan menjadi empat jenis kegiatan, yaitu: kegiatan pembangunan atau perbaikan prasarana dasar yang dapat memberikan manfaat ekonomi bagi warga miskin; kegiatan perbaikan layanan pendidikan dan kesehatan; kegiatan penunjang usaha ekonomi produktif masyarakat; dan Simpan Pinjam Perempuan (SPP). Semua program dirumuskan dan dikontestasikan oleh masyarakat dengan ‘prinsip pilihan terbuka’, masyarakat memilih jenis proyek pembangunan yang dibutuhkan dalam sebuah pertemuan yang harus dihadiri semua unsur warga desa. Setelah usulan terkumpul, ada sebuah pertemuan antardesa yang

¹⁵⁵ pnpn-mandiri.org

terdiri atas perwakilan desa yang akan bermusyawarah untuk membuat keputusan final tentang proyek mana yang akan didanai. Setelah dana *block grant* dialokasikan, konsultan sosial dan teknis akan membantu sosialisasi, perencanaan, dan pelaksanaan kegiatan. Pertemuan desa harus memilih beberapa orang yang akan menjadi bagian dari tim pelaksana kegiatan yang akan menjalankan proyek. Fasilitator teknis akan membantu tim pelaksana untuk menyusun rancangan infrastruktur, anggaran proyek, verifikasi kualitas, dan pengawasan.

Kabupaten Lamongan merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang mendapatkan alokasi dana PNPM Mandiri. Alokasi dana PNPM Mandiri pada 2013 adalah Rp 53,95 miliar, mengalami kenaikan bila dibandingkan dengan tahun 2012 sebesar Rp 27,35 miliar.¹⁵⁶ Dana tersebut dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur seperti gedung taman kanak-kanak/ pendidikan anak usia dini, pos kesehatan, pembangunan jalan desa, dan instalasi air bersih.

Beberapa kajian telah dilakukan berkaitan dengan pencapaian tujuan dan efektivitas program PNPM Mandiri. Kajian Nurnaini (2011) menilai bahwa Program PNPM Mandiri kurang difokuskan untuk masyarakat miskin khususnya untuk peningkatan kualitas manusia seperti pelaksanaan kegiatan pelatihan, pemberian modal usaha, dan bantuan beasiswa bagi anak usia sekolah

¹⁵⁶<http://nasional.kompas.com/read/2013/01/18/16214433/alokasi.dana.pnpm.mandiri.untuk.lamongan.rp.5395.miliar>

terutama untuk keluarga miskin.¹⁵⁷ Kajian Syukri, M., & Mawardi, S. (2013) tentang partisipasi dan representasi dalam pelaksanaan program PNPM menyimpulkan bahwa program PNPM yang dirancang untuk meningkatkan partisipasi dan representasi dari seluruh kelompok masyarakat dalam pengambilan keputusan sering kali hanya dilakukan oleh elite desa, yakni perangkat desa dan tokoh-tokoh masyarakat. Warga desa pada umumnya bersikap pasif terhadap berbagai informasi tentang pembangunan, kecuali informasi menyangkut program bantuan langsung seperti raskin dan BLT. Model partisipasi yang diterapkan PNPM tidak berdampak signifikan terhadap pemerintahan (partisipasi, transparansi, akuntabilitas) di tingkat desa.¹⁵⁸ Hasil serupa juga dalam kajian Nugroho (2014) dalam kajian terhadap partisipasi pemuda dalam menyukseskan program PNPM mandiri menyimpulkan bahwa keterlibatan pemuda sangat rendah dalam proses perencanaan, *monitoring*, dan implementasi program. Salah satu hambatannya adalah kurangnya sosialisasi dan pengarahan bagi pemuda. Selain itu, program-program pemberdayaan sebagian besar dikerjakan oleh pemborong, sehingga pemuda tidak bisa memberikan masukan terhadap program tersebut.¹⁵⁹ Selain masalah partisipasi dan representasi,

¹⁵⁷Nuraini, S. (2017). Penanganan Tunggakan Dana Bergulir (*Non Performing Loan*) Paska Pelaksanaan PNPM Mandiri Pedesaan. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis Airlangga*, 1(1).

¹⁵⁸Syukri, M., & Mawardi, S. (2013). Studi Kualitatif Dampak PNPM-Pedesaan di Jawa Timur, Sumatra Barat, dan Sulawesi Tenggara.

¹⁵⁹Nugroho, B. A., & Astuti, P. (2015). Partisipasi Pemuda dalam

program PNPM Mandiri di Kabupaten Lamongan juga tidak lepas dari jerat korupsi.¹⁶⁰

Program pemberdayaan masyarakat, termasuk pemuda adalah program pemberian Alokasi Dana Desa (ADD). Program ADD bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Pemberian Alokasi Dana Desa berdasarkan pandangan bahwa pemerintah desa merupakan satuan pemerintah terendah memegang peran terdepan dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan, pemberdayaan dan pelayanan publik (*development, empowerment and public service*).

Dasar implementasi program ADD adalah UU No. 6 tahun 2014 Tentang Desa. Undang-Undang Desa mengakui eksistensi desa dengan pengakuan atas kewenangan berdasarkan asal usul (tradisional) merupakan landasan kuat untuk membentengi hak-hak masyarakat desa agar bisa berdaya menggerakkan inisiatif-inisiatif untuk mengurangi kemiskinan. Pasal 18 ayat 7 UUD

Menyuksesan Program Pnpm Mandiri Perdesaan di Desa Buluroto Kabupaten Bora. *Journal of Politic and Government Studies*, 4(2), 206-220.

¹⁶⁰<https://news.detik.com/jawatimur/2452751/ketua-upk-pnpm-korupsi-dana-rp-900-juta-ditahan-kejari-lamongan>

1945 dan pasal 18B ayat 2. Pasal 18 ayat 7 merupakan landasan hukum bagi kedudukan desa sebagai bagian dari pemerintahan daerah. Penjelasan pasal 5 UU Desa tentang kedudukan desa menggambarkan pengaturan desa berdasarkan pasal 18 ayat 7 sebagai *local self-government* (tata pemerintahan daerah). Sedangkan pasal 18B ayat 2 merupakan landasan hukum bagi kedudukan desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan masyarakat atau sering kali disebut sebagai masyarakat yang berpemerintah.

Pengelolaan ADD berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, pengelolaan ADD merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan desa yakni keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan desa. Dalam Pedoman Umum Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Lamongan No. 3 Tahun 2011 bahwa tujuan pemberian ADD adalah:

1. Meningkatkan kinerja pemerintah desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintah, pembangunan, dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya.
2. Meningkatkan peran dan fungsi lembaga kemasyarakatan di desa dalam proses penyaluran aspirasi, musyawarah dalam pengambilan keputusan

serta memberdayakan masyarakat dalam proses pelaksanaan pembangunan.

3. Meningkatkan partisipasi, peran serta, dan kreativitas masyarakat dalam pembangunan.
4. Mendorong kegiatan usaha ekonomi produktif.
5. Tersedianya sarana dan prasarana bagi pengembangan kegiatan ekonomi.

Berdasarkan tujuan ADD tersebut, penggunaan ADD terbagi menjadi dana operasional pemerintah desa dan pemberdayaan masyarakat. Khusus untuk pembangunan dan pemberdayaan Masyarakat dana ADD dapat digunakan untuk:

1. Pembangunan sarana/prasarana fisik (pemberdayaan lingkungan) yang dapat menunjang kegiatan ekonomi dan dapat mendorong percepatan kemajuan desa.
2. Pemberdayaan ekonomi, utamanya untuk menumbuhkembangkan Lembaga Ekonomi Desa dan Badan Usaha Milik Desa.
3. Pemberdayaan manusia untuk mendukung peningkatan di bidang pendidikan, kesehatan, dan kegiatan sosial.

Sayangnya, sebagaimana program pemberdayaan lainnya, program ADD juga belum dapat mencapai harapan. Kajian Istifazhuddin (2016) menyimpulkan bahwa efisiensi proses pelaksanaan kebijakan ADD di Desa Nguwok, Kecamatan Modo, Kabupaten Lamongan,

tidak efisien dan tidak sesuai dengan rencana pelaksanaan yang ditetapkan.¹⁶¹

Selain program pemberdayaan masyarakat yang bersumber dari pemerintah pusat, pemerintah daerah Kabupaten Lamongan juga melaksanakan program pemberdayaan yang dikenal dengan Program Gerakan Membangun Ekonomi Rakyat Lamongan Berbasis Pedesaan (Gemerlap). Program ini secara resmi disahkan pada 14 Juni 2011 berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2011. Program Gemerlap bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan meningkatkan kesempatan kerja masyarakat pedesaan. Sasaran penerima Program Gemerlap adalah masyarakat pedesaan yang telah mempunyai usaha mandiri, yang dimungkinkan untuk dikembangkan menjadi usaha masyarakat desa yang kemudian akan menjadi produk unggulan desa tersebut. Program tersebut menstimulasi produk-produk unggulan di setiap desa dan kecamatan agar produktivitasnya meningkat. Stimulasi itu berbentuk bantuan permodalan maupun pembinaan teknis secara intensif. Terutama merangsang mentalitas masyarakat agar tidak pantang menyerah dan berjuang hingga berhasil. Pelaksanaan program Gemerlap dilaksanakan oleh beberapa Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) di lingkungan

¹⁶¹Istifazhuddin, A. H. (2016). *Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan ADD (Alokasi Dana Desa) di Desa Nguwok, Kecamatan Modo, Kabupaten Lamongan* (Disertasi doktoral, Universitas Airlangga).

pemerintahan Kabupaten Lamongan. Program Gemerlap meliputi: a. pertanian dan kehutanan, b. peternakan, c. perikanan, d. koperasi, perdagangan, dan industri.

Implementasi program Gemerlap diawali dengan sosialisasi yang dilaksanakan pada dua tahap. Tahap pertama sosialisasi pada tingkat kabupaten yang dilaksanakan di kantor bupati. Pada tahap kedua sosialisasi dilaksanakan pada tingkat kecamatan. Setelah dilaksanakan sosialisasi pada tingkat kecamatan akan dilakukan seleksi pada beberapa kelompok-kelompok masyarakat. Kelompok yang sudah lolos pada tahap seleksi akan dilakukan verifikasi oleh tim verifikasi yang terdiri dari SKPD pelaksana program. Beberapa kelompok yang telah mendapatkan dana program Gemerlap adalah Kelompok Ternak Sumber Rejeki peternakan itik di Desa Tawangrejo. Kelompok petani Peternak Lele Tambak Terpal di Kecamatan Sambeng, dan Kelompok itik yang digerakkan ibu-ibu berhasil mendapat penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara dan Ketahanan Pangan 2012 kategori Pelaku Pembangunan Ketahanan Pangan. Program tersebut juga mengantarkan Lamongan meraih Otonomi Award 2012 kategori khusus Pemberdayaan Ekonomi Lokal (Perempuan Produktif).

Selain program pemberdayaan di atas, beberapa program pemberdayaan masyarakat juga dilakukan oleh Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) Kabupaten Lamongan sesuai tugas pokok dan fungsinya. Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Lamongan,

misalnya, bidang ketenagakerjaan, Dinas ini menjalankan fungsi merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis pada bidang ketenagakerjaan seperti penanggulangan masalah pengangguran, ketenagakerjaan, hubungan industrial, pengawasan perlindungan kerja, tenaga kerja asing, pelatihan kerja, dan jaminan sosial ketenagakerjaan. Salah satu kewenangan SKPD ini adalah memberikan status pencari kerja. Untuk mendapatkan status pencari kerja ini, pemohon cukup memenuhi persyaratan seperti menyerahkan fotokopi KTP Lamongan, ijazah. Pelamar bahkan tidak perlu menyertakan dalam permohonannya surat keterangan catatan kepolisian (SKCK). Jika pemohon tidak memiliki KTP Lamongan, pemohon cukup membawa surat domisili menetap di Lamongan yang dikeluarkan kelurahan di mana pemohon berdomisili. Pada 2016, kebijakan yang ditempuh terkait peningkatan kualitas dan pengembangan kompetensi tenaga kerja antara lain melalui pembinaan keterampilan kerja masyarakat, penguatan sarana dan prasarana Balai Latihan Kerja, serta penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja melalui *job market fair*.

Dalam bidang sosial, dinas ini bertugas menjalankan program pemerintah baik pusat dan pemerintah daerah Kabupaten Lamongan seperti pelaksanaan jaminan dan perlindungan sosial, rehabilitasi sosial, dan juga pemberdayaan sosial. Program pemerintah Pusat yang di-kawal oleh Dinas Sosial Lamongan berhubungan dengan bantuan Kementerian Sosial untuk Yayasan Lingkar Per-

damaian,¹⁶² seperti program *life skill* atau *vocational training* terhadap mantan napiter, Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat, dan Kartu Keluarga Sejahtera untuk anak-anak mantan napiter.

Dinas Koperasi, Industri, dan Perdagangan Kabupaten Lamongan, salah satu tumpuan pengembangan ekonomi wilayah. Berdasarkan pembagian kewenangan yang diatur oleh Peraturan Pemerintah No. 37 tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintah, maka terdapat dua urusan yang menjadi kewenangan Dinas Koperasi, Industri, dan Perdagangan Kabupaten Lamongan yaitu urusan Koperasi dan UMKM menjadi urusan wajib dan urusan pilihan Industri dan Perdagangan yang harus diselenggarakan oleh pemerintah daerah provinsi dan pemerintah kabupaten daerah kabupaten. Keberadaan koperasi sebagai *sokoguru* ekonomi diharapkan mampu mengerakkan ekonomi wilayah.

Secara garis besar, kegiatan Dinas Koperasi dan UKM dapat digambarkan sebagai berikut: *Pertama*, peningkatan persentase koperasi aktif. Program peningkatan kualitas kelembagaan dan usaha koperasi, kegiatan pemeriksaan kelembagaan dan usaha koperasi, kegiatan penilaian kesehatan KSP/USP konvensional dan syariah, kegiatan pemantauan pelaksanaan sanksi dan rehabilitasi kelembagaan dan usaha. *Kedua*, peningkatan skala usaha dari klasifikasi usaha mikro menjadi kecil. Program

¹⁶²<https://news.detik.com/berita/d-3606781/mensos-siapkan-program-khusus-untuk-mantan-napi-teroris>

penciptaan iklim usaha mikro kecil dan koperasi yang kondusif, kegiatan penyusunan kebijakan tentang usaha kecil menengah, kegiatan pelayanan klinik koperasi dan UMK, kegiatan fasilitasi legalitas usaha bagi koperasi dan UMK, kegiatan sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman peraturan dan perundang-undangan perkoperasian, kegiatan pengembangan Standarisasi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) SDM koperasi dan UMKM. *Ketiga*, pertumbuhan wirausaha baru. Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan dan peningkatan jaringan kerja sama lembaga usaha koperasi dan UMK. Beberapa bentuk koperasi di Kabupaten Lamongan antara lain; KUD (Koperasi Unit Desa), Kopkar (Koperasi Karyawan), KSU (Koperasi Serba Usaha), KSP/KSPS, Koptan (Koperasi Tani), KMDH, Kopwan. Pencapaian peningkatan kinerja koperasi di Kabupaten Lamongan diwujudkan dengan diterimanya penghargaan di antaranya Koperasi Wanita Berprestasi tingkat Provinsi Jawa Timur atas nama Koperasi Wanita Amalia Desa Kandangrejo, Kecamatan Kedungpring dengan aset 3 miliar 200 juta rupiah.¹⁶³

UU No. 20 tahun 2008 menetapkan definisi dari usaha mikro, kecil, dan menengah. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini yaitu:

¹⁶³<https://www.bangsaonline.com/berita/3014/kopwan-di-lamongan-beromzet-rp-23-m>

- a) memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b) memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Penduduk Lamongan juga dikenal dengan jiwa kewirausahaan yang tinggi. Diaspora Lamongan atas serbuan warung pecel lele dan soto ayam di segenap penjuru Nusantara. Warung-warung tenda dengan mudah ditemukan di pinggir-pinggir jalan dari Jakarta, Surabaya, Lamongan, Ternate, sampai Papua. Serbuan pemuda-pemuda Lamongan untuk berdagang merupakan salah satu pilihan di tengah himpitan ekonomi. Krisis ekonomi rupanya telah mempertinggi kemampuan masing-masing UKM untuk menyerap tenaga kerja. Dengan kata lain, sektor tersebut telah turut berperan dalam mengatasi persoalan pengangguran yang diakibatkan oleh krisis ekonomi. Hal ini tidak lepas dari kemampuan UKM untuk merespons krisis ekonomi secara cepat dan fleksibel dibandingkan kemampuan usaha besar.¹⁶⁴ Namun demikian, ada pendapat bahwa sektor informal tidaklah memberikan perbaikan secara berarti terhadap taraf hidup para pekerjanya. Hidup di sektor informal hanyalah hidup secara subsisten.¹⁶⁵

¹⁶⁴Sulistyastuti, D.R. (2004). Dinamika usaha kecil dan menengah (UKM) analisis konsentrasi regional UKM di Indonesia 1999–2001. *Economic Journal of Emerging Markets*, 9(2).

¹⁶⁵Basri, F.H. (2002). *Perekonomian Indonesia: Tantangan dan Harapan bagi Kebangkitan Ekonomi Indonesia*. Erlangga.

Dinas yang paling bertanggung jawab dalam urusan pembinaan pemuda yakni Dinas Pemuda dan Olahraga. Visi dinas ini adalah “terwujudnya pemuda dan insan olahraga yang produktif, prestatif, dan inovatif”. Sedangkan misinya adalah 1) Mewujudkan pemuda yang produktif, prestatif dan inovatif; 2) Mewujudkan olahraga yang berkualitas, berprestasi dan memasyarakat; 3) Mewujudkan pemuda dan insan olahraga yang mandiri dan sejahtera. Secara garis besar, program kegiatan dinas ini adalah penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda. Secara garis besar ada tiga bidang yang menjadi tanggungjawab dinas ini yaitu; bidang penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda di Kabupaten Lamongan.

Bidang penyadaran pemuda, merupakan bidang baru dalam tugas dan fungsi dispora Kabupaten Lamongan sehingga belum punya program khusus kepada kaum muda, keluarga, atau mantan napi teroris. Terkait upaya penanggulangan teroris atau upaya pencegahan berulangnya kasus teroris yang dilakukan oleh pelaku lama atau keluarganya. Kepala Seksi Pemuda di Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) di Lamongan mengungkapkan, bahwa: “Kita ini kan dititipi Kementerian Pemuda dan Olahraga kalau urusan terorisme, tidak sampai ke teknis. Tapi di wilayah pelayanan, penyadaran”.¹⁶⁶ Bidang pemberdayaan pemuda, kegiatan pemberdayaan pemuda dilakukan melalui kegiatan membangkitkan potensi dan

¹⁶⁶ Wawancara 28 September 2017.

peran aktif pemuda yang dilakukan melalui “pelatihan bela negara tiap tahun, kita minta pesertanya ke camat dan tembusannya ke UKP, nanti diteruskan ke organisasi-organisasi seperti KNPI, IPNU, Anshor”.¹⁶⁷ Kegiatan pengembangan pemuda sebagaimana diungkapkan oleh Sekretaris Dispora bahwa: “melahirkan atlet-atlet handal dengan mengupayakan dalam menyaring atlet bibit berbakat melalui kegiatan olahraga seleksi dan latihan”¹⁶⁸

Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Lamongan. SKPD yang portofolio—atau biasa dikenal dengan sebutan tugas dan fungsi—adalah mengupayakan peningkatan bidang ideologi, wawasan kebangsaan, kewaspadaan, politik dalam negeri, ketahanan seni, budaya, agama, dan ekonomi dalam masyarakat. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melakukan pembinaan poldagri, ideologi negara dan pembinaan kesatuan bangsa, fasilitasi, kegiatan kesatuan bangsa dan politik, pelaksanaan kajian strategis di bidang kesatuan bangsa, pengoordinasian kegiatan kesatuan bangsa dan politik dengan instansi dan atau lembaga terkait. Kinerja urusan kesatuan bangsa dan politik adalah persentase konflik sosial yang ditangani tercapai sebesar 100 persen dan persentase ormas, orpol, dan LSM yang terdaftar sebesar 96,58 sesuai target yang ditetapkan.

Selain itu, SKPD ini juga bekerja sama dengan tokoh-tokoh agama dalam menciptakan kerukunan antar umat

¹⁶⁷ Wawancara 28 September 2017.

¹⁶⁸ Wawancara 28 September 2017.

beragama di Kabupaten Lamongan. Bentuk kerja sama tersebut diimplemetasikan dalam program kegiatan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). Lembaga ini merupakan “diplomasi kultural”, yaitu bentuk hubungan simbiosis antara aktor-aktor keagamaan dan agen pemerintah yang keduanya saling memberikan manfaat. Tokoh-tokoh agama menjadi salah satu pranata yang selama ini diandalkan dalam membangun dialog antar-umat beragama. Model dialog seperti ini, dapat disebut dialog kelembagaan (*institutional dialogue*), yakni dialog di antara wakil-wakil institusional berbagai organisasi agama yang melibatkan majelis-majelis agama yang diakui pemerintah.¹⁶⁹

Dari studi lapangan diketahui bahwa Kantor Kementerian Agama (KKA) Kabupaten Lamongan juga tidak terlibat langsung pada upaya pemberdayaan ekonomi kaum muda apalagi ikut menjalankan program yang berorientasi pada peningkatan keahlian agar kelompok muda ini dapat mandiri secara ekonomi dan akhirnya semakin terhindar dari radikalisme dan tindakan terorisme. Sehingga ketika ada muncul letupan-letupannya dari Lamongan itu sifatnya kasuistik, hanya orang per orang bukan mengatasnamakan lembaga atau organisasi. Kantor Kementerian Agama (KKA) sifatnya hanya melakukan pembinaan dan bimbingan.¹⁷⁰ Kementerian

¹⁶⁹ Asrori, Saifudin (2017). *Politik Kerukunan di Indonesia; Model Dialog Kelembagaan Antar Umat Beragama*. Tangerang Selatan, Young Progressive Muslim.

¹⁷⁰ Wawancara 28 September 2017.

Agama berupaya memberikan bimbingan dan pembinaan agama, “Ada kegiatan pembinaan, ada dua. Yang pertama pembinaan setiap seminggu sekali di lapas, dan setiap hari Jum’at ada pembinaan narapidana yang di antaranya memang termasuk teroris. Kedua memang kita laksanakan khotbah Jumat setiap hari Jumat.”¹⁷¹

- **Partisipasi Organisasi Sosial-Keagamaan dalam Pemberdayaan Pemuda**

Organisasi kemasyarakatan atau disingkat Ormas menjadi ciri penting masyarakat Indonesia. Undang-Undang No. 7 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menggambarkan Ormas sebagai organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Seperti dalam ketentuan UU Ormas Pasal 9 (1) dan Pasal 11 ayat (1) menjelaskan bahwa, Ormas dapat berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum, adapun yang berbadan hukum dapat berbentuk perkumpulan atau yayasan. Pada Pasal 12 disebutkan bahwa soal persyaratan pendirian perkumpulan, yaitu; akte pendirian, sumber pendanaan, NPWP atas nama perkumpulan, dan lain-lain.

Secara garis besar, Ormas dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu: 1) Ormas yang bergerak dalam

¹⁷¹ Wawancara 28 September 2017.

satu bidang kekhususan. Ormas yang termasuk dalam kelompok ini, biasanya adalah organisasi profesi seperti, Ikatan Sosiologi Indonesia (ISI), Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI), dan lain-lain; dan 2) Ormas yang bergerak dan/atau mempunyai kegiatan bidang kemasyarakatan lebih dari satu kekhususan, seperti: Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah. Organisasi tersebut, dalam praktiknya selain organisasi keagamaan/dakwah, juga bergerak dalam bidang kemasyarakatan lainnya seperti pendidikan, kesehatan, dan persoalan sosial lainnya; 3) Ormas kepemudaan dan mahasiswa.

Beragam bentuk Ormas lahir dari suatu kesadaran dan sangat memberdayakan masyarakat karena organisasi merupakan manifestasi dari kepedulian dan peran serta masyarakat, yang diwujudkan dalam berbagai bentuk program dan kegiatan kemasyarakatan, sesuai dengan visi dan misinya masing-masing, termasuk di dalamnya menyampaikan pandangan, kritikan, dan mungkin konsep tandingan atas berbagai kebijakan yang diambil pemerintah. Keterlibatan Ormas dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat sering kali lebih fokus bila dibandingkan dengan program-program dari lembaga pemerintah. Majelis Taklim misalnya, merupakan kelompok sosial keagamaan yang tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat. Keberadaannya memberikan kontribusi bagi terciptanya tradisi belajar sepanjang hayat dan masyarakat belajar (*learning society*).

Secara umum, Majelis Taklim berfungsi sebagai institusi pendidikan, dakwah, sosial, dan sebagian ekonomi.¹⁷² Keberadaan Majelis Taklim diperkuat dengan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Bab VI Pasal 26 Ayat 4 yang menyebutkan bahwa Majelis Taklim merupakan bagian dari pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan, berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat.

Beberapa Ormas telah melakukan kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat, termasuk pemuda. Majelis Ulama Indonesia (MUI), misalnya, secara organisasi merupakan wadah para ulama dalam menyebarkan Islam, membimbing umat, penegak *amar makruf* dan *nahi mungkar* yang dilakukan antara lain dengan penerbitan fatwa baik diminta atau tidak tentang berbagai aspek kehidupan umat sekaligus juga penyalur aspirasi umat Islam. Selain memberikan fatwa, MUI berkontribusi pada pemberdayaan sosial, seperti menyelenggarakan pelatihan tentang Islam dan syariah, misalnya kader pendidikan guru (pelatihan untuk membentuk kader ulama). Dalam bidang sosial dan ekonomi, MUI misalnya terlibat dalam pendirian Bank Muamalat Indonesia dan sertifikasi halal serta membangun kerja sama dengan

¹⁷² Asrori, Saifudin (2014). Pemberdayaan Perempuan Majelis Taklim Darun Nisa: Analisis Kapital Sosial. *Jurnal Bimas Islam*, Vol. 7 No. 4 Tahun 2014. 755-779.

badan-badan internasional seperti UNICEF dan WHO; dan menjadi lembaga penilaian pangan, obat-obatan, dan kosmetik (Lembaga Pengkajian Pangan dan Kosmetika, LPPOM).

Majelis Ulama Indonesia (MUI) memiliki struktur hierarki mulai dari MUI Pusat, MUI Provinsi, MUI Kabupaten/Kota sampai tingkat kecamatan. Dalam struktur MUI Kabupaten Lamongan, ada beberapa komisi salah satunya adalah Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat. Dengan peran dan adanya organ di MUI yang bertanggung-jawab mengurus pemberdayaan ekonomi umat, mendapatkan informasi tentang penanggulangan terorisme dari dimensi ekonomi sangat relevan. Namun, MUI Lamongan tidak memiliki program khusus pemberdayaan bagi kalangan muda apalagi yang berorientasi pada penciptaan keahlian agar kelompok muda dapat mandiri secara ekonomi dan sulit untuk digoda untuk terlibat dalam tindakan yang kekerasan yang bermotif keagamaan seperti terorisme.

Walaupun demikian, seperti responden yang lain, secara umum, MUI juga melihat munculnya terorisme dapat berawal dari masalah ekonomi terutama masalah keadilan ekonomi. MUI melihat ketimpangan ekonomi termasuk penguasaan sumber-sumber ekonomi di tangan kelompok kecil masyarakat yang beretnis minoritas adalah salah satu bentuk ketidakadilan ekonomi. Ini bisa menimbulkan bibit-bibit konflik. MUI juga pernah terlibat dalam forum-forum yang membicarakan stabilitas

Kabupaten Lamongan yang terkait dengan potensi konflik yang bernuansa keagamaan dengan pihak kepolisian.

Ormas lain yang memiliki perhatian terhadap pemberdayaan masyarakat adalah Nahdlatul Ulama atau NU. Organisasi berdiri pada 31 Januari 1926 di Surabaya oleh beberapa kyai di Jawa Timur termasuk KH. Hasyim Asyari (Tebu Ireng) dan KH. Wahab Hasbullah (Tambak Beras). NU merupakan organisasi Islam terbesar di Indonesia, bahkan mungkin di dunia, dengan keanggota-an sekitar 40 juta. NU juga mendanai sekolah dan rumah sakit serta mengorganisasi masyarakat untuk membantu mengurangi kemiskinan. Sebagai organisasi yang didirikan oleh kyai, keberadaan Nahdlatul Ulama tidak dapat dilepaskan dari pesantren. Hubungan NU dan pesantren digambarkan oleh Luken-Bull, sebagai *“NU is the pesantren writ large; the pesantren is NU writ small.”*¹⁷³ Banyak kegiatan pemberdayaan NU dilakukan melalui pondok pesantren. Selain itu, NU juga memiliki 44 universitas, dan terlibat dalam studi ekonomi dan pertanian, dan kegiatan sosial termasuk keluarga berencana.

Secara struktural, NU terdiri Syuriah (dewan tertinggi), Tanfidziyah (dewan eksekutif), dan Mustasyar (dewan penasihat) memberi masukan kepada keduanya. Struktur tersebut meluas sampai daerah tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan beberapa di luar negeri. Selain itu,

¹⁷³Lukens-Bull, R. (2005). *A Peaceful Jihad: Negotiating Identity And Modernity In Muslim Java*. Springer. 17.

NU juga mempunyai badan otonom, lembaga, dan komite, yaitu:

1. Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama (LD-NU).
2. Lembaga Pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama (LP Ma'arif NU).
3. Lembaga Pelayanan Nahdlatul Ulama (LPK-NU).
4. Lembaga Perekonomian Nahdlatul Ulama (LP-NU).
5. Lembaga Pengembangan Pertanian Nahdlatul Ulama (LPP-NU).
6. Rabithah Ma'ahid Islamiyah Nahdlatul Ulama (RMI-NU).
7. Lembaga Asosiasi Pesantren Nahdlatul Ulama.
8. Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama (LKK-NU).
9. Lembaga Takmir Masjid Nahdlatul Ulama (LTM-NU).
10. Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber daya Manusia NU.
11. Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum Nahdlatul Ulama.
12. Lembaga Kesehatan Nahdlatul Ulama (LK-NU).
13. Lembaga Badan Halal Nahdlatul Ulama (LBHNU).
14. Sarikat Buruh Muslimin Indonesia (SARBUMUSI).

Berkaitan dengan kerentanan pemuda di Kabupaten Lamongan yang terlibat dalam aksi kekerasan, terutama

terorisme, paling tidak disebabkan oleh beberapa hal, yaitu:

Pertama, sikap tertutup dari kalangan pesantren al-Islam, Ketua PC NU mengungkapkan “orang-orangnya itu awalnya tertutup, punya usaha...tapi karena ketertutupan itu tidak ada yang tahu.”¹⁷⁴ Keberadaan kelompok ekstremis di Kabupaten Lamongan tidak dapat dilepaskan dari pengaruh pesantren di desa Tenggulun, Kecamatan Solokuro. Desa Tenggulun merupakan salah satu desa terpencil terletak di pedalaman Kabupaten Lamongan. Desa ini terletak di tengah hamparan sawah kering dan tambak ikan, pohon pisang, dan hamparan jagung. Jarak Desa Tenggulun dengan kota Lamongan lebih kurang lebih 60 km. Untuk mencapai desa tersebut bisa menggunakan kendaraan roda dua atau roda empat, namun tidak tersedia angkutan umum. Angkutan umum hanya sampai di persimpangan Paciran jalan ke Kecamatan Solokuro. Kemudian ke dalam berjarak 10 km ditempuh dengan ojek. Demikian pula dari Desa Solokuro (ibukota kecamatan) ke Desa Tenggulun berjarak 7 km ditempuh dengan mengendarai ojek. Letak pesantren yang di pedalaman memudahkan aktivitas pendidikan dan pengajaran dilakukan secara tertutup dan sembunyi-sembunyi. Hal ini juga diakui oleh Kapolres Lamongan, “Mungkin saya sebagai aparat tidak bisa masuk ke lingkungan mereka.”¹⁷⁵

¹⁷⁴ Wawancara dengan PC NU Lamongan 29 September 2017.

¹⁷⁵ Wawancara pada 11 September 2017.

Kedua, ketertarikan dengan jaringan ekstremis Ngruki. Sebelum al-Islam berdiri pada tahun 1993, keluarga ini telah mendirikan pesantren namun tidak bertahan lama. Awal mula kemunculan ideologi radikal di al-Islam berawal dengan masuknya beberapa keluarga besar Ustadz Chozin untuk melanjutkan pendidikan di Pesantren al-Mukmin Ngruki. Ketertarikan dengan al-Mukmin digambarkan oleh Ustadz Chozin menceritakan bahwa “Setelah banyak melihat banyak pesantren satu-satunya pesantren yang menurut saya pas itu hanya al-Mukmin Ngruki. Kami melihat kedisiplinan santrinya juga kedisiplinan pengelolannya,”¹⁷⁶ afiliasi ini berbentuk pada bantuan guru atau pengajar yang diterima al-Islam dari al-Mukmin, Ngruki. Ketua PC NU mengungkapkan bahwa: “awalnya itu sumbernya sama, di Ngruki, Solo, termasuk yang kemarin tertangkap di belakang Polres perumahan itu tidak ada kaitannya dan dilacak sama aparat juga tidak ada kaitannya dengan Al-Islami, tapi kalau dirunut panjangnya memang kategori pergerakannya sama seperti yang berkembang dan menyebar di Ngruki dan sekitarnya”.¹⁷⁷

Ketiga, warga Tenggulun yang mayoritas adalah warga Nahdliyin (NU) yakni sekitar 90% (kurang lebih 2.263 jiwa) dan Muhammadiyah sekitar 10% (kurang lebih 251 jiwa). Persinggungan antara dua kelompok tersebut sering kali terjadi, antara warga NU dan Muhammadiyah

¹⁷⁶ Wawancara pada 13 September 2017.

¹⁷⁷ Wawancara pada 13 September 2017.

berlangsung sering terjadi selama dulu sih sebelum Amrozi meletus kayak begitu persinggungan kelompok di sana luar biasa, jadi antara NU, Muhammadiyah, dan mereka itu bahasa menghinanya itu luar biasa, istilahnya itu mengkafirkan-nya itu dengan mudah.¹⁷⁸ Makanya, ketika Pesantren Al Islam mengajarkan akidah yang berbeda dengan akidah kebanyakan warga, yakni NU dan Muhammadiyah. Masyarakat cenderung diam membiarkan segala aktivitas terkait dengan keberadaan Pesantren Al Islam. Sikap warga masyarakat dan aparat pemerintah Desa Tenggulun yang demikian, berdampak pada hilangnya peran pengawasan dan kontrol baik oleh masyarakat maupun aparat pemerintahan desa terhadap segala bentuk perkembangan dan ancaman dalam lingkungan sekitarnya.

Beberapa kondisi tersebut, bagi kalangan NU Kabupaten Lamongan bahwa tindakan ekstremis merupakan tanggungjawab individu dan kelompok tersebut. Selain itu berdasarkan pada pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah, masalah aksi terorisme merupakan kewenangan pemerintah pusat, dalam hal ini adalah BNPT. Namun, NU akan ikut terlibat aktif dalam proses tersebut, misalnya jajaran NU, dengan kepolisian, dengan kodim, lintas agama pernah melakukan diskusi dengan Disbangpol tentang toleransi, tentang kerukunan.”¹⁷⁹

¹⁷⁸ Wawancara pada 13 September 2017.

¹⁷⁹ Wawancara pada 13 September 2017.

Ormas lain yang mempunyai perhatian terhadap pemberdayaan adalah Persyarikatan Muhammadiyah atau Muhammadiyah. Ormas ini didirikan pada tahun 1912 oleh Ahmad Dahlan di Yogyakarta sebagai gerakan sosial budaya reformis, yang menganjurkan *ijtihad*—interpretasi individual tentang al-Quran dan sunnah—yang bertentangan dengan *taqlid*. Sejak didirikan, Muhammadiyah telah mengadopsi sebuah *platform* reformis yang memadukan pendidikan agama dan sekuler, terutama sebagai cara untuk mempromosikan mobilitas vertikal umat Islam menuju komunitas ‘modern’, selain itu juga berupaya memurnikan praktik Islam sinkretis. Muhammadiyah mengelola sejumlah besar rumah sakit, dan universitas atau perguruan tinggi. Saat ini, Muhammadiyah adalah organisasi Islam terbesar kedua di Indonesia dengan 29 juta anggota. Meski para pemimpin dan anggota Muhammadiyah sering terlibat aktif dalam membentuk politik di Indonesia, Muhammadiyah bukanlah partai politik. Ini telah mengabdikan dirinya untuk kegiatan sosial dan pendidikan.

Dalam kegiatannya, Muhammadiyah didukung oleh beberapa organisasi otonom:

1. Aisyiyah (wanita).
2. Pemuda Muhammadiyah (pemuda).
3. Nasyiatul Aisyiyah (remaja putri).
4. Ikatan Pelajar Muhammadiyah (asosiasi mahasiswa).
5. Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (mahasiswa).

6. Tapak Suci Putra Muhammadiyah (pencak silat).
7. Hisbul Wathan (pramuka).

Berkaitan dengan kerentanan pemuda di Kabupaten Lamongan yang terlibat dalam kegiatan terorisme, Muhammadiyah mengukui telah ada kerja sama dengan pesantren al-Islam. Wawancara dengan pengurus Muhammadiyah Kabupaten Lamongan mengungkapkan bahwa, “Kalau dengan al-Islam itu kerja samanya saat Ramadhan santri-santri al-Islam itu kita berdayakan di daerah minus, sambil mereka kita bimbing dan kita arahkan ke gerakan-gerakan Muhammadiyah supaya mereka mengenal gerakan Muhammadiyah itu begini yang lebih banyak kepada sosial dan perubahan pemikiran pendidikan. Sekalipun isinya dakwah tetapi sambil mengubah pemikiran Islam yang berpendidikan itu seperti apa. Sebelumnya kita juga bina kepada mereka dan kita dasari langkah-langkah Muhammadiyah.”¹⁸⁰

Sayangnya kerja sama tersebut belum mengarah pada kerja sama pemberdayaan ekonomi, hasil wawancara mengungkapkan bahwa: “Kalau Muhammadiyah sendiri untuk organisasi ini tidak tahu, kami tidak bekerja sama dengan mereka dalam bidang ekonomi. Tetapi Muhammadiyah sendiri mempunyai majelis ekonomi. Kami pun memajukan ekonomi dalam lingkup warga Muhammadiyah sendiri dengan mengadakan pelatihan-pelatihan dalam segi pertanian dan peternakan.”

¹⁸⁰ Wawancara dengan Pengurus Muhammadiyah 28 September 2017.

Pemberdayaan masyarakat selain dilakukan oleh Organisasi masyarakat (ormas) juga dilakukan oleh organisasi kepemudaan (OK). Organisasi bertujuan menghimpun segenap potensi anak muda baik mahasiswa maupun anak sekolah yang masuk kategori pemuda bahkan mereka yang tidak menjadi anak terdidik.

Beragam bentuk organisasi ini, seperti PMIL, HMI, IMM, BEM, dan organisasi berbasis kedaerahan. Pemuda yang terhimpun dalam OK menjalani proses kaderisasi, interaksi, dan uji kemampuan memimpin. Sayangnya, peran organisasi ini dalam pemberdayaan belum banyak dilakukan

4. Pemberdayaan Mantan Napiter oleh Yayasan Lingkar Perdamaian

Peletakan batu pertama renovasi Masjid Baitul Muttaqin dan pembangunan Taman Pendidikan al-Quran (TPA) di Solokuro, Lamongan pada Rabu, 29 Maret 2017 menjadi tanda dimulai beroperasinya kegiatan Yayasan Lingkar Perdamaian. Yayasan didirikan bertujuan untuk melakukan pemberdayaan mantan kombatan diharapkan dapat memberikan harapan bagi aktivis mantan napiter (napi teroris) untuk dapat berdaya. Sebagaimana yang diungkapkan oleh inisiator pendirinya, Ali Fauzi *“Selama ini kami selalu bingung ketika ada napi terorisme keluar dari penjara dan bingung mau apa. Cari kerjaan sulit, tapi ada anak-istri yang harus dihidupi”*.¹⁸¹ Kehadiran YLP diharapkan

¹⁸¹ Wawancara Ali Fauzi 28 September 2017.

dapat memberikan wadah bagi mantan napi teroris yang memberikan dukungan pada anggotanya dengan gaya yang sama tetapi dengan muatan berbeda. Menjunjung nilai-nilai perdamaian, cinta kasih, toleransi, dan mendakwahkan Islam ramah, bukan Islam marah. Para aktor YLP diharapkan mampu mendedikasikan dirinya bagi menciptakan keadilan dan perdamaian melalui cara-cara tanpa kekerasan, beroperasi pada berbagai jarak dari konflik yang mengancam jiwa, dalam berbagai hubungan dengan komunitas religius dan struktur resminya, dan dalam beberapa pengaturan mungkin terlihat terlalu birokratis, rutin, atau aman.

Urgensi pemberdayaan yang dilakukan oleh YLP, paling tidak didasari oleh dua alasan penting. *Pertama*, kemampuan yang dimiliki oleh napiter dalam menggunakan senjata, agitasi, propaganda, dan membuat bom, berdampak pada hambatan lapangan pekerjaan yang bisa menampung. *Kedua*, adanya *stereotype* mantan teroris menjadikan hambatan bagi masyarakat untuk berhubungan dengan mereka. Gambaran itu sebagaimana diungkapkan oleh *Sumarno*, "...kita mengalami sebuah kejadian yang sangat pahit, ketika semua orang gak ada yang mendekati..."¹⁸²

Untuk itu kiranya penting pemberdayaan bagi mantan kombatan. Ali Fauzi, merasa terpanggil untuk terlibat dalam upaya pemberdayaan, "Jika tidak ada yang mau peduli, biasanya nanti malah melakukan aksi lagi,

¹⁸² Wawancara Sumarno 28 September 2017.

paling tidak mereka tidak terlibat lagi dalam jaringan teroris.” Perubahan ini juga mendapatkan dukungan dari BNPT, sebagaimana yang diungkapkan oleh Kepala BNPT Suhardi begitu bergembira ketika justru para mantan kombatan itulah yang mengambil inisiatif. Tanpa banyak bicara, dia langsung setuju untuk membantu dan memfasilitasi. “Gerakan-gerakan seperti inilah yang paling efektif untuk menekan laju terorisme,” tambahnya. Suhardi mengungkapkan, saat ini total ada 1.500-an napi terorisme dan sekitar 560-an yang baru saja keluar sepanjang 2016. Yang menggembirakan, imbuh Suhardi, hanya tiga napi terorisme yang kembali melakukan aksi teror.”¹⁸³

Meski sebagian aktivis kelompok ekstremis Lamongan telah bermetamorfosis menjadi kelompok yang berorientasi pada upaya-upaya deradikalisasi dan perdamaian, namun tidak lepas dari dinamika pro dan kontra internal maupun eksternal kelompok. Dinamika internal terjadi berhubungan dengan pesantren al-Islam dan anggota jaringan Jl. Ali Fauzi mengatakan, “Masih banyak kawan yang mencurigai aktivitas yang kami lakukan.” Dinamika juga terjadi di eksternal kelompok. Dalam sebuah wawancara, salah satu pegawai pemerintah daerah mengungkapkan, “Karena semuanya dikendalikan oleh teori konspirasi tersebut tetapi kan kita cuma bisa melihat fakta bahwa hari ini mereka yang aktivis-aktivis

¹⁸³<https://www.jawapos.com/read/2017/03/30/119820/eks-kombatan-kumpul-di-lamongan-dirikan-yayasan-lingkar-perdamaian>

teror itu awalnya sekarang itu sudah berubah menjadi proses deradikalisasi.”¹⁸⁴

Dan kelompok-kelompok ini yang anti kekerasan ini yang sumbernya adalah orang lama teroris ini efektif betul, karena mereka tahu jaringannya, mereka tahu sel-sel. Ini kan selnya putus, bahkan kita ngomong sama Pak Fauzi itu jangankan itu dek, anak-anak saya yang di pesantren itu pada berubah banyak yang tidak suka, banyak yang marah. Pak Ali Fauzi juga bilang gitu, saya ini gara-gara dekat dengan BNPT memang jaringan saya banyak yang tidak suka juga.”

Terlepas dari dinamika pro dan kontra keberadaan YLP, diharapkan dari kelompok ini terbangun ‘komunitas baru’, di mana secara bertahap dapat menentang keyakinan ekstremis dari keluarga mereka yang dipenjarakan. Ali Fauzi mengungkapkan:

“Penting ketika mereka butuh kita hadir. Hanya kalau terlalu diteorikan itu yang susah. Saya sudah profiling lebih dari 40 kawan dan murid sendiri, kenapa mereka balik? Mereka gabung kelompok lama. Yayasan ini sebagai alternatif untuk membuat komunitas baru. Sebenarnya sama biar ada saling taawun, tapi muatannya beda. Kalau mereka menyuarakan kekerasan, kita perdamaian. Metodenya sama. Contoh kalau mereka ada proyek ke Yaman, ya kita juga ke Yaman tapi kan muatan-nya beda. Mereka senang naik gunung

¹⁸⁴ Wawancara 28 September 2017.

kita juga sama, tapi muatannya beda. Itu yang terpenting. Lebih ideal lagi jika yayasan ini didukung mereka bisa kita jadikan kontranaratif, itu yang belum ada.”¹⁸⁵

Yayasan Lingkar Perdamaian telah mengidentifikasi sekitar selusin keluarga yang membutuhkan dukungan ekonomi. Jika sebuah keluarga mengalami kesulitan untuk menemukan dana sekolah untuk anak-anak mereka, dia membantu mereka mendaftar di al-Islam. Mereka juga secara bebas mengekspresikan pandangan-pandangan tentang *jihad* tanpa perlu takut untuk dikucilkan dari kelompoknya, karena mereka mendapatkan penguatan dari teman satu komunitas tersebut. Selain itu, individu yang tergabung bisa mengekspresikan aspirasinya, kebutuhan ekonomi dan keyakinan ideologinya tanpa rasa takut dan was-was.

- **Upaya-Upaya Pemberdayaan Kolaborasi antar stakeholder**

Program yang pertama kali dilakukan oleh Yayasan Lingkar Perdamaian adalah melakukan kolaborasi dengan para pemangku kepentingan, di mana mereka ini mempunyai peran yang sangat besar dalam perkembangan dan kelangsungan upaya pemberdayaan mantan narapidana teroris.

Meskipun begitu, tambah Ali, perlu ada pencegahan yang melibatkan seluruh komponen masyarakat. “Masyarakat harus dilibatkan, tokoh masyarakat, tokoh

¹⁸⁵ Hasil FGD Lamongan.

agama, tokoh pemuda, ini tugas kita bersama-sama untuk menyatukan perspektif, bahwa teror tersebut dilakukan oleh kelompok-kelompok yang ingin mengguncang negara," terangnya.

Jika para *stakeholder* dapat bersinergi dengan baik maka kelangsungan deradikalisasi di Solokuro akan berjangka panjang. *Pertama*, peran pesantren al-Islam menjadi sangat penting dalam keberlangsungan program ini, karena komunitas ini dipertemukan atas keterikatan mereka dengan pesantren al-Islam. Hampir semua eksponen Yayasan Lingkar Perdamaian mempunyai hubungan dengan al-Islam, baik sebagai keluarga pendiri, guru, maupun santri. Dukungan terhadap Yayasan Lingkar Perdamaian sejalan seiring dengan perubahan yang terjadi di pesantren al-Islam. Bagi pesantren al-Islam, keterlibatan para ustadz/pengajar, santri dan alumni Pesantren Al Islam dalam kasus Bom Malam Natal tahun 2000 dan Kasus Bom Bali tahun 2002, benar-benar menjadi titik balik untuk melakukan perubahan orientasi pesantren, dari *jihad-dakwah-tarbiyah*, menjadi *tarbiyah-dakwah-jihad*. Upaya Pesantren al-Islam dalam rangka meredusir paham radikal di lingkungan sekitarnya dilakukan dengan akulturasi dengan lingkungan sekitar, aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan seperti komite sekolah dan bergabung dengan Muhammadiyah, membentuk dewan pengasuh dan terlibat aktif dalam kegiatan deradikalisasi. Hal senada disampaikan Muhammad Chozin, saudara Ali Fauzi. Yayasan itu

menurut dia bisa membuktikan sinergi antara masyarakat dengan pihak keamanan bukan hanya retorika, seperti yang dulu terjadi.

Kedua, masyarakat lokal Desa Tenggulun dan pengusaha mempunyai peran aktif dalam pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Yayasan Lingkar Perdamaian.

Ketiga, kolaborasi dengan pemerintah daerah, pusat, kepolisian, militer, dan BNPT. Sebagaimana yang diatur dalam perundangan bahwa aksi-aksi terorisme merupakan permasalahan nasional, maka penyelesaian masalah diurus oleh pemerintah pusat melalui Badan Nasional Pemberantasan Terorisme (BNPT). Badan ini dalam mendesain program deradikalisasi dengan empat pendekatan, yaitu reedukasi, rehabilitasi, resosialisasi, dan reintegrasi. Kolaborasi pemerintah akan menghasilkan kerja sama, seperti terungkap dalam wawancara dengan Ali Fauzi,

“Mungkin sementara ini belum ada *funding* emang. Yang jadi andalan kita ya kita punya *partner* untuk donatur kita dari kawan-kawan pengusaha lokal, juga kawan-kawan yang punya usaha di Tenggulun, di wilayah Lamongan kita rekrut untuk mendanai. Kalau dana dari pemerintah sebelumnya nggak ada dana untuk mendukung program kerja, mungkin di tahun 2018 baru kita ajukan dana ke Pemkab Lamongan karena mereka juga *care* dengan yayasan ini. Sudah banyak dari kawan-kawan yang sudah kita berdayakan. Ada

yang kebanyakan kita titipkan di proyek kawan-kawan pengusaha.”

Pada upaya ini, bentuk pemberdayaan dilakukan oleh masyarakat, ketika institusi pemerintah dan masyarakat belum memberikan bentuk konkret dalam pemberdayaan. Hasil wawancara dengan Ali Fauzi mengungkapkan, “bahwa aksi-aksi teror yang dilakukan pada jihadis merupakan salah satu kritik atas ketidakhadiran negara”. Banyak kegiatan deradikalisasi merupakan hasil iuran dari aktivis dan sumbangan dari simpatisan. Bupati Fadeli yang turut menyumbangkan kendaraan roda empat untuk kegiatan operasional Yayasan Lingkar Perdamaian, berharap itu bisa menjadi sinergi sebagai upaya deradikalisasi.

- **Pendekatan Sosial dan Budaya**

Pendekatan dilakukan oleh pihak Yayasan Lingkar Perdamaian dalam upaya deradikalisasi tebagi menjadi dua yaitu bersifat non material, seperti perubahan ideologi jihad dari pemahaman jihad yang diartikan sebagai berperang, membunuh, berbuat keras pada orang-orang kafir musuh-musuh Islam menjadi jihad pada amal ibadah. Maka, tidak heran bila muncul pelaku-pelaku teroris lama, karena doktrin mereka memang masih melekat kuat. Ali mengibaratkan terorisme sebagai sebuah penyakit yang sudah dalam keadaan yang mengkhawatirkan dan perlu penanganan yang lebih khusus. “Ibarat sebuah penyakit, teroris ini sudah komplikasi butuh spesialis dan kampanye perdamaian dari orang-orang yang pernah terjangkau

penyakit ini. Kami pernah mengalami virus ini bertahun-tahun, tapi alhamdulillah kami bisa sembuh dan bangkit dan ingin menyembuhkan yang lainnya,” urainya.

Mencegah mereka menggunakan media sosial tentu pekerjaan berat. Apalagi sekarang media sosial menjadi tren bagi anak muda. Dengan demikian, yang bisa diupayakan adalah melakukan kegiatan pencerahan.

Ali mengatakan, “Tantangan lebih berat, karena terorisme yang ada di Indonesia ini sudah terpengaruh dengan terorisme global. Tantangan ke depan masih cukup banyak, mengingat terorisme lokal selalu dipengaruhi oleh terorisme global.”

Pemahaman mereka, terutama soal konsep *jihad*, tidak bisa dianggap remeh yang bisa dimentahkan dengan dalil-dalil syar’i konvensional. Mengingat buku yang dijadikan referensi mereka untuk membentuk doktrin bukan buku biasa, tapi buku *fiqh* karangan ulama dunia. Di antaranya buku berjudul *Al-Jihadu Salabina* (Jihad Dalam Kami) karangan Syeikh Abdul Baqi Ramdun. Juga *Kitabul Jihad* karya Syeikh Ibnul Mubarak, dan buku berjudul *Fi At-Tarbiyah Al-Jihadiyah*, karya Syeikh Abdul Azam. Inilah persoalannya. Doktrin yang terbentuk sudah sangat kuat dari buku-buku *fiqh* mereka. Mengubah keyakinan mereka tidak cukup hanya dengan program deradikalisasi sesaat, apalagi hanya dari forum seminar dan pengajian. Proses indoktrinasi tersebut dilakukan dengan pendekatan persuasif melalui lembaga formal maupun non formal, melalui *dauroh*, *i’dad*, *rihlah*, *mukhoyyamah*, dan lainnya.

Kedua, bersifat material, berupa pinjaman lunak, pinjaman modal, pemberian biaya sekolah anak-anak mereka, bantuan kesehatan, dan sebagainya. Meski sifat pemberdayaan material masih bersifat pribadi. Modal akhirnya ada, tetapi setahap demi setahap. Sekarang bagaimana awalnya membangun perspektif bahwa perdamaian itu lebih indah. Memberikan terapi biar mereka tidak mudah terprovokasi. Kalau mengandalkan dana dari pemerintah itu biasanya fokus ke program. Keberhasilan membangun komunitas baru sangat bergantung pada dukungan non material dan material, kedua dukungan itu harus diberikan secara simultan dan tidak bisa dipisahkan.

5. Kesimpulan

Program pemberdayaan ekonomi bagi pemuda di Kabupaten Lamongan menjadi bagian dari program pemberdayaan masyarakat. Berbagai program telah dilakukan baik oleh pemerintah pusat seperti program PNPM Mandiri atau program pemerintah daerah seperti Program Gemerlap bertujuan untuk mengurangi kemiskinan di Kabupaten Lamongan. Program ini juga didesain untuk meningkatkan partisipasi pemuda. Pemerintah Daerah Lamongan juga melakukan berbagai upaya peningkatan pelayanan melalui Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD). Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, misalnya, melakukan peningkatan kualitas

dan pengembangan kompetensi tenaga kerja antara lain melalui pembinaan keterampilan kerja masyarakat, penguatan sarana dan prasarana balai latihan kerja, serta penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja melalui *job market fair*.

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah melakukan pelayanan demi terciptanya peningkatan persentase koperasi aktif, peningkatan skala usaha dari klasifikasi Usaha Mikro menjadi Kecil dan peningkatan pertumbuhan Wirausaha Baru. Pelayanan pemuda juga dilakukan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga, pelayanan dilakukan melalui bidang tugasnya yaitu pemberdayaan pemuda. Beberapa kegiatan yang dilakukan seperti pelatihan bela negara dan revitalisasi organisasi kepemudaan dan pemberdayaan atlet. Pemberdayaan juga dilakukan oleh Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Lamongan. Kinerja urusan kesatuan bangsa dan politik adalah persentase konflik sosial yang ditangani tercapai sebesar 100 persen dan persentase ormas, orpol dan LSM yang terdaftar sebesar 96,58 sesuai target yang ditetapkan dan peningkatan Kerukunan Antar Umat Beragama di Kabupaten Lamongan. Sedangkan Kantor Kementerian Agama (KKA) Kabupaten Lamongan upaya pemberdayaan dilakukan melalui bimbingan dan pembinaan agama.

Pemberdayaan Masyarakat termasuk di dalamnya pemuda juga dilakukan oleh organisasi masyarakat. Salah satu karakteristik masyarakat Lamongan adalah kuatnya masyarakat sipil (*civil society*), kekuatan masyarakat

ini terhimpun dalam berbagai ormas seperti NU dan Muhammadiyah. Beberapa kegiatan pemberdayaan masyarakat dilakukan oleh kedua ormas ini, seperti kegiatan pendidikan dan pelatihan, dan program-program penguatan masyarakat. Selain itu, masyarakat Lamongan juga mempunyai jiwa wirausaha yang tinggi, himpitan ekonomi telah menyebabkan mereka menjadi pedagang dan sebagai tenaga kerja Indonesia di beberapa negara.

Terkait dengan kerentanan pemuda untuk terlibat dalam aksi-aksi terorisme, pemerintah pusat, melalui BNPT dan pemerintah daerah, telah melakukan kerja sama dengan Yayasan Lingkar Perdamaian. Yayasan ini berupaya untuk melakukan deradikalisasi pemuda-pemuda yang pernah terlibat dalam kegiatan terorisme.

BAB 6

Ekonomi Kaum Muda dan Keamanan Perbatasan di Nunukan, Kalimantan Utara

1. Pendahuluan

Kaum muda menjadi isu yang menarik di Indonesia. Penyebabnya ialah masih banyaknya masalah kepemudaan yang belum dapat diatasi dengan baik. Sementara institusi yang menangani kepemudaan di Indonesia cukup lengkap mulai dari tingkat kementerian sampai tingkat dinas pada kabupaten/kota di seluruh Indonesia.

Masalah kepemudaan saat ini merupakan problem yang dialami sehari-hari oleh setiap generasi. Problematika kepemudaan yang menonjol dapat ditunjukkan antara lain rendahnya tingkat pendidikan pemuda, banyaknya pemuda yang terlibat dalam penggunaan narkotika dan barang adiktif lainnya (narkoba) dan termasuk keterlibatan para pemuda dalam aksi-aksi terorisme yang ditunjukkan dari serangkaian kasus teror di Indonesia. Masalah lainnya adalah kecilnya anggaran pembangunan kepemudaan, khususnya pemberdayaan pemuda sehingga menimbulkan rendahnya tingkat kepuasan masyarakat

atas pelayanan pemberdayaan pemuda yang dilakukan oleh institusi negara.¹⁸⁶

Hal terpenting untuk menyelesaikan berbagai problematika kepemudaan tersebut amat tergantung pada kebijakan pemberdayaan pemuda yang dirumuskan dan diimplementasikan oleh pemerintah, termasuk keterlibatan dari lembaga-lembaga non pemerintah seperti organisasi keagamaan dan kemasyarakatan.

Secara teoretis, pemberdayaan (*empowerment*) adalah ragam pendekatan dan aplikasi konstruktif yang bersifat multilevel sebagai hasil dari interaksi individual, sosial, dan kolektif. Dalam arti yang luas, pemberdayaan mengacu pada ragam indikator, yaitu individu, keluarga, organisasi, dan komunitas.¹⁸⁷ Indikator tersebut yang mendapatkan akses sekaligus kontrol dalam konteks sosial, budaya, politik, dan terutama ekonomi, yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup.

Karena itu, dalam konteks kekinian pemberdayaan pemuda sangat penting karena merupakan bagian dari strategi pembangunan nasional. Terkait hal tersebut, upaya untuk melihat sejauh mana program pemerintah melalui badan pemerintah dan non pemerintah khususnya pemberdayaan dalam bidang ekonomi penting telah dilakukan. Untuk menilai efektif atau tidaknya program-program tersebut, dibutuhkan evaluasi dan perbaikan

¹⁸⁶<http://fisip.ui.ac.id/evaluasi-kebijakan-pemberdayaan-pemuda>

¹⁸⁷<https://futureleadersummit.org/artikel/pemberdayaan-pemuda-melalui-proyek-sosial>

yang lebih baik terutama di daerah Nunukan, Kalimantan Utara yang menjadi lokasi dari penelitian ini.

2. Profil Kabupaten Nunukan

Kabupaten Nunukan merupakan salah satu kabupaten yang terletak di wilayah utara Provinsi Kalimantan Utara. Kabupaten Nunukan kaya akan potensi sumber daya alam di mana sebagian dari potensi tersebut belum dimanfaatkan secara optimal.¹⁸⁸ Sumber daya alam dan hasil-hasilnya merupakan sumber utama penghasilan daerah, khususnya dari sektor pertambangan, kehutanan, dan hasil lainnya.

Gambaran umum tentang kondisi dan potensi Kabupaten Nunukan dapat diuraikan sebagai berikut, Kabupaten Nunukan terletak pada posisi antara 115°33' sampai dengan 118°03' bujur timur dan 3°15' sampai dengan 4°24' lintang utara. Wilayah Kabupaten Nunukan di sebelah Utara berbatasan langsung dengan negara Malaysia Timur-Sabah, sebelah timur dengan Laut Sulawesi, sebelah selatan dengan Kabupaten Bulungan dan Kabupaten Malinau, sebelah barat berbatasan langsung dengan negara Malaysia Timur-Serawak.

Luas wilayah Kabupaten Nunukan adalah 63,68 km² atau 7,06% dari total luas Provinsi Kalimantan Utara dan wilayah lautan sejauh 4 mil laut dari garis pantai terluar ke arah laut seluas 1.408,758 km². Wilayah Kabupaten

¹⁸⁸<https://karyanunukan.wordpress.com>. Kondisi Geografis Kabupaten Nunukan.

Nunukan terdiri atas sembilan kecamatan,¹⁸⁹ yaitu Kecamatan Krayan, Kecamatan Krayan Selatan, Kecamatan Lumbis, Kecamatan Sembakung, Kecamatan Nunukan, Kecamatan Nunukan Selatan, Kecamatan Sebuku, Kecamatan Sebatik, dan Kecamatan Sebatik Barat.

- **Pertumbuhan Ekonomi Daerah**

Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Nunukan tercatat sebesar 7,13% pada 2015 untuk PDRB dengan migas. Sedangkan untuk PDRB tanpa migas bertumbuh sebesar 7,10% atau hanya berbeda sedikit. Berdasarkan harga berlaku, PDRB dengan migas Kabupaten Nunukan naik dari Rp 3,173 triliun pada 2008 menjadi Rp 5,362 triliun pada 2012. Dengan kata lain, angka tersebut naik sekitar Rp 2 triliun atau sekitar 60% tingkat pertumbuhan ini lebih tinggi dari tingkat pertumbuhan nasional pada periode tersebut.

Berdasarkan strukturnya, perekonomian Nunukan didominasi oleh sektor pertambangan dan penggalian, lalu disusul oleh sektor pertanian. Secara umum, sektor pertanian dan sektor pertambangan dan penggalian mendominasi perekonomian Kabupaten Nunukan dengan porsi rata-rata hingga 70% per tahun dari total PDRB. Data menunjukkan bahwa sektor pertambangan dan penggalian memiliki porsi sebesar 39% dari total PDRB Kabupaten Nunukan di tahun 2013. Porsi ini naik menjadi 58% di tahun 2014, lalu sempat turun perannya menjadi

¹⁸⁹Badan Pusat Statistik Nunukan (2016), *Kabupaten Nunukan dalam Angka*, hlm. 3.

47% di tahun 2015. Pada 2016 sektor ini pun tetap dominan dengan porsi sekitar 52% dari total PDRB Kabupaten Nunukan.¹⁹⁰

Sektor pertanian terus berada pada posisi kedua dalam satu dekade terakhir. Sektor ini memainkan peran-an terbesar dalam perekonomian Kabupaten Nunukan setelah sektor pertambangan dan penggalian. Pada 2012, sektor pertanian memiliki porsi sebesar 37% dari total PRDB Kabupaten Nunukan.¹⁹¹ Porsi tersebut lalu turun cukup jauh hingga hanya menjadi 22% pada 2013, lalu sedikit mengalami kenaikan menjadi 26% pada 2015. Di tahun 2016, sektor pertanian tetap berada di posisi kedua dengan peran sebesar 22% dari total PDRB Kabupaten Nunukan.

Dua sektor lainnya yang juga cukup dominan, meski dengan porsi yang jauh lebih kecil, adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran, dan sektor jasa-jasa. Sektor perdagangan, hotel, dan restoran menempati peringkat ketiga dengan proporsi 9% dari total PDRB Nunukan pada 2013. Angka ini sempat mengalami kenaikan menjadi 10% pada 2006 dan 12% pada 2014, meskipun kemudian mengalami sedikit penurunan menjadi 11% pada 2015.

Sektor jasa-jasa, terus berada di posisi keempat dalam satu dekade terakhir. Sektor jasa pemerintahan adalah yang paling dominan dalam sektor ini. Pada 2012, sektor

¹⁹⁰<https://kaltim.antaranews.com-Laju> Pertumbuhan Ekonomi Nunukan 6,72 persen.

¹⁹¹Profil Kabupaten Nunukan 2015.

ini memiliki porsi sebesar 5% dari total PDRB Kabupaten Nunukan. Angka ini sempat mengalami penurunan menjadi 4% di tahun 2013, meskipun kemudian naik kembali menjadi 8% di tahun 2015 dan 2016.

Pada 2015 jumlah total angkatan kerja sebesar 70,88% dari total penduduk berumur 15 tahun ke atas di Kabupaten Nunukan, di mana total yang bekerja 88,17%. Kelompok Penduduk Usia Kerja dibagi ke dalam dua kelompok, yaitu Angkatan Kerja (AK) dan Bukan Angkatan Kerja. Penduduk yang termasuk ke dalam Angkatan Kerja adalah penduduk yang bekerja maupun yang sedang mencari pekerjaan. Sedangkan penduduk yang masuk dalam kategori Bukan Angkatan Kerja adalah penduduk yang sedang bersekolah, mengurus rumah tangga, dan lainnya.

Seiring dengan kenaikan jumlah penduduk, maka jumlah Angkatan Kerja Kabupaten Nunukan juga ikut mengalami pertumbuhan. Angkatan Kerja di Nunukan mengalami kenaikan dari 71.021 jiwa pada 2015 menjadi 115.819 pada 2016. Hal ini menunjukkan bahwa dalam periode lima tahun terjadi kenaikan Angkatan Kerja sebesar 44.798 jiwa atau sekitar 63%.

Seiring dengan peningkatan kebutuhan hidup tersebut tentunya dibutuhkan penyesuaian pada tingkat upah minimum di Kabupaten Nunukan terus mengalami kenaikan antar tahun. Pada 2013 rata-rata upah minimum di Nunukan adalah sebesar Rp 787.033. Rata-rata upah minimum tersebut terus mengalami kenaikan hingga

menjadi Rp1.186.000 pada 2014, atau naik sebesar Rp 398.967 (50%) dari tahun 2012.

Pertumbuhan secara proporsional juga terjadi dalam jumlah penduduk yang bekerja maupun yang mencari kerja. Total penduduk Nunukan yang bekerja adalah 65.667 jiwa pada 2015 menjadi 102,126 jiwa tahun 2016. Terjadi pertumbuhan sebesar 346.459 atau bertumbuh sebanyak 55,5% selama lima tahun.¹⁹²

Berdasarkan data, tampak bahwa meskipun jumlah penduduk yang bekerja terus mengalami kenaikan, namun Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Nunukan terus mengalami kenaikan. TPT sendiri menggambarkan jumlah penduduk yang tidak bekerja namun sedang mencari pekerjaan. Tingkat Pengangguran terbuka Kabupaten Nunukan sempat mengalami pe-nurunan dari 7,53% pada 2008 menjadi 5,94% pada 2012. Namun, angka tersebut terus mengalami kenaikan menjadi 7,67% pada 2013, 9,52% pada 2014. Hingga akhirnya menjadi 11,83% pada 2015. Meskipun demikian, terjadi peningkatan yang stabil dalam angka tingkat partisipasi Angkatan Kerja (TPAK).

Bila membandingkan jumlah pencari kerja dengan TPT, akan tampak bahwa jumlah penduduk menganggur di Nunukan bertambah tidak hanya secara proporsi terhadap total angkatan kerja, namun juga secara absolut. Jumlah penduduk menganggur yang terus naik ini

¹⁹²*Profil Kabupaten Nunukan (2016)*. Badan Pusat Statistik Nunukan, hlm. 4.

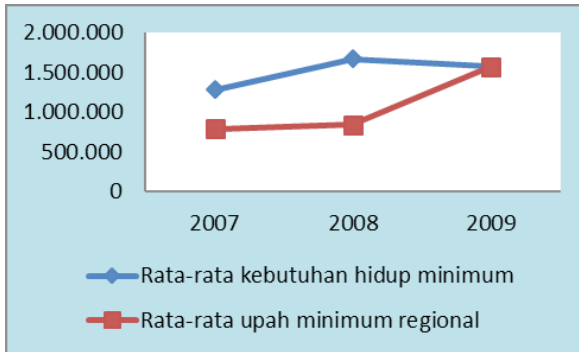
tentunya menjadi tantangan bagi pemerintahan Kabupaten Nunukan.

TPAK menggambarkan besarnya penduduk yang masuk dalam pasar tenaga kerja. TPAK Kabupaten Nunukan naik drastis dari 55,05% pada 2013 menjadi 64,89% pada tahun 2014. Pada tahun-tahun berikutnya pun TPAK terus mengalami kenaikan meskipun dalam tingkat pertumbuhan yang lebih moderat. TPAK Kabupaten Nunukan pada tahun 2015 adalah sebesar 65,06% lalu mengalami kenaikan menjadi 68,68% di tahun, hingga akhirnya berada pada posisi 70,88% di tahun 2016. Sedang Tingkat Kesempatan Kerja merupakan komplemen dari Tingkat Pengangguran Terbuka. Tingkat Kesempatan Kerja merupakan total Angkatan Kerja yang tidak menganggur.

- **Upah Minimum Regional**

Pendapatan pekerja dalam hal ini adalah upah selalu mendapat perhatian dari pemerintah, hal ini bisa dilihat dari kenaikan rata-rata kebutuhan hidup minimum setiap tahunnya yang mengalami kenaikan sepanjang tahun 2005 hingga 2008, tetapi mengalami penurunan pada 2009. Pada 2011 rata-rata kebutuhan hidup minimum sebesar Rp 1.106.819 per orang, dan pada 2012 mengalami kenaikan menjadi Rp 1.278.985 per orang dan terus naik di tahun 2008 menjadi Rp 1.670.172 per orang. Untuk tahun 2009, kebutuhan hidup minimum mengalami penurunan dibanding tahun 2008

menjadi Rp 1.574.612. Upah Minimum Regional (UMR) juga mengalami hal yang sama, di mana pada 2007 UMR mencapai Rp 787.000 per orang dan mengalami kenaikan di tahun 2008 menjadi Rp 842.000 per orang, juga di tahun 2013 mengalami kenaikan lagi sehingga menamai kebutuhan hidup minimum menjadi Rp 1.574.612 per orang.



Grafik 2. Laju Pertumbuhan UMR & Kebutuhan Hidup Minimum

- **Pendidikan**

Pendidikan merupakan syarat mutlak pembangunan manusia untuk menciptakan Sumber Daya Manusia (SDM) berkualitas dalam upaya meningkatkan pembangunan di Kabupaten Nunukan khususnya dan bangsa Indonesia pada umumnya. Pendidikan formal merupakan suatu proses yang berjenjang dari SD hingga perguruan tinggi. Untuk menunjang keberhasilan pembangunan bidang pendidikan, pendidikan formal yang pada umumnya diselenggarakan di sekolah-sekolah. Jumlah penduduk yang menamatkan pendidikan menunjukkan ketersediaan

an kualitas sumber daya manusia pada suatu wilayah. Semakin banyak jumlah penduduk yang menamatkan sekolah tinggi, maka semakin baik pula ketersediaan kualitas sumber daya manusia.

Tabel 4. Jumlah Sekolah, Murid, dan Guru Pada Pendidikan Umum
Tahun 2015-2016

Satuan		Tahun		
		2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Jumlah sekolah				
• Taman Kanak-Kanak (TK)	Buah	17	25	27
• Sekolah Luar Biasa (SLB)	Buah	1	1	1
• Sekolah Dasar (SD)	Buah	136	139	140
• Sekolah Lj. Tkt. Prtm (SLTP)	Buah	39	39	38
• Sekolah Lanj. Tingkat Atas (SLTA)	Buah	17	17	18
• Perguruan Tinggi (PT)	Buah	3	3	0
• Sekolah Menengah Kejuruan	Unit	1	2	2
Jumlah siswa/ mahasiswa				
• Taman Kanak-Kanak (TK)	Orang	669	1.107	1.097
• Sekolah Luar Biasa (SLB)	Orang	15	15	15

• Sekolah Dasar (SD)	Orang	25.021	22.121	20.543
• Sekolah Lj. Tkt. Prtm (SLTP)	Orang	5.412	5.844	5.901
• Sekolah Menengah Umum (SMU)	Orang	2.510	2.983	4.608
• Sekolah Men. Kejuruan (SMK)	Orang	366	485	515
• Perguruan Tinggi (PT)	Orang	302	0	0
Jumlah guru/dosen & kepala sekolah				
• Taman Kanak-kanak (TK)	Orang	46	72	95
• Sekolah Luar Biasa (SLB)	Orang	3	3	5
• Sekolah Dasar (SD)	Orang	1.192	1.171	1.231
• Sekolah Lj. Tkt. Prtm (SLTP)	Orang	384	497	403
• Sekolah Menengah Umum (SMU)	Orang	249	287	386
• Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)	Orang	34	46	63
• Perguruan Tinggi (PT)	Orang	60	0	0

Sumber: Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Nunukan

- **Subsektor Perikanan dan Kelautan**

Subsektor perikanan di Kabupaten Nunukan diharapkan menjadi komoditas unggulan bagi pertumbuhan ekonomi terutama pada perikanan laut, mengingat posisi geografis Kabupaten Nunukan yang memiliki wilayah

perairan laut yang cukup luas. Potensi perikanan laut pada 2008 mencapai 4.585,36 ton meningkat sebesar 3,30%.

Produksi perikanan umum pada 2007 mencapai 146,43 ton menurun menjadi 146,10 ton pada 2008 dengan jumlah kapal ikan penangkap perairan umum 395 unit kapal. Sedangkan jumlah kapal penangkap ikan untuk perikanan laut tahun 2008 sebanyak 2.679 unit.

- **Subsektor Pertambangan**

Potensi sumber daya alam dan sumber daya mineral yang cukup besar di Kabupaten Nunukan, dilihat dari segi geologi dan potensi bahan galian mempunyai daya tarik yang cukup tinggi di mata para investor bidang pertambangan, namun masih banyak yang belum dimanfaatkan secara optimal. Hal ini terkait erat dengan masih perlunya secara terus-menerus informasi geologi dan sumber daya mineral dalam rangka mengelola sumber daya mineral, energi, air tanah, pengelolaan lingkungan, mitigasi bencana alam, penggunaan lahan, dan penataan ruang wilayah pertambangan.

Hasil pertambangan di Kabupaten Nunukan mencakup pertambangan migas dan non migas, dari hasil tambang tersebut minyak bumi dan gas alam yang sangat besar pengaruhnya dalam perekonomian di Kabupaten Nunukan

Perkembangan produksi minyak mentah meskipun mengalami penurunan, tetapi tetap memberikan kontribusi pada perekonomian. Pada tahun 2006 produksi minyak mentah sebanyak 1.362.303 MMSTB turun menjadi 275.880

MMSTB pada 2007. Sedangkan untuk gas alam pada 2007, produksi gas alam sebanyak 407.648 MMSCF. Sedangkan produksi batubara pada 2006 menghasilkan sebanyak 1.165.287,39 ton mengalami kenaikan jumlah produksi pada 2007 menjadi 1.174.428,81 ton dan mengalami kenaikan lagi produksi di tahun 2008 menjadi 1.540.318,39 ton.

- **Potensi Kawasan Perbatasan**

Kawasan perbatasan Nunukan mempunyai potensi yang besar untuk dapat dikembangkan, baik potensi sumber daya alam maupun potensi di bidang jasa, perdagangan, dan wisata.

Kawasan Nunukan yang sebagian besar kecamatan-nya berbatasan langsung dengan Malaysia (Sabah dan Sarawak) merupakan potensi yang besar dalam bidang jasa dan perdagangan, karena padatnya lalu lintas keluar masuknya perdagangan dengan Malaysia. Untuk itu perlu lebih dikembangkan di bidang-bidang lain yang dapat berujung pada perdagangan yaitu industri pengolahan.

Potensi yang dimiliki alam di Kabupaten Nunukan yang memiliki kontribusi besar adalah potensi bahan hasil pertambangan dan penggalian. Pada 2013 produksi batubara mencapai 3.467.537 ton. Untuk produksi minyak mentah mencapai 275.880 MMSTB, gas alam 407.648 MMSCF, serta batubara 1.174.428,81 ton pada 2007.

Dengan kondisi tanah yang rata-rata podzolik serta curah hujan yang cukup, kawasan perbatasan sangat

ideal bila dijadikan kawasan perkebunan khususnya tanaman kelapa sawit, kakao, karet, dan hutan tanaman industri. Potensi perkebunan kelapa sawit juga sangat besar yaitu luas lahan yang terus mengalami peningkatan dari tahun 2014 sampai 2015 yaitu 34.217,00 Ha, 50.435,82 ha dan 51.244,55 ha. Apabila hasil produksi ini dapat dimanfaatkan pada sektor industri pengolahan, tentu akan lebih bermanfaat dan dapat meningkatkan sektor yang lain, seperti perdagangan jika dibandingkan dengan langsung menjual hasil produksi perkebunan tanpa diolah terlebih dahulu.

Sektor pariwisata merupakan salah satu kontribusi bagi pemasukan pendapatan daerah serta meningkatkan perekonomian daerah. Di kawasan perbatasan terdapat beberapa potensi yang belum dikembangkan dan dapat dijadikan salah satu sumber dana bagi daerah. Kekuatan wisata di kawasan perbatasan ini antara lain berupa wisata alam (*ecotourism*) yaitu berupa wisata hutan, sungai, jeram, dan wisata bahari yang dipadukan dengan wisata budaya.

Wisata budaya merupakan kekayaan nilai-nilai tradisional yang masih melekat secara kuat dalam kehidupan sehari-hari. Objek wisata budaya setempat yang ada antara lain berupa rumah betang panjang (rumah panjang) serta kesenian tradisional dari masing-masing suku yang ada di perbatasan.

3. Gambaran Problem Terkini Masyarakat Nunukan

Untuk mendapatkan gambaran problematika terkini yang dihadapi Masyarakat di kabupaten Nunukan, maka tulisan ini merujuk kepada hasil obesrvasi dan wawancara peneliti selama di Nunukan dan diperkuat dengan publikasi hasil penelitian tentang potensi pulau-pulau terpencil .

- **Potensi Kekinian Nunukan**

Potensi yang dimiliki Kabupaten Nunukan adalah:

- agro industri (perkebunan dan kehutanan)
- kelautan dan jasa pelabuhan
- perdagangan internasional
- pertambangan
- pariwisata¹⁹³

Potensi ini perlu diawasi, dilindungi, serta dikelola dengan baik agar tidak habis dan akhirnya merusak lingkungan. Jika dilihat dari tata ruang kegiatan yang ada di Nunukan, sangat menarik untuk dikaji di mana potensi yang ada dapat memberikan pendapatan bagi pemerintah daerah dan masyarakat, terutama potensi sumber daya alam dan laut. Potensi ini sudah ada investasi, tetapi yang menjadi masalah adalah kantor perusahaan investor tersebut tidak berada di Kabupaten Nunukan, melainkan

¹⁹³Siregar, Chairil N (2015). *Analisis Potensi Pulau-pulau Terpencil dalam Rangka Meningkatkan Ketahanan, Keamanan Nasional, dan Keutuhan Wilayah NKRI di Nunukan, Kalimantan Timur.*

di Tarakan. Hal ini disebabkan karena sarana dan prasarana belum tersedia sepenuhnya. Di masa yang akan datang, pekerjaan rumah yang sangat besar harus di-selesaikan pemerintah Kabupaten Nunukan adalah sarana dan prasarana, di antaranya transportasi. Pembangunan hanya akan tetap terpusat di titik-titik tertentu jika tidak ada dukungan jaringan prasarana yang merata. Saat ini Pemerintah Daerah Nunukan memulai pembangunan dengan sistem gunting. Maksudnya, pembangunan dilakukan dari dua arah, dari Ibukota menuju daerah-daerah terpencil di pinggiran, pada saat yang sama dari daerah terpencil ke pusat pemerintahan. Bila jaringan jalan tersedia menyeluruh, sektor lain yang berpotensi terakselerasi lebih laju, seperti sektor perkebunan kelapa sawit, pariwisata, pertambangan.¹⁹⁴

Di Pulau Sebatik yang menjadi salah satu kecamatan yang sangat dekat dengan Kota Nunukan, jalan baru sebagian yang sudah diaspal tetapi masih banyak jalan yang belum diaspal. Jalan merupakan hal yang penting untuk menghubungkan satu daerah dengan daerah lainnya. Jika jalan yang ada tidak diperhatikan pembangunan dan perawatannya, masyarakat akan mengalami kesulitan dalam membawa hasil kebun dan pertanian mereka untuk dijual ke pasar. Hal ini terjadi di Pulau Sebatik, di mana masyarakat menjual hasil tangkapan Ikan dan Kebun ke Tawau, Sabah, Malaysia, karena transportasi laut sangat mudah dan murah. Sedangkan di Pulau Sebatik sendiri

¹⁹⁴ Siregar Chairil, hlm. 5.

bila ingin menjual hasil kebun dan ikan ke Pulau Nunukan memakan waktu yang cukup lama kurang lebih 1 jam, dengan transportasi darat (kendaraan umum) dan perahu tempel. Kondisi ini mempersulit arus barang dari Pulau Sebatik ke Nunukan, dan sebaliknya.

- **Kondisi Ekonomi**

Kabupaten Nunukan memiliki penghasilan dari berkebun, bertani, nelayan, wiraswasta, pegawai negeri, dan swasta. Letak Pulau Nunukan dan Sebatik yang secara geografis terpisah menyebabkan interaksi sosial masyarakat nunukan dan sebatik terbatas. Warga Pulau Sebatik bila menjual atau membeli kebutuhan sehari-hari selalu menyeberang ke negara tetangga yaitu Tawau, Sabah, Malaysia, karena murah, kualitas barang bagus, dekat secara geografis, dan transportasi mudah dan murah. Begitu juga masyarakat Pulau Nunukan sering berbelanja ke Tawau, Sabah, Malaysia karena dekat, transportasi mudah, kualitas barang bagus, dan sekalian berwisata ke negara tetangga. Untuk ikan dan sayur-sayuran sebenarnya dari Pulau Indonesia yang dekat dengan Malaysia sebagai pemasoknya, karena bila dijual ke Pulau Nunukan memerlukan waktu cukup lama bila dibandingkan ke Tawau, Malaysia.

Pulau Nunukan dan Sebatik hanya menjadi tempat pemasaran dari barang Tawau, Malaysia. Pendapatan yang berasal dari sektor riil seperti sektor pertanian, industri kecil, sektor perikanan, perkebunan, dan sektor per-

tambangan semua masyarakat Pulau Nunukan dan Sebatik belanja dan untuk sandang pangan sebagian papan (besi, semen, dan lain-lain) hasil industri manufaktur dari Pulau Jawa dan Malaysia. Hal ini kita kenal dengan konsumsi dan sebagian ditabung kemudian dikucurkan lagi dalam bentuk modal kerja.

Pulau Nunukan sebagai tempat pemasaran hasil produksi Malaysia, gula, beras, garam, minyak, telur, susu, contoh barang elektronika TV, radio, HP, komputer, dan kulkas, dan lebih ironisnya ikan dan sayur mayur dari Pulau Sebatik dibeli di pasar Tawau, Malaysia. Dapat dihitung berapa besar keuntungan didapat Tawau Malaysia dari masyarakat Kalimantan Timur khususnya masyarakat Pulau Nunukan dan Sebatik setiap harinya. Hal ini disebabkan karena transportasi antar pulau di Kalimantan Utara masih terbatas. Investor yang mau berinvestasi juga masih belum banyak yang tertarik untuk barang-barang tersebut. Untuk mengatasi hal ini perlu menentukan ruang khusus untuk kegiatan ekonomi akan lebih langsung menggerakkan kegiatan ekonomi. Pemerintah daerah perlu berusaha mengantisipasi kawasan-kawasan di mana yang dapat ditumbuhkan menjadi pusat perekonomian wilayah. Kawasan-kawasan yang strategis dan cepat tumbuh ini dapat berupa kawasan yang sudah menunjukkan tanda-tanda aglomerasi, seperti sentra-sentra produksi pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, dan perikanan. Di Kabupaten Nunukan banyak daerah potensial untuk dijadikan sentra-

sentra, di antaranya Sebatik, Sembakung, Kragan, dan Lumbis agar terjadi pemerataan dalam pembangunan ekonomi.

- **Kondisi Sosial dan Budaya**

Masyarakat di Kabupaten Nunukan penduduk aslinya adalah masyarakat Tidung Bulungan dan Dayak sedangkan penduduk pendatang adalah Bugis, Jawa, NTT, dan Toraja. Adapun upaya untuk mengembangkan sosial budaya masyarakat Nunukan adalah difokuskan kepada peningkatan kualitas intelektual, moral, etika, yang ditunjang oleh berbagai riset ilmiah, sedangkan pengembangan kelembagaan difokuskan kepada upaya penciptaan *good governance*.

Pada sektor media massa, terutama siaran TV, didominasi TV Malaysia, karena siaran TV Malaysia yang dapat ditangkap, sehingga banyak diminati oleh masyarakat Kabupaten Nunukan dan Sebatik. Tidak hanya barang kebutuhan sehari-hari mulai dari minuman ringan, susu, buah-buahan, daging, obat nyamuk, dan roti yang semuanya datang dari Malaysia. Hampir 70-80% kios-kios kelontong yang ada di Pulau Sebatik dan Nunukan menjual produk Malaysia menuju Tawau, perbatasan terdekat dengan Sebatik, cukup ditempuh dengan membayar 10 RM. Tetapi bukan hanya makanan dan barang Malaysia saja yang masuk Pulau Nunukan dan Sebatik tetapi siaran TV Malaysia sangat digemari oleh masyarakat Sebatik dan Nunukan, karena TVRI tidak dapat ditangkap di Sebatik. Untuk menikmati siaran

TVRI penduduk harus menggunakan parabola seharga Rp 2 juta atau berlangganan TV kabel. Pemancar di Nunukan berkekuatan 300 watt VHF sedangkan di Sebatik 1.000 watt VHF, radio dan televisi Malaysia (RTM) kini berkekuatan 10.000 watt. Siaran TV Malaysia sangat jelas diterima di Sebatik dan Nunukan. Kondisi ini sangat memprihatinkan mengingat derasnya arus informasi yang disiarkan melalui TV1, TV2, dan TV3 Malaysia ke masyarakat perbatasan ini merupakan sergapan budaya Malaysia terhadap budaya yang dimiliki masyarakat Indonesia di perbatasan. Walaupun begitu, masyarakat Indonesia yang ada di Pulau Sebatik yang mayoritas keturunan Bugis memiliki rasa cinta tanah air Indonesia yang sangat kental. Walaupun demikian, sedikit banyaknya budaya Malaysia banyak yang diserap oleh masyarakat perbatasan. Kondisi ini lambat laun dapat memengaruhi ketahanan nasional pada generasi yang akan datang.

- **Kearifan Lokal**

Kearifan lokal pada dasarnya masyarakat mengelola sumber daya alam secara tradisional dengan mendasarkan pada variasi jenis sebagai contoh banyak varietas padi tanam, beberapa jenis kayu digunakan untuk bahan bangunan, banyak jenis tumbuhan digunakan untuk obat, dan berbagai jenis satwa buruan.

Dengan tingginya keragaman jenis yang dimanfaatkan akan memperkecil kemungkinan jenis-jenis tadi

mengalami tekanan, pengelolaan tradisional tersebut pada dasarnya sangat sejalan dengan konservasi hutan. Tetapi sayang kearifan lokal banyak tidak menggunakannya malahan melanggar umumnya dilakukan oleh masyarakat pendatang. Pada umumnya masyarakat pendatang hanya ingin mengambil sumber daya dari kawasan untuk kepentingan pribadinya.

Pengelolaan hutan tradisional yang dikembangkan pada saat tombak dan sumpit digunakan, terkesampingkan oleh senjata api, gergaji mesin dan pukut harimau. Dengan peralatan yang semakin modern, orang semakin mudah untuk menangkap binatang dan mengumpulkan tumbuhan lebih banyak. Belum lagi kegiatan pencurian kayu, pengambilan produk-produk hutan komersial, dan pembangunan jalan yang mulai mengancam sumber daya alam. Dengan munculnya ancaman tersebut, masyarakat yang ada di dalam kawasan tersebut dianggap sebagai aset yang paling tepat untuk menjaga dan mengelola sumber daya alam melalui kearifan lokal yang mereka miliki.

- **Faktor Ketahanan Nasional**

Pembangunan wilayah perbatasan merupakan hal yang penting guna mempertahankan keutuhan NKRI. Wilayah perbatasan mempunyai nilai strategis dalam mendukung keberhasilan pembangunan nasional. Keadaan ini dapat merupakan suatu kegiatan yang memberikan nilai yang berarti bagi bangsa dan negara, kegiatan tersebut adalah:

- a. Mempunyai nilai penting bagi kedaulatan negara.
- b. Memiliki kemampuan untuk mendorong agar terjadi peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat sekitarnya.
- c. Mempunyai kemampuan untuk membangun jaringan kerja dengan wilayah lainnya dan negara tetangga.
- d. Memberikan kontribusi terhadap pertahanan dan keamanan baik skala regional maupun nasional.

Beberapa permasalahan yang dihadapi di wilayah perbatasan Kepulauan Nunukan dan Sebatik dengan negara Malaysia di antaranya adalah:

1. Kaburnya garis perbatasan wilayah negara akibat rusaknya patok-patok dan jarak satu patok dengan patok lainnya saling berjauhan.
2. Pengelolaan sumber daya alam belum terkoordinasi dengan baik, sehingga banyak sumber daya alam kita diambil oleh orang asing, misalnya kasus *illegal logging*. Akibat patok-patok yang tidak jelas mengakibatkan kerugian negara Indonesia.
3. Daerah perbatasan memiliki posisi strategis yang berdampak terhadap hankam mengingat fungsinya sebagai *outlet* terdepan Indonesia, di mana banyak terjadi pelintas batas baik dari dan ke Indonesia maupun Malaysia.
4. Kemiskinan akibat keterisolasian daerah menjadi pemicu tingginya keinginan masyarakat setempat menjadi pelintas batas ke Malaysia dengan alasan

untuk memperbaiki kehidupan, mengingat perekonomian di Malaysia lebih baik daripada di Indonesia.

5. Kesenjangan sarana dan prasarana antara kedua wilayah negara pemicu orientasi ekonomi masyarakat, seperti di Pulau Sebatik, ke Tawau, Malaysia daripada ke Pulau Nunukan karena lebih dekat dan murah ongkosnya, serta barang-barang yang diperlukan lebih berkualitas.

Berdasarkan isu strategis dalam mengelola wilayah perbatasan negara, terdapat beberapa masalah yang penting dikaji:

- a. Tidak jelasnya garis batas laut dan darat, akibatnya sering menimbulkan konflik. Kerugian selalu ada di pihak Indonesia dan kondisi ini langsung oleh masyarakat Indonesia. Pada waktu sengketa Ambalat, banyak nelayan yang sedang mencari ikan dikejar oleh polisi Malaysia. Keadaan di darat, di mana rumah penduduk ada yang terbagi dua oleh batas negara di mana ruang tamu masuk wilayah Indonesia, sedangkan dapur masuk wilayah negara Malaysia, tetapi masyarakat tetap menjadi warga negara Indonesia.
- b. Eksploitasi sumber daya alam secara ilegal, terutama hasil kehutanan dan kekayaan laut. Untuk menjaga agar perbatasan tidak mudah baik di darat maupun di laut mengingat luasnya daerah yang dijaga dan keamanan yang terbatas.

Masalah Askar Wataniah sebenarnya masalah ini hanya dibesar-besarkan oleh media massa, tetapi kenyataannya tidak ada. Menurut Ketua Daerah Pengurus Pemuda Panca Marga (PPM) Kalimantan Barat, Zainul Aripin, Hikmah lain yang patut dijadikan pembelajaran dari terkuaknya fenomena ini adalah bahwa Malaysia sebagai negara tetangga sudah jauh-jauh hari mempersiapkan aspek pertahanan dalam menjaga perbatasan negaranya. Contoh pembangunan infrastruktur atau jalan raya yang dibangun di daerah perbatasan, mulai dari kota Kuching hingga ke Sabah dengan kualitas jalan yang prima dikenal dengan sebutan “Higway Borneo” bila dalam keadaan darurat atau perang jalan ini dapat berubah fungsi sebagai landasan pesawat tempur dan pengangkut logistik perang seperti pesawat Herkules. Di Sebatik, yang daerahnya berbatasan langsung dengan Malaysia, sudah membangun rumah tempat tinggal warga negaranya yaitu masyarakat Malaysia dan dilengkapi dengan pos polisi Diraja Malaysia dengan penempatan penduduk Malaysia di garis batas terdepan ini, sudah mengacu kepada aspek pertahanan dan keamanan negara Malaysia (Pontianak Post, 2008). Timbul pertanyaan bagi negara Indonesia apakah kita sudah mempersiapkan pertahanan dan keamanan kita di perbatasan? Di Kabupaten Nunukan akan dibentuk sebuah satuan yang diberi nama Resimen Khusus Perbatasan (RKP) Resimen ini merupakan salah satu unsur dari masyarakat yang mendapat kepercayaan

guna mendukung pelaksanaan tugas-tugas pengawasan keamanan tersebut. RKP beranggotakan personel pilihan yang direkrut dari anggota PPM (Pemuda Panca Marga) Nunukan.

Isu keamanan di Kabupaten Nunukan yang sering terjadi:

- a. *illegal logging*,
- b. pencurian ikan disertai dengan perampokan dan pembunuhan
- c. kepabeanan (penyelundupan)
- d. pelayaran
- e. TKI ilegal
- f. konflik
- g. narkoba
- h. teroris (masih dalam status waspada, tetapi perlu diantisipasi)

Perampokan disertai dengan pembunuhan yang menimpa nelayan dari Nunukan Bulungan dan Tarakan sering terjadi begitu juga perampokan terjadi pada petani budi daya, dan nelayan udang di ketiga tempat tersebut di atas. Beberapa sumber mengatakan kasus perampokan yang disertai dengan pembunuhan biasanya dilaporkan kepada polisi, tetapi perampokan yang tidak menimbulkan korban jiwa tidak dilaporkan.

Nelayan Nunukan mengalami aksi teror dari Polisi Diraja Malaysia dan Tentara Laut Diraja Malaysia (TLDM) sedangkan para nelayan tersebut masih berada di per-

airan Indonesia, yaitu sekitar 10 km dari garis pantai Nunukan. Aksi teror itu tidak hanya mengejar tetapi juga menabrak kapal nelayan, dan melemparkan peluru gas ke arah nelayan tersebut, hal ini tidak dapat dibenarkan dan perlu dilaporkan pada Kepala Polisi Diraja Malaysia dan Panglima Tentara Laut Diraja Malaysia.

Pembalakan liar tidak hanya dilakukan oleh masyarakat sekitar hutan, tetapi juga dilakukan oleh para pemegang izin sah yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat dan daerah. Pembalakan liar merupakan salah satu penyebab degradasi hutan tropis di Kalimantan Timur yang saat ini sudah kehilangan 331.258 ha atau 71,2% dalam periode 2 tahun (World Bank Report, 2003). Pembalakan liar salah satunya dapat ditekan oleh keseriusan penegakan hukum dan komitmen pemerintah untuk memberantasnya, tetapi itu tidak cukup mengingat luasnya perbatasan dan personel keamanan terbatas jumlahnya dan fasilitas pendukung kurang memadai. Hal ini sekarang menjadikan *illegal logging* semakin marak melalui laut.

Illegal fishing dengan modus menggunakan nelayan Indonesia dimodali oleh cukong asing agar cukong asing tersebut bebas dari jerat hukum. Modus ini perlu mendapat perhatian serius agar cukong asing tidak seenaknya membiayai nelayan Indonesia untuk menangkap ikan di perairan Indonesia. Di samping itu, juga nelayan Indonesia harus diberikan informasi tentang pelanggaran hukum

yang dilakukannya agar pekerjaan itu tidak dilakukannya dan pembelajaran bagi kelompok nelayan yang lainnya.

Nasib para tenaga Indonesia (TKI) ilegal di Nunukan sangat memprihatinkan padahal mereka adalah warga negara yang memiliki hak yang sama dalam memperoleh perlindungan dari berbagai bahaya yang mengancamnya: kelaparan, ketakutan, penganiayaan. Sebenarnya TKI memiliki kesadaran untuk meringankan beban yang sedang ditanggung oleh negara. Para TKI tahu bahwa pengangguran hanya akan menjadi beban negara.

Pihak yang bertanggung jawab terhadap rakyat adalah pemerintah sebagai pihak yang memiliki kebijakan, skenario, rencana, dan kepentingan tetapi terkesan bahwa pemerintah kurang tanggap terhadap persoalan TKI.

4. Pemberdayaan Ekonomi Pemuda di Nunukan

Berikut ini akan dibahas bagaimana arah kebijakan pemerintah dalam pemberdayaan generasi muda, karakteristik, dan permasalahan serta pola kebijakan pemerintah terkait dengan pemberdayaan generasi muda.

- **Konsep Pemuda**

Pemuda adalah individu yang bila dilihat secara fisik sedang mengalami perkembangan dan secara psikis sedang mengalami perkembangan emosional, sehingga pemuda merupakan sumber daya manusia pembangunan baik saat ini maupun masa datang.

Secara internasional, WHO menyebut sebagai “young people” dengan batas usia 10-24 tahun, sedangkan usia 10-19 tahun disebut “adolesceneae” atau remaja. Definisi yang kedua, pemuda adalah individu dengan karakter yang dinamis, bahkan bergejolak dan optimis namun belum memiliki pengendalian emosi yang stabil (Mulyana, 2011:12). Pemuda menghadapi masa perubahan sosial maupun kultural.

Menilik dari sisi usia maka pemuda merupakan masa perkembangan secara biologis dan psikologis. Oleh karenanya pemuda selalu memiliki aspirasi yang berbeda dengan aspirasi masyarakat secara umum. Dalam makna yang positif aspirasi yang berbeda ini disebut dengan semangat pembaru.

Dalam kosakata bahasa Indonesia, pemuda juga dikenal dengan sebutan generasi muda dan kaum muda. Sering kali terminologi pemuda, generasi muda, atau kaum muda memiliki definisi beragam. Definisi tentang pemuda di atas lebih pada definisi teknis berdasarkan kategori usia sedangkan definisi lainnya lebih fleksibel. Di mana pemuda/generasi muda/kaum muda adalah mereka yang memiliki semangat pembaru dan progresif.

Merujuk pada UU No. 40/2009 Tentang Kepemudaan, generasi muda atau pemuda didefinisikan sebagai “Warga Negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun. Sementara itu dalam konteks demografi dan antropologis, generasi muda di-

bagi ke dalam usia persiapan masuk dunia kerja, atau usia produktif antara 15-40 tahun. Saat ini terdapat 40.234.823 penduduk Indonesia masuk dalam kategori generasi muda. Sementara dari sudut pandang sosial budaya. Generasi muda dari sudut pandang ini memiliki sifat majemuk dengan aneka ragam etnis, agama, ekonomi, domisili, dan bahasa. Mereka memiliki ciri ekosistem kehidupan yang terbagi ke dalam masyarakat nelayan, petani, pertambangan, perdagangan, perkantoran, dan sebagainya.

- **Konsep Pemberdayaan**

Menurut Kartasasmita (1996) pemberdayaan adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Pemberdayaan masyarakat merupakan sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Tujuan dari pemberdayaan masyarakat adalah terwujudnya struktur ekonomi Indonesia yang berbasis pada kegiatan ekonomi.

Pemberdayaan merupakan suatu upaya yang harus diikuti dengan tetap memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh setiap masyarakat. Dalam rangka itu pula diperlukan langkah-langkah yang lebih positif selain dari menciptakan iklim dan suasana. Perkuatan ini meliputi langkah-langkah nyata dan menyangkut penyediaan berbagai masukan (*input*) serta membuka akses kepada berbagai peluang (*opportunities*) yang nantinya dapat

membuat masyarakat menjadi semakin berdaya.¹⁹⁵ Pemberdayaan masyarakat dalam hal ini adalah upaya untuk membangun kemampuan masyarakat Nunukan khususnya para pemuda sebagai salah satu kelompok masyarakat yang mengembangkan kehidupan di perairan laut dan hidup dalam kondisi marginal yang diharapkan mampu memperbaiki akses terhadap modal, informasi, dan teknologi perikanan. Dengan demikian, masyarakat Nunukan dapat lebih mudah memasarkan hasil perikananannya, mendapatkan surplus, dan meningkatkan taraf kesejahteraan (Kartasasmita, 1996).

- **Kebijakan Pemerintah dalam Pemberdayaan Generasi Muda**

Sebagaimana yang ditegaskan dalam UU No. 40/2009 Pasal 9 dan 13 Tentang Kepemudaan, ditegaskan bahwa pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat bersinergi dalam pelayanan kepemudaan dalam upaya pemberdayaan. Sedangkan pada Pasal 7 dan Pasal 8, pelayanan kepemudaan diarahkan untuk menumbuhkan patriotisme, dinamika, budaya prestasi, dan semangat profesionalitas, meningkatkan partisipasi dan peran aktif pemuda dalam membangun dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.

Sedangkan pada Pasal 8, disebutkan bahwa strategi pelayanan kepemudaan adalah bela negara, kompetisi dan

¹⁹⁵ Sinkoh Frans dkk, 2017. Peran Pemerintah dalam Pemberdayaan di Kecamatan Pasan, Kabupaten Minahasa Tenggara.

apresiasi pemuda, peningkatan dan perluasan memperoleh peluang kerja sesuai potensi dan keahlian yang dimiliki, dan pemberian kesempatan yang sama untuk berekspressi, beraktivitas, dan berorganisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. peningkatan kapasitas dan kompetensi pemuda; pendampingan pemuda; perluasan kesempatan memperoleh dan meningkatkan pendidikan serta keterampilan; dan penyiapan kader pemuda dalam menjalankan fungsi advokasi dan mediasi yang dibutuhkan lingkungannya.

Selain itu, esensi pemberdayaan generasi muda sebagaimana Pasal 24 dan 25 UU No. 40/2009 dilaksanakan secara terencana, sistematis, dan berkelanjutan untuk meningkatkan potensi dan kualitas jasmani, mental spiritual, pengetahuan, serta keterampilan diri dan organisasi menuju kemandirian pemuda. Melalui peningkatan iman dan takwa, peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi, penyelenggaraan pendidikan bela negara dan ketahanan nasional, penguatan kemandirian ekonomi pemuda, peningkatan kualitas jasmani, seni, dan budaya pemuda, dan/atau penyelenggaraan penelitian, serta pendampingan kegiatan kepemudaan.

- **Peran Negara**

Untuk melihat hadirnya negara dalam pemberdayaan ekonomi kepada para pemuda dapat ditelusuri dari program-program institusi pemerintah di daerah melalui dinas-dinas dan lembaga pemerintah setempat.

Namun, sebelum memahami lebih lanjut kebijakan pemerintah dalam pemberdayaan generasi muda, perlu dipahami bahwa setiap kebijakan dan program tersebut dapat dibagi menjadi dua: yakni program kebijakan pemberdayaan generasi muda yang terkait langsung. Program pemberdayaan generasi muda yang langsung terkait dengan permasalahan generasi muda. Biasanya langsung berada di bawah kementerian atau dinas terkait. Sedangkan program kebijakan pemberdayaan generasi muda yang tidak terkait langsung adalah program turunan yang tidak langsung memosisikan generasi muda sebagai permasalahan itu sendiri. Hal ini biasanya dilakukan dalam bentuk lintas kementerian atau dinas tertentu.

Mengacu pada penjelasan tersebut di atas, maka pola kebijakan pemerintah dalam pemberdayaan generasi muda secara umum terbagi dalam lima pola kebijakan, yakni:

1. Kebijakan pemberdayaan oleh satu dinas/kementerian tertentu tanpa melibatkan unsur lainnya.
2. Pemberdayaan yang melibatkan dua dinas/kementerian tertentu.
3. Pola pemberdayaan kerja sama yang melibatkan unsur non pemerintah
4. Kementerian atau dinas tertentu yang mendukung Ornop atau kelompok masyarakat.
5. Program pemberdayaan generasi muda yang bersifat mandiri, terkait dengan kekhasan di daerah tertentu.

Untuk kepentingan laporan hasil penelitian ini peneliti tidak mengacu kepada lima pola kategorisasi tersebut. Tetapi membuat klasifikasi yang lebih sederhana berdasarkan kebutuhan dan fokus penelitian ini yakni melihat sejauh mana program-program pemberdayaan khususnya ke-pada para pemuda yang dilakukan oleh pemerintah daerah setempat melalui program-program lembaga dan dinas daerah yang merupakan perpanjangan tangan negara maupun program yang dilakukan oleh organisasi agama dan kemasyarakatan setempat.

5. Kebijakan Pemberdayaan Generasi Muda yang Dilakukan Lembaga Pemerintah di Nunukan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola ini biasanya terfokus hanya pada kementerian terkait, jadi setiap badan pemerintah melakukan program sesuai dengan tupoksinya masing-masing dan itu terlihat di program kerja setiap dinas dan instansi pemerintahan. Misalnya, program pemberdayaan kepemudaan yang dilakukan oleh Kementerian Negara Pemuda dan Olah Raga atau program belajar luar sekolah yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Sesuai dengan fokus penelitian, maka peneliti hanya ingin melihat ada atau tidaknya program-program yang berkaitan dengan pemberdayaan pemuda di setiap instansi pemerintah Nunukan khususnya berkaitan dengan pemberdayaan ekonomi. Beberapa instansi yang

menjadi fokus penggalan data di Nunukan adalah Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Sosial, Dinas Kepemudaan dan Olahraga, Dinas Pendidikan, Kementerian Agama, Lembaga Kemasyarakatan Nunukan, dan Dinas Kelautan dan Perikanan.

Dinas Koperasi dan UMKM berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Dinas Koperasi dan UMKM, Sarinah, menyatakan bahwa program pemberdayaan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi Nunukan adalah dengan melakukan program pelatihan kewirausahaan. Program ini dilaksanakan tiga sampai lima kali dalam setahun dan tempat pelaksanaannya biasanya diselenggarakan di gedung UMKM Center atau balai kecamatan. Wujud program pelatihan kewirausahaan ini sesuai dengan jenis pekerjaan masing-masing.¹⁹⁶

Untuk Dinas Sosial program pemberdayaannya melalui Karang Taruna dengan membentuk kelompok usaha kerja sama. Jenis usaha yang dikembangkan disesuaikan dengan potensi Nunukan yakni ikan dan rumput laut—namun berdasarkan penjelasan informan mereka kesulitan untuk melakukan intervensi karena alasan pendanaan. Selain itu, tugas pokok dari Dinas ini adalah menangani PMKS yang terdiri dari 26 jenis PMKS.¹⁹⁷

Adapun program dari Dinas Kepemudaan berdasarkan hasil wawancara, tidak menemukan ada program

¹⁹⁶ Wawancara dengan Sekretaris Dinas Koperasi dan UMKM, 29 Agustus 2017.

¹⁹⁷ Wawancara dengan Andi Ahmad-Kepala Dinas Sosial Nunukan, 30 Agustus 2017.

pemberdayaan yang fokus kepada bidang ekonomi, tetapi lebih ke menjalankan tupoksi berupa bantuan anggaran kepada KNPI, pembinaan prestasi olahraga dan program-program kepemudaan seperti pemuda SKMD, pemuda pelopor, dan pemuda pemimpin.¹⁹⁸

Lembaga Pemasarakatan Nunukan, berdasarkan hasil wawancara dengan Kalapas, Agus Baharudin, pola pembinaan dan pemberdayaan khusus untuk para narapidana dilakukan berupa program-program pelatihan seperti bikin anyaman, membuat lemari, perbengkelan, sandal, dan pemberian keterampilan ini digali dari keinginan dan potensi yang dimiliki oleh para napi tersebut. Sebagai catatan khusus bahwa di antara para narapidana tersebut kami tidak menemukan satu pun yang terlibat dalam aksi teroris bahkan berdasarkan data penghuni Lapas Nunukan, 70 persen adalah narapidana narkoba.¹⁹⁹

Pemberdayaan melalui jalur pendidikan khususnya di lingkungan Dinas Pendidikan berdasarkan hasil penelusuran melalui pengamatan dan wawancara dengan sekretaris Dinas Pendidikan Nunukan, Syafaruddin, menunjukkan bahwa belum ada program pemberdayaan berupa pelatihan untuk membangun jiwa *entrepreneur* siswa, manajemen bisnis bagi para pelajar, dan membuat *start-up* bisnis. Adapun melalui jalur pendidikan di bawah Kemenag ada keinginan untuk memasukkan materi mem-

¹⁹⁸ Wawancara Sekretaris Kementerian Kemendikpora, 5 September 2017.

¹⁹⁹ Wawancara pada tanggal 29 Agustus 2017.

bangun jiwa *enterpreneurship* di kalangan siswa Aliyah, namun oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Nunukan bahwa keinginan ini belum bisa diwujudkan dan ke depan dan ada upaya-upaya untuk mewujudkan melalui kerja sama dengan lembaga-lembaga lain yang terkait.²⁰⁰

Untuk Kementerian Agama, juga tidak terdapat program pemberdayaan ekonomi, namun tugasnya lebih ke himbauan secara moral seperti pernyataan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Nunukan, H. Saberah, bahwa saat ini tempat ibadah tidak hanya sebagai pusat ibadah tetapi juga pengembangan intelektual dan pemberdayaan ekonomi. Ia mengatakan, ada perpaduan aktivitas spiritual dan sosial ekonomi. Karena itu perlu sarana ibadah yang representatif. Tempat ibadah juga harus dikelola secara profesional, jangan hanya asal-asalan.²⁰¹

Salah satu program dari Dinas Kelautan dan Perikanan yang terdapat di wilayah Kabupaten Nunukan adalah pemberdayaan masyarakat melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri di sektor Kelautan dan Perikanan (PNPM Mandiri KP) karena Nunukan termasuk salah satu wilayah pesisir. Sasaran dari program ini adalah masyarakat miskin kelautan dan perikanan yang tergabung dalam kelompok usaha yaitu usaha penangkapan ikan, usaha pengolahan hasil perikanan, dan usaha budi daya rumput laut.

²⁰⁰ Wawancara pada tanggal 28 Agustus 2017.

²⁰¹ Wawancara pada tanggal 29 Agustus 2017.

Adanya program tersebut diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut. Oleh karenanya, pelaksanaan program tersebut harus sepenuhnya dievaluasi sebagai salah satu upaya untuk perbaikan dan pengembangan dalam pengelolaannya, sehingga tujuan dari program tersebut dapat dirasakan sepenuhnya oleh masyarakat pesisir. Namun faktanya, program ini belum sepenuhnya mampu menanggulangi tingkat kemiskinan masyarakat pesisir yang ada di Kabupaten Nunukan.

Program ini telah dijalankan sebelum peneliti turun ke lapangan, dan telah ada salah satu riset dari Muhammad Jufri Yusuf, mahasiswa Ilmu Pemerintahan Fisip Unmul Samarinda, yang melihat proses pemberdayaan ini dengan memfokuskan pada beberapa hal: (a) Akses pada pengetahuan dan teknologi dan regenerasi nelayan, (b) Partisipasi dari institusi sosial, agama, dan budaya (c) Pemberdayaan masyarakat di sektor mikro, (d) komersialisasi usaha (*corporatitation*) dan akses modal. Penjabaran dari program ini akan dibahas di bagian *best practice* dalam laporan ini.²⁰²

- **Peran Lembaga Non Pemerintah dan Masyarakat Sipil**

Untuk melihat bagaimana peran lembaga non pemerintah maka langkah yang dilakukan adalah dengan

²⁰²Yusuf, Jufri Muhammad (2013). *Studi tentang Pemberdayaan Masyarakat Pesisir di Kabupaten Nunukan*. eJournal Ilmu Pemerintahan, 2013, 1 (4): 1594-1607.

melakukan pendataan awal terhadap organisasi-organisasi non pemerintah di Nunukan dan selanjutnya melihat kiprah dan kontribusinya kaitannya dengan pemberdayaan ekonomi kaum muda. Lembaga non pemerintah dalam konteks penelitian ini dapat berupa lembaga-lembaga keagamaan dan organisasi-organisasi kemasyarakatan, termasuk LSM yang ada di Nunukan.

Berdasarkan data lembaga-lembaga keagamaan yang ada di Nunukan antara lain adalah Muhammadiyah, Nahdatul Ulama, Persis, dan Yayasan Hidayatullah. Peneliti berkesempatan bertemu dengan semua pucuk pimpinan dari ormas keagamaan tersebut dan menggali tentang program pemberdayaan ekonomi.

Hasil wawancara dengan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Nunukan, Ustadz Khalisah menunjukkan bahwa Pimpinan Cabang Muhammadiyah daerah Nunukan belum ada program spesifik untuk memberdayakan ekonomi kalangan muda kaitannya dengan pencegahan terorisme. Walaupun Muhammadiyah dikenal dengan sejumlah amal usahanya seperti lembaga pendidikan, panti asuhan, rumah sakit, lembaga sosial lainnya, namun untuk konteks Nunukan belum ada yang spesifik pemberdayaan ekonomi untuk kalangan pemuda. Sejauh yang bisa dilaksanakan adalah memberikan pencerahan kepada umat melalui kegiatan tabligh melalui pengajian, mimbar Jumat yang dikelola oleh majelis Tabligh Muhammadiyah.²⁰³

²⁰³Wawancara dengan PC Muhammadiyah Nunukan tanggal 30

Untuk Nahdlatul Ulama, berdasarkan wawancara dengan ketua Tanfiziah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PC NU) Nunukan, Ustadz Herman, menyebutkan bahwa NU sangat menyadari betapa pentingnya faktor ekonomi, karena ekonomi orang bisa bunuh diri, melakukan kekerasan dan bahkan terlibat narkoba. Dalam kaidah agama “*kaadal fakru ayyayakuuna kufran—* kadang kemiskinan atau kefakiran itu menjerumuskan kepada kekafiran”. PC NU Nunukan walaupun saat ini belum memiliki program-program khusus pemberdayaan ekonomi kaum muda, namun tekad NU pada masa-masa yang akan datang akan berusaha untuk mewujudkan program-program yang berkaitan dengan pemberdayaan untuk menyejahterakan masyarakat khusus kaum muda melalui pemberdayaan ekonomi.²⁰⁴

Yayasan Hidayatullah juga adalah salah satu ormas keagamaan di Nunukan yang kontribusinya terhadap pengembangan Islam di Kalimantan umumnya sangat besar, hampir semua provinsi, kota, dan kabupaten di Kalimantan ini menunjukkan bahwa betapa eksistensi dan penetrasi organisasi itu kuat, termasuk di Nunukan. Di Nunukan terdapat satu pesantren yang dinaungi oleh Yayasan Hidayatullah. Hasil pertemuan dengan pimpinan lembaga ini menunjukkan bahwa Hidayatullah juga belum memiliki program yang fokus kepada pemberdayaan ekonomi kaum muda, adapun kiprah atau

Agustus 2017.

²⁰⁴Wawancara dengan PC Nahdlatul Ulama Nunukan, tanggal 5 September 2017.

kontribusi yang dilakukan selama ini sama halnya dengan NU dan Muhammadiyah yakni proses penyadaran dan pencerahan melalui aktivitas ceramah keagamaan.²⁰⁵

6. Upaya Pencegahan terhadap Radikalisme dan Penanggulangan Terorisme

Berdasarkan pengamatan dan hasil wawancara selama masa penelitian tidak terdapat satu pun warga Nunukan yang terlibat dalam aksi terorisme dan radikalisme, memang terdapat beberapa cerita yang berkembang bahwa ada beberapa warga yang baru terindikasi memiliki paham radikal, namun berkat pendekatan persuasif dari tokoh agama dan pihak aparat setempat bisa dicegah atau tertangani dengan baik.

Dalam kasus Kabupaten Nunukan kaitan dengan terorisme bukan dalam konteks penanggulangan tetapi lebih ke upaya pencegahan. Berikut ini akan dipaparkan beberapa upaya yang dilakukan oleh pihak aparat TNI dan Polri serta pemerintah setempat termasuk para ormas Islam dan tokoh masyarakat dan agama dalam upaya pencegahan radikalisme.

Ormas Islam yang ada di Nunukan seperti NU, Muhammadiyah, Hidayatullah, dan DDI dalam upaya pencegahan terhadap paham radikalisme dilakukan dengan melakukan pencerahan melalui pembinaan umat lewat mimbar Jumat, pengajian mingguan dan pada setiap

²⁰⁵Wawancara dengan Ustadz Zikrullah pada 14 September 2017.

momentum keagamaan, materi pengajian tentang wajah Islam yang *rahmatan lil alamiin*, tentang toleransi, kasih sayang sesama manusia dan persatuan Indonesia.²⁰⁶

Dari Kementerian Agama dalam upaya pencegahan paham radikalisme sebagaimana yang disebutkan oleh Kepala Kementerian Agama Kabupaten Nunukan H. Sabera mengarahkan tenaga-tenaga penyuluh agama yang tersebar di berbagai wilayah Kabupaten Nunukan untuk menyampaikan pesan keagamaan kepada umat yang menyejukkan. Terdapat 102 tenaga penyuluh agama baik PNS maupun honorer di Kabupaten Nunukan, mereka ini dibekali dan diberikan arahan untuk menyampaikan tentang bahaya radikalisme melalui pesan-pesan keagamaannya seperti majelis taklim, pengajian umum, khutbah Jumat, hari-hari besar keagamaan dan pengajian khusus.²⁰⁷

Pada tingkat aparat pemerintah yang paling bawah diinstruksikan dengan menghidupkan RT untuk melakukan pendataan terhadap rumah-rumah kost dan para pendatang baru dengan memasang label dan menempel KTP di pintu rumah masing-masing untuk mengontrol pergerakan para pendatang baru tersebut.

Pihak aparat keamanan menjaga secara ketat dan berlapis jalur masuk dan melakukan koordinasi lewat patroli di perairan perbatasan, kemudian melakukan

²⁰⁶Wawancara pada 5 September 2017.

²⁰⁷Wawancara dengan Kepala Kementerian Agama Kabupaten Nunukan pada 7 September 2017.

pendidikan bela negara yang diikuti oleh 100 orang, menanamkan wawasan kebangsaan dan cinta tanah air kepada calon TKI, melalui kerja sama TNI dan Kodim.

7. Analisis Best Practice

Kementerian Kelautan dan Perikanan selama dua tahun terakhir menyelenggarakan suatu program nasional yang bernama Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (Program PEMP). Program PEMP ini bisa dikatakan sebagai suatu program usaha perikanan terpadu, mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Keterpaduan juga terwujud dalam hal kegiatan ekonomi produktif yang dilakukan masyarakat yang memang tidak terfokus pada kegiatan tertentu, namun tersebar ke dalam kelompok kegiatan yang saling terkait. Demikian pula, keterpaduan diwujudkan melalui pelibatan pemangku kepentingan yang berasal dari berbagai pihak, instansi pemerintah, masyarakat, dan swasta.

Meskipun program ini tidak diperuntukkan khusus kepada kaum pemuda tetapi masyarakat Nunukan secara umum, namun jika pemuda dilihat dari usia produktif maka program ini setidaknya telah menjangkau banyak kelompok pemuda, yang sekaligus bisa menjadi model bagi instansi lain termasuk pemerintah daerah dan berbagai pihak bagaimana pola pemberdayaan ekonomi dengan melihat potensi daerah setempat.

Salah satu potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Nunukan adalah potensi perikanan dan rumput laut. Hasil penelitian Siegar yang dimuat di Jurnal Socioteknologi edisi 13 tahun 7 April 2008 menunjukkan bahwa pada sektor perikanan, seperti diketahui bahwa sumber daya kelautan merupakan aset besar yang dimiliki bangsa ini, aset ini perlu dijaga dan dilestarikan keberadaannya. Sering kita ingat dan dengar bahwa nelayan ada yang memiliki budaya yang tidak baik yaitu nelayan untuk menangkap ikan dengan menggunakan 60 meter jaring pukat harimau, hal ini akan merusak terumbu karang, ikan-ikan kecil mati. Akibatnya, tangkapan nelayan sedikit demi sedikit mulai menurun, karena habitat ikan rusak, tidak ada plankton yang bisa dijadikan makanan ikan.²⁰⁸

Pengolahan hasil tangkapan ikan nelayan diberi harga yang sangat murah di pasaran luar negeri, dengan alasan ikan kita ukurannya tidak sama, kualitas tidak memenuhi standar kelayakan. Kondisi tersebut membuat pengusaha asing memeras nelayan kita. Walaupun ada lemahnya yaitu dalam hal *packaging*, pengawetan, dan negosiasi yang selalu posisi lemah. Bila kita lihat nelayan yang ada di Nunukan memilih untuk menjual hasil tangkapan ikan mereka ke Malaysia karena lebih baik harganya dan tidak akan ada yang tersisa dan membusuk.

Di Nunukan belum tersedia pabrik es yang sangat dibutuhkan nelayan-nelayan untuk menjaga ikan agar

²⁰⁸Siegar, Chairil (2008). *Analisis Potensi Daerah Pulau-pulau Terpencil*. Jurnal Socioteknologi, edisi 13 tahun 7 April 2008.

tidak cepat busuk. Di sisi lain, pelabuhan yang berstandar nasional belum dapat berfungsi sebagaimana mestinya, hal ini terlihat kurang bersihnya lokasi pelabuhan, minimnya sarana dan prasarana penunjang di dalamnya, dalam melakukan transaksi penjualan kurang nyaman, akibatnya kapal asing merasa sungkan untuk bersandar di pelabuhan nasional sekadar untuk melakukan transaksi pembelian ikan di Nunukan. Kapal asing lebih memilih bersandar di Tawau, Malaysia, daripada di Nunukan, karena mereka merasa lebih aman dan nyaman untuk melakukan transaksi.

Karena tumpukan masalah dan kendala yang dihadapi oleh masyarakat-masyarakat nelayan perikanan sehingga banyak masyarakat dan para pemudanya beralih kepada usaha budi daya rumput laut dengan demikian proses regenerasi nelayan di Nunukan tidak berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan.

Berikut ini adalah uraian singkat tentang PEMP yang kiranya dapat memberikan gambaran tentang baik keterpaduan pengelolaan perikanan maupun keterpaduan produksi perikanan. Yang dapat menjadi model bagi proses pemberdayaan khususnya para pemuda di Kabupaten Nunukan.

1) Implementasi Teknologi Tepat Guna

Teknologi tepat guna yang dikembangkan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan (DKP) Nunukan yakni kebun bibit dengan sistem seleksi di mana petani dapat

mengembangkan bibit unggul yang siap dibudidayakan, serta metode penjemuran yang dikenal dengan metode penjemuran sistem gantung di mana sistem ini jauh lebih efisien dari segi waktu dan hasil penjemuran dibandingkan dengan sistem penjemuran hamparan di lantai yang memakan waktu yang agak lama yakni 7-8 hari dan harus dibolak-balik secara berkala di bawah terik matahari. Metode penjemuran sistem gantung juga unggul dari hasil penjemuran di mana hasil jemuran rumput laut tidak terlalu susut sehingga cenderung berat dibanding sistem hamparan dan tidak perlu dibolak-balik secara berkala.

2) Pengembangan Teknologi Lokal

Terdapat teknologi lokal yang dikembangkan sendiri oleh masyarakat pesisir Nunukan dalam pembudidayaan rumput laut yakni dengan metode *long line*. Metode *long line* adalah metode budi daya dengan menggunakan tali panjang yang dibentangkan. Metode budidaya ini banyak diminati oleh masyarakat karena alat dan bahan yang digunakan lebih tahan lama serta mudah didapat. Teknik budi daya rumput laut dengan metode ini adalah menggunakan tali sepanjang 50-100 meter yang pada kedua ujungnya diberi jangkar dan pelampung besar, setiap 25 meter diberi pelampung utama yang terbuat dari drum plastik atau *styrofoam*. Pada setiap jarak 5 meter diberi pelampung berupa potongan *styrofoam*/karet sandal atau botol mineral bekas 500 ml.

3) Pemberdayaan Masyarakat pada Sektor Mikro meliputi:

a) Minimarket

Hanya ada sedikit minimarket di wilayah Nunukan, hal ini dikarenakan masyarakat Nunukan masih cenderung memilih berbelanja di pasar tradisional, selain mereka menjual hasil kebun yang mereka hasilkan mereka juga bisa sambil berbelanja kebutuhan sehari-hari mereka.

b) Paket Penyaluran Solar

Untuk paket BBM yang khusus disubsidi untuk petani rumput laut di Nunukan belum ada, namun pemerintah melalui Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) memberikan surat rekomendasi untuk mendapatkan BBM bersubsidi umum. Petani rumput laut diberi surat rekomendasi untuk memperoleh BBM bersubsidi dalam jumlah besar yang digunakan nelayan/petani rumput laut untuk melakukan aktivitasnya. Bagi masyarakat bukan petani rumput laut apabila tidak memiliki surat rekomendasi, maka pembeliannya akan dibatasi pihak penyalur BBM subsidi.

c) Budi daya Rumput Laut

Dalam program revitalisasi perikanan budi daya sasaran produksi rumput laut pada 2015 adalah sebesar 50.763.000 ton. Bentangan garis pantai serta pulau-pulau dengan dasar perairan

berkarang dan berpasir serta dukungan perairan yang terlindung dan relatif tenang sangat me-nunjang dalam usaha budi daya rumput laut. Dukungan sumber daya manusia yang sebagian besar adalah nelayan tradisional sangat berpeluang untuk mengembangkan jenis usaha alternatif ini. Dukungan pasar yang terus meningkat untuk komoditi ini juga menjadi latar belakang usaha alternatif ini dilaksanakan.

d) Proses Pascapanen

Proses pascapanen adalah penentu kualitas rumput laut karena melalui penjemuran kadar air dan kebersihannya dapat ditentukan. Cuaca yang tidak menentu membuat petani tidak menjemur dengan maksimal.

5) Komersialisasi Usaha (*corporatitation*) dan Akses Modal.

Pengusahaan usaha individual yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Nunukan telah lama dilakukan yakni dengan pemberian bantuan berupa modal usaha untuk para nelayan ataupun usaha pembudidaya rumput laut. Adapun usaha yang dilakukan pemerintah setempat, khususnya di Kabupaten Nunukan, yaitu:

- a) Memberdayakan masyarakat dari masyarakat yang tidak berdaya menjadi masyarakat yang berdaya, mandiri, dan madani.
- b) Menggali nilai-nilai masyarakat yang sudah luntur.
- c) Mengikutsertakan masyarakat berpartisipasi

dalam melaksanakan kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM).

e) Jejaring Ekonomi

Dapat kita lihat jejaring ekonomi untuk masyarakat pesisir telah berjalan di Kabupaten Nunukan Khususnya yakni koperasi unit desa. Hal ini ditujukan agar dapat mengontrol harga rumput laut agar harganya stabil pada musim panen. Posisi Kabupaten Nunukan yang masuk dalam 14 anggota Jejaring Pemuliaan Rumput Laut Nasional turut menguntungkan daerah ini. Nunukan dan Kabupaten Brebes, dua daerah yang terlibat di dalam jejaring tersebut, mendapatkan prioritas menggunakan hasil riset, seperti ketika riset di IPB. Hasil riset diutamakan untuk anggota.

f) Akses Perbankan Banking dan Non Perbankan

Sebagai bank milik pemerintah daerah, Bank Kaltim aktif memberikan pinjaman modal usaha kepada masyarakat pembudidaya rumput laut dalam meningkatkan hasil produksi melalui suntikan dana dari daerah walaupun masih sangat terbatas.

• **Faktor Pendukung dan Penghambat Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Nunukan**

1) Potensi Budi daya Perikanan

Salah satu potensi di Kabupaten Nunukan, khususnya di Nunukan, memiliki potensi sumber daya perikanan

budi daya yang terdiri dari tambak seluas 25 ha, kolam 2.31 ha, laut 406.14 ha. Pada 2010 ini lokasi tersebut telah dimanfaatkan dengan berbagai jenis komoditas. Ini menunjukkan komoditas rumput laut merupakan komoditi perikanan yang unggul dan memiliki kualitas yang baik hal ini sudah dibuktikan dengan kualitas rumput laut Kabupaten Nunukan adalah salah satu rumput laut terbaik di Asia Tenggara.

2) Sosialisasi

Hasil yang diharapkan dari proses sosialisasi adalah dimengerti dan dipahami secara utuh tentang konsep-konsep, prinsip prosedur, kebijakan, dan tahapan-tahapan dalam pelaksanaan program pengembangan budidaya rumput laut maupun penguatan modal dan usaha kelompok budi daya rumput laut oleh pelaku-pelaku pendukung yaitu penyuluh dan masyarakat sebagai pelaku sekaligus sasaran penerima program. Untuk mencapai pemahaman yang utuh tentang program tersebut, maka proses sosialisasi tidak hanya dilakukan pada awal pelaksanaan program saja melainkan secara terus-menerus sampai dengan akhir pelaksanaan program.

3) Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat adalah keterlibatan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam setiap tahapan kegiatan pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat petani rumput laut. Sebagaimana mekanisme kerja yang telah diuraikan, terlihat jelas bahwa pola

partisipasi masyarakat memang sangat dominan dalam semua tahapan kegiatan program pemberdayaan masyarakat petani rumput laut ini mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan, serta evaluasi. Dapat dilihat dari banyaknya Kelompok Usaha Bersama (KUB) yang dibentuk masyarakat yang ada di setiap kelurahan. Oleh karena itu tidak dapat dipungkiri dan memahami dengan jelas bahwa program ini hanya bisa berhasil jika mendapat respons dan perhatian dari masyarakat.

4) Sumber Daya Manusia (SDM)

Salah satu faktor yang menentukan keberlangsungan program pemberdayaan masyarakat ini yaitu kualitas sumber daya manusia yang dimiliki dalam hal ini yang dimaksud adalah para pelaku pelaksana program pemberdayaan rumput laut ini. Dapat dilihat bahwa penyuluh budi daya merupakan pelaku utama dalam mendukung setiap program yang diselenggarakan.

5) Anggaran

Anggaran merupakan salah satu faktor penting dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat rumput laut ini karena anggaran merupakan faktor penggerak seluruh elemen dari sebuah lembaga pemerintahan. Dalam pelaksanaan program penguatan modal dan usaha kelompok budi daya rumput laut, pengembangan budi daya rumput laut serta penyuluh budi daya anggaran

dasarnya dapat diperoleh dari Dana APBN pusat, DAK-DAU, DKP Provinsi Kalimantan Utara, dan Pemkab.

6) Kondisi Sarana dan Prasarana

Keberadaan sarana dan prasarana dalam suatu dinas merupakan salah satu modal untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi suatu dinas. Dengan adanya sarana dan prasarana tersebut, maka tujuan pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara optimal.

Ekonomi Kaum Muda dan Strategi Pencegahan Terorisme

Bab ini akan menceritakan kisah terbaik (*best practice*) dari beberapa daerah di Indonesia bagaimana para mantan teroris kini terlibat aktif dalam mengatasi terorisme, serta bagaimana kerja sama pusat dan daerah dilakukan dalam kegiatan ekonomi sebagai pencegahan dan penanggulangan terorisme. John Horgan menyatakan pentingnya memisahkan individu dan kelompok kekerasan dari yang lain (*disengagement*). Dalam pengalaman di Indonesia, *disengagement* para mantan narapidana teroris berlanjut di luar penjara.

Beragam pola dan model seorang teroris melakukan perubahan meninggalkan kekerasan. Agama, keluarga, interaksi, dialog dan komunitas di antara alasan untuk sepenuhnya berkomitmen meninggalkan pengalaman kekerasan pada masa lalu dan meneguhkan diri bergabung dalam pengembangan komunitas untuk perdamaian dan aktivitas sosial-ekonomi yang produktif. Pemahaman atas pola-pola ini bisa ditarik menjadi kebijakan pemerintah dalam mencegah dan menanggulangi terorisme melalui

kerja sama multi pihak. John Horgan menyatakan “*many potential ways out of terrorism, and that if we tried to identify them there might be implications for the development of policy initiatives.*”²⁰⁹ Horgan melakukan wawancara mendalam terhadap puluhan teroris ultra nasionalis dan radikal jihadis.

Julie Chernov Hwang selama enam tahun melakukan wawancara mendalam terhadap lebih dari seratus jihadis di berbagai kota di Indonesia dari beragam kelompok antara lain Jama'ah Islamiyah, Mujahidin Kompak, Ring Banten, Laskar Jihad dan Tanah Runtuh. Chernov Hwang melihat banyak perubahan individu dan kelompok jihadis di Indonesia dengan beragam alasan baik agama maupun psikologis. Mereka meninggalkan pengalaman kekerasan pada masa lalu, dan berkomitmen dalam mengembangkan komunitas damai melalui kegiatan sosial-ekonomi dan kerja sosial lainnya.²¹⁰ Ali Fauzi dan Arifuddin Lako adalah di antara mereka yang melakukan transformasi diri dan memiliki pengaruh kuat atas ratusan mantan teroris dan kombatan lainnya. Lako menegaskan “Komunitas Rumah Katu menjadi wahana mediasi dan interaksi mantan teroris, mantan kombatan, dan anak muda lainnya baik Muslim maupun Nasrani.”²¹¹ Lako ditunjuk sebagai

²⁰⁹John Horgan, *Walking Away from Terrorism Accounts of Disengagement from Radical and Extremist Movements*, New York: Routledge, 2009, hlm. 6.

²¹⁰Julie Chernov Hwang, *Why Terrorists Quit: The Disengagement of Indonesian Jihadists*, Ithaca: Cornell University Press, 2018.

²¹¹Arifuddin Lako, wawancara di Poso, 22 Januari 2018.

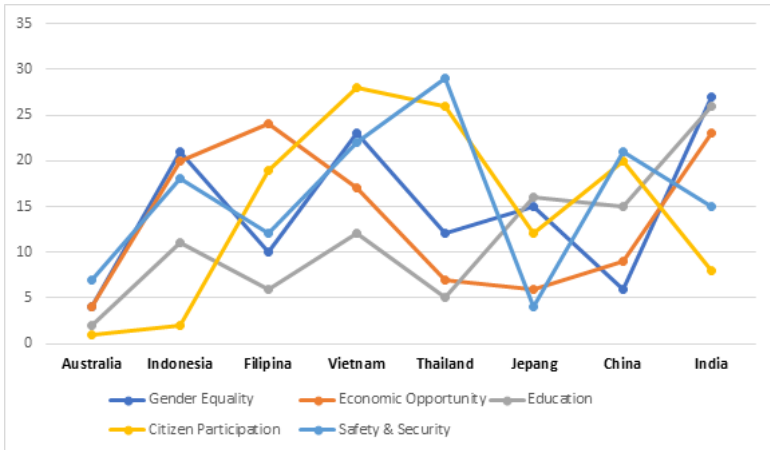
direktur Komunitas Rumah Katu, dan kini memproduksi film dokumenter dan film pendek sebagai pembelajaran generasi milenial atas konflik Poso, bagaimana mencegah kekerasan, dan menciptakan perdamaian secara permanen.

Penjara sebagai pusat rehabilitasi napiter memiliki pengaruh kuat dalam transformasi mereka dari kekerasan ke perdamaian. Interaksi antar napiter dan waktu reflektif yang cukup membuat terjadinya transformasi diri dalam penjara. Meskipun beberapa di antara mereka kembali pada komunitas kekerasan, terutama bagi mereka yang kecewa atas lemahnya dukungan sosial dan penolakan di masyarakat. Transformasi mantan napiter dan kombatan dalam konteks ini terdiri dari dua hal. Pertama, melalui penguatan komunitas, dan kedua, melalui kerja sama lintas sektoral.

Indonesia memiliki potensi besar partisipasi kaum muda dalam mendukung program pemerintah dan masyarakat. Dalam The Global Youth Wellbeing Index 2017 Indonesia menempati rangking 2 partisipasi warga negara dan nomor 11 pada bidang Pendidikan bagi kaum muda. Tetapi pada aspek kesempatan ekonomi, Indonesia menempati rangking 20 tiga paling bawah. Lebih rendah lagi dalam kesetaraan gender dan ICT masing-masing rangking 21 dan 23. Ini menunjukkan tantangan penting bagi pemerintah dan masyarakat untuk menggerakkan kaum muda dalam kewirausahaan dan pemberdayaan ekonomi. Secara umum rangking Indonesia pada level

menengah di kawasan Asia Pasifik, yaitu rangking sepuluh.²¹²

Grafik: Kesempatan Ekonomi Kaum Muda Indonesia dan Asia Pasifik 2017 ²¹³



Grafik ini menjelaskan bagaimana posisi kaum muda Indonesia per tahun 2017 diantara negara-negara Asia Pasifik khususnya Filipina, Vietnam, Thailand, Australia, Jepang, China dan India. Kesempatan ekonomi kaum muda Indonesia (20), lebih baik dibanding India (23) dan Filipina (24), tetapi jauh tertinggal dibandingkan Vietnam (17), China (9), Thailand (7), Jepang (6) dan Australia (4). Kaum muda Indonesia sangat kuat dalam Citizen Participation, yaitu dua (2), setingkat dibawah Australia yang menempati posisi tertinggi yaitu satu (1). Kaum muda

²¹²“The Global Youth Wellbeing Index,” diakses pada 01 Februari 2018 dari <http://www.youthindex.org/country/indonesia>.

²¹³Diolah dari the Global Youth Wellbeing Index 2017. Diakses pada 10 Februari 2018 dari <https://www.youthindex.org>

Indonesia sebagai warga negara sangat aktif partisipasi sosial, politik dan ekonomi. Sayangnya tidak dibarengi dengan pendampingan, pendidikan yang terarah dan kompetitif, serta modal usaha yang terbatas. Ini dirasakan kaum muda termasuk mantan napiter dalam melakukan usaha. Mereka mendapatkan dana terbatas dari BNPT dan pemerintah daerah yang tidak cukup untuk keberlanjutan usaha yang lebih kuat dan jangka panjang.

1. Peran Pemerintah

Pemberdayaan ekonomi merupakan faktor penting pendorong seseorang tidak melakukan aksi terorisme. Kegiatan usaha menguatkan mereka untuk menolak ajakan melakukan aksi teror. Dukungan pemerintah dan masyarakat dalam kegiatan ekonomi memberi mereka kepercayaan diri untuk melakukan perubahan dari masa lalu yang penuh aksi kekerasan menjadi seseorang atau kelompok yang produktif dan memberi manfaat untuk masyarakat.

Pemberdayaan dan pelatihan usaha juga diberikan kepada kalangan muda dalam rangka mencegah maraknya peredaran narkoba, sebagaimana terjadi di Nunukan, Kalimantan Utara. Kaum muda banyak tergiur dengan kemudahan mendapatkan dana menjadi kurir narkoba. Tujuh puluh persen penghuni Lapas Nunukan berasal dari kasus kriminal narkoba.

Pada Sidang Umum PBB September 2014, Presiden Barack Obama menyatakan bahwa pendekatan ke-

wirausahaan sangat strategis dalam mencegah dan mengatasi radikalisme dan terorisme. Steven R. Koltai dari Brookings Institute menegaskan bahwa:

*“President Obama is right that entrepreneurship is a powerful antidote to violence. Entrepreneurship is a job-creating machine, and jobs provide the growth and economic hope that are the foundation of peaceful, civil societies...huge numbers of young people in the Middle East and North Africa do not have jobs—youth unemployment rates can exceed 35 percent—and it is these young men, disillusioned and frustrated, who are drawn to extremism.”*²¹⁴

Bantuan ekonomi diberikan kepada mantan napiter dan mantan kombatan di berbagai daerah. BNPT menjadi lembaga pemerintah paling utama dalam memberi bantuan ekonomi. Dalam wawancara dengan petugas Lapas Solo dinyatakan:

*“Kalau BNPT tidak memberikan bantuan uang tapi barang sesuai dengan usaha yang diinginkan. Yang ingin jualan dibelikan gerobak, yang ingin kambing dibelikan kambing, yang ingin jualan online dibelikan laptop. Tetapi disayangkan, karena kebutuhan, banyak barang tersebut dijual lagi.”*²¹⁵

²¹⁴Steven R. Koltai, “Fighting ISIS with Entrepreneurship,” 7 Oktober 2014. Diakses pada 30 Januari 2018 dari <https://www.brookings.edu/blog/fixgov/2014/10/07/fighting-isis-with-entrepreneurship/>

²¹⁵Agus Rahmanto, Siswanto dan Mulyono, Wawancara di Bapas Solo, 4 September 2017.

Agus Rahmanto, Siswanto dan Mulyono meyakinkan bahwa ekonomi menjadi faktor penunjang. Ideologi adalah aspek pertama yang perlu ditangani untuk perubahan teroris. Mereka melanjutkan:

“Faktor ekonomi bukan yang signifikan untuk mengubah itu, karena pertama ideologi. Ekonomi hanya mendorong saja, bisalah untuk mengurai usaha kegiatan, minimal mengurangi aktivitas dia di bidang teroris. Kesibukan dia di ekonomi mungkin bisalah mengurangi kesibukan dia yang dolanan bom bisalah dialihkan untuk dolanan makanan. Tapi secara ideologis sendiri mereka begitu ada pemicunya ya sudah mereka akan kembali.”²¹⁶

Pemerintah memiliki peran paling krusial dalam menggunakan pendekatan ekonomi untuk mengatasi tantangan terorisme dan kriminal transnasional. Pendekatan lebih komprehensif dan memenuhi target perlu kerjasama dengan masyarakat. Karena dalam beberapa aspek pemerintah kurang efektif masuk dalam komunitas kaum muda. Di Solo, beberapa kaum muda terutama mantan napiter tidak menerima kehadiran BNPT dan Polisi dalam pemberdayaan ekonomi bagi mereka. Dinas Perdagangan dan Dinas Koperan dan UKM akan lebih mudah diterima karena dianggap netral. Mereka memiliki trauma pada masa penangkapan dan penahanan.

²¹⁶ Agus Rahmanto, Siswanto dan Mulyono, Wawancara di Bapas Solo, 4 September 2017.

Harapan selanjutnya adalah pada masyarakat. Re-integrasi kaum muda di masyarakat memiliki dampak penting. Penerimaan masyarakat terhadap mereka akan memberi rasa aman dan nyaman dalam melakukan aktivitas ekonomi secara produktif dan berkesinambungan melalui dukungan penuh komunitas.

2. Penguatan Komunitas

Komunitas para mantan teroris menjadi penggerak masyarakat dalam mencegah perkembangan terorisme di Indonesia. Mereka tidak lagi tergantung pada pemerintah, tetapi secara independen melakukan penguatan jaringan komunitas dalam mengatasi tantangan terorisme. Gerakan mereka mendapat kritik dan tantangan dari individu dan kelompok teroris dan radikal yang masih menyimpan sikap anti pemerintah dan secara tersembunyi bergerak membangun kekuatan.

Ali Fauzi pernah menjadi instruktur pelatihan terorisme di Mindanao di bawah komando Jama'ah Islamiyah. Sebagai instruktur bahan peledak tentu saja memiliki pengaruh penting bagi ratusan mantan teroris dan mantan kombatan yang tersebar di Indonesia. Pasca bom Bali Oktober 2002 di mana Fauzi juga diduga terlibat terjadi proses transformasi Fauzi dari komandan dan instruktur terorisme menuju pemimpin penanggulangan dan pencegahan aksi teror, penggerak perdamaian bagi para mantan narapidana terorisme dan mantan kombatan veteran konflik Ambon, Poso dan Mindanao.

Demikian juga, Khairul Ghozali, pernah terlibat dalam perampokan Bank CIMB dipenjara selama beberapa tahun, kini menjadi penggerak lembaga Pendidikan untuk anak-anak mantan teroris Pesantren Al Hidayah di Medan, Sumatra Utara.

Agus Martin alias Hasan lahir pada 17 Agustus 1981, mantan napiter asal Lamongan, memiliki pengalaman penting bagaimana program ekonomi dan dukungan komunitas membuat mereka yang baru keluar dari penjara kasus terorisme kuat bertahan dari dorongan dari luar untuk terlibat kembali dalam gerakan dan aksi terorisme. Hasan merupakan anggota Yayasan Lingkar Perdamaian Lamongan yang hadir menjadi peserta FGD. Dalam forum FGD pada 4 September 2017 di kantor YLP di Tenggulun, Solokuro, Lamongan ia menyatakan: “Perkenalkan nama saya Hasan, baru bebas tahun 2016. Mungkin kendala bagi kami mantan napiter untuk di luar yaitu *soft skill* dan bagaimana bisa hidup setelah keluar dari penjara. Karena banyak kawan terjebak melakukan lagi karena mereka tidak punya pekerjaan dan tidak punya skill... Saya merasakan karena 4 tahun menjalani masa tahanan, kalau tidak ada yang merangkul kami maka ya mereka yang akan merangkul lagi.”²¹⁷

Ali Fauzi di depan para mantan kombatan dan mantan napiter yang bergabung dalam Yayasan Lingkar Perdamaian dalam FGD menyatakan bahwa kaum

²¹⁷Hasan, mantan napiter, FGD di Solokuro, Lamongan, 4 September 2017

muda yang terlibat dalam terorisme memiliki alasan ideologis, jaringan komunitas serta manfaat material. YLP menggunakan pola yang sama mengarahkan ideologi dan komunitas ke arah damai, Islam ramah. Dukungan komunitas memberi mereka kekuatan dan kepercayaan diri untuk melakukan transformasi dari pengalaman kekerasan menuju perdamaian. Ali Fauzi menyatakan: “Karenanya menjadi penting membentuk sebuah komunitas baru yang memberikan *support* yang serupa dengan gaya yang sama, tetapi dengan muatan yang berbeda. Muatannya toleransi, perdamaian, cinta kasih dan bukan Islam yang marah. Keberhasilan membangun komunitas baru perlu dukungan material dan non material, harus diberikan secara simultan dan tidak bisa dipisah-pisahkan.”²¹⁸

3. Lintas Sektoral

Brigjen Pol Hamli, Direktur Pencegahan BNPT, menyatakan sampai akhir 2017 Indonesia telah menahan lebih dari 1400 orang terkait dengan terorisme. Menjadi kebutuhan mendesak kerja sama lintas sektoral pusat dan daerah dalam penanganan radikalisme dan terorisme. Pemerintah juga memerhatikan transisi deportan dan returnees dari Suriah. Rehabilitasi dilakukan oleh Kementerian Sosial. Setelah dinyatakan cukup mereka dikembalikan ke daerah masing-masing. Kemensos tidak

²¹⁸ Ali Fauzi, Direktur YLP, FGD di Solokuro, Lamongan, 4 September 2017.

lagi memiliki wewenang di daerah untuk melanjutkan pendampingan terhadap deportan dan returnees. Brigjen Hamli menyatakan bahwa “Pemerintah daerah diharapkan turun tangan mendampingi para deportan dan returnees. Ini menjadi kendala kurangnya peran dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam menangani dan mengatasi terorisme.”²¹⁹

Program ekonomi bagi kaum muda sebagai pencegahan dan penanggulangan radikalisme dan terorisme membutuhkan kerja sama lintas sektoral baik antar kementerian dan lembaga pemerintah pusat, dan lebih penting lagi keterlibatan dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat di daerah. Dalam wawancara di lima provinsi terhadap dinas, mantan kombatan dan mantan napiter terlihat betapa masih lemahnya pelibatan daerah dalam kegiatan ekonomi dan kebijakan lainnya terkait dengan penanganan terorisme dan radikalisme.

Kasat Bimas Polres Poso, M. Masloeman, menyatakan pentingnya daerah dilibatkan dalam pemberdayaan ekonomi kaum muda yang dilakukan oleh pemerintah pusat, termasuk yang telah ditangani secara langsung oleh BNPT. Koordinasi dengan elemen daerah akan memastikan keberhasilan program ekonomi bagi para kombatan dan mantan napiter. Kasat M. Masloeman menyatakan: “Pasca penegakan hukum dan kembali ke masyarakat mereka banyak dibantu oleh BNPT tetapi

²¹⁹Brigjen Pol Hamli, presentasi dalam Seminar Nasional di Hotel Grand Shahid Jaya Jakarta, Rabu, 20 Desember 2017.

tidak ada perkembangan, mungkin hanya sebagian kecil yang berhasil. Setelah pelatihan pendampingan kewirausahaan di Jakarta dan beberapa mantan napiter belum ada eksekusi pendampingan yang dilakukan dengan baik. Sebenarnya unsur lokal harus dilibatkan agar program pemberdayaan ekonomi bisa terlaksana dengan baik.”²²⁰

Poso sebagai daerah pasca konflik memiliki karakter penanganan khusus atas mantan kombatan dan mantan teroris dalam konteks resolusi konflik. Program ekonomi bagi kaum muda tidak hanya memiliki tujuan mengatasi radikalisme dan terorisme, tetapi sebagai wahana dan instrumen penting bagi terciptanya keamanan dan perdamaian yang lebih permanen. Konflik Poso dijadikan kelompok teroris sebagai ajang rekrutmen dan dukungan masyarakat muslim atas kelompok yang melakukan aksi terorisme dengan alasan dendam konflik. Mahfud, dinas Pekerjaan Umum Poso, menyatakan bahwa “secara umum memang sebagaimana arahan Bupati dan Kapolres bahwa mereka (para mantan kombatan) harus diperhatikan demi stabilitas keamanan.”²²¹ Meskipun keamanan dan perdamaian menjadi aspek penting dalam setiap pengarahannya pimpinan pemerintah daerah, tetapi dinas tetap memegang prinsip kualitas dan kapasitas. Dalam memberi program kepada mantan kombatan

²²⁰Kasat Bimas Polres Poso, wawancara di Poso, 30 Agustus 2017

²²¹Mahfud, Dinas Pekerjaan Umum Poso, wawancara di Poso, 1 September 2017.

Mahfud, dinas PU Poso, meyakinkan bahwa “kita juga pihak dinas dan pak Kadis tidak memberikan perlakuan khusus bagi mereka. Ketika kriteria mereka memenuhi untuk item tersebut, ya mereka akan dapat item itu.”²²²

Kerja sama lintas sektoral menjadi perhatian pemerintah pada 2018 melalui Rencana Aksi Nasional Penanggulangan Ekstremisme (RAN-PE) BNPT yang melibatkan 32 Kementerian dan Lembaga Pemerintah dalam pencegahan dan penanggulangan terorisme secara nasional. Dengan demikian komunikasi dan koordinasi pusat dan daerah, serta antar dinas akan dilakukan lebih kuat. Chomidin atas nama Kepala BNPT, Komjen Pol. Suhardi Alius, menyatakan “BNPT meletakkan empat pilar dalam koordinasi penyusunan RAN-PE, yakni pilar pencegahan, penegakan hukum sekaligus penguatan legislasi, deradikalisasi dan kontra radikalisasi, serta pilar keempat berupa kemitraan dan kerja sama internasional.”²²³

4. Kesimpulan

Program penguatan skill ekonomi kaum muda penting tidak hanya mencegah dan menanggulangi terorisme tetapi mengatasi masalah sosial, perbatasan, dan kriminal. Secara

²²²Mahfud, Dinas PU Poso, wawancara di Poso, 1 September 2017.

²²³“BNPT-UN Women Gelar Konsultasi Publik RAN-PE Berbasis Kekerasan yang Mengarah ke Terorisme,” diakses pada 1 Februari 2018 dari <http://teraju.id/berita/nasional/bnpt-un-women-gelar-konsultasi-publik-ran-pe-berbasis-kekerasan-yang-mengarah-ke-terorisme-6803/>.

internasional posisi kaum muda Indonesia menempati level menengah dalam berbagai aspek. Tantangan besar pada aspek kesempatan ekonomi, Indonesia menempati level bawah dalam *The Global Youth Wellbeing Index 2017*. Termasuk pada rangking bawah pada bidang kesetaraan gender bagi kaum muda.

Pemerintah dan masyarakat telah melakukan pendekatan ekonomi sebagai strategi mengatasi terorisme. Pemerintah juga menggunakan pendekatan mengatasi problem perdagangan narkoba dan human trafficking di perbatasan Nunukan, Kalimantan Utara. Kendala pemasaran dan pendampingan usaha menjadi salah satu alasan mengapa beberapa bisnis yang diinisiasi kaum muda mengalami kemunduran. Bahkan, beberapa usaha ditutup karena tidak menghasilkan profit. Beberapa yang bertahan selalu melakukan inovasi usaha dengan melihat kesempatan dan kekuatan pemasaran online. Dinas Koperasi dan UKM Solo mengakui pergeseran usaha yang dilakukan kaum muda tidak lagi pada usaha offline, tetapi lebih dominan kewirausahaan online. Karena itu, Dinas Koperasi dan UKM Solo menggandeng beberapa perusahaan pemasaran online seperti Bukalapak untuk memberi motivasi kepada kaum muda di Solo dalam melakukan usaha secara lebih berkesinambungan.

BAB 8

KESIMPULAN

Kaum muda memiliki pola berbeda dalam aktivitas ekonomi. Mereka mengombinasikan aspek kemandirian, kreativitas, inovasi, dan jaringan *online*, serta media sosial. Pendampingan, peningkatan inovasi, dan kualitas produk usaha melalui kelompok usaha yang lebih mapan pada level daerah dan nasional akan menjamin kegiatan ekonomi kaum muda berjalan lebih berkesinambungan. Hal ini termasuk kaum muda yang terlibat dalam kelompok terorisme dan memiliki pengalaman konflik bernuansa agama pada masa lalu. John Horgan menyatakan bahwa penting proses *disengagement* bagi mereka yang potensial keluar dari lingkaran kelompok teroris melalui beragam pendekatan dan aktivitas. Program ekonomi, diskusi, dan dialog bisa menjadi wahana dalam proses pemisahan ini. Meski setiap individu dan kelompok memiliki waktu dan pendekatan berbeda tergantung pada pemahaman dan pengalaman mereka dalam aksi dan kelompok terorisme.

Mereka memiliki tekad dan komitmen untuk berubah dan meninggalkan pengalaman kekerasan dalam terorisme dan konflik melalui program ekonomi. Pemerintah khususnya Polisi (Densus 88) dan BNPT melakukan inisiatif awal dalam mengatasi terorisme melalui pendekatan ekonomi. Sebagai inisiatif, polanya jangka pendek dan dananya terbatas. Bantuan modal usaha berakhir menjadi konsumsi. Kehadiran beberapa kementerian, dinas, dan pengusaha lokal dalam membantu pemberdayaan ekonomi kaum muda sangat berarti terutama keterjaminan bantuan dan dukungan usaha secara jangka panjang dan berkelanjutan. Kaum muda ini termasuk mereka yang pernah terlibat dalam aksi terorisme, konflik, dan kriminal lainnya.

Pencegahan terorisme dan deradikalisasi memiliki beragam pendekatan. Salah satu di antaranya melalui pemberdayaan ekonomi. Studi di lima kota lima provinsi di Indonesia yaitu Nunukan (Kalimantan Utara), Poso (Sulawesi Tengah), Solo (Jawa Tengah), Lamongan (Jawa Timur), dan Medan (Sumatra Utara) pada Agustus-November 2017 menunjukkan bahwa program ekonomi memiliki peran strategis bagi kaum muda mantan napiter, mantan kombatan dan mereka yang terlibat dalam aksi kriminal dalam perubahan dan pemisahan dari kelompok kekerasan masa lalu.

Kaum muda di Kabupaten Nunukan memiliki tantangan di tengah tekanan kelompok bisnis narkoba lintas negara melalui jalur perbatasan Indonesia,

Malaysia, dan Filipina yang sangat luas. Tujuh puluh persen pemuda yang dipenjara di Kabupaten Nunukan akibat kasus perdagangan narkoba. Mereka juga memilih bekerja di perkebunan sawit di Sabah, Malaysia meskipun dengan cara ilegal. Pelatihan dan peningkatan kapasitas kewirausahaan, kerajinan, dan usaha kuliner dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) serta Dinas Koperasi dan UKM terhadap kaum muda laki-laki dan perempuan khususnya ratusan orang yang dideportasi dari Sabah, Malaysia karena dianggap pekerja ilegal (*illegal migrant*). Pascapelatihan mereka diharapkan melakukan usaha di Nunukan. Sayangnya sekali, sebagian besar mereka tetap kembali masuk ke Sabah bekerja tanpa membawa dokumen resmi. Beberapa aktivis muda memilih tetap membangun usaha dan bekerja di Kabupaten Nunukan dan Pulau Sebatik. Kemudahan bahan perdagangan mulai dirasakan sejak periode Presiden Joko Widodo yang membangun Indonesia dari perbatasan dan konsep tol laut yang memberi kepastian pemasaran dan ketersediaan barang ke daerah kepulauan dan daerah perbatasan.

Pemberdayaan ekonomi di Poso, Sulawesi Tengah, memiliki fungsi dan peran berbeda. Sebagai daerah pasca-konflik kaum muda dihadapkan pada kompleksitas trauma konflik, lambatnya investasi dan pembangunan, dan segregasi sosial yang belum pulih. Terdapat faktor lain yang harus diselesaikan untuk menyelesaikan problem sosial politik dan hukum secara lebih serius.

Poso menjadi lokasi subur bagi gerakan terorisme karena masih adanya dendam dan ketidakadilan masih kuat dirasakan masyarakat. Upaya aktivis LSM dan pemerintah pusat dan daerah terus dilakukan melalui beragam pelatihan dan pemberian modal secara terbatas. Kaum muda mantan kombatan Poso mulai membangun kegiatan ekonomi secara mandiri tanpa tergantung pada bantuan pemerintah. Mereka secara berkelompok membangun komunitas untuk mengembangkan perkebunan dan pertanian, berwirausaha dan kegiatan ekonomi lain. Kehadiran pemerintah dan masyarakat dalam program ekonomi mereka akan membuat mereka terus kuat dan berkelanjutan dalam melakukan berwirausaha dan membangun kemandirian. Diharapkan kegiatan ekonomi melibatkan komunitas muda lintas etnis dan agama untuk menciptakan pengembangan perdamaian lebih permanen di Poso.

Pemberdayaan ekonomi bagi kaum muda di Solo dan Lamongan memiliki pengalaman menarik. Masyarakat dan pengusaha lokal berperan lebih aktif dalam melakukan pendampingan dan dukungan terhadap kegiatan ekonomi kaum muda. Mahasiswa dan kaum muda melakukan pelatihan entrepreneurship bekerja sama dengan pelaku bisnis *online* seperti Tokopedia atau Bukalapak. Inovasi ekonomi kreatif menjadi ikon upaya mereka dalam membangun usaha secara lebih kuat, mandiri dan maju dalam jangka panjang.

Di Lamongan, beberapa pengusaha lokal peduli dengan menerima para mantan napiter untuk bekerja di perusahaan mereka. Tidak adanya stigma dan penerimaan kaum muda mantan napiter, mantan teroris dan kombatan dalam dunia usaha daerah dan pusat sangat krusial dalam upaya secara nasional bagaimana mengatasi radikalisme dan terorisme menjadi tanggung jawab bersama masyarakat dan pemerintah.

Pemda dan dinas-dinas di Solo dan Lamongan juga lebih aktif dalam pendekatan dan pemberdayaan ekonomi terhadap kaum muda dalam rangka pencegahan dan penanggulangan terorisme dan radikalisme.

Program ekonomi bagi kaum muda di Medan, Sumatra Utara, tidak terfokus pada upaya mengatasi terorisme dan radikalisme. Sebagai daerah metropolis kaum muda lintas etnis, daerah, dan agama biasa dalam kegiatan ekonomi. Keberadaan Pesantren Al Hidayah sebagai pusat rehabilitasi dan deradikalisasi anak-anak mantan teroris dan potensial terpapar gerakan teroris yang dikembangkan atas inisiatif Densus 88 dan BNPT tidak mendapatkan dukungan cukup dari pemerintah daerah dan pemangku kepentingan (*stakeholder*) lokal. Usaha peternakan dan perikanan sebagai modal penting kemandirian lembaga pendidikan tidak berkembang akibat lemahnya dukungan daerah di Pesantren Al Hidayah. Padahal banyak anak muda dan remaja dikirim dan datang ke lembaga ini untuk diarahkan dalam program ekonomi, agama, dan

keterampilan lainnya agar terbebas dari beban sejarah dan pengaruh radikalisme dan terorisme.

Program ekonomi bagi kaum muda memiliki peran strategis dalam mengatasi radikalisme dan terorisme. Pemerintah, masyarakat sipil, dan ormas agama memiliki kontribusi penting dalam aktivitas dan pemberdayaan ekonomi kaum muda termasuk mereka mantan napi teroris, mantan kombatan dan kaum muda yang potensial menjadi target gerakan terorisme dan radikalisme. Program ekonomi juga memperkuat nasionalisme dan pertahanan sosial-keamanan di daerah perbatasan.

Program dan kegiatan ekonomi bagi kaum muda dan para mantan napi teroris dan mantan kombatan akan memperkuat kepercayaan diri mereka dalam membangun kemandirian, memberi ruang dalam proses pelepasan (*disengagement*) dari kelompok teroris dan masa lalu kekerasan dan reintegrasi di masyarakat. Wawancara dengan para mantan napi teroris dan mantan kombatan bahwa mereka berhasil melepaskan tekanan dan pengaruh kelompok teroris yang masih berusaha mengajak mereka dalam aksi kekerasan dan terorisme melalui kegiatan ekonomi baik secara individu maupun melalui komunitas dan koperasi. Pelatihan beragam keterampilan, modal usaha, inovasi produk, dan pendampingan bagi mereka akan menjamin keberlanjutan upaya mereka untuk keluar dari lingkaran kekerasan masa lalu dan sepenuhnya terintegrasi di masyarakat.

Program ekonomi kaum muda masih didominasi oleh program pemerintah (BNPT, Kementerian Sosial, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan dinas-dinas terkait di daerah) secara jangka pendek. Masih terbatas peran pemangku kepentingan, pemerintah daerah, dan pengusaha lokal dalam kegiatan ekonomi bagi kaum muda, mantan napiter, dan mantan kombatan. Pentingnya program ekonomi dalam jangka panjang dan berkesinambungan dengan melibatkan pemerintah dan masyarakat secara bersama akan menciptakan program ekonomi bagi kaum muda yang lebih kuat dan memiliki pengaruh dan dampak lebih permanen. Ini juga penting bagi kepastian perdamaian di daerah pascakonflik.

Kendala terbesar yang dirasakan dalam pemberdayaan ekonomi kaum muda adalah masih kuatnya ego sektoral antar kementerian, lembaga-lembaga pemerintah, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah, serta dinas-dinas. Mengatasi terorisme dan radikalisme di kalangan kaum muda membutuhkan kerja bersama seluruh pemangku kepentingan pemerintah dan masyarakat. Rencana Aksi Nasional (RAN) BNPT 2018 yang melibatkan sekitar 32 kementerian dan lembaga pemerintah menjadi titik tolak menurunkan ego sektoral dan mulai memikirkan kepentingan bangsa dan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus SB (2016). *Deradikalisasi Nusantara: Perang Semesta Berbasis Kearifan Lokal Melawan Radikalisasi dan Terorisme*, Jakarta: Daulat Press.
- Alwasilah, C. (2002). *Pokoknya Kualitatif*. Pustaka Jaya. Bandung.
- Anonim. (2015). *Profil Kabupaten Nunukan BAPPEDA Kabupaten Nunukan*.
- Appleby, S.R. (1999). *The ambivalence of the sacred: Religion, violence, and reconciliation*. Rowman & Littlefield Publishers.
- Asrori, S. (2014). Pemberdayaan Perempuan Majelis Taklim Darun Nisa: Analisis Kapital Sosial. *Jurnal Bimas Islam*, Vol. 7. No. 4 Tahun 2014. 755-779.
- Asrori, S. (2017). *Politik Kerukunan di Indonesia; Model Dialog Kelembagaan Antar Umat Beragama*. Tangerang Selatan: Young Progressive Muslim.
- Badan Pusat Statistik (2006). *Statistik Pemuda Indonesia 2006*.
- Badan Pusat Statistik Jawa Timur (2016), *Provinsi Jawa Timur dalam Angka*.
- Badan Pusat Statistik Kota Medan (2016). *Kota Medan dalam Angka*. 2016.
- Badan Pusat Statistik Lamongan (2016), *Kabupaten Lamongan dalam Angka*.

Badan Pusat Statistik Medan (2017). *Kota Medan dalam Angka 2017*.

Badan Pusat Statistik Sumatra Utara Perkembangan Indeks Harga Konsumen/Inflasi No. 55/10/12/Th. XX, 02 Oktober 2017 https://sumut.bps.go.id/backend/brs_ind/brsInd-20171002130755.pdf

Basri, F.H. (2002). *Perekonomian Indonesia: Tantangan dan Harapan bagi Kebangkitan Ekonomi Indonesia*. Jakarta: Erlangga.

Blossfeld, H. P., Klijzing, E., Mills, M., & Kurz, K. (ed.). (2006). *Globalization, Uncertainty And Youth In Society: The Losers In A Globalizing World*. Routledge.

BNPT, *Blueprint Deradikalisasi*, 2013.

“BNPT-UN Women Gelar Konsultasi Publik RAN-PE Berbasis Kekerasan yang Mengarah ke Terorisme,” diakses pada 1 Februari 2018 dari <http://teraju.id/berita/nasional/bnpt-un-women-gelar-konsultasi-publik-ran-pe-berbasis-kekerasan-yang-mengarah-ke-terorisme-6803/>

BPS Berita Resmi Statistik No. 16/02/Th.XX, 06 Februari 2017 https://www.bps.go.id/website/brs_ind/brsInd-20170208123344.pdf

BPS Kabupaten Poso (2015). *Poso dalam Angka*.

BPS RI <https://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/907>

BPS RI <https://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/981>

BPS Tabel Statistik <https://sumut.bps.go.id/frontend/linkTabelStatistik/view/id/362>

BPS, Statistik Pemuda 2016 <https://www.bps.go.id/website/pdf/publikasi/Statistik-Pemuda-Indonesia-2016.pdf>

Bungin, B. (2011). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Chernov Hwang, J. (2018). *Why Terrorists Quit: The Disengagement of Indonesian Jihadists*, Ithaca: Cornell University Press.

BPS Jawa Tengah (2017). Propinsi Jawa Tengah dalam Angka.

Data BPS Kota Surakarta. (2017). *Kota Surakarta dalam Angka*, Solo: BPS Solo.

Denzin, N.K., dan Lincoln, Y.S. (2009). *Handbook of Qualitative Research*. California: Sage Publication, Inc.

“Eksklusif G30S 1965: Pengakuan Penyergap Ketua CC PKI Aidit,” *Tempo*, 17 Januari 2018. <https://bisnis.tempo.co/read/1051324/surakarta-ultah-solo-great-sale-tawarkan-diskon-hingga-80-persen>

Geertz, C. (1976). *Religion of Java*, Chicago: University of Chicago Press.

Giyarsih, S.R. (2010). *Pemetaan Kelembagaan dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis DAS Bengawan Solo Hulu*, *Jurnal Sains dan Teknologi Lingkungan Universitas Islam Indonesia*, 2 (2): 90-96.

Giyarsih, S.R. (2010). Pola Spasial Transformasi Wilayah di Koridor Yogyakarta-Surakarta. Dimuat dalam *Jurnal Forum Geografi, Fakultas Geografi UMS*, 24(1) : 28-38.

Giyarsih, S.R. (2010). *Urban Sprawl of The City of Yogyakarta, Special Reference to The Stage of patial Transformation, Indonesian Journal of Geography*, 42 (1): 49-60.

Giyarsih, S.R. (2014). *Pengentasan Kemiskinan yang Komprehensif di Bagian Wilayah Terluar Indonesia: Kasus Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara. Jurnal Manusia dan Lingkungan*. 21(2):239-246.

“The Global Youth Wellbeing Index,” diakses pada 01 Februari 2018 dari <http://www.youthindex.org/country/indonesia>.

Hasan, Noorhaidi (2010). “The Drama of Jihad: The Emergence of Salafi Youth in Indonesia” dalam *Being Young and Muslim: New Cultural Politics in the Global South and North*. Oxford: Oxford University Press.

“Historisitas Kristenisasi dan Komunisme di Kota Solo,” Panjimas, 1 Desember 2015, <http://www.panjimas.com/nahi-munkar/2015/12/01/historisitas-kristenisasi-dan-komunisme-di-kota-solo/>

Horgan, J (2009). *Walking Away from Terrorism Accounts of Disengagement from Radical and Extremist Movements*, New York: Routledge.

<http://deputi1.kemenpora.go.id/statik/tupoksi>

<http://medan.tribunnews.com/2017/06/07/ketua-majelis-mujahidin-akui-ada-mantan-pengurus-diamankan-densus-88>

<http://nasional.kompas.com/read/2013/01/18/16214433/alokasi.dana.pnpm.mandiri.untuk.lamongan.rp.5395.miliar>

<http://nasional.kompas.com/read/2017/06/25/10592361/dua.terduga.teroris.masuk.ke.markas.polda.sumut.dengan.lompat.pagar>

<http://news.liputan6.com/read/2913537/peran-zainal-pemimpin-jaringan-teroris-jad-dibekuk-di-lamongan>

<http://news.liputan6.com/read/2914821/polisi-aksi-teror-di-tuban-terkait-teroris-lamongan>

<http://regional.kompas.com/read/2017/06/08/17005691/istri.3.terduga.teroris.di.medan.pertanyakan.keberadaan.suaminya>

<http://www.beasiswapascasarjana.com/2017/04/pendaftaran-beasiswa-s2-kemenpora.html>

<http://www.tribunnews.com/nasional/2017/06/26/inilah-wajah-2-pelaku-penyerangan-polda-sumut>

<http://www.viva.co.id/berita/nasional/278628-senjata-di-aceh-selundupan-dari-selat-malaka>

<http://www.voa-islam.com/read/politik-indonesia/2016/01/22/41830/pengamat-tindakan>

teror-di-jakarta-merupakan-sandiwara-ciptaan-polisi/#sthash.6cZDguxa.dpbs

<https://g035.wordpress.com/2012/01/13/kabupaten-poso/peta-kab-poso>

https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_kecamatan_dan_kelurahan_di_Kabupaten_Poso

<https://news.detik.com/berita/d-3541617/teror-di-polda-sumut-diduga-terkait-penangkapan-3-teroris-di-medan>

<https://news.detik.com/berita/d-3606781/mensos-siapkan-program-khusus-untuk-mantan-napi-teroris>

<https://news.detik.com/jawatimur/2452751/ketua-upk-pnpm-korupsi-dana-rp-900-juta-ditahan-kejari-lamongan>

<https://tirto.id/survei-uin-jakarta-intoleransi-tumbuh-di-banyak-sekolah-dan-kampus-czQL>

<https://www.bangsaonline.com/berita/3014/kopwan-di-lamongan-beromzet-rp-23-m>

<https://www.bnpt.go.id/tentang-bnpt>

“Industri Kreatif, Masa Depan Kota Solo,” Kompas, 10 Desember 2010. <http://ekonomi.kompas.com/read/2010/12/10/05144252/Industri.Kreatif.Masa.Depan.Kota.Solo>.

IPAC. (2015), Indonesia’s Lamongan Network: How East Java, Poso And Syria Are Linked. 15 April. Report No. 18.

- Irfan I. (2016). *Membumikan Deradikalisasi; Soft Approach Model Pembinaan Terorisme dari Hulu ke Hilir secara Berkesinambungan*, Jakarta: Daulat Press.
- Irjayanti, M. & Aziz A.M. (2012). *Barrier Factors and Potential Solutions for Indonesian SMEs. Procedia Economics and Finance*. 4: 3-12.
- Istifazhuddin, A. H. (2016). *Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan ADD (Alokasi Dana Desa) di Desa Nguwok, Kecamatan Modo, Kabupaten Lamongan (Disertasi doktoral, Universitas Airlangga)*.
- Jaelani, A.T. (1958). *The Sarekat Islam Movement: Its Contribution to Indonesian Nationalism*, Montreal: Tesis PhD. Di McGill University.
- Janko, Z. & Popli, G. (2015). "Examining the link between crime and unemployment: a time-series analysis for Canada," *Applied Economics*, Volume 47, Issue 37.
- Jones, G. (2009). *Youth*. Cambridge: Polity. *Key Concepts for Understanding Curriculum*, 4.
- "Kemenangan Fenomenal Jokowi-Rudy," Kompas, 21 Mei 2010; "Pasangan Rudy-Purnomo Ditetapkan Sebagai Pemenang Pilkada Solo," Sindo, 17 Desember 2015.
- Koltai, S.R. (2014). "Fighting ISIS with Entrepreneurship," 7 Oktober 2014. Diakses pada 30 Januari 2018 dari <https://www.brookings.edu/blog/fixgov/2014/10/07/fighting-isis-with-entrepreneurship/>

- Korver, A.P.E. (1985). *Sarekat Islam: Gerakan Ratu Adil?* Jakarta: Grafiti Press.
- Lee, K. (2009). "Unemployment and crime," Econometric Society Austral Asian Meeting, Canberra.
- Lukens-Bull, R. (2005). *A peaceful Jihad: Negotiating identity and modernity in Muslim Java*. Springer, 17.
- Mahdi, W. F., & Al-Hattami, A. A. (2016). Youth & Revolution. Dalam *Education and the Arab Spring* (hlm. 83-94). SensePublishers.
- Masri Sitanggang, "Ada Apa Dengan Jihad?!" <https://sisipandangmasrisitanggang.wordpress.com/2016/07/29/ada-apa-dengan-jihad/>
- Mbai, A. (2014). *Dinamika Baru Jejaring Teror di Indonesia dan Keterkaitannya dengan Gerakan Radikalisme Transnasional*, Jakarta: AS Production Indonesia.
- Melick, M.D. (2003). "The Relationship between Crime and Unemployment," *The Park Place Economist*, Volume 11, Issue 1.
- Monks, F.J., Knoers, A.M.P., & Haditono, S.R. (2002). *Psikologi Perkembangan: Pengantar dalam Berbagai Bagianannya*, terjemahan Sri Rahayu Haditomo, Yogyakarta: UGM, 217.
- Natsir, M. (1991). *Percakapan Antar Generasi: Pesanan Perjuangan Seorang Bapak*, diedit oleh A.W. Pratiknya dan N. Murbakusuma, Petaling Jaya: Dewan Pustaka Islam.

Niel, R.v. (1960). *The Emergence of Modern Indonesian Elite*, The Hague and Bandung: W. van Hoeve Ltd.

Nugroho, B. A., & Astuti, P. (2015). Partisipasi Pemuda dalam Menyukseskan Program PNPM Mandiri Pedesaan di Desa Buluroto Kabupaten Blora. *Journal of Politic and Government Studies*, 4(2), 206-220.

Nuraini, S. (2017). Penanganan Tunggal Dana Bergulir (*Non Performing Loan*) Pasca Pelaksanaan PNPM Mandiri Pedesaan. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis Airlangga*, 1(1).

Observasi lapangan peneliti di sentra produksi rumah tangga sutlecock di kecamatan Serengan.

Oxford Advanced Learner's Dictionary (Vol. 1428). Oxford: Oxford University Press.

Peraturan Kepala BNPT Nomor: PER-02/K.BNPT/1/2012 tentang Pembentukan Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme di Daerah.

Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2012.

pnpm-mandiri.org

Powell, J. (2015). *Terrorists at the Table Why Negotiating is the Only Way to Peace*, New York: Palgrave Macmillan.

- Rappaport, J. (1987). Terms Of Empowerment/Exemplars Of Prevention: Toward A Theory For Community Psychology. *American journal of community psychology*, 15(2), 121-148.
- Renaldi, A. https://www.vice.com/en_id/article/nz8beg/meet-the-former-mujahideen-behind-indonesias-fight-against-terrorism
- Samuel, T.K. (2012). *Reaching the Youth: Countering the Terrorist Narrative*, Kuala Lumpur: SEARCCT.
- Sedgwick, J.L. (1980). "Deterring Criminals: Policy Making and the American Political Tradition," The American Enterprise Institute for Public Policy Research, Washington, DC: AEI.
- Siregar, N.S. (2014). *Analisis Potensi Daerah Pulau-pulau Terpencil dalam Rangka Meningkatkan Ketahanan, Keamanan Nasional, dan Keutuhan Wilayah NKRI di Nunukan-Kalimantan Timur*.
- Solahudin (2011). *NII sampai Ji*. Depok: Komunitas Bambu.
- Sulistiyastuti, D. R. (2004). Dinamika Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Analisis Konsentrasi Regional UKM di Indonesia 1999–2001. *Economic Journal of Emerging Markets*, 9(2).
- Sumartana, Th. (1994). *Mission at the Crossroads: Indigenous Churches, European Missionaries, Islamic Association and Socio-religious Change in Java 1812-1936*, Jakarta: BPK Gunung Mulia.

- Suprihanto, J. (2013). *Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah: Kasus Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Syukri, M., & Mawardi, S. (2013). *Studi Kualitatif Dampak PNPM-Perdesaan di Jawa Timur, Sumatra Barat, dan Sulawesi Tenggara*.
- Takashi Shiraishi, *Zaman Bergerak: Radikalisme Rakyat di Jawa 1912-1926* (Jakarta: Pustaka Grafiti 1997)
- Taylor, J.G. (2003). *Indonesia: Peoples and Histories*, New Haven and London: Yale University Press.
- Vertigans, S. (2008). *Militant Islam: A Sociology Of Characteristics, Causes And Consequences*. Routledge, hal. 82-83.
- Wildan, M. (2013). "The Nature of Islamic Radical in Solo," *Journal of Indonesian Islam*, vol. 07/01.
- Wildan, M. (2014). "Memetakan Islam Radikal: Studi atas Suburnya Gerakan Islam Radikal di Solo," dalam Martin van Bruinessen (ed.), *Islam Indonesia dalam Ancaman Fundamentalisme*, Bandung: Mizan.
- Wouters, J., Ninio, A., & Doherty, T. (ed.). (2015). *The World Bank Legal Review Volume 6 Improving Delivery in Development: The Role of Voice, Social Contract, and Accountability*. World Bank Publications.
- Wyn, J., & White, R. (1996). *Rethinking Youth*. Sage.
- Yusuf, M. J. (2013). *Studi tentang Pemberdayaan Masyarakat Pesisir di Kabupaten. Studi Kasus di Kelurahan*

Nunukan Selatan Kecamatan Selatan. E-Journal Ilmu Pemerintahan, 1 (4): 1594-1607.

Wawancara

Wawancara dengan Budiman Maliki, Direktur LPMS Poso, 25 Agustus 2017.

Tengah, 5 September 2017 di Palu.

Wawancara dengan beberapa mantan narapidana terorisme dan FGD, 26-27 Agustus 2017 di Poso.

Wawancara dengan Upik dan Irwanto Irano, 26 Agustus 2017 di Poso.

Wawancara dengan Fuad dan diskusi dalam FGD tentang Pemberdayaan Ekonomi terkait CVE, di Poso.

Wawancara dan diskusi dalam FGD tentang Pemberdayaan Ekonomi terkait CVE, 11 September 2017 di Poso.

Wawancara dengan Mursid, 28 Agustus 2017 di Poso.

Wawancara dengan Julen di Dinas UMKM, 28 Agustus 2017 di Poso.

Wawancara dengan anggota Kodim Poso, 28 Agustus 2017 di Poso.

Wawancara dengan anggota Kodim Poso, 28 Agustus 2017 di Poso.

Wawancara dengan anggota Polres Poso, 28 Agustus 2017 di Poso.

Hasil FGD tentang Pemberdayaan Ekonomi bagi Pemuda terkait CVE, 11 September 2017 di Poso.

Wawancara dengan Fadly, 4 September 2017 di Palu.

Wawancara dengan Ridwan, 5 September 2017 di Palu.

Hasil FGD tentang Pemberdayaan Ekonomi bagi Pemuda terkait CVE, 11 September 2017 di Poso.

FGD dengan pelajar-pelajar, rohis, takmir masjid, perwakilan lembaga mahasiswa di Solo, Aula Sekolah Tinggi Islam Al-Mukmin (STIM), 6 September 2017.

Diskusi dengan Dr. Muhammad Wildan dan tim CisForm di UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 25 Agustus 2017.

Wawancara dengan Agus Rahmanto (Kepala Bapas), Siswanto (staf), dan Mulyono (staf), 4 September 2017.

Wawancara dengan Eko Prasetyo, penggiat LSM Sarekat Movement Indonesia, 27 Agustus 2017.

Wawancara dengan Faisal, Penggiat LSM, 30 Agustus 2017.

Wawancara dengan Hilmi Ahmad Sakdilah, Ketua PCNU Surakarta, 5 September 2017.

Wawancara dengan In'am, pengusaha Kopi Gandroeng, 27 Agustus 2017.

Wawancara dengan In'am, pengusaha Kopi Gandroeng, 25 Agustus 2017.

Wawancara dengan Joko, Mantan Napiter, 5 September 2017

Wawancara dengan Nurhayati, Kepala Dinas UMKM Surakarta, 7 September 2017.

Wawancara dengan Tri, ketua Majelis Ekonomi PDM Surakarta, 11 September 2017.

Wawancara dengan Subagiyo, Kepala Dinas Perdagangan Surakarta, 4 September 2017.

Wawancara dengan Suprpto, Sekretaris Dinas Perdagangan Surakarta, 4 September 2017.

Wawancara dengan Suprpto, Sekretaris Dinas Perdagangan Surakarta, 31 Agustus 2017.

Wawancara dengan Toyib, pengelola Dapur Bistik, 30 Agustus 2017.

Wawancara dengan Yusuf, mantan napiter yang berdomisili di Semarang, 3 September 2017.

Tentang Penulis dan Editor

Badrus Sholeh, M.A., Ph.D. adalah Direktur Pusat Studi Timur Tengah dan Perdamaian Global dan dosen Jurusan Hubungan Internasional, FISIP UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Mengajar di HI sejak 2006 mata kuliah: Resolusi Konflik, Politik Internasional, HI Kawasan Australia dan Pasifik, dan *Strategic Studies*. Menyelesaikan program S-1 di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, S-2 di Australian National University, dan S-3 di Deakin University Melbourne, Australia pada bidang Politik Internasional. Penelitian dan advokasi pada bidang Konflik Internasional, Kekerasan Politik, Kontra Terorisme dan Hubungan Indonesia-Timur Tengah. Menulis beberapa buku dan artikel di antaranya: *Daesh in Europe and Southeast Asia: An Indonesian Perspective*, Panorama Insights into Asian and European Affairs, No. 02/ 2016, Singapura: RSIS & Konrad Adenauer Stiftung; *Dari Ji ke ISIS: Pemikiran Strategis dan Taktis Gerakan Terorisme di Asia Tenggara*, Jurnal Hubungan Internasional, Vol. 5, No. 2 Oktober 2016–Maret 2017, Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Menulis dan sebagai editor beberapa buku antara lain: *Jihad in Maluku*, dalam Andrew T.H. Tan (ed.), *A Handbook of Terrorism and Insurgency in Southeast Asia* (Edward Elgar Publishing, 2007), editor dan penulis *Budaya Damai Komunitas Pesantren* (Jakarta, LP3ES, 2007). Email: badrus.sholeh@uinjkt.ac.id.

Irfan R Hutagalung, S.H., LL.M. adalah alumnus Fakultas Hukum Universitas Indonesia tahun 1997. Setamat kuliah, dia mengajar di almamaternya sampai tahun 2006. Mendapat beasiswa Fulbright di tahun 2004, dia melanjutkan pendidikan S-2 di Northwestern University School of Law, Chicago, AS dengan konsentrasi pada International Human Rights Law. Sebelum belajar hukum di Northwestern, pada tahun itu juga, ia sempat mendapatkan kursus tentang Introduction to US Law dalam suatu kursus musim panas (*summer course*) di University of California Davis (UC Davis) School of Law di Davis, California, AS. Dan sebelum itu, pada 2003, Irfan mengikuti kursus perancangan peraturan perundang-undangan (*legislative drafting*) di Boston University School of Law, Boston, AS. Sejak 2012 hingga sekarang, Irfan mengajar di Program Studi Hubungan Internasional, FISIP UIN, Jakarta. Juga, sejak 2016 mengajar di Sekolah Tinggi Hukum Jentera untuk mata kuliah Hukum Internasional.

Dr. Muhammad Guntur Alting, M. Pd, M.Si lahir di Mareku-Tidore (Maluku Utara) adalah pengajar tetap di Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Islam Syarif Hidayatullah Jakarta dengan mata kuliah utama Sosiologi Agama dan Sosiologi Budaya. Tahun 2008 menyelesaikan Magister Sosiologi di Universitas Hasanuddin (UNHAS) Makassar dan selanjutnya pada 2009 mengikuti *Short Course Program Sandwich* di University of Southern Queensland (USQ) Brisbane Australia. Tahun 2011 meraih Doktor Sosiologi

di Universitas Negeri (UNM) Makassar. Karya tulis yang pernah dihasilkan: *Asas-asas Multiple Researches* diterbitkan oleh Tiara Wacana Yogyakarta (2010). *Belajar pada Keheningan: Agama di Tengah Pertarungan Realitas Sosial* diterbitkan oleh UMMU Press (2015). *Voice of Dakwah* diterbitkan Rabbani Press Jakarta (2007). Penelitian yang pernah dilakukan: Solidaritas Sosial Komunitas Tobelo Pascakonflik di Halmahera Utara (2006), Rasionalitas Perilaku Keagamaan Warga Tidore (2010), Menelusuri Jejak Kedatangan Islam di Maluku Utara (2013).

Nostalgiaawan Wahyudhi S.IP., MA. kini sebagai peneliti di Pusat Penelitian Politik, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dan juga staf pengajar di FISIP Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta. Menempuh pendidikan S-1 Ilmu Hubungan Internasional di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, dan melanjutkan jenjang S-2 di International Islamic University Malaysia (IIUM). Penulis aktif di berbagai penelitian di bidang kajian politik Islam, gerakan Islam transnasional, dan studi Timur Tengah. Penulis ikut berkontribusi dalam buku *Problematika Kekuatan Politik Islam di Yaman, Suriah, dan Aljazair* (2015), *Problematika Kekuatan Politik Islam di Sudan, Maroko, dan Somalia* (2016), *Problematika Kekuatan Politik Islam di Bahrain, Qatar, dan Lebanon* (2017), *Mereka yang Tersisir: Studi tentang Ketahanan Sosial atas Pengungsi Ahmadiyah dan Syiah di Indonesia* (2017), *Problematika Kekuatan Politik Islam di Arab Saudi, Kuwait, dan Uni Emirat Arab* (akan terbit 2018). Penulis juga aktif menulis dalam kajian serupa baik

di jurnal-jurnal ilmiah, media cetak nasional, dan menjadi narasumber isu-isu Timur Tengah di media cetak dan televisi nasional. Penulis mengikuti berbagai konferensi ilmiah baik nasional dan internasional.

Saifudin Asrori, M.Si. merupakan pengajar pada Program Studi Sosiologi FISIP UIN Jakarta. Dia merupakan kandidat Ph.D di Nanjing University, Jiangsu, China melalui beasiswa China Scholarship Council (CSC) dengan mendalami isu pendidikan Islam di Indonesia. Beberapa publikasi ilmiah antara lain, *Regulasi Keagamaan di Indonesia* (2011), *Resolusi Kekerasan Agama: Analisis Hubungan Antarkelompok Keagamaan* (2011), *Peran Majelis Taklim dalam Pemberdayaan Wanita* (2014), *Negotiating Secular Democracy: Comparative Analysis Indonesia and Mesir* (2015), *The Rise of Salafist: Religious Politic, Institutional Change and Democracy in Egypt, Yemen and Indonesia* (2016), *Politik Kerukunan Umat Beragama di Indonesia* (2017), *Negosiasi Ruang Publik: Modernisasi dan Penguatan Civil Society Model Pesantren* (2017).

Sholehuddin, M.Pd kelahiran Indramayu, 15 Juni 1979. Adalah alumnus S-1 Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2003 dan S-2 di Universitas Negeri Jakarta, Program Studi Manajemen Pendidikan, tahun 2006. Pada 2009, menjadi tenaga ahli anggota DPD RI. Saat ini aktivitasnya sebagai dosen di Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Jakarta. Sebelumnya ia juga sempat mengajar di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Syarif Hidayatullah

Jakarta dan Program Pascasarjana Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an. Sejak 2011 hingga awal 2017, bekerja di Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, khususnya di bidang deradikalisasi dan pencegahan. Saat ini, di samping sebagai dosen, ia juga aktif dalam kegiatan-kegiatan pencegahan terorisme dan deradikalisasi baik dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) maupun dengan beberapa organisasi baik di kampus maupun di organisasi sosial kemasyarakatan, ia juga menulis beberapa buku, khususnya tentang pendidikan dan wawasan kebangsaan.

Ingrid Galuh Mustikawati, MHSPS lahir di Sukabumi, 16 Juli 1980. Lulus Sarjana Ilmu Sosiologi di FISIP Universitas Indonesia, Depok pada 2003. Setahun kemudian, melanjutkan studi S-2 di Department of Political Science, International Islamic University Malaysia. Pada 2012 menerbitkan buku *Helsinki Agreement and Power Sharing in Aceh* yang diterbitkan oleh Lambert Academic Publisher, Jerman. Sejak kuliah, aktif melakukan serangkaian penelitian yang dikelola oleh beberapa lembaga penelitian independen dan juga aktif menulis di berbagai media massa dan jurnal. Pada 2011 sampai 2013, terlibat sebagai peneliti dalam program Sistem Nasional Pemantauan Kekerasan, The Habibie Center. Saat ini bekerja sebagai Dosen di Program Studi Hubungan Internasional FISIP UIN.

Ahmad Syaifuddin Zuhri, S.IP.,L.M., lahir di Lamongan, Jawa Timur, 21 Oktober 1983. Alumni S-1

jurusan Hubungan Internasional di Universitas Wahid Hasyim Semarang (2010). Mendapatkan beasiswa belajar bahasa Mandarin dan S-2 dari Pemerintah China melalui program China Scholarship Council (CSC) jurusan Hubungan Internasional, School of Politics, Nanchang University, Nanchang, China, (2011-2015). Aktif di organisasi kepemudaan di antaranya pernah menjabat Presiden BEM Universitas Wahid Hasyim Semarang (2005-2006), Ketua Umum Remaja Islam Masjid Agung Jawa Tengah, Semarang (RISMA-JT) 2009-2011, Wakil Ketua Umum Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) Tiongkok (2013-2014). Direktur Eksekutif Pusat Pengembangan Budaya Islam-China (PPBIC) Masjid Agung Jawa Tengah Semarang, Pengurus Pusat GP Ansor Bidang Hubungan Internasional (2015- 2019). Wakil Rois Syuriah PCI NU Tiongkok 2017-2018 dan Sekretaris Pusat Studi Timur Tengah dan Perdamaian Global (PSTPG) FISIP UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Mengajar di Jurusan Hubungan Internasional FISIP UIN Jakarta. Aktif menulis di media cetak dan online seperti Republika, Bisnis Indonesia, Suara Merdeka, Koran Mandarin Guoji Ribao, Okezone.com. dll. Blog pribadi www.jejakzuhri.wordpress.com

INDEKS

A

- Abu Bakar al Baghdadi 4
Abu Bakar Ba'asyir 21
Abu Tholut 147
Ali Fauzi 8, 149, 152, 153, 154,
215, 216, 217, 218, 221,
222, 279, 284, 285, 286
Ambon 16, 135, 182, 284
Anggaran 46, 65, 90, 103, 112,
114, 143, 144, 145, 159,
160, 190, 192, 227, 261,
277
Asia Pasifik 2

B

- Balai Pemasarakatan (Bapas)
62
Bantuan modal 292
Barack Obama 10, 281
berkelanjutan 5, 35, 90, 179,
257, 292, 294
Best Practice 164, 263, 268, 278
BNPT (Badan Nasional Pen-
anggulangan Terorisme)
1, 5, 6, 18, 25, 32, 33, 36,
46, 55, 60, 61, 76, 94, 95,
96, 97, 98, 120, 140, 142,
143, 144, 145, 146, 148,
149, 150, 153, 154, 155,
156, 162, 163, 164, 165,
167, 168, 169, 170, 171,
212, 217, 218, 221, 226,

- 282, 283, 286, 287, 289,
292, 295, 297, 299, 306,
319

- Bom Bali I (2002) 182
Bom Bali II (2005) 182
Brookings Institute 281
Budiman Maliki 90, 309

C

- Clifford Geertz 130
Countering Violent 11, 12

D

- daerah perbatasan 6, 7, 250,
293, 296
Densus 88 1, 17, 140, 146, 155,
167, 292, 295
Deradikalisasi 31, 42, 88, 96,
97, 298, 299, 304
Dinas Kelautan dan Perikanan
260, 262, 272
Dinas Koperasi dan UKM 49,
198, 290, 293
Dinas Pekerjaan Umum 6, 102,
288
Dinas Sosial 8, 51, 52, 68, 70,
103, 144, 155, 164, 196,
197, 260, 261

E

- Extremism (CVE) 12

- F**
- FGD 2, 25, 100, 104, 110, 113, 114, 169, 219, 285, 286, 309, 310
- Filipina 7, 13, 293
- FISIP UIN Jakarta 318
- FKPT 33, 36, 37, 60, 94, 95, 309
- FKUB 102, 114, 203
- Front Pembela Islam 135
- Front Pemuda Islam Surakarta 135
- 206, 207, 208, 209, 213, 223, 226, 227, 235, 243, 246, 248, 249, 250, 252, 253, 254, 255, 267, 278, 279, 280, 281, 284, 286, 289, 292, 293, 298, 299, 300, 301, 304, 305, 307, 308, 310, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321
- ISIS 2, 4, 7, 113, 120, 133, 140, 143, 148, 182, 282, 304
- G**
- Gerakan Pemuda Ka'bah 135
- Ghazali, Khairul 21, 54, 55, 69
- H**
- Himpunan Mahasiswa Islam 25
- Horgan, John 11, 278, 279, 291
- Hwang, Julie Chernov 279
- I**
- Ideologi 31, 48, 88, 95, 96, 126, 131, 177, 182, 183, 202, 211, 282, 286
- Ikatan Pemuda Karya (IPK) 40
- illegal migrant 293
- Indonesia 1, 2, 3, 4, 7, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 23, 25, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 49, 63, 74, 75, 82, 97, 119, 120, 123, 124, 125, 126, 129, 130, 137, 142, 143, 145, 164, 171, 173, 174, 175, 176, 182, 183, 198, 199, 200, 203, 204, 205,
- J**
- Jamaah Ansharut Daulah 20
- Jama'ah Islamiyah 7, 21, 140, 153
- jangka panjang 2, 9, 10, 95, 292, 294, 297
- Jihad 26, 183, 208, 223, 279, 301, 305, 315
- Jonathan Powell 1
- K**
- Kalimantan Utara 2, 6, 13, 227, 229, 244, 277, 281, 290, 292, 301, 308
- Kaum Muda 1, 2, 3, 14, 73, 118, 173, 227, 278
- Kebijakan 1, 10, 11, 195, 256, 258, 259, 304
- Kemenkumham 159, 168
- Kementerian Agama 53, 203, 225, 260, 262, 267
- Kementerian Koperasi dan UKM 107, 297
- Kementerian Pekerjaan Umum 297

- Kementerian Pemuda dan Olahraga 41, 65, 201
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 260
- Kementerian Sosial 1, 8, 93, 94, 197, 286, 297
- Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi 297
- Kemiskinan 4, 85, 249, 301
- Kesatuan Bangsa dan Politik 48, 202, 225
- Kewirausahaan 91, 97, 98, 107, 120, 155, 163, 171, 199, 260, 280, 287, 290, 293
- KNPI 40, 41, 113, 114, 202, 261
- Kombatan 2, 3, 6, 8, 102, 215, 216, 217, 279, 280, 282, 284, 285, 287, 288, 292, 294, 295, 296, 297
- Komjen Pol. Suhardi Alius 289
- Komunitas Rumah Katu 279, 280
- Kontra Terorisme 315
- Koperasi 49, 52, 65, 67, 70, 107, 161, 162, 163, 198, 199, 225, 260, 290, 293, 297
- Kopi Gandroeng 141, 153, 311
- L**
- Lako, Arifudin 5
- Lamongan Jawa Timur 2
- Lembaga Pemasarakatan 88, 90, 261
- M**
- Majelis Mujahidin Indonesia 20
- Majelis Tafsir Al-Qur'an (MTA) 137
- Malaysia 7, 21, 22, 229, 239, 242, 243, 244, 245, 246, 248, 249, 250, 252, 270, 293, 317, 319
- Masyarakat Sipil 264
- Medan 2, 9, 10, 12, 14, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 58, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 142, 285, 292, 295, 298, 299
- Media Sosial 2, 4, 15, 25, 88, 176, 223, 291
- Mia Bloom 11
- Mindanao 7, 284
- Muhammad Wildan 127, 130, 134
- N**
- Nahdlatul Ulama 131, 205, 208, 209, 265
- Napiter xiv, 142, 169, 215, 311
- Narkoba 4, 7, 13, 67, 69, 70, 106, 135, 175, 227, 251, 261, 265, 281, 290, 292, 293
- Nasionalisme 13, 97, 106, 108, 112, 296
- Ngruki 132, 133, 134, 211
- Noor Huda Ismail 149
- Nunungan, Kalimantan Utara 2, 6, 229, 281, 290, 308
- O**
- Orde Baru 74, 81, 132, 175

P

Pegawai Negeri Sipil (PNS) 16, 53
Pemerintah Daerah xiv, 7, 55, 75, 102, 110, 195, 196, 224, 225, 242
Pemerintah Pusat xiv, 75, 76, 92, 115, 189
Pemuda Muhammadiyah 39, 41, 213
Pemuda Pancasila 40
Pencegahan Terorisme 94, 95, 278
pendidikan agama 56, 57, 186, 213
pengusaha lokal 221, 292, 294, 295, 297
Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) 25
Pesantren Al Hidayah 9, 10, 54, 285, 295
PNPM 173, 174, 189, 190, 191, 192, 224, 263, 274, 306, 308
pondok pesantren 127, 132, 133, 208
Poso vi, vii, xi, xiv, 2, 5, 6, 12, 16, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 92, 94, 95, 96, 98, 99, 100, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 113, 114, 116, 123, 182, 279, 280, 284, 287, 288, 289, 292, 293, 294, 299, 303, 304, 309, 310
PPIM vi, vii, viii, xi, xii, 177

Pulau Sebatik 242, 243, 245, 246, 249, 293

R

Radikalisme xv, 56, 75, 132, 266, 305, 308
RAN-PE 289, 299
Rehabilitasi 8, 51, 67, 69, 96, 197, 198, 221, 280, 286, 295
Reintegrasi 8, 221, 296
resolusi konflik 288

S

Santoso 75, 88
SDM 125, 152, 161, 199, 235, 276
Semarang 122, 131, 142, 143, 148, 149, 150, 151, 311, 320
skill ekonomi vi, 289
SKPD 36, 42, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 65, 195, 196, 197, 202, 225
stakeholder vi, ix, 9, 11, 18, 90, 105, 219, 220, 295
Sulawesi Selatan 7, 80
Sulawesi Tengah vi, 2, 12, 73, 74, 78, 79, 87, 94, 95, 292, 293, 309
Sumatra Utara vi, 2, 9, 12, 14, 285, 292, 295
Sungkar, Abdullah 21, 22, 133
Suriah 4, 8, 148, 182, 286, 317

T

Tarakan 242, 251

Tenggulun 8, 210, 211, 212,
221, 285
terorisme v, vi, ix, x, xi, 1, 2,
3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13,
14, 15, 17, 18, 19, 21, 23,
24, 25, 26, 27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 35, 36, 40, 41,
42, 45, 46, 47, 48, 49, 53,
54, 55, 56, 57, 58, 59, 60,
61, 62, 63, 64, 65, 66, 67,
68, 69, 71, 75, 76, 88, 89,
90, 93, 94, 97, 98, 99, 100,
103, 104, 105, 106, 109,
110, 111, 113, 114, 116,
118, 119, 120, 133, 134,
135, 139, 140, 141, 144,
145, 146, 147, 149, 152,
156, 163, 164, 170, 171,
172, 173, 175, 178, 182,
201, 203, 207, 210, 212,
214, 215, 217, 221, 222,
223, 226, 227, 264, 266,
278, 281, 283, 284, 285,
286, 287, 288, 289, 290,
291, 292, 294, 295, 296,
297, 299, 309, 319
TNI 40, 55, 87, 92, 108, 266, 268

U

UIN Syarif Hidayatullah 318
UNDP vi, vii, viii
Usaha Ekonomi Mandiri 103
Ustad Chozin 211
UU Kepemudaan 57
UU Pemerintahan Daerah 43,
64

W

Widodo, Joko 293

Y

Yayasan Hidayatullah 264, 266



PUSAT STUDI TIMUR TENGAH DAN PERDAMAIAN GLOBAL FISIP UIN JAKARTA

The Centre for the Middle East and Global Peace Studies (Pusat Studi Timur Tengah dan Perdamaian Global/PSTPG) was established in November 2015. An autonomous institution within Department of International Relations, Faculty of Social and Political Sciences, Syarif Hidayatullah State Islamic University Jakarta. It was launched by Dean Prof. Zulkifli on March 3, 2016 during the seminar series on The Map of Terrorist Networks in Southeast Asia after Jakarta Attack with guest speakers Irjen Pol H.M. Tito Karnavian, Ph.D, chief of Jakarta Metropolitan Police, and Professor Rohan Gunaratna, head of International Center for Political Violence and Terrorism Research. The Centre mission is to be a leading research, training and community development on the issues of the Middle East geo-politics, International Conflict, Counterterrorism and Peacebuilding in Southeast Asia and the World. Strengthen regional and global engagements on relevant studies. Publish strategic analysis on political violence, conflict, terrorism and deradicalisation. The Centre will focus on three main topics: The Middle East: Geo-politics and Geo-strategy, Global Peace, Security and Strategic Studies, Counterterrorism and Counterradicalism.



Gedung FISIP UIN Jakarta Lt.4
Jl. Kertamukti No.5 RT.002/008 Pisangan
Ciputat Timur Kota Tangerang Selatan 15412



pstpg.uinjkt@gmail.com



021 74705215/ 021 74702013



<http://pstpg.fisip.uinjkt.ac.id>